PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023-2026







PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2022

BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang :

a. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3499/SJ dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali dlubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 9);
16. Peraturan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 15);

17. Peraturan Bupati Nomor 268 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 268);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang dibuat bagi daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan kerja Pemerintah Kabupaten periode 1 (satu) tahun.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja PD.

BAB II

KEDUDUKAN RPD

Pasal 2

(1) RPD Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari RPJPD.

(2) RPD berpedoman pada RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Selatam, dan RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin

(3) RPD Tahun 2023-2026 disusun secara teknokratis, yakni menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten.

(4) RPD merupakan landasan dan pedoman bagi Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

(5) RPD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD, dan Renja PD, serta sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2023-2026.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) Dokumen RPD Kabupaten tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) RPD Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : GAMBARAN UMUM;
BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
BAB V : TUJUAN DAN SASARAN;
BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS;
BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
BAB IX : PENUTUP.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 4

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RPD
Pasal 5

(1) Perubahan RPD dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
c. terjadi perubahan mendasar meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan atau pemekaran daerah;
d. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan sasaran dan program tetapi tidak mengubah target akhir pencapaian sasaran kabupaten, maka penetapan perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 6

(1) Semua ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang termuat/tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026 dapat berubah sesuai perkembangan dan kebijakan pada tahun berkenaan sepanjang tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir RPD;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat mengakomodir perubahan target indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 19 MARET 2022
Plt.BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,

BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 19 MARET 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022 NOMOR 16

KATA PENGANTAR

Berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati Musi Banyuasin Periode 2017-2022 pada tahun 2022 menandai juga berakhirnya RPJMD Periode 2017-2022 pada kurun waktu yang sama sementara RPJMD yang baru akan dibuat setelah Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin perlu disusun suatu dokumen sebagai pedoman Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 yang berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025, penyelesaian target kinerja RPJMD 2017-2022 yang belum tercapai dan menjaga keselarasan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin dengan Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan serta mengantisipasi perkembangan pembangunan yang akan mempengaruhi kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 disusun sebagai pedoman penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD. Keselarasan dan kesinambungan antar dokumen tersebut diharapkan akan menjadikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin dapat selaras, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Demikianlah dokumen ini dibuat untuk menggambarkan proses perencanaan yang telah dilakukan dalam penyusunan RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026, serta dalam rangka mendukung keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan dan keberlanjutan kebijakan perencanaan pembangunan.

Sekayu, 14 Maret 2022

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,

BENI HERNEDI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 16
TANGGAL : 14 MARET 2022
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023-2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum..... I-4
1.3 Maksud dan Tujuan I-8

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Kondisi Umum Daerah II-1
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Per Urusan, Tujuan, Sasaran pada RPJMD Periode Sebelumnya II-114

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu III-3
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-24

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah IV-3

4.2 Isu Strategis IV-36

4.3 Penyelarasan Isu Strategis Kabupaten Musi Banyuasin IV-75

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Tujuan V-5

5.2 Sasaran V-9

5.3 Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan V-18

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

6.1 Strategi VI-1

6.2 Arah Kebijakan VI-10

6.3 Program Prioritas VI-38

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan VII-1

7.2 Program Perangkat Daerah VII-22

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

8.1 Indikator Makro Pembangunan VIII-2

8.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) VIII-9

8.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) VII-12

BAB IX PENUTUP IX-1

9.1 Kaidah Pelaksanaan IX-3

9.2 Pedoman Transisi IX-4

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Desa/ Kelurahan dan Luas Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021	II-2
Tabel 2.2	Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin	II-9
Tabel 2.3	Jenis, Jumlah Kejadian dan Realisasi Bencana di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin	II-20
Tabel 2.4	Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021	II-22
Tabel 2.5	Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021	II-23
Tabel 2.6	Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Periode 2017-2021 (%)	II-27
Tabel 2.7	Produk Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2017-2021 (Milyar Rupiah)	II-28
Tabel 2.8	Produk Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2017-2021 (Milyar Rupiah)	II-29
Tabel 2.9	Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Periode 2017-2021 (%)	II-30
Tabel 2.10	Produk Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2017-2021 (Milyar Rupiah)	II-31
Tabel 2.11	Produk Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2017-2021 (Milyar Rupiah)	II-31
Tabel 2.12	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dan Atas Dasar Harga Konstan dengan Migas Periode 2016-2020 (dalam Milyar rupiah)	II-33
Tabel 2.13	Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2013-2021	II-36
Tabel 2.14	Garis Kemiskinan berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021	II-37

Tabel 2.15	Garis Kemiskinan berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021	II-39
Tabel 2.16	Indikator Variabel Pembentuk IPG	II-40
Tabel 2.17	Indikator Variabel Pembentuk IDG	II-41
Tabel 2.18	Penduduk Musi Banyuasin Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 2017-2021	II-47
Tabel 2.19	Kegiatan Kebudayaan Kab. Musi Banyuasin Tahun 2020-2021	II-50
Tabel 2.20	Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Musi Banyuasin Tahun 2020-2021	II-51
Tabel 2.21	Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Musi Banyuasin Tahun 2020-2021	II-52
Tabel 2.22	Jumlah Sekolah dan Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kab. Muba Tahun 2016-2021	II-56
Tabel 2.23	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kab. Musi Banyuasin Tahun 2017-2021	II-57
Tabel 2.24	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kab. Musi Banyuasin Tahun 2017- 2021	II-58
Tabel 2.25	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kab. Musi Banyuasin Tahun 2016- 2020	II-60
Tabel 2.26	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kab. Musi Banyuasin Tahun 2017-2021	II-63
Tabel 2.27	Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kab. Musi Banyuasin 2016- 2020	II-64
Tabel 2.28	Capaian Kinerja Urusan Sosial Kab. Musi Banyuasin Tahun 2016- 2020	II-65
Tabel 2.29	Daftar Nama Panti Asuhan Binaan Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020	II-66
Tabel 2.30	Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin 2021	II-68

Tabel 2.31	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kab. Musi Banyuasin Tahun 2017-2021	II-69
Tabel 2.32	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Musi Banyuasin Tahun 2017- 2021	II-70
Tabel 2.33	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Musi Banyuasin Tahun 2017- 2021	II-71
Tabel 2.34	Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020	II-71
Tabel 2.35	Capaian Kinerja Urusan Pangan Kab. Musi Banyuasin Tahun 2016- 2020	II-72
Tabel 2.36	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kab. Musi Banyuasin Tahun 2016-2020	II-74
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin Tahun 2017- 2021	II-75
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Capil Kab. Musi Banyuasin Tahun 2016- 2020	II-76
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Musi Banyuasin Tahun 2016- 2020	II-77
Tabel 2.40	Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kab. Musi Banyuasin Tahun 2016- 2020	II-78
Tabel 2.41	Jumlah Kendaraan Angkutan Darat Menurut Jenisnya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 - 2020	II-79
Tabel 2.42	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kab. Musi Banyuasin Tahun 2020	II-80
Tabel 2.43	Koperasi/KUD dan Non KUD Dalam Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2020	II-82
Tabel 2.44	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kab. Musi Banyuasin Tahun 2016 – 2020	II-83
Tabel 2.45	Capaian Kinerja Pemuda dan Olahraga Kab. Musi Banyuasin Tahun 2016-2020	II-84
Tabel 2.46	Capaian Kinerja Pemuda dan Olahraga Kab. Musi Banyuasin Tahun 2016-2020	II-85

Tabel 2.47	Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2016- 2020	II-86
Tabel 2.48	Capaian Kinerja Kebudayaan Kab. Musi Banyuasin Tahun 2016 – 2020.....	II-87
Tabel 2.49	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kab. Musi Banyuasin Tahun 2016-2020.....	II-88
Tabel 2.50	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kab. Musi Banyuasin Tahun 2016-2020.....	II-89
Tabel 2.51	Produksi Ikan (Tangkap dan Budidaya) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 - 2020.....	II-90
Tabel 2.52	Konsumsi Ikan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 – 2020	II-91
Tabel 2.53	Objek Wisata di Kabupaten Musi Banyuasin	II-92
Tabel 2.54	Luas Lahan Pertanian (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 - 2021	II-94
Tabel 2.55	Luas Panen (Ha) Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 - 2020.....	II-95
Tabel 2.56	Luas Panen (Ha) Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 - 2020.....	II-95
Tabel 2.57	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kab. Musi Banyuasin Tahun 2016 - 2020.....	II-97
Tabel 2.58	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kab. Musi Banyuasin Tahun 2016 – 2020.....	II-99
Tabel 2.59	Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kab. Musi Banyuasin Tahun 2017 - 2021.....	II-100
Tabel 2.59a	Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang terbina Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021.....	II-100
Tabel 2.59b	Jumlah Transmigran yang Terbina Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021.....	II-100
Tabel 2.60	Urusan Perencanaan Kab. Muba Tahun 2017-2020	II-101

Tabel 2.61	Urusan Penelitian dan Pengembangan Kab. Muba Tahun 2017-2020	II-102
Tabel 2.62	Urusan Keuangan Kab. Muba Tahun 2017-2020	II-103
Tabel 2.63	Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Muba Tahun 2017-2020.....	II-104
Tabel 2.64	Urusan Pengawasan Kab. Muba Tahun 2017-2020	II-106
Tabel 2.65	Urusan Administrasi Pemerintahan Kab. Muba Tahun 2017-2020	II-107
Tabel 2.66	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kab. Muba Tahun 2017 – 2021.....	II-108
Tabel 2.67	Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga per Kapita Kab. Muba Tahun 2016 – 2020	II-109
Tabel 2.68	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum dan Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun.....	II-110
Tabel 2.69	Penataan Ruang Kab. Muba Tahun 2017-2020	II-111
Tabel 2.70	Perekonomian Kab. Muba Tahun 2017-2021.....	II-111
Tabel 2.71	Lama Proses Perizinan dan Jumlah Perda yang mendukung Iklim Usaha di Kab. Muba Tahun 2017 – 2020	II-112
Tabel 2.72	Jumlah Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertiggi Kab. Muba Tahun 2017 – 2020	II-113
Tabel 2.73	Rasio lulusan S-1, S-2 dan S-3 terhadap total penduduk Kab. Muba Tahun 2017 – 2020	II-113
Tabel 2.74	Komposisi Penduduk dan Rasio Ketergantungan (%) Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2016 – 2020	II-114
Tabel 2.75	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022	II-133
Tabel 2.76	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kab. Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2021.....	II-139

Tabel 3.1	Rata - Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021 (dalam Rupiah)	III-3
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021.....	III-7
Tabel 3.3	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021.....	III-10
Tabel 3.4	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	III-13
Tabel 3.5	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2021	III-23
Tabel 3.6	Rekapitulasi Pendanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)/CSR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013-2020.....	III-33
Tabel 3.7	Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Musi Banyuasin.....	III-35
Tabel 3.8	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2020	III-37
Tabel 3.9	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Musi Banyuasin 2017 – 2020	III-39
Tabel 3.10	Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Musi Banyuasin 2017 – 2021	III-41
Tabel 3.11	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Musi Banyuasin	III-43
Tabel 3.12	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Musi Banyuasin.....	III-45
Tabel 4.1	Jumlah Kepala Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Musi Banyuasin dan lapangan Usaha Tahun 2018-2020 (Jiwa)	IV-4
Tabel 4.2	Perkembangan Angka Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan	IV-7
Tabel 4.3	Garis Kemiskinan berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021.....	IV-8
Tabel 4.4	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (dalam Persen) Periode 2016-2020	IV-14

Tabel 4.5	Perbandingan Jumlah Penduduk dan Angkatan Kerja di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019-2020	IV-20
Tabel 4.6	Jumlah Sekolah dan Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kab. Muba Tahun 2016-2021	IV-21
Tabel 4.7	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas Menurut Karakteristik Dan Status Pendidikan Pada Tahun 2020	IV-22
Tabel 4.8	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah (SMP) Di Kabupaten Musi Banyuasin	IV-23
Tabel 4.9	Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Klinik Pratama dan Posyandu Di Kabupaten Musi Banyuasin	IV-25
Tabel 4.10	Kondisi Jalan (dalam km) Di Kabupaten Muba Tahun 2019-2021	IV-28
Tabel 4.11	Isu Strategis RPJMD Daerah Perbatasan	IV-60
Tabel 4.12	Struktur Ruang dan Fungsi yang diemban Kecamatan	IV-64
Tabel 4.13	Progress TORA di Kabupaten Musi Banyuasin	IV-72
Tabel 4.14	Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah	IV-76
Tabel 5.1	Indikator Tujuan	V-7
Tabel 5.2	Indikator Sasaran	V-11
Tabel 5.3	Keterkaitan Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran	V-13
Tabel 5.4	Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026	V-15
Tabel 5.5	Penyelarasan Target Indikator makro Kab. Muba – Prov. Sumsel – Nasional Tahun 2020-2024	V-19
Tabel 5.6	Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam RPD – RPJMD Provinsi – RPJM Nasional	V-20

Tabel 6.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 untuk Mewujudkan Tujuan: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	VI-2
Tabel 6.2	Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 untuk Mewujudkan Tujuan: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	VI-3
Tabel 6.3	Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 untuk Mewujudkan Tujuan: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	VI-4
Tabel 6.4	Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 untuk Mewujudkan Tujuan: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	VI-6
Tabel 6.5	Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 untuk Mewujudkan Tujuan 2: Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	VI-7
Tabel 6.6	Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 untuk Mewujudkan Tujuan 3: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	VI-9
Tabel 6.7	Tema Pembangunan Kabupaten Muba Tahun 2023 – 2026.....	VI-11
Tabel 6.8	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026.....	VI-13
Tabel 6.9	Keselarasan Permasalahan – Srategi – Arah Kebijakan Kabupaten Musi Banyuasin.....	VI-17

Tabel 6.10	Keselarasan Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJMN	VI-25
Tabel 6.11	Program Prioritas Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.....	VI-44
Tabel 7.1	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022-2026	VII-4
Tabel 7.2	Proyeksi SILPA Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022 - 2026 (dalam jutaan)	VII-12
Tabel 7.3	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022- 2026	VII-14
Tabel 7.4	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022-2026.....	VII-16
Tabel 7.5	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022-2026.....	VII-20
Tabel 7.6	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.....	VII-27
Tabel 8.1	Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.....	VIII-2
Tabel 8.2	Target IPM Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.....	VIII-3
Tabel 8.3	Target Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.....	VIII-4
Tabel 8.4	Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026	VIII-5
Tabel 8.5	Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.....	VIII-6
Tabel 8.6	Target Pengeluaran Perkapita Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026	VIII-7
Tabel 8.7	Target Indeks Gini Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026	VIII-8
Tabel 8.8	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.....	VIII-10
Tabel 8.9	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.....	VIII-13

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Komponen Besaran Dana Perimbangan Periode 2017-2021	III-5
Grafik 3.2	Hasil Analisis Current Ratio dan Quick Ratio	III-19
Grafik 3.3	Hasil Analisis Debt to Asset dan Debt to Equity	III-21
Grafik 3.4	Hasil Analisis Rasio Aktivitas	III-22
Grafik 4.1	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Muba Tahun 2007 – 2021 ...	IV-6
Grafik 4.2	Persentase Penduduk Miskin Muba dan Sumsel Tahun 2015-2021	IV-9
Grafik 4.3	Garis Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2011-2021	IV-10
Grafik 4.4	Garis Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2011-2021	IV-12
Grafik 4.5	PDRB per Kapita ADHK dan ADHB Kabupaten Muba Tahun 2016-2020	IV-16
Grafik 4.6	Tingkat Pengangguran Terbuka Muba dan Sumsel Periode 2014-2021 (%)	IV-18
Grafik 7.1	Proyeksi Pendapatan Daerah 2022-2026.....	VII-11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Persentase Luas Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Menurut Kecamatan (%)	II-2
Gambar 2.2	Wilayah Administratif Kabupaten Musi Banyuasin	II-3
Gambar 2.3	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Musi Banyuasin	II-4
Gambar 2.4	Peta Curah Hujan Per hari	II-7
Gambar 2.5	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Musi Banyuasin	II-19
Gambar 2.6	Tren Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2012-2021 (%)	II-25
Gambar 2.7	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Musi Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2021	II-34
Gambar 2.8	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 – 2021	II-35
Gambar 2.9	Garis Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2011-2021	II-37
Gambar 2.10	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Muba dan Sumsel Periode 2012-2021	II-38
Gambar 2.11	Perkembangan IPG Kab.Muba Tahun 2017-2021	II-40
Gambar 2.12	Perkembangan IDG Kab.Muba Tahun 2017-2021	II-41
Gambar 2.13	Persentase Kemampuan Membaca dan Menulis Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019-2020	II-42
Gambar 2.14	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021	II-43
Gambar 2.15	Angka Harapan Hidup di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021	II-44
Gambar 2.16	Angka Kesakitan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021	II-46

Gambar 2.17	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2020	II-48
Gambar 2.18	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan SD/MI Kab.Muba Tahun 2017-2021	II-55
Gambar 2.19	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan SMP/MTs Kab.Muba Tahun 2017-2021 ..	II-55
Gambar 2.20	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA Kab.Muba Tahun 2017-2021	II-56
Gambar 2.21	Presentase Penduduk Berakses Air Minum dan Capaian Akses Sanitasi	II-62
Gambar 2.22	Tingkat Pengangguran Terbuka Muba dan Sumsel Periode 2017-2021 (%)	II-67
Gambar 2.23	Ikan Patin	II-89
Gambar 4.1	Perbandingan Lahan Terbakar 2015, Prioritas Restorasi, dan Lahan Terbakar 2019	IV-33

BAB 1
PENDAHULUAN



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi Daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir tahun 2022 atau tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD.

Untuk Kabupaten Musi Banyuasin, dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin periode 2017-2022 yang menandai berakhirnya pula RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 pada tahun 2022 ini sehingga dibutuhkan dokumen transisi sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan tahunan.

Sesuai dengan amanat UU tersebut dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, Kabupaten Musi Banyuasin akan menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang disebut Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 sebagai pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD yang lebih lanjut akan menjadi dasar penyusunan APBD dan bagi kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2023-2026.

Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh daerah pada masa transisi ini terdiri dari RPJPD, RPD, RKPD dan Renstra-PD. Masing-masing dokumen merupakan hirarki dokumen yang saling berhubungan. RPJPD yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun yang kemudian disinkronisasikan dengan RPD masa transisi sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan. Selanjutnya RPD dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk satu tahun dalam bentuk RKPD sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait. Selanjutnya, RKPD menjadi landasan bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Musi Banyuasin. RPD ini juga sebagai dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 ini memiliki nilai strategis karena dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Tahun 2023-2026 ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama masa transisi tahun 2023-2026. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 telah melewati beberapa tahapan sebagaimana amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan melalui proses yang melibatkan berbagai perwakilan para pemangku kepentingan yaitu dari unsur Perguruan Tinggi/Akademisi, LSM, Dunia Usaha, Perbankan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi, Kecamatan dan DPRD melalui Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2022. Kemudian dilakukan asistensi dan konsultasi dengan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Rapat-rapat Pembahasan dengan Tim Penyusun RPD. Selanjutnya dokumen RPD telah direview oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan difasilitasi oleh Bappeda Provinsi Sumatera

Selatan serta dievaluasi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk dilakukan penyempurnaan dan kemudian ditetapkan melalui Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali dlubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547;
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang- Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17)
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 13);

17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022;
19. Peraturan Bupati Nomor 268 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 268.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2023-2026, RKPD, Renja-PD, RPJM Desa dan RKP Desa.
2. Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumber daya dan dana pembangunan yang akan dijadikan salah satu kekuatan pembangunan.
3. Memberikan arah dan sekaligus tolak ukur keberhasilan pembangunan.
4. Merumuskan indikator kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
5. Merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan RKPD dan rangkaian kegiatan penyusunan APBD tahunan.
2. Mewujudkan arah kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan arah kebijakan Provinsi dan Nasional dengan memperhatikan isu strategis dan dinamika terkini.
3. Menjadi pedoman evaluasi kinerja pembangunan daerah.
4. Mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan yang berkelanjutan.
5. Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

BAB 2
GAMBARAN UMUM



BAB II
GAMBARAN UMUM

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Musi Banyuasin dilihat berdasarkan posisi astronomi berada di antara garis $103^0$00' sampai dengan $104^0$45' Bujur Timur dan antara 1,3^0 sampai dengan 4^0 Lintang Selatan. Adapun secara administratif, letak wilayah Kabupaten Musi Banyuasin berbatasan dengan Provinsi Jambi di sebelah utara, Kabupaten Banyuasin di sebelah timur, Kabupaten PALI (Penungkal Abab Lematang Ilir) di sebelah selatan dan Kabupaten Musi Rawas di sebelah barat.

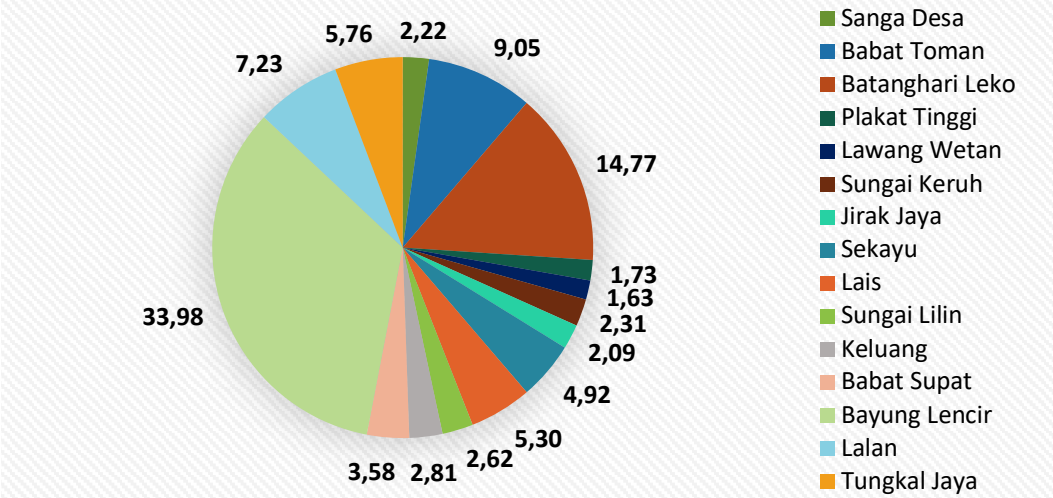
Sebagai kabupaten yang terluas ke-2 di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin merupakan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki luas wilayah sebesar 14.265,96 Ha atau sekitar 15 persen dari luas Provinsi Sumatera Selatan dan terdiri dari 15 Kecamatan, 230 Desa dan 13 Kelurahan. Dari 15 Kecamatan tersebut, kecamatan di Kabupaten Musi Banyusin yang memiliki Desa/ Kelurahan terbanyak yaitu Kecamatan Lalan dengan 27 Desa/ Kelurahan. Sedangkan Kecamatan Sungai Keruh menjadi Kecamatan dengan jumlah Desa/ Kelurahan paling sedikit di Kabupaten Musi Banyuasin yakni sebanyak 11 Desa/ Kelurahan.

Tabel 2.1
Jumlah Desa/ Kelurahan dan Luas Wilayah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas (Km²)	Persentase (%)
1.	Sanga Desa	19	317,00	2,22
2.	Babat Toman	14	1.291,00	9,05
3.	Batang Hari Leko	16	2.107,79	14,77
4.	Plakat Tinggi	15	247,00	1,73
5.	Lawang Wetan	15	232,00	1,63
6.	Sungai Keruh	11	330,12	2,31
7.	Jirak Jaya	12	298,88	2,09
8.	Sekayu	14	701,60	4,92
9.	Lais	16	755,53	5,30
10.	Sungai Lilin	15	374,26	2,62
11.	Keluang	14	400,57	2,81
12.	Babat Supat	16	511,02	3,58
13.	Bayung Lencir	23	4.847,00	33,98
14.	Lalan	27	1.031,00	7,23
15.	Tungkal Jaya	16	821,19	5,76
J u m l a h		**243**	**14.265,96**	**100,00**

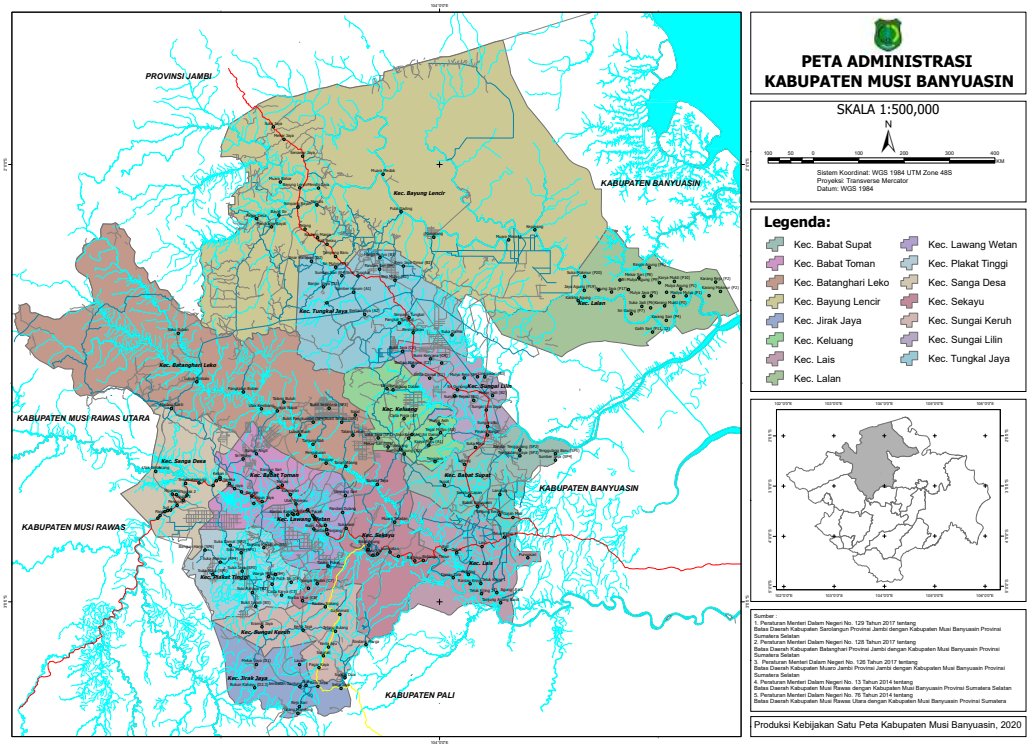
Sumber: BPS, 2022

Gambar 2.1
Persentase Luas Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021
Menurut Kecamatan (%)



Sumber: BPS, 2022

Gambar 2.2
Wilayah Administratif Kabupaten Musi Banyuasin



Sumber: Produksi Kebijakan Satu Peta Kabupaten Musi Banyuasin, 2020

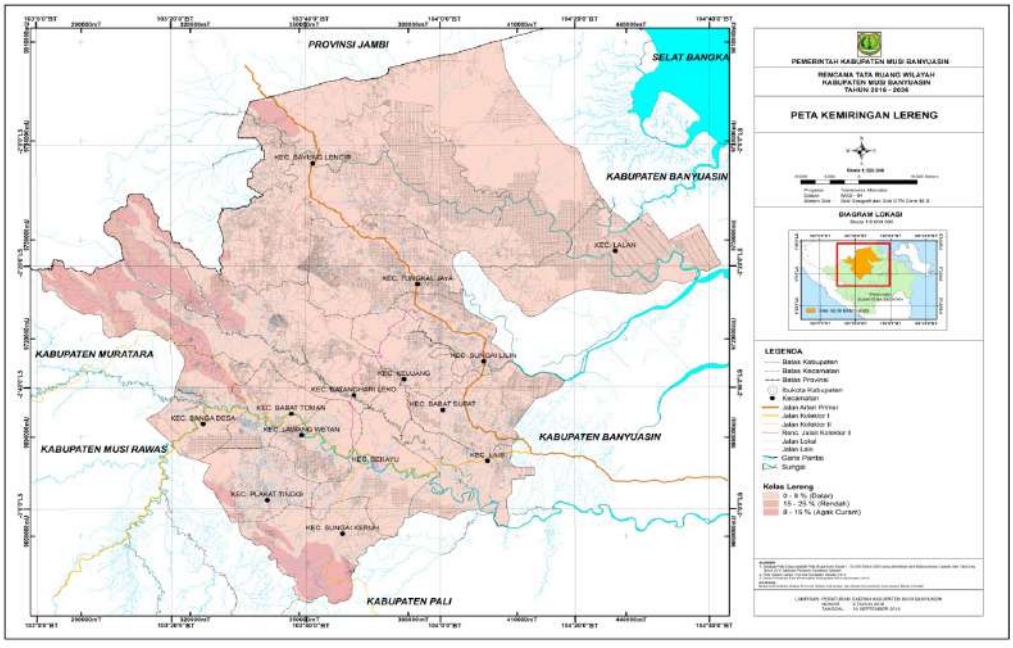
Kabupaten Musi Banyuasin telah mengalami beberapa kali penambahan jumlah kecamatan yang diakibatkan karena terdapat pemekaran sejak otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2001. Pada tahun 2010, terjadi penambahan kecamatan sebanyak 3 kecamatan. Pemekaran berikutnya terjadi pada tahun 2013 yaitu penambahan sebanyak 4 desa. Sepanjang tahun 2014-2017 tidak terjadi perubahan, hingga pemekaran terbaru dilakukan pada tahun 2018 yaitu penambahan satu kecamatan dan tiga desa menjadi 15 kecamatan, 230 desa dan 13 kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin. Kabupaten Musi Banyuasin terus berkembang dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Bayung Lencir dengan luas 4.847 Km2 dan wilayah terkecil adalah Kecamatan Lawang Wetan dengan luas 232,00 Km^2.

2.1.1.2. Kondisi Topografi

Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin secara topografi terdiri dari 3 (tiga) bagian berdasarkan kemiringan lahan di 243 desa/kelurahan yakni dataran rendah, bergelombang dan berbukit.

Di sebelah timur Kecamatan Sungai Lilin, sebelah barat Kecamatan Bayung Lencir kemudian di daerah pinggiran aliran Sungai Musi sampai ke Kecamatan Babat Toman, tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut dengan topografi dan ketinggian di wilayah berkisar antara 14-37 meter di atas permukaan laut. Daerah lainnya merupakan dataran tinggi dan berbukit-bukit dengan ketinggian mencapai 37 meter di atas permukaan laut. Jika dilihat dari topografi wilayahnya, ada 40 desa berada di lembah daerah aliran sungai, dan 203 desa berada di dataran.

Gambar 2.3
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Musi Banyuasin



Sumber: RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 – 2036

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan daerah rawa dan sungai besar serta kecil seperti Sungai Musi, Sungai Banyuasin, Sungai Batanghari Leko dan lain-lain. Untuk aliran Sungai Musi yang berada di bagian timur dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Disamping itu daerah ini juga terdiri dari lebak dan danau-danau kecil. Kondisi ini berguna bagi kegiatan irigasi/pengairan pertanian sehingga pencetakan sawah baru dapat mempertimbangkan keberadaan sungai-sungai tersebut. Sedangkan guna memenuhi keperluan penduduk dalam hal pemenuhan air bersih, keberadaan sungai tersebut dapat pula dimanfaatkan untuk pengambilan air baku PDAM.

Jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari empat macam meliputi *Organosol* (berada di dataran rendah atau rawa-rawa yang sebagian terdapat di Bayung Lencir, Lais dan Lalan); *Glei Humus* (berada di dataran rendah dan rawa rawa dan banyak digunakan untuk persawahan pasang surut dan persawahan rawa seperti pada Bayung Lencir, Lais dan Lalan); *Alluvial* (berada di sepanjang sungai seperti Sungai Lilin, Sekayu, Babat Supat, Lais, Batanghari Leko, Babat Toman, Keluang dan Sanga Desa); dan *Padzolik* (berada di daerah berbukit – bukit yang sebagian besar terdapat di daerah Sungai Keruh, Plakat Tinggi, Babat Toman, Batang Hari Leko, Lais dan Sungai Lilin). Berdasarkan kondisi jenis tanah tersebut, maka wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dikatakan mempunyai jenis tanah yang tidak peka terhadap erosi dan sangat berpotensi untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.

Kondisi jenis tanah di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin diidentifikasi bahwa pada kedalaman efektif tanah > 90 cm, sangat ideal untuk pertumbuhan tanaman pada tanah yang berdrainase baik. Berdasarkan pengalaman menunjukkan bahwa tanaman tahunan maupun tanaman semusim memberikan hasil yang memuaskan pada tanah berdrainase baik dengan kedalaman zona perakaran efektif tanah > 90 cm. Berdasarkan pengalaman ini maka kemudian kedalaman efektif tanah > 90 cm dijadikan patokan untuk batas minimum tanah klas 1 dengan tingkat pengelolaan yang standar.

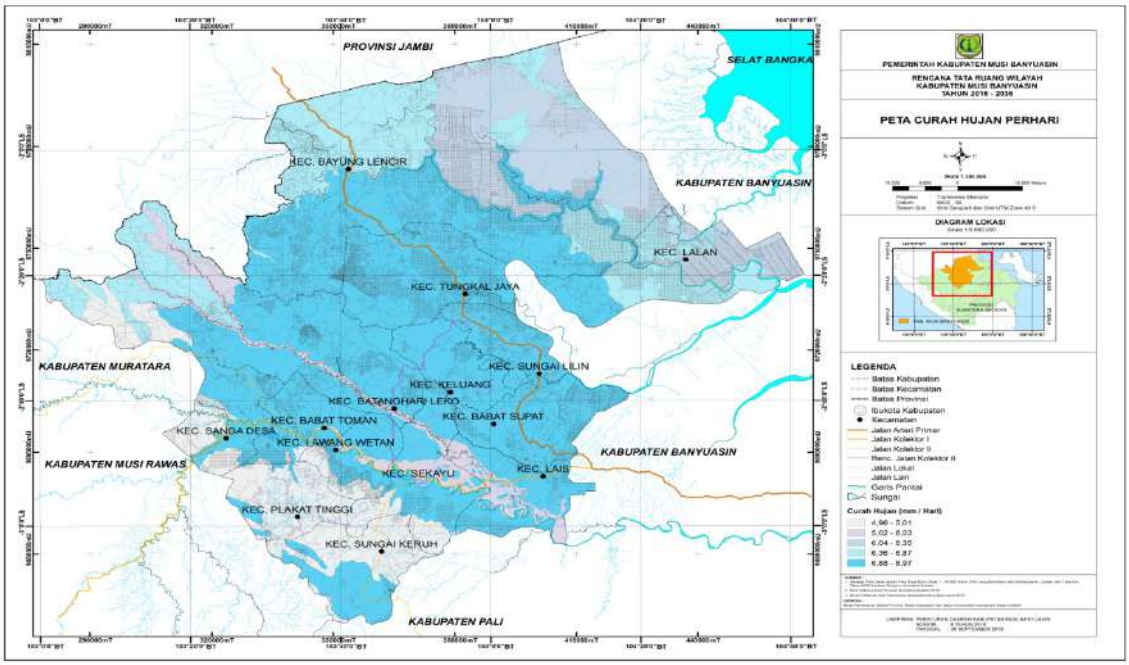
Secara umum kedalaman efektif tanah di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin adalah lebih dari 90 cm. Keadaan ini tentu secara dini dapat memberikan indikasi bahwa lahan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sangat kondusif untuk pertumbuhan tanaman. Selain lahan-lahan dengan kedalaman efektif lebih dari 90 cm juga ditemukan lahan yang kedalaman efektifnya antara 60 hingga 90 cm.

Jenis penggunaan lahan/tanah di Kabupaten Musi Banyuasin dibedakan dalam 15 (lima belas) jenis penggunaan. Jenis penggunaan tanah yang penyebarannya paling luas berupa Hutan dengan luas 535.421,57 Ha atau 37,53% dari luas total Kabupaten Musi Banyuasin. Jenis penggunaan lahan lainnya yang penyebarannya cukup luas yaitu berupa kebun rakyat dengan 312.613,30 Ha atau 21,91% dari luas Kabupaten, selanjutnya perkebunan besar dengan 127.215,63 Ha atau 8,92% dari luas wilayah Kabupaten disusul kebun campuran dengan 121.538,79 Ha atau 8,52% dari luas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

merupakan penggunaan terbesar keempat. Sedangkan jenis penggunaan lahan/tanah lainnya penyebarannya relatif lebih kecil jika dibandingkan keempat penggunaan diatas.

2.1.1.3. Kondisi Hidrologi

Gambar 2.4
Peta Curah Hujan Per hari



Sumber: RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 – 2036

Secara umum, Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai iklim tropis basah. Berdasarkan data BPS Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021, variasi curah hujan antara 60,0 – 587,5 mm sepanjang tahun 2021. Curah hujan paling banyak pada bulan Desember 2021. Hari hujan pada tahun 2021 menunjukkan variasi antara 6-23 hari, dengan hari hujan paling banyak pada bulan November dan Desember 2021.

Secara garis besar arahan pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budidaya tetap mengedepankan kelestarian lingkungan hidup untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan. Pengidentifikasiannya di lakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain ketinggian, kemiringan/sudut lereng, keadaan hidrologi serta kawasan-kawasan bahaya alamiah maupun kawasan-kawasan berupa cagar alam dan taman nasional.

Kawasan budidaya ditetapkan dengan fungsi untuk di budidayakan atas dasar kondisi potensi sumber daya alam, manusia dan buatan. Pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara spasial mencakup wilayah yang berdasarkan analisis daya dukung lahan tergolong tinggi dan sangat tinggi, baik untuk pengembangan kawasan pertanian maupun perkotaan yang berdasarkan analisis spasial arahan pola ruang kawasan budidaya di Kabupaten Musi Banyuasin luas kawasan budidaya sebesar 1.326.112.732 Ha.

Berdasarkan pada letaknya, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki sumber daya air berupa sumber daya air permukaan dan sumber daya air tanah. Sumber daya air permukaan tersebut yakni berupa sungai, danau, rawa-rawa dan perairan laut. Berdasarkan pola aliran sungai dan sifat tata airnya, wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dibedakan menjadi wilayah dataran kering dan rawa. Sungai-sungai yang ada pada daerah rawa mempunyai pola aliran rectanguler (cabang sungai tegak lurus), sedangkan di wilayah dataran kering pola aliran sungainya

dendritik (menjari). Pada sungai-sungai besar aliran airnya ada sepanjang tahun dan tidak terpengaruh oleh perubahan musim secara signifikan, sehingga pada sungai-sungai jenis ini dapat dipergunakan sebagai moda transportasi, sungai tersebut antara lain Sungai Musi dan Sungai Lalan.

Pada daerah dataran kering dengan pola aliran dendritik keberadaan air permukaan umumnya ada pada musim hujan, sedangkan pada musim kemarau keberadaan air permukaan umumnya langka selain disebabkan menurunnya curah hujan juga disebabkan batuan penyusunnya umumnya kedap air sehingga pemunculan mata air langka di daerah ini. Menurut debit airnya, sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin menunjukan DAS Musi memiliki debit rata-rata 763 m3/detik, sedangkan DAS Air Lalan seluas 8.30 km2 memiliki debit rata-rata 196,8 m3/detik. Berikut ini merupakan sungai yang mengalir di wilayah Kab. Musi Banyuasin beserta debit rata-rata hariannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

Nama DAS	Panjang Sungai (KM)	Luas DAS (Ha)	Debit (M3/dtk)
Sungai Ibul (Anak Sungai Musi)	35	14.500	3,3
Sungai A. Calik (Anak Sungai A.Banyuasin)	57	96.400	28
Sungai Dawas (Anak Sungai A. Calik)	50	6.500	1,6
Sungai Supat (Anak Sungai A. Calik)	32	22.600	5,1
Sungai Keluang (Anak Sungai A. Calik)	19	9.400	2,1
Sungai Tungkal (Anak Sungai A. Calik)	82	149.500	33,6
Sungai Lalan (Anak Sungai A.Banyuasin)	243	830.300	196,8
Sungai Merang (Anak Sungai Lalan)	66	83.900	24,4
Sungai Bohar (Anak Sungai Lalan)	20	10.000	2,2

Nama DAS	Panjang Sungai (KM)	Luas DAS (Ha)	Debit (M3/dtk)
Sungai Medak (Anak Sungai Lalan)	72	108.300	25,7
Sungai Tungkal (Anak Sungai Lalan)	25	5.900	1,9
Sungai Serdang (Anak Sungai Lalan)	34	8.300	2,4
Sungai Meranti (Anak Sungai Lalan)	28	15.100	4,4
Sungai Kepahiang (Anak Sungai Lalan)	16	13.300	3,9
Sungai Mangsang (Anak Sungai Lalan)	18	7.400	1,8
Sungai Mendis (Anak Sungai Lalan)	19	3.900	0,9
Sungai Batang Hari Leko (Anak Sungai Musi)	176	374.600	103,9
Sungai Kapas (Anak S. Batang Hari Leko)	63	71.300	16,9
Sungai Meranti (Anak S. Batang Hari Leko)	38	26.400	8,8
Sungai Putat (Anak S. Batang Hari Leko)	38	20.100	8,6
Sungai A. Aur (Anak S. Batang Hari Leko)	19	12.700	5,4
Sungai Rampasan (Anak S. Batang Hari Leko)	19	11.600	4,9
Sungai Angit (Anak S. Batang Hari Leko)	13	5.300	2,3
Sungai Kukui (Anak S. Batang Hari Leko)	15	10.200	4,3
Sungai Lalang (Anak S. Batang Hari Leko)	25	21.900	5,2

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Musi Banyuasin

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

1. Kawasan Lindung

- **Kawasan Hutan Lindung**

  Kawasan Hutan Lindung Kademba dan Kawasan Hutan Lindung Sungai Jernih dengan luas kurang lebih 16.233 (enam belas ribu dua ratus tiga puluh tiga) hektar, yang berada di :

  - Kecamatan Batanghari Leko
  - Kecamatan Sanga Desa

- **Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya**

  Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya yaitu Kawasan Rawa Gambut Muara Medak dengan luas kurang lebih 24.768 (dua puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan) hektar berada di Kecamatan Bayung Lencir.

- **Kawasan Perlindungan Setempat**

Kawasan perlindungan setempat meliputi:

- Kawasan Sempadan sungai di Sungai Musi, Sungai Batanghari Leko, Sungai Lalan, Sungai Dawas dengan luas kurang lebih 11.134 (sebelas ribu seratus tiga puluh empat) hektar;
- Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan seluas 30 (tiga puluh) persen dari luas perkotaan dengan luas RTH sebesar kurang lebih 9.755 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima) hektar.

- **Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya**

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya terdiri atas:

1. Suaka Margasatwa
    - Suaka Margasatwa (SM) Bentayan dengan luas kurang lebih 16.553 (enam belas ribu lima ratus lima puluh tiga) hektar yang terletak di Kecamatan Lalan, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Tungkal Jaya.
    - Suaka Margasatwa (SM) Dangku dengan luas kurang lebih 47.978 (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) hektar yang terletak di Kecamatan Keluang, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Bayung Lencir dan Kecamatan Tungkal Jaya.

- Suaka Margasatwa (SM) Buaya Senyulong seluas kurang lebih 13.871 (tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu) hektar yang terletak di Kecamatan Bayung Lencir .

2. Taman Nasional

   Taman Nasional Sembilang dengan luas kuarang lebih 2.906 (dua ribu sembilan ratus enam) hektar terletak di Kecamatan Lalan.

3. Taman Nasional Laut

   Taman Nasional Sembilang Laut (perairan) dengan luas kurang lebih 214 (dua ratus empat) hektar yang terletak di kecamatan Lalan.

- **Kawasan Rawan Bencana Alam**

Kawasan Rawan Bencana Alam meliputi:

- Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan terletak di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Lalan, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Tungkal Jaya, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sekayu.
- Kawasan rawan banjir terletak di kecamatan Lais, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Sanga Desa, dan Kecamatan Batanghari Leko.

- Kawasan yang pernah terjadi dan rawan terjadinya longsor didinding sungai ini seperti Kecamatan Sekayu, Lais dan Sanga Desa.
- Angin Puting Beliung pernah terjadi beberapa kali seperti misalnya di Kecamatan Sekayu.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya meliputi :

a) Kawasan peruntukan hutan produksi

Kawasan perutukan hutan produksi, meliputi :

- Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luas kurang lebih 94.980 (sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh) hektar yang berada di Kecamatan Batanghari Leko dan Kecamatan Bayung Lencir.
- Hutan Produksi Tetap (HP) dengan luas kurang lebih 409.719 (empat ratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas) hektar yang berada di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Lais, Kecamatan Lalan, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Babat Supat dan Kecamatan Tungkal Jaya.
- Hutan Produksi Konveksi (Hpk) dengan luas kurang lebih 66. 408 (emam puluh enam ribu empat ratus delapan) hektar yang berada di Kecamatan Babat Supat, Kecamatan

Batanghari Leko, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Keluang, Kecamatan Lalan, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Tungkal Jaya.

b) Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan peruntukan pertanian meliputi :

1. Kawasan budidaya tanaman pangan dengan luas kurang lebih 125.062 (seratus dua puluh lima ribu enam puluh dua) hektar yang berada di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Lais, Kecamatan Keluang dan Kecamatan Lalan.
2. Kawasan budidaya tanaman hortikultura terdiri dari tanaman sayur – sayuran dengan luas kurang lebih 3.031 (tiga ribu tiga puluh satu) hektar yang berada di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Keluang dan Kecamatan Lalan. Selain itu juga terdapat tanaman buah – buahan dengan luas kurang lebih 3.262 (tiga ribu dua ratus enam puluh dua) hektar yang tersebar dibeberapa kecamatan.

Kawasan peruntukan perkebunan adalah pertanian tanaman tahunan seluas kurang lebih 581.811 (lima ratus delapan puluh satu delapan ratus sebelas) hektar yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

c) Kawasan peruntukan perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan adalah pertanian tanaman tahunan seluas kurang lebih 581.811 (lima ratus delapan puluh satu delapan ratus sebelas) hektar yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

d) Kawasan Peruntukan Peternakan

Kawasan peruntukan peternakan adalah peruntukan pengembangan peternakan besar yang terletak di Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Plakat Tinggi dan Kecamatan Sungai Lilin sedangkan peternakan kecil terletak di Kecamatan Bayung Lencir.

e) Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan, meliputi:

1. Kawasan peruntukan perikanan tangkap;

   Kawasan peruntukan perikanan tangkap adalah perikanan tangkap di perairan umum, meliputi kegiatan perikanan tangkap di perairan Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan

Bayung Lencir, Kecamatan Lais, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Lalan.

2. Kawasan peruntukan perikanan budidaya

Kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi perikanan budidaya air tawar berada di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Lais, Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Sungai Lilin.

3. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan.

Kawasan pengembangan sarana dan prasarana perikanan berada di Kecamatan Lais, Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Sungai Lilin.

f) Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan pertambangan batubara, yang berada di wilayah pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi.

g) Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri adalah industri kecil yang berupa industri pangan yang terletak di Kecamatan Babat Toman, Sekayu dan Bayung Lencir. Industri sandang yang terletak di Kecamatan Sanga Desa, Sekayu dan Keluang. Industri kimia dan logam terletak di Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Sungai Lilin.

h) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata meliputi:

1. Danau Ulak Lia/*Ulak Lia Lake*, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu;
2. Danau Konger/*Konger Lake*, Desa Sungai Dua, Kecamatan Sungai Keruh;
3. Pulau Pandak dan Pulau Panjang Kecamatan Sanga Desa;
4. Sungai Kubu /*Kubu River*, Desa Karang Agung, Kecamatan Lalan;
5. Agro Wisata Perkebunan Gambir/*Gambir Estate*, Desa Toman Kecamatan Babat Toman;
6. Tambang Minyak Tradisional, Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman;
7. Tambang Minyak Modern Desa Bonot Kecamatan Lais;
8. Kebudayaan Suku Anak Dalam Kecamatan Bayung Lencir;
9. Goa Jepang Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa;
10. Candi Sereka Desa Sereka Kecamatan Babat Toman.

i) Kawasan Peruntukan Perdangangan dan jasa serta pusat pemerintahan

Kawasan Peruntukan Perdangangan dan jasa serta pusat pemerintahan meliputi :

1. Kecamatan Sekayu
2. Kecamatan Sungai Lilin
3. Kecamatan Bayung Lencir
4. Kecamatan Babat Toman

j) Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan Peruntukan Permukiman, meliputi :

1. Permukiman Perkotaan

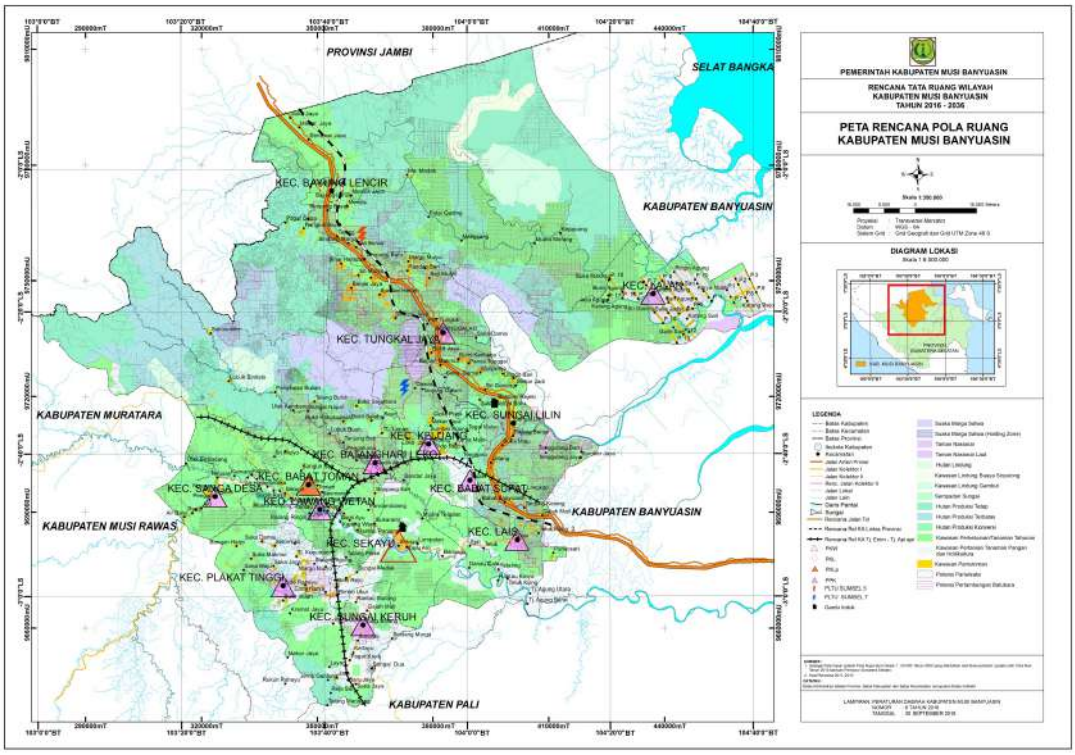
Permukiman perkotaan sebagaimana seluas kurang lebih 22.517 (dua puluh dua ribu lima ratus tujuh belas) hektar dikembangkan di kawasan perkotaan Sekayu, kawasan perkotaan Sungai Lilin, kawasan perkotaan Bayung Lencir dan kawasan perkotaan Babat Toman.

2. Permukiman Perdesaan

Permukiman perdesaan di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 13.542 (tiga belas ribu lima ratus empat puluh dua) hektar terletak di:

- Kecamatan Sekayu;
- Kecamatan Babat Toman;
- Kecamatan Batanghari Leko;
- Kecamatan Sanga Desa;
- Kecamatan Sungai Keruh;
- Kecamatan Lais;
- Kecamatan Sungai Lilin;
- Kecamatan Keluang;
- Kecamatan Bayung Lencir;
- Kecamatan Plakat Tinggi;
- Kecamatan Lalan;
- Kecamatan Lawang Wetan;
- Kecamatan Tungkal Jaya; dan
- Kecamatan Babat Supat.

Gambar 2.5
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Musi Banyuasin



Sumber: RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 – 2036

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa bencana adalah peristiwa

atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Lebih lanjut klasifikasi bencana meliputi:

1. Bencana Alam, terdiri dari (A) Bencana Geologi; (B) Bencana Vulkanologi; (C) Bencana Hidrometeorologi; (D) Karhutla;
2. Bencana Non Alam, terdiri dari (A) Gagal Teknologi; (B) Epidemi; (C) Wabah Penyakit; (D) Gagal Modernisasi;
3. Bencana Sosial, terdiri dari (A) Konflik Sosial; (B) Teror.

Adapun potensi bencana di Kabupaten Musi Banyuasin disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Jenis, Jumlah Kejadian dan Realisasi Bencana
di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

Jenis Bencana	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Banjir	10	11	6	24	16
Banjir jalan	-	1	-	-	1
Banjir Bandang	-	-	-	-	1
Banjir dan tanah longsor	-	-	1	-	-
Angin Kencang	-	1	-	-	5
Angin Kencang + Pohon Tumbang	-	-	-	-	2
Tanah Longsor	2	3	2	3	1
Angin Puting Beliung	2	-	-	5	1
Orang Tenggelam	7	3	6	10	3
Ledakan (Kebakaran) tempat Pengeboran Minyak	1	-	-	-	-
Kebakaran Rumah	4	1	-	-	-

Jenis Bencana	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Karhutbunlah	-	70	115	7	2
Pohon Tumbang	-	-	1	-	-
Rumah Roboh	-	-	-	1	-
Orang Hilang	-	-	-	1	1
Pemakaman Covid-19	-	-	-	23	181

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Musi Banyuasin, diolah

Pengelolaan serta perencanaan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin perlu memperhitungkan bencana sebagai salah satu aspek yang mempengaruhinya.

2.1.4. Aspek Demografi

Berdasarkan Data Hasil Sensus Penduduk tahun 2021, jumlah penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021 mencapai sebanyak 644.832 jiwa. Angka ini terus meningkat dari 2020 dengan jumlah penduduk sebanyak 622.206 jiwa, maka Kabupaten Musi Banyuasin memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,31 persen. Dilihat dari jumlah penduduknya, Kabupaten Musi Banyuasin termasuk salah satu kabupaten/kota dengan penduduk terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan.

Bertambahnya penduduk dari tahun ke tahun ternyata tidak diikuti dengan pemerataan penyebaran penduduk. Apabila dilihat dari persebarannya, Kecamatan Sekayu merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Musi Banyuasin yakni sebanyak 93.424 jiwa atau 14,50 persen dari total jumlah penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin. Sedangkan Kecamatan Jirak Jaya merupakan daerah

dengan jumlah penduduk paling sedikit sebanyak 19.664 jiwa atau 3,00 persen.

Kepadatan penduduk Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021 tercatat sebesar 43,91 jiwa/km^2 meningkat dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebesar 43,61 jiwa/km^2. Dengan luas wilayah sebesar 14.686,96 km^2, maka setiap 1 km^2 rata-rata ditempati penduduk sebanyak 43 orang pada tahun 2021. Sebaran kepadatan penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan bahwa Kecamatan Sungai Lilin dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 170,02 jiwa/km^2, diikuti oleh Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Lawang Wetan dengan masing-masing kepadatan penduduk sebesar 133,16 jiwa/km^2 dan 116,51 jiwa/km^2. Sementara kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Batang Hari Leko (10,48 jiwa/km^2), Kecamatan Bayung Lencir (16,21 jiwa/km^2), dan Kecamatan Babat Toman (29,02 jiwa/km^2).

Tabel 2.4
Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021

No.	Kecamatan	Luas (Km^2)	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km^2)
1.	Sanga Desa	317,00	19	34.709	2,53	109,49
2.	Babat Toman	1.291,00	14	37.468	2,61	29,02
3.	Batang Hari Leko	2.107,79	16	22.085	2,69	10,48
4.	Plakat Tinggi	247,00	15	27.712	2,18	112,19
5.	Lawang Wetan	232,00	15	27.031	2,34	116,51
6.	Sungai Keruh	330,12	11	24.489	2,59	38,93

No.	Kecamatan	Luas (Km²)	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)
7.	Jirak Jaya	298,88	12	19.664	2,57	46,71
8.	Sekayu	701,60	14	93.424	2,16	133,16
9.	Lais	755,53	16	54.853	2,01	72,60
10.	Sungai Lilin	374,26	15	63.631	2,02	170,02
11.	Keluang	400,57	14	33.857	2,02	84,52
12.	Babat Supat	511,02	16	36.112	2,12	70,67
13.	Bayung Lencir	4.847,00	23	78.567	2,74	16,21
14.	Lalan	1.031,00	27	40.232	2,26	39,02
15.	Tungkal Jaya	821,19	16	50.998	2,30	62,10
J u m l a h		**14.265,96**	**243**	**644.832**	**2,31**	**43,91**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diolah

Tabel 2.5
Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021

No	Kecamatan	Jenis Kelamin (jiwa)		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Sekayu	47.343	46.081	93,424	103.00
2.	Lais	28.146	26.707	54,853	105.00
3.	Sungai Keruh	12.560	11.929	24,489	105.00
4.	Batang Hari Leko	11.587	10.498	22,085	110.00
5.	Sanga Desa	17.743	16.966	34,709	104.00
6.	Babat Toman	19.244	18.224	37,468	106.00
7.	Sungai Lilin	32.661	30.970	63,631	105.00
8.	Keluang	17.321	16.536	33,857	105.00
9.	Bayung Lencir	41.460	37.107	78,567	112.00
10.	Plakat Tinggi	14.085	13.627	27,712	103.00
11.	Lalan	21.175	19.057	40,232	111.00
12.	Tungkal Jaya	26.613	24.385	50,998	109.00
13.	Lawang Wetan	13.821	13.210	27,031	104.00
14.	Babat Supat	18.373	17.739	36,112	104.00
15.	Jirak Jaya	10.211	9.453	19,664	108.00
J u m l a h		**332.343**	**312,489**	**644.832**	**106.00**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diolah

Sementara itu, rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021 sebesar 106,00 persen, yang artinya terdapat 106 orang laki-laki untuk setiap 100 orang perempuan di Kabupaten Musi Banyuasin. Angka ini menunjukkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dimana persentase penduduk laki-laki sebesar 51,52 persen, sedikit lebih banyak dibanding persentase penduduk perempuan sekitar 48,48 persen. Dari Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 menunjukkan rasio jenis kelamin di level kecamatan secara umum selaras dengan level Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan.

2.1.5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan Masyarakat menjadi salah satu prioritas untuk menangani berbagai isu yang berkembang tentang tingkat kesejahteraan masyarakat terutama kemajuan dibidang ekonomi.

2.1.5.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

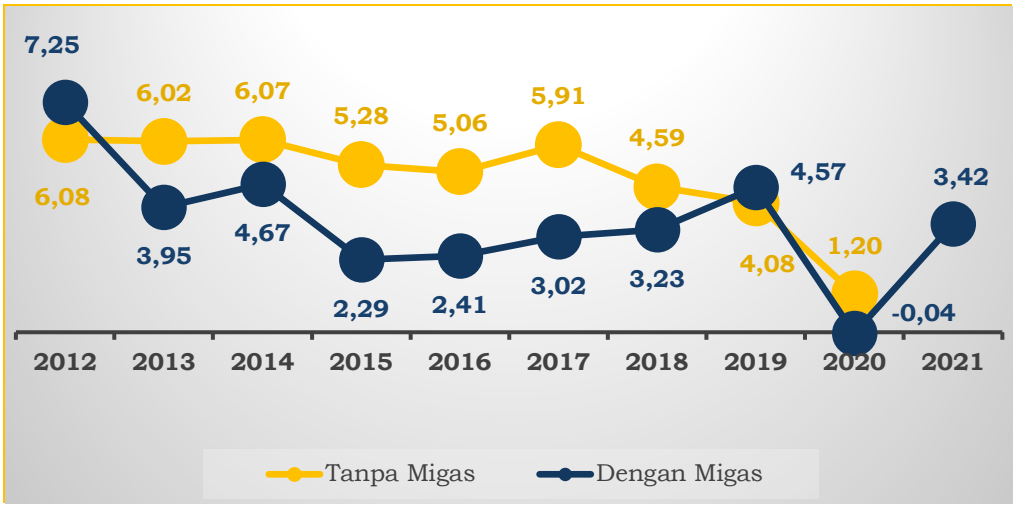
2.1.5.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah pada periode tertentu. PDRB Kabupaten Musi Banyuasin dengan migas Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2017 sebesar 56.020,03 milyar rupiah, tahun 2018 sebesar 60.861,46 milyar rupiah, tahun 2019 sebesar 66.089,04 milyar rupiah,

tahun 2020 sebesar 65.943,88 milyar rupiah dan tahun 2021 sebesar 72.640,74 milyar rupiah. Sedangkan PDRB Kabupaten Musi Banyuasin dengan migas Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010 yaitu tahun 2017 sebesar 41.341,25 milyar rupiah, tahun 2018 sebesar 42.670,21 milyar rupiah, tahun 2019 sebesar 44.620,40 milyar rupiah, tahun 2020 sebesar 44.604,66 milyar rupiah dan tahun 2021 sebesar 46.128,39 milyar rupiah.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Musi Banyuasin, pertumbuhan ekonomi Musi Banyuasin menunjukkan tren positif setelah sempat mengalami perlambatan pada tahun 2013 dan tahun 2015. Pada Tahun 2019 ekonomi Musi Banyuasin tumbuh sebesar 4,57 persen dan kembali turun hingga negatif pada tahun 2020 sebesar - 0,04 persen dikarenakan dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Musi Banyuasin kembali meningkat sebesar 3,42%.

Gambar 2.6
Tren Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin
Periode 2012-2021 (%)



Sumber : BPS, Muba Dalam Angka, 2022, Diolah

Pertumbuhan terjadi pada 16 (enam belas) lapangan usaha, sedangkan kontraksi terjadi pada 1 (satu) lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 9,35 persen, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,78 persen dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,75 persen. Sektor Pertambangan dan Penggalian yang memiliki peran dominan juga tumbuh 2,70 persen, sedangkan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh sebesar 4,21 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan merupakan satu - satunya Lapangan Usaha yang mengalami kontraksi pada tahun 2021, yaitu sebesar 0,33 persen.

Masing-masing lapangan usaha (sektor) memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan distribusi persentase PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha Tahun 2021, sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 53,67%. Selanjutnya sektor yang memiliki kontribusi terbesar kedua yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 11,69%. Sektor industri pengolahan menempati urutan ketiga dengan kontribusi sebesar 10,69%. Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terkecil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Musi Banyuasin adalah sektor

pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,02%, sektor jasa perusahaan sebesar 0,04%, serta sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 0,05%. Hal yang harus mendapat perhatian khusus bahwa walaupun 2 sektor masih memberikan kontribusi terbesar untuk PDRB, pertumbuhannya mengalami perlambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.6
Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Periode 2017-2021 (%)

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,74	11,70	11,19	12,00	11,69
B	Pertambangan dan Penggalian	54,18	54,87	55,36	52,43	53,67
C	Industri Pengolahan	9,19	9,93	10,17	10,95	10,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,04	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	8,32	8,02	7,79	8,09	7,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,57	4,68	4,81	5,03	4,97
H	Transportasi dan Pergudangan	0,28	0,29	0,30	0,31	0,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,15	0,16	0,18	0,19	0,18
J	Informasi dan Komunikasi	0,23	0,25	0,26	0,31	0,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,99	1,94	1,88	1,95	1,84
L	Real Estate	1,88	1,98	2,06	2,22	2,19
M,N	Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,57	3,35	3,13	3,43	3,32
P	Jasa Pendidikan	1,91	1,85	1,83	1,96	1,91
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,34	0,33	0,34	0,39	0,39
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,54	0,55	0,58	0,63	0,60
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba, diolah
* Angka sementara/Preliminary Figures
** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Tabel 2.7
Produk Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2017-2021 (Miliyar Rupiah)

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.596,46	5.632,86	5.721,21	5.862,32	6.109,33
B	Pertambangan dan Penggalian	24.944,13	25.588,54	26.823,40	26.379,81	27.093,26
C	Industri Pengolahan	2.845,44	3.169,24	3.435,11	3.478,64	3.570,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,94	10,37	10,89	12,31	13,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,81	6,27	6,51	6,96	6,99
F	Konstruksi	2.813,48	2.890,10	3.026,09	3.103,38	3.216,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.281,11	1.333,30	1.393,26	1.388,14	1.495,77
H	Transportasi dan Pergudangan	86,95	95,00	102,75	101,38	101,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	42,87	46,95	52,29	52,13	55,61
J	Informasi dan Komunikasi	88,71	98,76	110,14	125,74	137,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	726,62	746,92	768,24	791,56	813,94
L	Real Estate	621,71	678,66	727,39	761,01	819,92
M,N	Jasa Perusahaan	12,72	13,63	14,80	14,87	14,97
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.195,25	1.235,87	1.248,12	1.299,99	1.380,82
P	Jasa Pendidikan	731,30	767,00	802,22	818,57	872,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	122,11	126,58	134,61	147,57	159,05
R,S,T,U	Jasa lainnya	216,64	230,16	243,37	260,27	267,63
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**41.341,25**	**42.670,21**	**44.620,40**	**44.604,66**	**46.128,39**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba, diolah
* Angka sementara/Preliminary Figures
** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Tabel 2.8
Produk Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2017-2021 (Miliyar Rupiah)

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.137,78	7.119,72	7.371,60	7.911,97	8.493,84
B	Pertambangan dan Penggalian	30.352,65	33.392,11	36.682,99	34.574,36	38.989,39
C	Industri Pengolahan	5.150,33	6.043,90	6.695,83	7.221,34	7.767,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	27,41	28,14	28,39	33,15	36,24
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,12	11,44	12,14	13,26	13,79
F	Konstruksi	4.659,23	4.881,36	5.125,04	5.336,63	5.704,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.560,76	2.846,87	3.175,05	3.318,61	3.613,09
H	Transportasi dan Pergudangan	155,77	178,24	200,56	201,61	201,65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	85,93	99,91	119,31	122,68	131,37
J	Informasi dan Komunikasi	128,72	149,64	174,02	202,29	221,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.115,35	1.182,11	1.238,61	1.284,94	1.335,06
L	Real Estate	1.055,13	1.204,69	1.355,54	1.462,02	1.593,72
M,N	Jasa Perusahaan	20,96	23,98	27,52	28,55	28,87
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.999,14	2.037,72	2.071,30	2.264,15	2.409,79
P	Jasa Pendidikan	1.067,77	1.125,20	1.206,20	1.290,31	1.384,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	191,45	199,92	225,73	259,73	283,13
R,S,T,U	Jasa lainnya	301,55	336,52	379,21	418,28	432,58
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**56.020,03**	**60.861,46**	**66.089,04**	**65.943,88**	**72.640,74**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba, diolah
* Angka sementara/Preliminary Figures
** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Tabel 2.9
Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto (PDRB)
Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Pengeluaran Periode 2017-2021 (%)

Komponen	2017	2018	2019	2020*	2021**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	72,34	72,00	70,37	70,54	66,53
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,81	1,87	1,97	1,87	1,80
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,34	6,35	6,35	6,12	5,98
Pembentukan Modal Tetap Bruto	34,08	32,78	30,07	31,12	28,25
Perubahan Inventori	0,22	-1,00	0,16	-0,89	0,02
Net Ekspor Barang dan Jasa	-14,78	-12,01	-8,93	-8,76	-2,58

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba, diolah

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Berdasarkan **Tabel 2.9** diatas terlihat bahwa selama periode 2017– 2021, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik Kabupaten Musi Banyuasin sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (rata-rata di atas 65 persen). Net ekspor barang dan jasa selalu bernilai negatif yang artinya peranan impor relatif lebih besar dibanding ekspor, karena sekitar 40 s.d. 60 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor, baik luar negeri, luar provinsi maupun luar kabupaten. Di sisi lain, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 30 s.d. 35 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 6 persen yang menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar.

Tabel 2.10
Produk Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran Kabupaten Musi Banyuasin
Periode 2017-2021 (Miliyar Rupiah)

Komponen	2017	2018	2019	2020*	2021**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	40.522,20	43.823,11	46.313,80	46.515,45	48.325,52
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.012,34	1.137,73	1.299,67	1.232,91	1.306,02
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.552,52	2.886,85	4.181,84	4.037,52	4.346,33
Pembentukan Modal Tetap Bruto	19.091,17	19.949,57	19.790,52	20.523,03	20.521,82
Perubahan Inventori	123,20	-606,79	104,53	-587,47	-15,40
Net Ekspor Barang dan Jasa	-8.281,39	-7.308,00	-5.879,36	-5.777,56	-1874,34
PDRB	**56.020,03**	**60.861,46**	**65.811,00**	**65.943,88**	**72.640,74**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba, diolah

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Tabel 2.11
Produk Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Pengeluaran Kabupaten Musi Banyuasin
Periode 2017-2021 (Miliyar Rupiah)

Komponen	2017	2018	2019	2020*	2021**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	26.319,80	27.484,04	28.392,65	27.961,97	28.541,93
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	723,17	783,14	852,34	817,05	834,78
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.755,57	2.802,97	2.937,74	2.803,78	2.922,94
Pembentukan Modal Tetap Bruto	13.701,14	14.091,52	13.84,00	14.258,45	13.833,72
Perubahan Inventori	706,29	-500,77	94,91	-586,19	12,39
Net Ekspor Barang dan Jasa	-2.864,72	-1.990,69	-1.506,24	-650,40	-17,37
PDRB	**41.341,25**	**42.670,21**	**44.620,40**	**44.604,66**	**46.128,39**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba, diolah

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

2.1.5.1.2 PDRB Per Kapita

Pendapatan perkapita atau juga sering disebut PDRB perkapita adalah suatu pendapatan rata-rata dari masyarakat dalam suatu daerah. Pengertian lain, pendapatan perkapita merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk. Dengan begitu, peningkatan pendapatan perkapita diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan.

Indikator berhasil tidaknya pembangunan ekonomi wilayah, dapat dilihat melalui tingginya pendapatan masyarakat. Bahkan tinggi rendahnya pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai indikator penentu kemajuan wilayah. Analisis ini, termasuk indikator terpenting yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil dari pembangunan.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2016-2020) PDRB per kapita Atas Harga Berlaku (ADHB) dengan migas Kabupaten Musi Banyuasin terus menunjukkan tren yang meningkat. Tahun 2016 PDRB per kapita sebesar Rp. 85.017,39 Miliyar lalu meningkat menjadi Rp. 101.488,07 Miliyar pada tahun 2020. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

PDRB per kapita Atas Harga Konstan (ADHK) dengan migas Kabupaten Musi Banyuasin juga menunjukkan tren yang meningkat. Tahun 2016 PDRB per kapita sebesar Rp. 64.647,20 Miliyar lalu meningkat menjadi Rp. 68.057,05 Miliyar pada tahun 2020. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 2.12
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
Dan Atas Dasar Harga Konstan dengan Migas
Periode 2016-2020 (dalam Miliyar rupiah)

PDRB Per Kapita	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
ADHB	85.017,39	88.950,20	95.300,78	102.135,05	101.488,07
ADHK	64.647,20	65.642,82	66.815,75	68.957,08	68.057,05

Sumber : BPS, 2021. Diolah

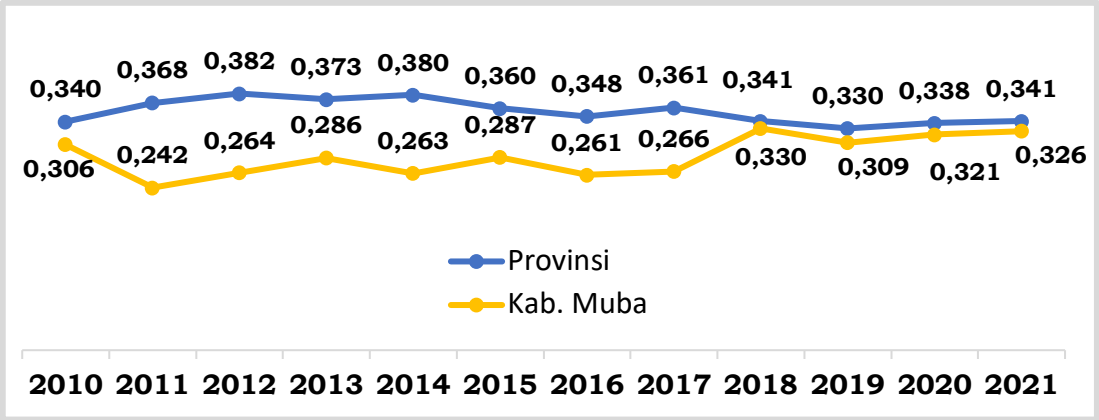
2.1.5.1.3 Indeks Gini

Indeks Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk. Indeks Gini menunjukkan pemerataan yang sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk.

Berdasarkan data BPS, bahwa indeks gini di Kabupaten Musi Banyuasin periode Tahun 2011-2021 cenderung fluktuatif. Secara umum selama periode tersebut ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin cenderung meningkat.

Beberapa penyebab meningkatnya ketimpangan pendapatan di Kabupaten Musi Banyuasin, antara lain distribusi pengeluaran penduduk kaya semakin meningkat dibandingkan penduduk miskin, perbedaan kesempatan dalam memperoleh pekerjaan, pendapatan pekerja informal yang sangat rendah dibandingkan pekerja formal, harga komoditas yang fluktuatif seperti karet dan sawit, perbedaan kesempatan mengakses pendidikan dan kesehatan serta krisis global.

Gambar 2.7
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Musi Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2021



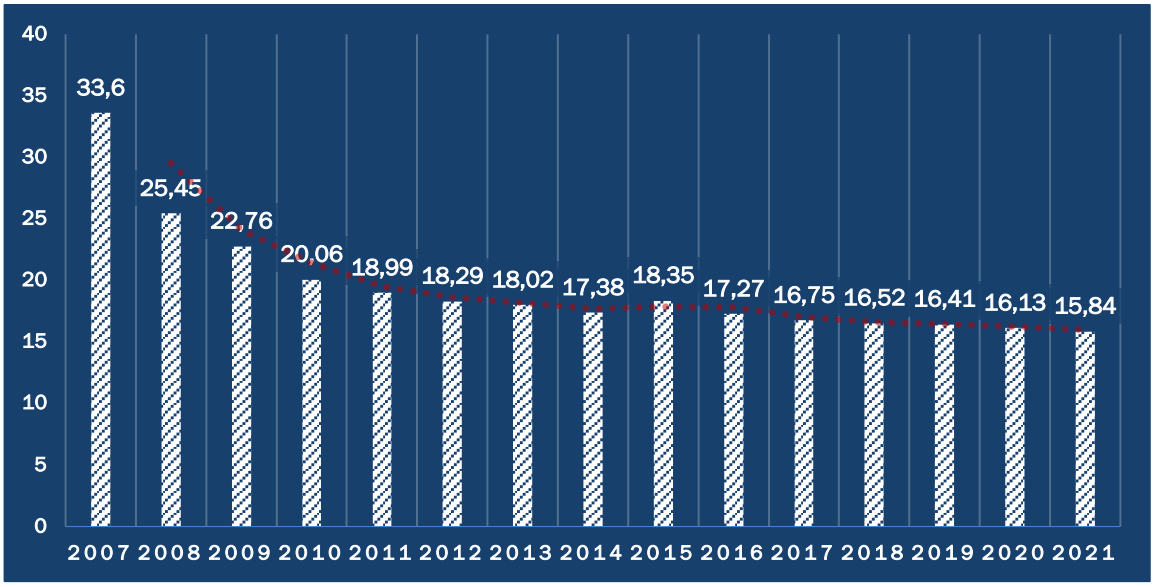
Sumber : BPS, 2022

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan, indeks gini Kabupaten Musi Banyuasin lebih baik atau dengan kata lain bahwa tingkat ketimpangan di Kabupaten Musi Banyuasin lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2021, tingkat ketimpangan Kabupaten Musi Banyuasin adalah 0,326 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 0,321. ketimpangan ini harus terus dikurangi dengan meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.

2.1.5.1.4 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik, dan sosial-psikologis. Permasalahan kemiskinan terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Secara umum, tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2007-2021 terus menunjukkan tren yang menurun, kecuali pada tahun 2015 meningkat menjadi 18,35% dibandingkan tahun 2014 sebesar 17,38%. Tahun 2007 tingkat kemiskinan masih sebesar 33,60% lalu mampu diturunkan menjadi 15,84% pada tahun 2021 atau turun sebesar 17,76%.

Gambar 2.8
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2007 – 2021



Sumber : BPS, 2021.

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan, tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin masih cukup tinggi. Tahun 2017 tingkat kemiskinan Kabupaten Musi

Banyuasin (16,75%) menempati urutan ke-3 tertinggi setelah Kabupaten Muratara (19,49%) dan Kabupaten Lahat (16,81%), sedangkan pada tahun 2018 hingga tahun 2020 menjadi urutan ke-2 tertinggi (16,52%; 16,41%; 16,13%) setelah Kabupaten Muratara (19,12%; 19,12%; 19,47%).

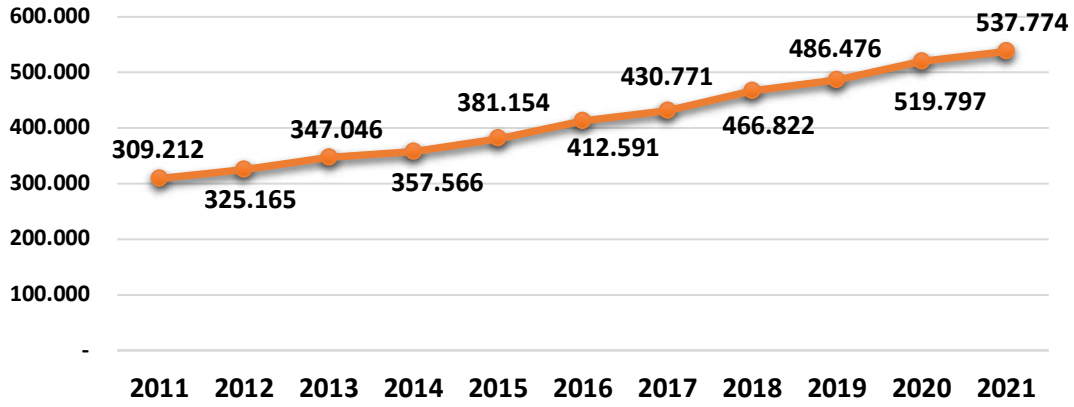
Tabel 2.13
Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2013-2021

No.	Kabupaten/ Kota	Penduduk Miskin (%)								
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Musi Rawas Utara				20	19,49	19,12	19,12	19,47	20,11
2	Lahat	18,61	18,02	18,02	17,11	16,81	16,15	15,92	15,95	16,46
3	**Musi Banyuasin**	**18,02**	**17,38**	**18,35**	**17,27**	**16,75**	**16,52**	**16,41**	**16,13**	**15,84**
4	Ogan Komering Ilir	15,82	15,3	17,08	16,03	15,75	15,28	15,01	14,73	14,68
5	Musi Rawas	17,85	17,28	15,13	14,3	14,24	13,76	13,37	13,5	13,89
6	Ogan Ilir	13,86	13,38	14,43	13,8	13,58	13,19	13,31	13,36	13,82
7	Empat Lawang	13,1	12,89	13,33	12,54	12,44	12,25	12,3	12,63	13,35
8	Lubuk Linggau	14,37	13,9	15,16	13,99	13,12	13,02	12,95	12,71	13,23
9	Pali				14,26	14,53	13,81	13,47	12,62	12,91
10	Ogan Komering Ulu	12,31	11,96	13,22	13,29	12,95	12,61	12,77	12,75	12,62
11	Muara Enim	14,26	13,76	14,54	13,56	13,19	12,56	12,41	12,32	12,32
12	Prabumulih	11,23	10,86	12,12	11,44	11,42	11,39	11,61	11,59	12,2
13	Palembang	13,36	12,93	12,85	12,04	11,4	10,95	10,9	10,89	11,34
14	Oku Selatan	11,57	11,21	11,58	10,95	10,98	10,64	10,53	10,85	11,12
15	Banyuasin	12,28	11,88	12,54	11,72	11,47	11,32	11,32	11,17	10,75
16	Oku Timur	10,28	10,13	11,24	11,29	11	10,57	10,43	10,43	10,6
17	Pagar Alam	9	8,9	9,64	9,19	8,89	8,77	8,9	9,07	9,4

Sumber : BPS, 2021. Diolah

Gambar 2.9

Garis Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2011-2021



Sumber : BPS, 2021.

Tabel 2.14
Garis Kemiskinan berdasarkan Kabupaten/Kota
Tahun 2016-2021

No	Kabupaten/Kota	GK (Rupiah/Kapita/Bulan)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Prabumulih	466.459	493.871	530.748	541.648	569.769	592.209
2	Palembang	456.225	480.735	510.994	521.489	548.563	567.517
3	**Musi Banyuasin**	**412.591**	**430.771**	**466.822**	**486.476**	**519.797**	**537.774**
4	Musi Rawas Utara	401.205	417.805	456.844	470.485	504.598	532.273
5	Lubuk Linggau	417.192	435.956	470.897	477.756	495.213	516.762
6	Musi Rawas	377.135	392.740	427.595	437.854	467.766	493.675
7	Ogan Ilir	367.067	386.740	416.098	433.616	469.746	492.536
8	Lahat	369.359	385.525	419.658	428.309	457.569	485.141
9	Ogan Komering Ulu	365.341	380.254	415.785	428.200	457.452	481.139
10	Banyuasin	337.391	353.914	381.437	397.496	429.816	445.088
11	Pali	330.907	346.448	377.160	388.208	412.236	435.379
12	Muara Enim	316.729	331.554	353.012	367.761	390.342	405.782
13	Ogan Komering Ilir	295.852	310.341	333.505	347.121	375.837	393.239
14	Oku Timur	274.608	285.970	312.340	321.629	343.601	362.446
15	Empat Lawang	269.211	280.350	306.546	315.699	341.007	360.377
16	Oku Selatan	273.594	286.157	310.717	319.333	341.148	359.858
17	Pagar Alam	289.493	299.982	324.025	328.745	342.738	356.287

Sumber : BPS, 2021

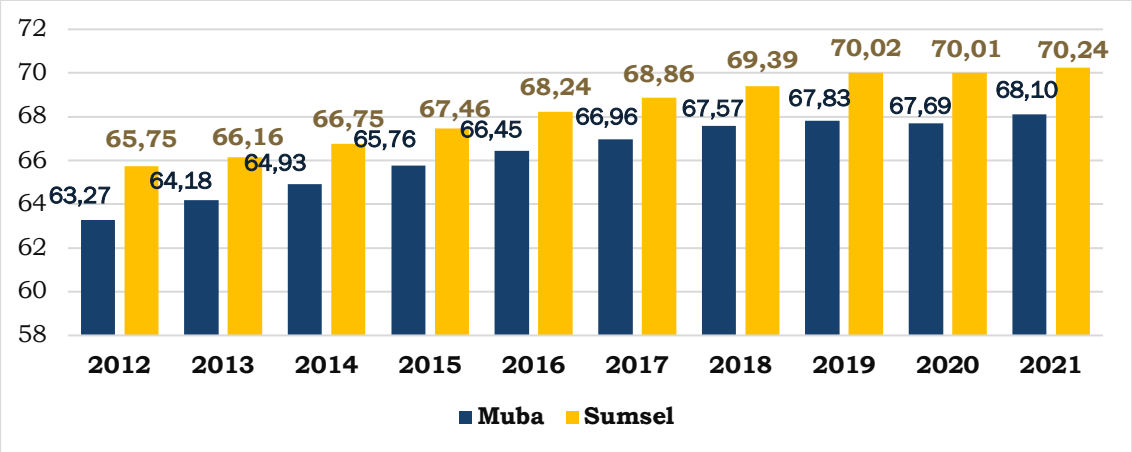
2.1.5.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.5.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara khusus mengukur capaian pembangunan manusia dengan menggunakan 4 (empat) variabel pokok yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita Riil (*adjusted*).

Indeks Pembangunan manusia di Kabupaten Musi Banyuasin terus memperlihatkan perkembangan yang positif . Dalam kurun waktu tahun 2012-2021, tren IPM Kabupaten Musi Banyuasin terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan meningkat sebesar 4,83 poin yang menunjukkan semakin baiknya pembangunan manusia di Kabupaten Musi Banyuasin walaupun masih dibawah rata-rata capaian Provinsi Sumatera Selatan. Untuk tahun 2012 capaian IPM Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 63,27 dan terus meningkat menjadi 68,10 pada tahun 2021.

Gambar 2.10
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Muba dan Sumsel Periode 2012-2021



Sumber : BPS, 2021

Walaupun IPM Musi Banyuasin telah mengalami peningkatan dalam waktu delapan tahun terakhir tetapi apabila dibandingkan dengan 17 kabupaten/kota dalam Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021, Kabupaten Musi Banyuasin masih menempati urutan ke-8 dibawah Kota Palembang (78,72), Kota Lubuk Linggau (74,89), Kota Prabumulih (74,67), Kabupaten OKU (69,60), Kabupaten OKU Timur (69,58), Kabupaten Muara Enim (68,86) dan Kabupaten Pagar Alam (68,68). Hal ini tentunya menjadi kewajiban bersama untuk meningkatkan pembangunan manusia di Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel 2.15
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2021

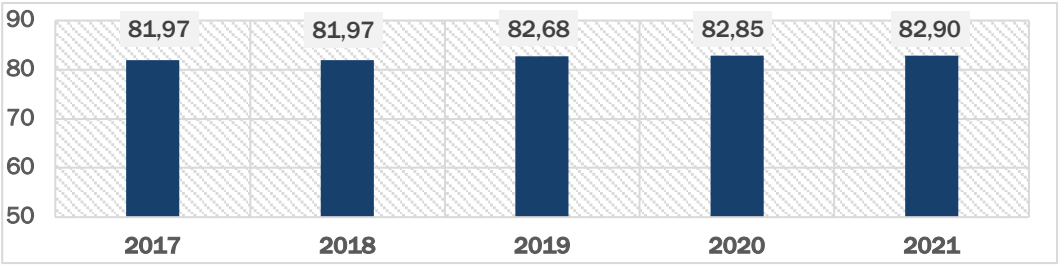
No	Kabupaten/Kota	Capaian IPM		Selisih
		2020	2021	2020-2021
1	Palembang	78,33	78,72	0,39
2	Lubuk Linggau	74,78	74,89	0,11
3	Prabumulih	74,55	74,67	0,12
4	Ogan Komering Ulu	69,32	69,60	0,28
5	Ogan Komering Ulu Timur	69,28	69,58	0,3
6	Muara Enim	68,74	68,86	0,12
7	Pagar Alam	68,31	68,68	0,37
8	**Musi Banyuasin**	**67,69**	**68,10**	**0,41**
9	Lahat	67,44	67,58	0,14
10	Ogan Ilir	67,06	67,17	0,11
11	Ogan Komering Ilir	66,82	67,17	0,35
12	Musi Rawas	66,79	67,01	0,22
13	Banyuasin	66,74	67,13	0,39
14	Ogan Komering Ulu Selatan	65,30	65,34	0,04
15	Empat Lawang	65,25	65,39	0,14
16	PALI	64,70	64,88	0,18
17	Musi Rawas Utara	64,49	64,93	0,44
Sumatera Selatan		**70,01**	**70,24**	**0,23**

Sumber : BPS, 2021

2.1.5.2.2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender tahun 2021 sebesar 99,87% dari target sebesar 83% terealisasi sebesar 82,90%. Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur selisih antara IPM laki-laki dan IPM Perempuan yang bertujuan melihat ketidakadilan gender antara pencapaian laki-laki dan perempuan. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Indikator Variabel Indeks Pembangunan Gender (IPG) yaitu 4 variabel pokok yang menggabungkan 3 aspek di bidang kesehatan (Angka Harapan Hidup), Pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan Rata- rata lama sekolah) dan ekonomi (Pengeluaran perkapita).

Gambar 2.11
Perkembangan IPG Kab.Muba Tahun 2017-2021



Sumber: DPPPA Kab. Muba, 2021

Tabel 2.16
Indikator Variabel Pembentuk IPG

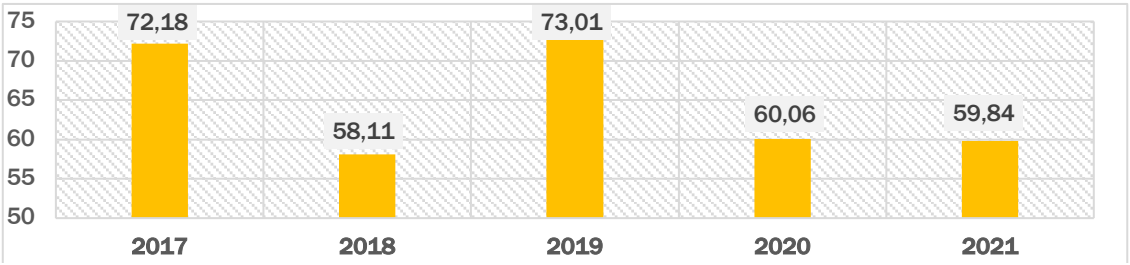
No	Indikator	Tahun 2021	
		Laki- Laki	Perempuan
Indeks Pembangunan Gender (IPG) : 82,90			
1	Angka Harapan Hidup	66,58	70,71
2	Harapan Lama Sekolah	11,99	12,08
3	Rata- rata lama sekolah	7,89	7,34
4	Pengeluaran perkapita	15,8 juta/th	5,2 juta/th

Sumber: DPPPA Kab. Muba, 2021

2.1.5.2.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Capaian indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2021 sebesar 89,98 % dari target sebesar 66,5% terealisasi sebesar 59,84%. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan ukuran keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, meski relatif lambat. Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Adapun variabel pembentuk IDG yaitu Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai Tenaga Profesional dan Sumbangan Pendapatan Perempuan.

Gambar 2.12
Perkembangan IDG Kab.Muba Tahun 2017-2021



Sumber: DPPPA Kab. Muba, 2021

Tabel 2.17
Indikator Variabel Pembentuk IDG

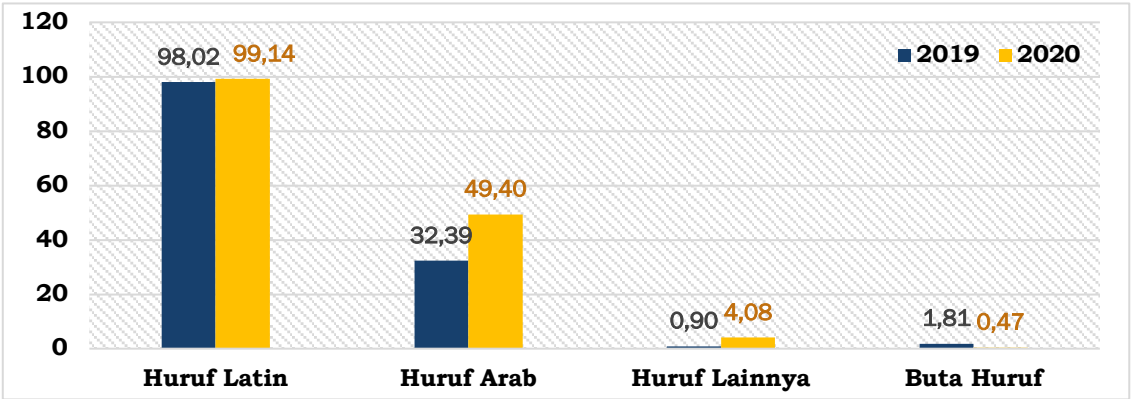
No	Indikator	Tahun 2021
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) : 59,84		
1	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	6,67
2	Perempuan sebagai Tenaga Profesional	47,11
3	Sumbangan Pendapatan Perempuan	35,21

Sumber: DPPPA Kab. Muba, 2021

2.1.5.2.4 Aspek Pendidikan

Dalam rangka menciptakan SDM berkualitas, salah satu faktor penting yaitu meningkatkan derajat pendidikan. Pada tingkat makro, ukuran mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan baca tulis penduduk. Secara minimal penduduk harus mempunyai kemampuan membaca dan menulis agar dapat menerima informasi secara tertulis, dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan dan dapat menikmati hasil- hasil pembangunan secara wajar. Sehingga dapat dikatakan kemampuan baca tulis merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan penduduk untuk hidup sejahtera.

Gambar 2.13
Persentase Kemampuan Membaca dan Menulis Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019-2020



Sumber: BPS Kab. Muba, 2021

Pada tahun 2020 masih terdapat 0,47 persen penduduk Kabupaten Musi Banyuasin usia 15 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis (buta huruf). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019, hal ini mengalami penurunan karena pada tahun 2019 penduduk Musi Banyuasin usia 15 tahun ke atas yang

tidak bisa membaca maupun menulis (buta huruf) adalah sebesar 1,81 persen.

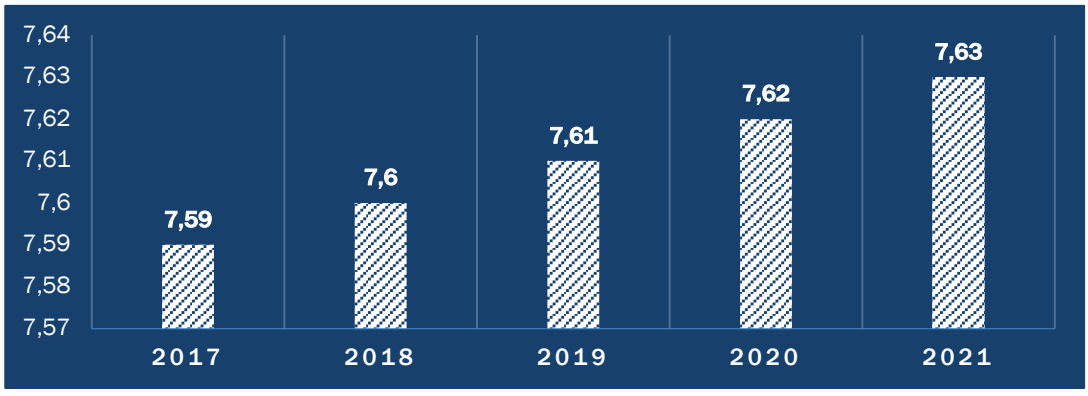
Ukuran lain dari tingkat pendidikan adalah rata-rata lama bersekolah (tahun). Secara umum indikator ini menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai olehpenduduk dewasa (15 tahun ke atas). Semakin lama rata-rata lama bersekolahpenduduk, berarti semakin baik tingkat pendidikan penduduk tersebut.

Pada tahun 2017, rata-rata lama sekolah penduduk di Musi Banyuasin adalah 7,59 tahun. Artinya mayoritas penduduk dewasa di Musi Banyuasin adalah berpendidikan tamat SMP kelas 1 (tingkat VII). Dalam perkembangannya, rata-rata lamanya sekolah tampak mengalami peningkatan hingga tahun 2021, rata-rata lamanya sekolah penduduk usia 15 tahun keatas mencapai 7,63 artinya mayoritas penduduk dewasa di Musi Banyuasin adalah berpendidikan tamat SMP kelas 1 atau kelas 2.

Gambar 2.14

Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas

di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021

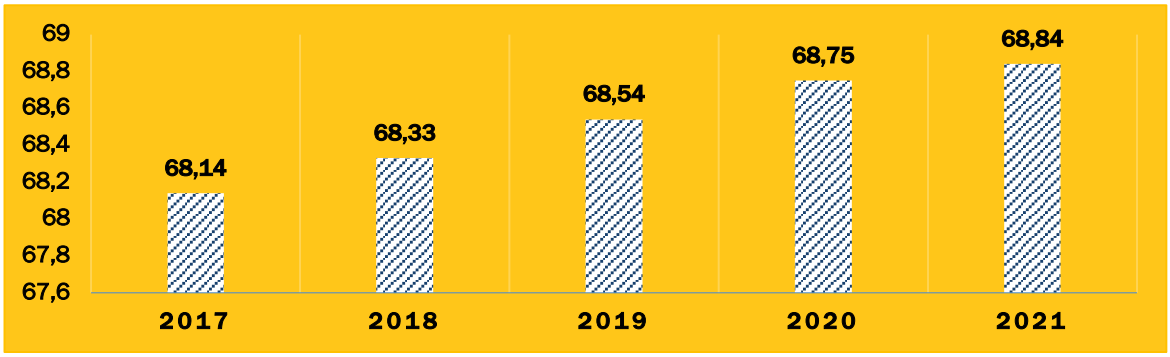


Sumber: BPS Kab. Muba, 2021

2.1.5.2.5 Aspek Kesehatan

Aspek kesehatan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan. Sasaran pembangunan kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan yang makin menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Angka harapan hidup merupakan indikator untuk mengukur tingkat kualitas hidup penduduk. Semakin tinggi angka harapan hidup penduduk suatu wilayah menunjukkan semakin baik tingkat kesehatan penduduk di wilayah tersebut. Usaha peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin, terutama pada tingkat puskesmas dan pustu diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penurunan kematian bayi sehingga akan meningkatkan pula angka harapan hidup penduduk Kabupaten Musi Banyuasin.

Gambar 2.15
Angka Harapan Hidup di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021



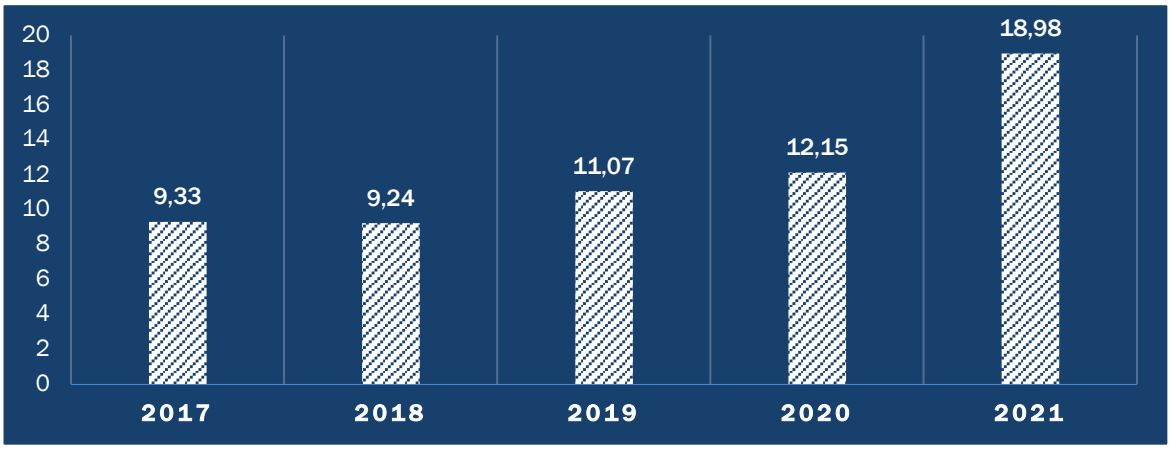
Sumber: BPS Kab. Muba, 2021

Berdasarkan tabel diatas, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021 adalah 68,84 yang artinya rata-rata penduduk Musi Banyuasin akan hidup mencapai umur 68 tahun.

Jika dibandingkan dengan angka harapan hidup periode sebelumnya, terdapat peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini mengindikasikan terjadi peningkatan derajat kesehatan penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin. Status kesehatan penduduk memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk saat waktu tertentu dimana dalam Susenas dicatat selama sebulan sebelum pencacahan. Status kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat produktivitas penduduk. Sebagai contoh pekerja yang tidak mengalami gangguan kesehatan (pekerja sehat) akan dapat bekerja dengan jam kerja lebih lama dan bekerja lebih optimal.

Status kesehatan penduduk secara keseluruhan dapat dilihat dengan menggunakan indikator angka kesakitan dan persentase penduduk dengan keluhan kesehatan. Angka kesakitan adalah adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun aktivitas lainnya. Secara umum, angka kesakitan di Kabupaten Musi Banyuasin selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan. Pada tahun 2017, angka kesakitan yaitu sebesar 9,33 lalu turun hingga 9,24 di tahun 2018, kemudian meningkat di tahun 2019 menjadi 11,07 dan akibat pandemi Covid-19 kembali meningkat hingga mencapai 12,15 di tahun 2020 dan 18,98 di tahun 2021.

Gambar 2.16
Angka Kesakitan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kab. Muba, 2021

2.1.5.2.6 Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan modal bagi geraknya roda pembangunan. Kondisi jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Oleh karena itu data mengenai perkembangan ketenagakerjaan sangatlah penting bagi pemerintah terkait dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Beberapa indikator yang menggambarkan ketenagakerjaan antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antarajumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja

dengan penduduk usia kerja atautenaga kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk yang bukan termasuk Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lain selain kegiatan pribadi. Ukuran ini secara kasar dapat menerangkan kecenderungan tenaga kerja agar aktif bekerja atau mencari kerja yang sifatnya mendatangkan kesempatan berpenghasilan baik berupa uang atau barang. Makin besar angka TPAK mengindikasikan peningkatan kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi. Jumlah penduduk usia kerja, kebutuhan penduduk untuk bekerja, dan berbagai faktor sosial, ekonomi dan demografis merupakan faktor utama yang memengaruhi angka TPAK.

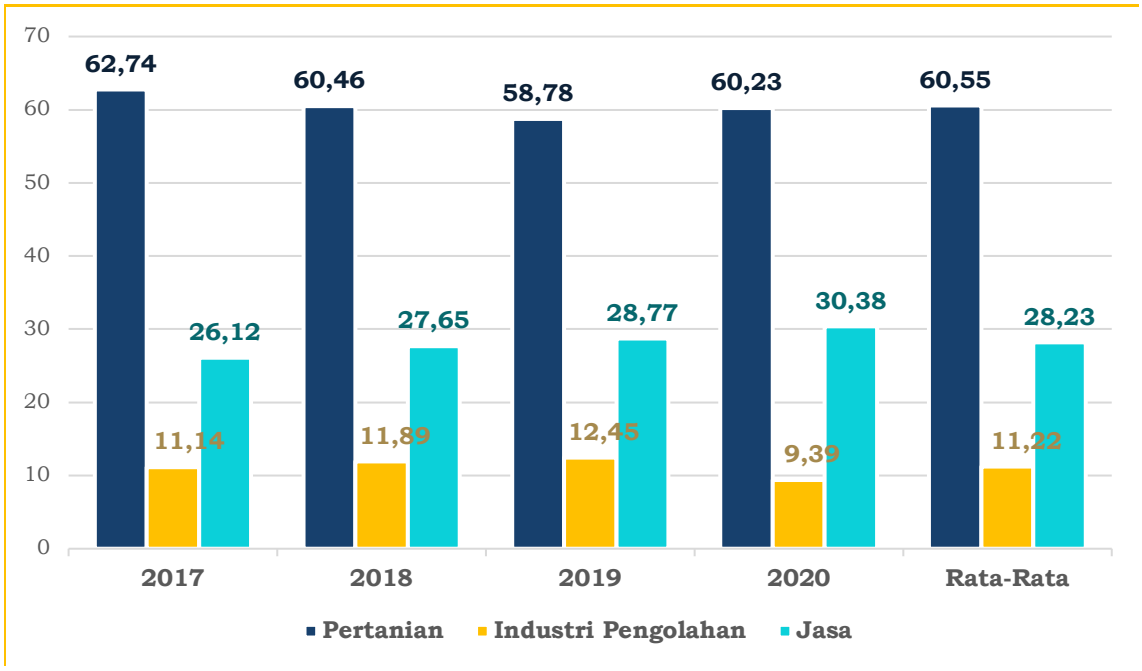
Tabel 2.18
Penduduk Musi Banyuasin Usia 15 Tahun Ke Atas
Menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 2017-2021

Jenis Kegiatan Utama	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Angkatan Kerja	285.123	298.957	303.317	333.864	331.326
Bekerja	269.140	290.745	290.744	317.868	318.096
Menganggur	15.983	8.212	12.573	15.986	13.230
2. Bukan Angkatan Kerja	139.425	143.045	153.811	138.952	147.576
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,64	65,36	66,35	70,61	69,18
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,75	3,29	4,15	4,79	3,99

Sumber: BPS Kab. Muba, 2021

Jumlah angkatan kerja di Musi Banyuasin tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2021 terdapat 331.326 penduduk yang merupakan angkatan kerja, jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 46.203 jiwa dari jumlah angkatan kerja pada tahun 2017. Pada tahun 2021, TPAK Musi Banyuasin sebesar 70,61 persen yang kemudian turun pada tahun 2021 menjadi 69,18. Angka tingkat partisipasi angkatan kerja ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021, 69,18 persen penduduk Kabupaten Musi Banyuasin yang berusia 15 tahun ke atas memutuskan untuk ikut aktif di pasar kerja. Sedangkan 30,82 persen sisanya memutuskan untuk fokus sekolah, mengurus rumah tangga maupun memiliki kegiatan di luar kegiatan ekonomi seperti kaum lanjut usia.

Gambar 2.17
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2020



Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin menurut lapangan usaha utama masih menunjukkan dominasi persentase tenaga kerja di sektor primer disusul sektor tersier dan kemudian sektor sekunder. Salah satu permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin adalah angka pengangguran yang cukup tinggi. Di negara-negara berkembang umumnya tingkat pengangguran yang tinggi utamanya di pedesaan belum dianggap masalah serius, karena masih adanya sektor alternatif (pertanian). Padahal jika dicermati, akibat yang ditimbulkan dari tingginya angka pengangggguran ini sangat kompleks, bahkan bisa mengakibatkan terganggunya stabilitas kamtibmas di suatu daerah.

Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebesar 2,75 persen, lalu terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 yaitu menjadi sebesar 4,79 persen. Dan turun kembali menjadi 3,99 persen pada tahun 2021. Tingkat pengangguran di Musi Banyuasin pada tahun 2021 sebesar 3,99 persen, artinya dari 100 orang angkatan kerja terdapat 3 sampai 4 orang yang menganggur atau dari 331.326 angkatan kerja terdapat 13.230 orang yang menganggur.

2.1.5.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.1.5.3.1 Kebudayaan

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku, dan karya cipta manusia yang dapat menuntun kehidupan manusia agar

lebih bermartabat. Sehingga keberagaman dan keunikan budaya di Kabupaten Musi Banyuasin mendorong kebhinekaan dan ketahanan budaya, melalui pelestarian dan pengembangan kearifan lokal. Kondisi layanan kebudayaan tercermin dari tabel data-data berikut ini.

Tabel 2.19
Kegiatan Kebudayaan Kab. Musi Banyuasin Tahun 2020-2021

Kegiatan	Tahun	
	2020	2021
Jumlah Sanggar Seni Budaya Yang Aktif	48 Sanggar	68 Sanggar
Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Yang Aktif	1 Festival	1 Festival
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	1 Lokasi	2 Lokasi
Persentasi Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	29%	33%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Muba, 2021

Berdasarkan data tabel diatas, menunjukkan hasil yang statis yang menunjukkan bahwa ketahanan budaya dalam melestarikan dan melindungi aset budaya di Kabupaten Musi Banyuasin belum optimal. Hanya 33 persen situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun di Kabupaten Musi Banyuasin diselenggarakan festival seni budaya yang aktif setiap tahunnya, yakni Festival Randik yang merupakan ajang kesenian antar kecamatan dalam upaya pelestarian seni budaya di Kabupaten Musi Banyuasin.

2.1.5.3.2 Olahraga

Pembangunan kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia seutuhnya. Hal ini dapat dilakukan diantaranya melalui pembinaan

kepemudaan terhadap lembaga/organisasi kepemudaan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kepedulian dan partisipasi pemuda dengan peningkatan peran serta aktif dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dilaksanakan melalui fasilitasi kader kewirausahaan yaitu pelatihan, pembimbingan, pendampingan, dan akses permodalan.

Tabel 2.20
Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2020-2021

Kegiatan	Tahun	
	2020	2021
Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif	35 organisasi	35 organisasi
Jumlah Organisasi Olahraga Yang Aktif	43 organisasi	45 organisasi
Jumlah Kegiatan Kepemudaan Sesuai Kalender Kegiatan	5 kegiatan	8 kegiatan
Jumlah Kegiatan Olahraga Sesuai Kalender Kegiatan	10 kegiatan	30 kegiatan
Persentase Penghargaan yang dicapai oleh Generasi Muda minimal di Tingkat Provinsi terhadap Generasi Muda yang dibina	16,49	91,48

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata Kab. Muba, 2021

Jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2020-2021 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 35 organisasi. Sedangkan organisasi olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020 – 2021 meningkat yaitu sebanyak 43 organisasi menjadi 45 organisasi. Jumlah Kegiatan Kepemudaan Sesuai Kalender Kegiatan di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami penambahan sebanyak 3 kegiatan dari tahun 2020 ke 2021. Untuk kegiatan olahraga, jumlah Kegiatan Olahraga Sesuai Kalender Kegiatan di Kabupaten Musi Banyuasin juga mengalami penambahan sebanyak 20 kegiatan dari tahun 2020 ke 2021.

2.1.6 Standar Pelayanan Minimal

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.Oleh karena itu, baik dalam perencanaanmaupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Berikut merupakan Capaian SPM Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020.

Tabel 2.21
Capaian Standar Pelayaan Minimal Kab. Musi Banyuasin Tahun 2020

NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN
1	Pendidikan	A. Pendidikan Anak Usia Dini	36,17%
		B. Pendidikan Dasar	88,18%
		C. Pendidikan Kesetaraan	55,51%

NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN
2	Kesehatan	A. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	96,25%
		B. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	97,50%
		C. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	94,97%
		D. Pelayanan Kesehatan Balita	96,57%
		E. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	96,46%
		F. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	87,83%
		G. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	88,56%
		H. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	94,25%
		I. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	92,99%
		J. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	92,22%
		K. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	97,86%
		L. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	112,16%
3	Pekerjaan Umum	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	85,47%
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	66,30%
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0,00%
		Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	19,73%
5	Trantibum Linmas	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban umum	100,00%
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	118,00%
6	Bencana Daerah	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1,46%
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	0,42%
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100,00%
7	Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100,00%
		Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap & Paska Bencana bagi Korban Bencana Kab/Kota	100,00%

Sumber : SPM Kab. Muba, 2020

2.1.7 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Secara umum terdapat 36 bidang urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, yang dibagi berdasarkan urusan wajib, pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang. Namun tidak semua bidang urusan berhubungan langsung dengan pelayanan umum terhadap publik. Berikut ini urusan wajib yang memberikan kontribusi terbesar dalam mengukur pelayanan terhadap publik.

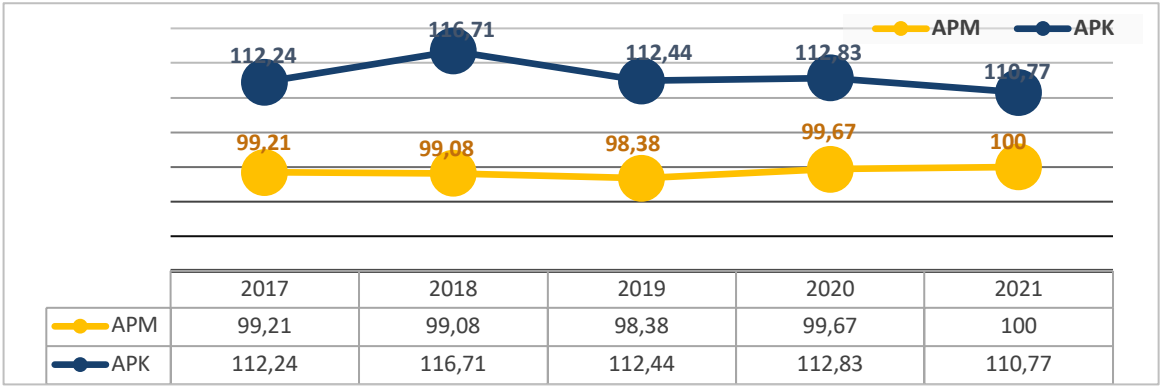
2.1.7.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.1.7.1.1 Urusan Pendidikan

Dalam Pembukaan UUD 1945, Salah satu tujuan berbangsa dan bernegara adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang itu hanya bisa dicapai melalui Pendidikan. Sehingga Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah, Pendidikan merupakan salah satu gerbang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan membuka peluang individu maupun masyarakat untuk mengembangkan diri dan mewujudkannya. Layanan pendidikan dasar yang dilaksanakan meliputi pendidikan dasar dan pendidikan menengah, yang dicerminkan dalam program pemerintah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat pastisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang Pendidikan. Untuk melihat angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK) menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

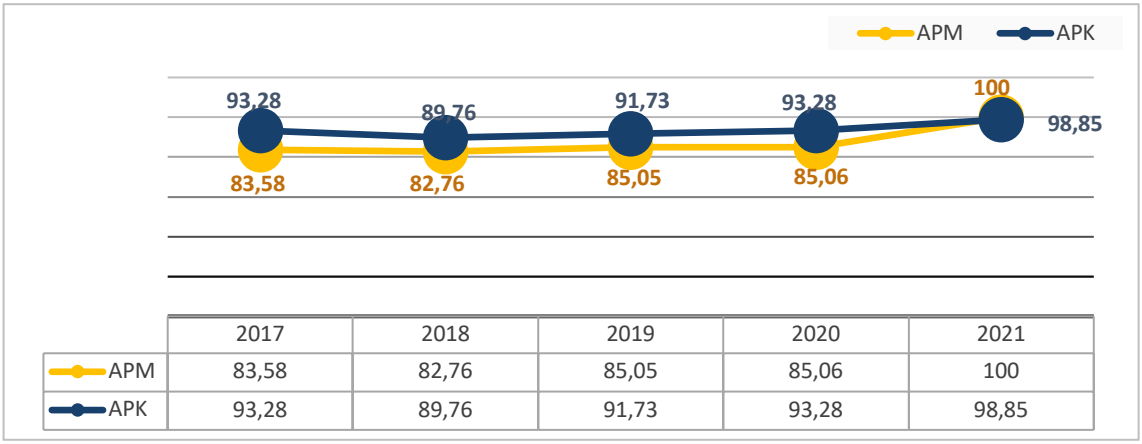
Gambar 2.18
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut Jenjang Pendidikan SD/MI Kab.Muba
Tahun 2017-2021



	2017	2018	2019	2020	2021
APM	99,21	99,08	98,38	99,67	100
APK	112,24	116,71	112,44	112,83	110,77

Sumber : BPS Kab. Muba, 2017-2021

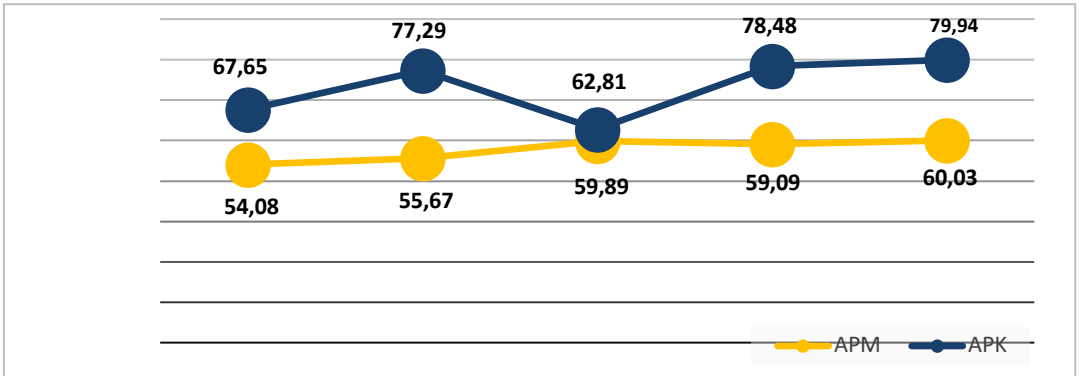
Gambar 2.19
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut Jenjang Pendidikan SMP/MTs Kab.Muba
Tahun 2017-2021



	2017	2018	2019	2020	2021
APM	83,58	82,76	85,05	85,06	100
APK	93,28	89,76	91,73	93,28	98,85

Sumber : BPS Kab. Muba, 2017-2021

Gambar 2.20
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA Kab.Muba
Tahun 2017-2021



	2017	2018	2019	2020	2021
APM	54,08	55,67	59,89	59,09	60,03
APK	67,65	77,29	62,81	78,48	79,94

Sumber : BPS Kab. Muba, 2017-2021

Tabel 2.22
Jumlah Sekolah dan Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan
di Kab. Muba Tahun 2016-2021

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah (unit)						Jumlah Murid (jiwa)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TK/RA	N/A	N/A	196	224	224	248	N/A	N/A	8.632	10.084	10.533	10.004
SD/MI	483	492	500	502	488	481	86.627	91.082	89.764	88.589	89.518	83.443
SLTP/MTs	172	190	191	195	188	162	32.283	33.062	34.220	34.725	34.609	31.228
SMU/SMK/MA	86	99	99	101	100	101	20.808	20.808	25.308	26.848	28.084	27.757

Sumber : BPS Kab. Muba dan Dinas Pendidikan Kab. Muba, 2022

Pada tahun 2021 jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin secara umum jumlahnya cukup memadai dengan TK/RA sebanyak 248 unit, SD/MI sebanyak 481 unit, SLTP/MTs sebanyak 162unit, SMU/SMK/MA sebanyak 101 unit, Poltek Sekayu sebanyak 1 unit dengan 3 program, AKPER sebanyak 1 unit dan Sekolah Tinggi Swasta sebanyak tiga unit dengan lima Program. Sementara

jumlah murid tahun 2021 untuk tingkat TK/RA sebanyak 10.004 orang, SD/MI sebanyak 83.443 orang, SLTP/MTs sebanyak 31.228 orang, dan SMU/SMK/MA sebanyak 27.757 orang.

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan
Kab. Musi Banyuasin Tahun 2017- 2021

No	Indikator	Tahu				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase terlayaninya pendidikan anak usia dini 0-6 tahun	79,58	70,33	72,95	55,38	55,38
2	APK SD	104,31	108,72	108,29	115,72	110,77
3	APK SMP	109,18	109,70	108,30	97,17	98,85
4	APM SD	100	100	100	115,72	100
5	APM SMP	100	100	100	100	100
6	Jumlah Kelompok Belajar Paket C	20	19	18	18	17
7	Jumlah Kelompok belajar non formal	25	24	23	18	17
8	Persentase guru bersertifikasi	75,00	83,62	90,32	91,04	94,50

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Muba, 2021

KESIMPULAN
Permasalahan utama pelayanan Pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin terletak pada kualitasnya. Angka APK dan APM jenjang SD dan SMP menunjukkan capaian tinggi dan cenderung meningkat setiap tahunnya.

2.1.7.1.2 Urusan Kesehatan

Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor dan diantaranya adalah layanan kesehatan. Untuk meningkatkan kesehatan dalam masyarakat diperlukan koordinasi yang seimbang antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pelayanan kesehatan adalah dengan

peningkatan tipe rumah sakit dan mulai beroperasi pada awal tahun 1999.

Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 3 unit yang terletak di Kecamatan Sekayu, Kecamatan Bayung Lencir, dan Kecamatan Sungai Lilin. Adapun jumlah sarana kesehatan lainnya yaitu poliklinik sebanyak 10 unit, puskesmas sebanyak 32 unit, puskesmas pembantu sebanyak 107 unit, dan apotek sebanyak 16 unit. Sedangkan jumlah tenaga medis dan paramedis pada tahun 2020 sebanyak 1.384 orang yang terdiri dari dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, sanitarian dan lainnya.

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan
Kab. Musi Banyuasin Tahun 2017- 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kematian balita (per kasus)	-	-	0/1000	150/1000	3/1000
2	Persentase kasus gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100	100	100	100	100
3	Persentase stunting pada balita	21,4	10,12	9	7,67	2,21
4	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar terakreditasi baik	43	71,4	100	100	100
5	Angka Kematian Ibu	9 Kasus	94/ 100000	86/ 100000	63/ 1000	60/ 1000
6	Angka Kematian Bayi	42 Kasus	3/1000	5/1000	5/1000	2/1000
7	Angka Kematian Balita	N/A	N/A	0/1000	150/1000	3/1000
8	Persentase Penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	42,23	50,81	99,70	95,08	95,08
9	Indeks Keluarga Sehat	0,09	0,09	0,10	0,193	0,27
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	77	82,66	83,19	83,62	95,24
11	Rata-rata indeks kepuasan pelanggan rumah sakit	77	82,66	83,19	83,62	95,24
12	Tipe kelas Rumah sakit rujukan regional JKN wilayah sumsel	Tipe B	Tipe B	Tipe B	Tipe B	Tipe B
13	Predikat penilaian akreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna versi SNARS	Paripurna versi SNARS
14	Persentase Indikator SPM yang mencapai target	-	-	85,71	90,48	81,77*

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Muba, 2021

KESIMPULAN
Untuk mencapai derajat kesehatan yang baik perlu ditunjang oleh kecukupan gizi dan penerapan pola hidup sehat oleh masyarakat, serta kecukupan sarana pelayanan kesehatan dan tenaga medis serta tenaga penunjang medis lainnya. Selain tenaga medis dan penunjang medis di atas, saat ini Kabupaten Musi Banyuasin masih memerlukan tenaga manajemen, terutama di puskesmas.

2.1.7.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Untuk penanganan jalan dan pada jalur horizontal dan vertikal di Kabupaten Musi Banyuasin termasuk menangani jalan-jalan non status pada jalur tersebut. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sedang meningkatkan beberapa ruas jalan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin terus berorientasi pada visi yang ingin dicapai dimana diharapkan kondisi jalan dan jembatan yang mantap, aman dan nyaman di Kabupaten Musi Banyuasin dengan menyelenggarakan program dan kegiatan diseluruh bidang kebina margaan secara berkesinambungan dan berkelanjutan berbasis kinerja. Disamping penanganan jalan Kabupaten, juga telah dilakukan pula peningkatan jalan sebagai pendukung Kawasan Industri, yaitu peningkatan dan rehabilitasi jalan antara desa dalam kecamatan.

Total panjang jalan Kabupaten tahun 2021 sebesar 1.073,77 km dimana berdasarkan jenis permukaannya sebesar 494,97 km adalah jalan diaspal, 224,69 km adalah jalan beton, 305,11 km adalah jalan kerikil dan 49,00 km masih merupakan jalan tanah. Pada tahun 2021 panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 776,21 km dibandingkan dengan panjang seluruh jalan Kabupaten Musi Banyuasin sepanjang

1.073,77 km. Dalam perhitungan pencapaian indikator kinerja utama sudah menggunakan data panjang jalan terbaru, sehingga capaian kinerjanya belum mencapai target.

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pekerjaan Umum diukur dengan indikator kinerja antara lain sebagai berikut.

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum
Kab. Musi Banyuasin Tahun 2016- 2020

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi baik (%)	54,33	49,88	56,72	57,88	72,29
2	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	70,00	78,30	81,23	80	81,26

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

KESIMPULAN
Secara umum kinerja indikator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menunjukkan realisasi yang positif. Ketidaktercapaian target kinerja tahun 2017-2021 yang sebagian besar diakibatkan oleh keterbatasan anggaran dan penurunan kondisi jalan mantap akibat tidak disiplinnya pengguna jalan terutama muatan angkutan yang melebihi tonase jalan. Selanjutnya, karena pembangunan infrastruktur yang memerlukan anggaran tinggi, maka dalam perspektif kedepan penting perlu difikirkan untuk mencari pembiayaan selain APBD, dapat melalui APBN, Kerjasama Pemerintah dan Swasta, PPP atau memanfaatkan dana CSR internasional dalam skema *goverment to goverment* yang sangat mungkin dilakukan.

2.1.7.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dengan semakin meningkatnya urbanisasi dan jumlah penduduk mengakibatkan jumlah perumahan yang ada terus bertambah. Masalah pokok kawasan perumahan dan permukiman adalah terjadinya penurunan kualitas pelayanan dan pengelolaan prasarana dan sarana.

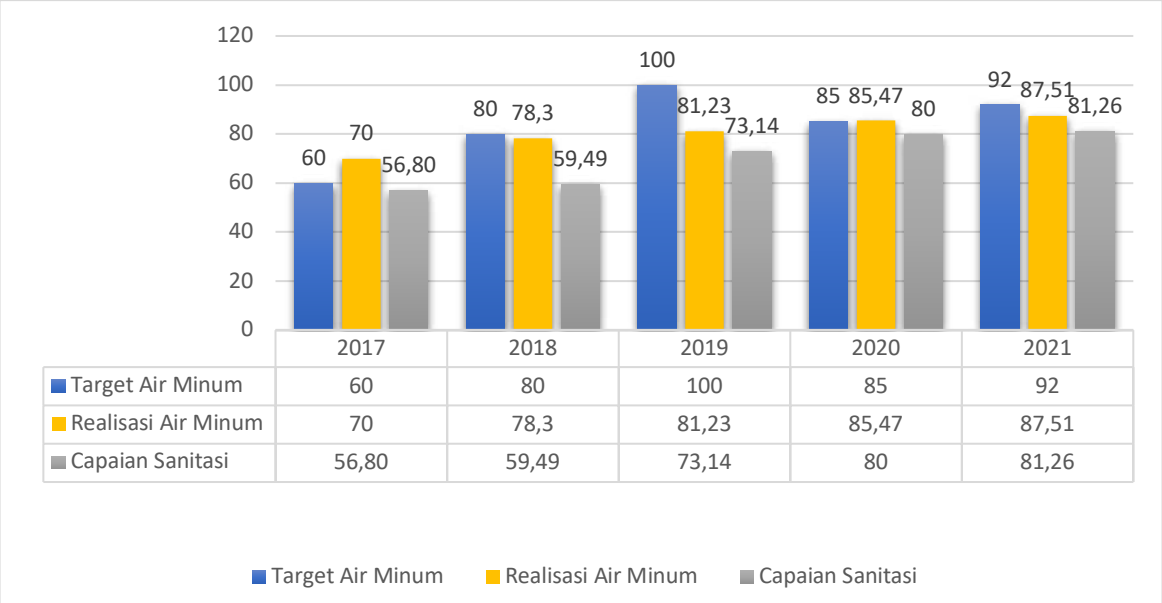
Adanya keterbatasan proporsi penduduk yang menerima manfaat dari fasilitas pelayanan air bersih dan air limbah, khususnya bagi masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah. Sementara perkembangan perumahan dan permukiman semakin bertambah cepat. Disamping itu kenyataan yang ada bahwa perkembangan infrastruktur menurun karena kemampuan keuangan pemerintah dalam pembiayaan fasilitas perkotaan dan fasilitas pelayanan umum. Berbagai upaya peningkatan kualitas perumahan dan kesehatan lingkungan telah dilakukan dalam masalah ini. Salah satu pemecahannya adalah peningkatan akses terhadap lingkungan pemukiman yang tidak memadai, meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan fasilitas, terutama pada penyediaan pelayanan fasilitas listrik, air bersih dan pengelolaan air limbah yang sesuai dengan lingkungan perumahan dan permukiman yang ada.

Capaian indikator kinerja Persentase jumlah KK yang terlayani air bersih tahun 2021 sebesar 95,11% dari target sebesar 92% terealisasi sebesar 87,51%. Angka ini naik sebesar 2,04% dibandingkan tahun 2020 dimana realisasi jumlah KK yang terlayani Air Bersih sebesar 85,54%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 100%, maka jumlah KK yang terlayani air bersih di Kabupaten Musi Banyuasin masih terus diupayakan secara masif agar jumlah KK yang terlayani air bersih dapat naik secara signifikan.

Capaian indikator kinerja jumlah KK yang terlayani air bersih ini didukung oleh peningkatan dan program pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan air limbah setiap tahun melakukan penambahan sarana prasarana distribusi air bersih di wilayah kecamatan serta terus meningkatkan kualitas air bersih yang dipasok kepada masyakat. Disamping pemenuhan kebutuhan air bersih yang dilakukan melalui PDAM Tirta Randik Sekayu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga membangun sumur – sumur bor terutama untuk wilayah perdesaan yang sulit dan sangat jauh dari jangkauan layanan air bersih PDAM serta melakukan pembangunan sarana prasarana PAMSIMAS baik melalui Program PAMSIMAS APBD maupun Program HID (Hibah Insentif Desa) untuk Desa PAMSIMAS berkinerja baik yang menggunakan dana APBN. Upaya ini dilakukan tidak lain untuk meningkatkan kinerja dan memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat secara merata hingga ke wilayah perdesaan.

Gambar 2.21
Presentase Penduduk Berakses Air Minum dan Capaian Akses Sanitasi



	2017	2018	2019	2020	2021
Target Air Minum	60	80	100	85	92
Realisasi Air Minum	70	78,3	81,23	85,47	87,51
Capaian Sanitasi	56,80	59,49	73,14	80	81,26

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Muba

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017- 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	63,46	65,47	59,91	67,93	87,51
2.	Rumah tangga bersanitasi (%)	57,65	58,75	73,14	83,83	81,26
3.	Rumah layak huni (%)	84	84,32	84,39	84,45	84,37
4.	Rumah tangga pengguna listrik	95,78	98,3	98,9	98,55	98,55

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

KESIMPULAN

Secara umum kinerja indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selama tahun 2017-2021 menunjukkan realisasi yang positif. Selanjutnya, karena urusan perumahan dan kawasan permukiman terkait dengan infrastruktur yang cenderung memerlukan anggaran tinggi, maka untuk percepatan penyelesaian permasalahan, dalam perspektif kedepan penting perlu difikirkan mencari pembiayaan selain APBD, dapat melalui APBN, Kerjasama Pemerintah dan Swasta, PPP atau memanfaatkan dana CSR internasional dalam skema *goverment to goverment* yang sangat mungkin dilakukan.

2.1.7.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat di wilayahnya. Pemenuhan rasa aman akan berdampak positif pada proses pembangunan di berbagai sektor. Rasa aman yang dibutuhkan masyarakat adalah rasa aman dari segala bentuk kerawanan dan masalah sosial berupa berbagai penyakit sosial serta rasa aman dari adanya bencana alam.

Kerjasama harmonis dari Satpol PP, Kesbangpol dan Linmas, Kepolisian dan PD terkait senantiasa digalang dalam rangka meminimalisir terjadinya berbagai penyakit masyarakat.

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kab. Musi Banyuasin 2016- 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penegakkan Perda	100	100	100	100	100
2.	Tingkat Penyelesaian konflik sosial masyarakat (%)	60	100	100	100	100
3.	Persentase/angka keikutsertaan penduduk dalam pemilu dan pemilukada di Kabupaten Musi Banyuasin (%)	-	60,12	63,67	82	75
4.	Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah sesuai kalender kerja	-	12	4	1	1
5.	Angka Penurunan Kasus Konflik Sosial	-	52,85	100	100	100
6.	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	-	12	4	1	1

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Musi Banyuasin

KESIMPULAN
Secara umum, kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mencapai realisasi moderat. Keterbatasan anggaran seyogyanya tidak menjadi hambatan dalam menyempurnakan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pentingnya upaya kreatif dan inovatif yang dapat mensiasati hambatan tersebut.

2.1.7.1.6 Urusan Sosial

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial

terhadap masyarakat miskin atau masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui dalam bentuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, Jaminan Sosial dan perlindungan Sosial. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggraan Kesejahteraan Sosial. Adapun capaian kinerja urusan sosial dapat sebagai berikut.

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Urusan Sosial Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2016- 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka PMKS yang mendapat layanan	-	5,49	32	85,54	71,41
2	Persentase penyandang disabilitas yang mendapat layanan	-	14	25	51	65,59
3	Persentase panti sosial yang dibina	100	100	100	75	100
4	Persentase lembaga sosial yang berdaya	100	100	100	100	100
5	Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan hidup PMKS	100	100	100	100	100
6	Persentasi korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kab. Musi Banyuasin, 2021

Pada **Tabel 2.29** berikut ini, disampaikan jumlah panti asuhan dalam binaan Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut:

Tabel 2.29
Daftar Nama Panti Asuhan Binaan Dinas Sosial
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020

NO.	JENIS PELAYANAN PANTI	NAMA PANTI SOSIAL	JUMLAH ANAK ASUH /PENGHUNI
1.	Panti Asuhan Anak	Panti Asuhan At- Taqwa	41 Orang
2.	Panti Asuhan Anak	Panti Asuhan Hari Kurnia	40 Orang
3.	Panti Asuhan Anak	Panti Asuhan Nurul Huda	23 Orang
4.	Panti Asuhan Anak	Panti Asuhan Elnuza	42 Orang

Sumber: Dinas Sosial Kab. Muba

KESIMPULAN

Secara umum seluruh indikator kinerja yang tercantum menunjukkan realisasi yang positif. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan pada tahun 2020 terealisasi 71,41 persen.

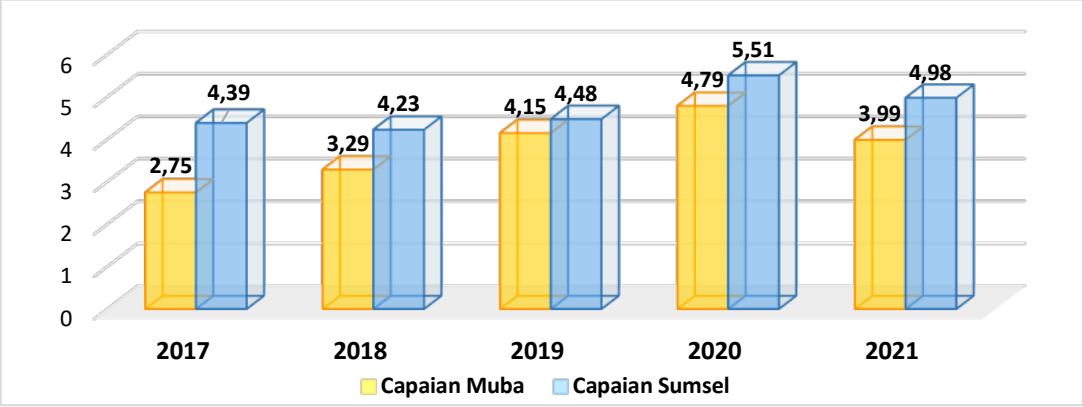
2.1.7.2 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Non-Pelayanan Dasar

2.1.7.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan ketenagakerjaan menjadi salah satu fokus utama pembangunan. Hal ini mengakibatkan pentingnya penyediaan lapangan kerja utamanya untuk generasi muda yang saat ini mendominasi jumlah penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin. Salah satu tantangan terbesar adalah menciptakan lapangan kerja atau usaha yang layak bagi angkatan kerja yang harus diantisipasi dari sejak dini sebelum terjadi peningkatan karena perubahan struktur umur penduduk. Tantangan ini mencakup dua aspek sekaligus yaitu penciptaan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang belum bekerja dan peningkatan produktivitas kerja bagi mereka yang sudah bekerja sehingga dapat memperoleh imbalan kerja yang memadai untuk dapat hidup secara layak (*decent living*).

Capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021 sebesar 3,99%. Capaian Kinerja Indikator Pengangguran terbuka didapat dari perbandingan jumlah pengangguran terbuka Usia Angkatan Kerja sebanyak 13.230 Orang dan jumlah Penduduk Angkatan Kerja sebanyak 331.326 Orang. Untuk kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Musi Banyuasin selama periode tahun 2017-2021 cenderung fluktuatif dengan persentase lebih rendah dari Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2017 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 2,75% dan meningkat di tahun 2018 menjadi 3,29%. Kemudian meningkat kembali di tahun 2019 menjadi 4,15% dan tahun 2020 menjadi 4,79%. Di tahun 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Musi Banyuasin menurun menjadi 3,99%.

Gambar 2.22
Tingkat Pengangguran Terbuka Muba dan Sumsel
Periode 2017-2021 (%)



Sumber : BPS, Statistik Daerah Kab. Muba, 2021

Peningkatan angka pengangguran terbuka tersebut berbanding lurus dengan peningkatan angka pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun yang sama sebagai salah satu dampak dari kondisi pandemi covid-19. Dilihat dari jenis kelamin, jumlah

pengangguran terbuka di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021 sebanyak 13.230 orang yang terdiri dari 7.177 laki-laki dan 6.053 perempuan.

Jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021 sebesar 433 perusahaan dengan pekerja sebanyak 57.116 orang. Usaha-usaha pembinaan terhadap pengrajin akan terus dilanjutkan untuk masa-masa yang akan datang mengingat jumlah dan ragam kegiatan pengrajin cukup banyak di daerah ini yang memerlukan bimbingan dan penyuluhan. Pada **tabel 2.30** dapat dilihat jumlah perusahaan industri menurut tenaga kerja yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin :

Tabel 2.30
Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin 2021

No.	Kecamatan	Perusahaan	Tenaga Kerja
1	Sanga Desa	10	2.141
2	Babat Toman	19	3.676
3	Batanghari Leko	21	2.044
4	Plakat Tinggi	4	816
5	Lawang Wetan	-	-
6	Sungai Keruh	6	1.108
7	Sekayu	73	6.243
8	Lais	84	7.878
9	Sungai Lilin	41	6.192
10	Keluang	3	223
11	Babat Supat	11	1.857
12	Bayung Lencir	132	18.082
13	Lalan	10	3.308
14	Tungkal Jaya	17	3.483
15	Jirak Jaya	2	65
MUSI BANYUASIN		**433**	**57.116**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Muba, 2022

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017- 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio penduduk yang bekerja	94,80	94,99	83,19	67,32	68,92
2	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	29,14	32,32	16,50	38,66	40,89
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,75	3,29	4,15	4,79	3,99
4	Tingkat partisipasi angkatan kerja	67,43	77,03	66,35	70,61	69,18
5	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun	7,3	7,1	6	12,59	11,43

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Musi Banyuasin, 2022

KESIMPULAN

Saat ini tingkat pengangguran di Kabupaten Musi Banyuasin tercatat 3,99%. Kondisi tersebut terbilang cukup tinggi sehingga perlu membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dengan memberikan kemudahan berinvestasi, meningkatkan kewirausahaan, melatih tenaga kerja lokal agar dapat bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah.

2.1.7.2.2.Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender tahun 2021 sebesar 99,87% dari target sebesar 83% terealisasi sebesar 82,90%. Sedangkan untuk Capaian indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2021 sebesar 89,98 % dari target sebesar 66,5% terealisasi sebesar 59,84%.

Meskipun capaian kinerja ini sudah sangat baik, namun perlu ditingkatkan peran perempuan dalam pembangunan. Tidak saja diukur dari jumlah perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan, tetapi perlu didorong organisasi – organisasi perempuan sebagai wadah penyampaian aspirasi para perempuan, serta

meningkatkan kemampuan melalui pendidikan, pelatihan serta kesempatan yang sama dengan kaum laki – laki.

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Musi Banyuasin Tahun 2017- 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PD yang mengimplementasikan PPRG	-	20	30	32	35
2	Rasio KDRT perempuan	0,01	0,076	0,007	0,0041	0,006
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	81,97	81,97	82,68	82,85	82,90
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,18	58,11	73,01	60,06	59,84
5	Penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindakan kekerasan	-	20	27	N/A*	N/A*
6	Persentase kecamatan layak anak	-	26	33.33	40	54,34

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Musi Banyuasin, 2021

** Tahun 2020 Tidak menghitung penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindakan kekerasan Rasio Kekerasan Terhadap Anak : 0,014*

KESIMPULAN

Untuk mencapai keberhasilan pelayanan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Musi Banyuasin sudah dilakukan hal-hal yang relevan dan memiliki capaian yang positif. Namun demikian, saat ini terdapat beberapa elemen-elemen pemberdayaan perempuan dan anak yang belum dapat diukur kinerjanya.

2.1.7.2.3 Urusan Pangan

Dalam urusan pangan, Kabupaten Musi Banyuasin turut serta mendukung program Sumsel Lumbung Pangan.Pembangunan Ketahanan Pangan didasarkan kepada tiga pilar utana yaitu ketersediaan, distribusi dan harga pangan serta konsumsi dan keamanan pangan. Dilihat dari produksi dan kebutuhan konsumsi

masyarakat langsung pangan masyarakat, secara umum Kabupaten Musi Banyuasin sudah dapat memenuhi beberapa kebutuhan pangan sendiri. Data produksi dan konsumsi langsung masyarakat beberapa komoditas pangan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.33
Neraca Ketersediaan Pangan yang diproduksi dan dikonsumsi
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020

NO	Komoditi	2020		
		Produksi (ton)	Konsumsi (ton)	Surplus /minus
1.	Beras	173.843	54.477	106.510
2.	Jagung	44.312	504	160.483
3.	Ubi Kayu	30.675	12.155	7.463
4.	Ubi Jalar	2.108	1.700	1.282
5.	Kedelai	3	2.960	2.123
6.	Gula Pasir	0	3.590	(3.590)
7.	Minyak goreng/ Sawit	0	7.117	(7.117)
8.	Sayuran	72.710	36.654	(27.388)
9.	Buah	24.240	20.279	(7.927)
10.	Daging Sapi, Kerbau, Kambing, Domba dan Babi	1.100	2.204	(1.288)
11.	Daging ayam	3.924	7.872	(3.595)
12.	Telur	502.327	8.313	(4.532)
13.	Susu	0	8.943	(8.943)
14.	Ikan	238.080	30.167	10.122

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2020

Tabel 2.34
Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan
Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2020

No.	*Kelompok Bahan Pangan*	*Energi (Kalori)*	*% AKE*	*Bobot*	*Skor riil*	*Skor PPH*	*Skor Maks*
1.	Padi-padian	3.214	133,90	0,5	67,0	25,0	25,0
2.	Umbi-umbian	241	10,02	0,5	5,0	2,5	2,5

No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks
3.	Pangan Hewani	3.761	156,69	2,0	313,4	24,0	24,0
4.	Minyak dan Lemak	2.850	118,76	0,5	59,4	5,0	5,0
5.	Buah/biji berminyak	8	0,35	0,5	0,2	0,2	1,0
6.	Kacang-kacangan	121	5,05	2,0	10,1	10,0	10,0
7.	Gula	68	2,82	0,5	1,4	1,4	2,5
8.	Sayuran dan buah	176	7,34	5,0	36,7	30,0	30,0
9.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**10.438**	**434,93**		**493,1**	**98,1**	**100,0**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Muba,2021

Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor PPH penduduk Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 sebesar 98,1 melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 88,0 tetapi masih dibawah standar ideal PPH 100, hal ini berarti capaian skor PPH Tahun 2020 sebesar 111,48 %. Skor PPH berhasil mencapai target dikarenakan konsumsi beberapa kelompok bahan pangan yang konsumsi harapan dan perlu ditingkatkan lagi yaitu lagi yaitu dari kelompok Padi-padian, Umbi – umbian, Pangan Hewani, Kacang – kacangan dan kelompok pangan sumber vitamin dan mineral.

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Urusan Pangan Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2016- 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Pangan	-	89,1	96,8	96,9	98,1

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi Pangan (Angka Skor)	-	83,5	85,4	86,9	88,0
3	Ketersediaan bahan pangan (beras) per 1000 penduduk	-	234,21	371,28	209,5	312,2
4	Angka konsumsi rumah tangga per kapita (Rp/orang)	-	200,4	2004,9	2011,6	2059,8
5	Persentase desa mandiri pangan	-	31,36	33,47	15,86	23,45
6	Persentase Pangan Aman di Konsumsi	-	-	85	76,8	84,23
7	Jumlah pangan segar asal tumbuhan PSAT yang aman dikonsumsi	-	-	-	-	-
8	Jumlah lumbung dan sarana prasarana yang dibangun (unit)	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin

KESIMPULAN

Secara umum kondisi ketersediaan pangan di Kabupaten Musi Banyuasin selama periode 2016-2020 telah mencukupi. Mengacu pada data dan informasi kinerja yang telah disampaikan, untuk periode pembangunan jangka menengah selanjutnya, strategi yang dilakukan adalah untuk mempertahankan kinerja ketahanan pangan (ketersediaan stok) dengan tetap berorientasi pada manajemen risiko ketahanan pangan.

2.1.7.2.4 Urusan Pertanahan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pertanahan diukur dengan indikator persentase luas lahan bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara dan penyelesaian izin lokasi. Indikator persentase luas lahan bersertifikat sebanyak 20,16% di tahun 2016, 9,2% di tahun 2017, 9,63% di tahun 2018 dan 9,53% di tahun 2019. Sedangkan untuk indikator penyelesaian kasus tanah negara selama periode 2016-2020 menyelesaikan kasus tanah negara mencapai 50%. Di Kabupaten Msui

Banyuasin, untuk indikator penyelesaian izin lokasi selama 5 tahun terakhir, izin lokasi yang dikeluarkan terselesaikan sebanyak 100%.

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2016- 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	20,6	9,2	9,63	9,53	9,87
2	Penyelesaian kasus tanah negara (%)	50	50	50	50	50
3	Penyelesaian izin lokasi(%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Banyuasin

KESIMPULAN

Secara umum kinerja indikator Urusan Pertanahan selama tahun 2016-2020 menunjukkan realisasi yang positif terutama dalam hal penyelesaian izin lokasi.

2.1.7.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

Kondisi Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan data ada pada Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sesuai dengan Pergub Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2012, sejalan dengan kebijakan tersebut, Kabupaten Musi Banyuasin sebagai dari Provinsi Sumatera Selatan merasa memiliki peran strategis dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan inisiatif ini juga merupakan dukungan terhadap proses Implementasi RAD – GRK Provinsi Sumsel. Bagi Kabupaten Musi Banyuasin, hal ini merupakan proses yang memperkuat proses perencanaan pembangunan yang responsif terhadap perubahan iklim

dan berwawasan keberlanjutan *(sustainabilty),* yang belum semua daerah di Indonesia dapat melaksanakan proses ini.

Tabel 2.37

Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Kab. Musi Banyuasin Tahun 2017- 2021

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	54,56	72,93	73,03	72,78	73,11
2	Persentase Indeks Kualitas Air	%	61,11	87,2	87	55,56	56,45
3	Persentase Indeks Kualitas Udara	%	71,2	87,29	83,02	85,52	89,34

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin, 2022

KESIMPULAN
Secara umum kinerja indikator Urusan Lingkungan Hidup selama tahun 2017-2021 menunjukkan realisasi yang positif. Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam penurunan emisi GRK di Kabupaten Musi Banyuasin.

2.1.7.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Secara umum perkembangan realisasi kinerja urusan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan hasil yang positif. Cakupan penerbitan KTP selama tiga tahun terakhir mencapai lebih dari 90%. Kondisi demikian dikarenakan berkurangnya lama pengurusan KTP yang hingga pada tahun 2021 mencapai 1 hari saja.

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Capil
Kab. Musi Banyuasin Tahun 2016- 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Jumlah Penduduk ber. KTP	%	76,71	97,12	99,91	99,99	99,45
2	Lama Pengurusan KTP	Hari	5	5	1	1	1
3	Nilai SKM	%	70,05	82,45	83,71	83,75	94,11*

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Musi Banyuasin, 2022
** Data tahun 2021 merupakan data sementara (s.d Triwulan III)*

KESIMPULAN

Secara umum kinerja indikator Urusan Kependdukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017-2021 menunjukkan realisasi yang positif. Dalam perspektif kedepan masih perlu melakukan persuasif dan stimulus ke masyarakat agar berinisiatif dalam tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2.1.7.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan Pemerintah Kabupaten terbagi menjadi 4 sub urusan yaitu Penataan Desa; Kerja Sama Desa; Administrasi Pemerintahan Desa; serta Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat desa pada umumnya termasuk dalam kategori ekonomi lemah. Usaha yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun tergolong usaha kecil. Masalah yang sering mereka hadapi persoalan terbatasnya modal.

Diharapkan dari semua fungsi LPM tersebut dapat membantu selaku wadah mitra kerja pemerintah Desa dalam mewujudkan aspirasi masyarakat di bidang pembangunan. Di Kabupaten Musi Banyuasin,

Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) pada tahun 2020 mencapai sebesar 12 Kelompok. Seddangkan Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK pada tahun 2020 mencapai sebesar 10 kelompok.

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kab. Musi Banyuasin Tahun 2016- 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	kelompok	68	68	3	11	12
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	kelompok	76	76	5	15	10

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Musi Banyuasin

KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat melalui LPM di Kabupaten Musi Banyuasin masih perlu ditingkatkan. Diharapkan dari semua fungsi LPM tersebut dapat membantu selaku wadah mitra kerja pemerintah Desa dalam mewujudkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin.

2.1.7.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Musi Banyuasin meningkatkan sasaran Pasangan Usia Subur dan Persentase pemakaian kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate*/ prevalensi peserta KB aktif). CPR mempunyai definisi Angka yang menunjukkan banyaknya Pasangan Usia Subur yang sedang memakai alat kontrasepsi pada saat pencacahan. Pada tahun 2021 capaian dari indikator ini sebesar

84,96%. Memang terlihat ada penurunan dibanding selama periode tahun 2017-2021. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah pasangan yang memasuki fase menopause dan mengalami kehamilan.

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kab. Musi Banyuasin Tahun 2017- 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Prevalensi peserta KB aktif (CPR)	97,94%	84,25%	82,08%	84,72%	84,96%
2	Rasio petugas KB /desa	0,17%	0,15%	0,14%	0,13%	0,13%
3	Prevalensi peserta KB pria	450	487	454	422	388
4	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,49	2,25	2,01	2,1	2,1
5	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	20,11%	12,11%	11,03%	10,60%	8,75%

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Musi Banyuasin

KESIMPULAN

Secara umum kinerja indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menunjukkan realisasi positif. Namun demikian, perlu meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi modern, meminimalkan peserta KB yang putus pakai, menurunkan *unmeetneed*, yang semuanya bermuara pada penurunan *total fertility rate*.

2.1.7.2.9 Urusan Perhubungan

Sarana pengangkutan massa atau sarana transportasi merupakan salah satu satu sarana yang penting untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, baik dari daerah ke kota maupun sebaliknya. Dari data yang ada dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, terdapat 5 jenis angkutan darat yang tercatat yaitu Bus Tak Umum dengan jumlah 5 unit, Mobil Penumpang Otolet Tak Umum 1.774 unit, Truk Tak Umum 116 unit, Pick Up Tak Umum 443 unit dan Sepeda Motor 8.524 unit.

Tabel 2.41
Jumlah Kendaraan Angkutan Darat Menurut Jenisnya
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 - 2020

JENIS KENDARAAN	JUMLAH		
	2018	2019	2020
Bus Umum/Otobus	97	3.650	-
Bus Tak Umum	105	92	5
Mobil Penumpang	208	-	-
Mobil Penumpang Otolet Tak Umum	10.316	-	1.774
Truk Umum	465	520	-
Truk Tak Umum	2.394	1.745	116
Pick Up Umum	41	900	-
Pick Up Tak Umum	4.429	2.017	443
Sepeda Motor	217.149	12.304	8.524
Lainnya	20	-	16
JUMLAH	**4.327**	**21.228**	**10.878**

Sumber: Musi Banyuasin Dalam Angka 2020

Selain transportasi darat, di Kabupaten Musi Banyuasin juga mempergunakan transportasi air. Sarana transportasi air ini sangat penting karena dapat menjangkau daerah-daerah terpencil yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan darat dikarenakan topografi Kabupaten Musi Banyuasin yang sulit dan keterbatasan jumlah sarana jalan darat.

Sungai yang sebagian besar dipergunakan untuk transportasi adalah Sungai Musi, Sungai Batanghari Leko, Sungai Lalan, Sungai Dawas dan Sungai Supat. Jenis alat transportasi yang dipergunakan untuk transportasi sungai ini adalah kapal motor dengan berbagai kapasitas angkut dan daya mesin. Jumlah dermaga sungai yang terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin sejumlah empat lokasi yaitu

dermaga sekayu, UPLLASD Karang Agung/Lalan, UPLLASD Sungai Lilin/Muara Tobo dan UPLLASD Kepayang.

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2018	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Sarana dan Prasarana Transportasi Darat, Laut, Udara dan Kereta Api	51	52	52	52	52
2.	Persentase Fasilitas LLAJ yang direhap	30%	30%	35%	38%	43%
3.	Jumlah Rute Pelayanan	1	1	1	1	1
4.	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	3,3	4,2%	3%	3%	31,7%
5.	Persentase transportasi yang nyaman dan layak jalan	71,52%	60,2%	60%	61%	53%
6.	Persentase Prasarana Penunjang Fasilitas Perhubungan	30%	30%	35%	30%	35%
7.	Persentase kecamatan yang terlayani angkutan	30%	30%	33%	30%	33%

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Musi Banyuasin

KESIMPULAN

Menimbang kebutuhan pembangunan sistem transportasi memerlukan anggaran yang besar, maka dalam perspektif kedepan penting perlu difikirkan untuk mencari skema pembiayaan selain APBD, dapat melalui APBN, Kerjasama Pemerintah dan Swasta, PPP atau memanfaatkan dana CSR lokal atau internasional dalam skema goverment to goverment yang sangat mungkin dilakukan

2.1.7.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat pesat saat ini memungkinkan hampir setiap orang untuk mendapatkan informasi dalam waktu sesaat (realtime). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2017, sebanyak 43 media komunikasi publik milik Pemda (website,

media cetak, radio, televisi, media sosial). Pada tahun 2018 media komunikasi publik milik Pemda bertambah menjadi 51 media dan kembali bertambah pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 104 media komunikasi publik milik Pemda Kabupaten Musi Banyuasin.

Adapun cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2017 sebanyak 60% dan meningkat pada tahun 2018 sebanyak 66,15%. Di tahun 2019 dan 2020, cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Musi Banyuasin meningkat sebanyak dua kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 99,5%.

KESIMPULAN

Pelayanan cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Musi Banyuasin perlu terus dioptimalkan. Dalam perspektif kedepan perlu upaya inovatif dan kreatif yang tidak menjadikan permasalahan keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam pengembangan pelayanan.

2.1.7.2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan koperasi di Kabupaten Musi Banyuasin selama tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Sampai dengan tahun 2020, koperasi di Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 343 unit yang terdiri dari 104 unit KUD, 22 unit KPN, 21 unit KOPKAR, dan lainnya berjumlah 196 unit. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa Koperasi belum bisa berperan sebagai lembaga ekonomi yang dapat mensejahterakan anggotanya disebabkan lemahnya manajemen, kurangnya keterkaitan usaha koperasi dengan kepentingan ekonomi anggotanya, kurangnya pemahaman anggota, pengurus, dan

pengawas koperasi tentang perkoperasian dan koperasi belum dikelola secara professional. Sehingga masih diperlukan soialisasi, bimtek, pelatihan dan penerapan manajemen informasi sistem keuangan perkoperasian kepada pengurus, pengawas, pengelola dan anggota koperasi dan kepada keompok-kelompok orang yang akan mendirikan koperasi.

Namun demikian mekanisme sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang telah dilakukan pada periode terdahulu perlu dilakukan telaah dan evaluasi, hal ini untuk mengetahui model *transfer knowledge* seperti apa yang efektif, jangan sampai kegiatan sosialisasi tidak berdampak dalam mewujudkan tujuan. Hakikatnya kegiatan sosialisasi dan *transfer knowledge* harus dapat merubah *mindset* kelompok yang akan mendirikan koperasi dan para penggiat koperasi sehingga bermuara pada perubahan perilaku peningkatan kualitas manajemen koperasi.

Tabel 2.43
Koperasi/KUD dan Non KUD Dalam Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2016-2020

NO.	JENIS	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	KOPERASI / KUD	94	96	98	99	104
2.	NON KUD	198	201	216	226	239
JUMLAH		283	292	314	325	343

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Muba, 2021

KESIMPULAN

Secara umum kinerja urusan Koperasi dan Usaha Mikro binaan menunjukkan arah positif. Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu dioptimalkan melalui transfer knowledge (bintek/sosialisasi/pelatihan,dst)

2.1.7.2.12 Urusan Penanaman Modal

Kebijakan mengundang investor adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, juga agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, khususnya Kabupaten Musi Banyuasin. Capaian kinerja urusan penanaman modal Kab. Musi Banyuasin tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perda yang mendukung iklim perusahaan	4 perda	3 perda	3 perda	3 perda	3 perda
4	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang perizinan	83,84	83,89	82,15	82,22	88,37

Sumber: DPM-PTSP Kab. Musi Banyuasin, 2021

Terkait dengan investasi di Kabupaten Musi Banyuasin, perlu dilakukan pengukuran daya tarik investasi sebagai sebuah acuan dalam meningkatkan kinerja di bidang penanaman modal. Selain mengandalkan investasi di sektor industri, pemerintah daerah dapat mendorong lebih banyak investasi di daerah melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau dikenal juga dengan istilah public private partnership (PPP).

KESIMPULAN

Perlu dilakukan pengukuran daya tarik investasi sebagai sebuah acuan dalam meningkatkan kinerja di bidang penanaman modal. Untuk meningkatkan investasi, pemerintah daerah dapat mendorong lebih banyak investasi di daerah melalui KPBU.

2.1.7.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja urusan olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin cenderung masih diukur dari ketersediaan sarana dan prasarana olahraga, perolehan medali dan prestasi olahraga. Dalam perspektif perencanaan periode selanjutnya, seyogyanya perlu dirumuskan tolak ukur kinerja yang lebih *clear*, terutama dalam mengukur pelayanan olahraga kepada masyarakat. Saat ini beberapa indikator yang telah diutarakan pada tabel di atas tidak memiliki definisi operasional yang jelas dan cara perhitungan yang tepat.

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Pemuda dan Olahraga Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2016- 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	-	40	45	45	46
2.	Persentase Pemuda yang bebas narkoba	-	99,90	99,95	99,94	99,94
3.	Persentase perolehan medali emas dalam kejuaraan resmi tingkat provinsi	-	22,20	19,05	19,88	8,84
4.	Peringkat dalam kejuaran resmi olahraga tingkat provinsi	-	2	2	1	0
5.	Persentase pemuda yang berwirausaha	-	17,00	17,68	21,28	32,81

Sumber: Dispopar Kabupaten Musi Banyuasin, 2021

KESIMPULAN

Dalam perspektif perencanaan periode selanjutnya, perlu dirumuskan tolok ukur kinerja yang lebih *clear*, terutama dalam mengukur pelayanan olahraga kepada masyarakat. Saat ini beberapa indikator tidak memiliki definisi operasional yang jelas dan cara perhitungan yang tepat.

2.1.7.2.14 Urusan Statistik

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa di tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota urusan statistik mencakup penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten/Kota. Adapun Buku Kabupaten dalam Angka selama periode Tahun 2016-2020 selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan. Selain itu Buku PDRB Kabupaten selama tahun 2016-2020 dan Buku Statistik Daerah selalu tersedia. Kedua buku tersebut merupakan sumber data dan informasi sosial ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin yang dapat digunakan sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan.

Tabel 2.46

Capaian Kinerja Urusan Statistik Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2016 - 2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah buku Statistik Daerah	1	1	1	1	1
2	Jumlah Buku PDRB Kabupaten	1	2	2	2	2
3	Jumlah Buku Kabupaten dalam Angka	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Musi Banyuasin, 2021

KESIMPULAN

Perlu mengoptimalkan sistem informasi yang ada saat ini dengan mengintegrasikan dengan system data yang lainnya, sehingga dapat tercipta data yang terpadu, aktual, valid dan akuntabel. Pengumpulan, analisa, pengelolaan dan diseminasi data Statistik harus dilakukan dengan metode dan prinsip-prinsip keilmuan di Bidang Statistik. Perlu

inovasi dan kreatifitas dalam hal ini, sehingga keterbatasan anggaran tidak menjadi hambatan utama dalam peningkatan pelayanan. Forum Satu Data harus diberdayakan dan difungsikan secara optimal, efektif dan efisien sehingga koordinasi, komunikasi dan sinergitas dapat terus dilaksanakan dalam mewujudkan Satu Data Indonesia tingkat Daerah. Diseminasi data statistik harus dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap berpedoman pada prinsip kerahasiaan dan karakterisik data yang akan dipublikasikan.

2.1.7.2.15 Urusan Persandian

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2016- 2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan	7	7	14	18	32,26
2	Rasio jenis informasi yang diamankan dengan persandian	2	2	2	2	100
3	Rasio konten informasi dari setiap jenis informasi yang diamankan dengan persandian	0	4	6	0	97,80

Sumber: Pemerintah Kab. Musi Banyuasin

Urusan Persandian ditujukan untuk pengamanan informasi pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah. Berdasarkan Tabel 2.57 dapat diketahui bahwa rasio perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan pada tahun 2020 hanya 32,26 persen, rasio jenis informasi yang diamankan dengan persandian pada tahun 2020 sebesar 100 persen dan rasio konten informasi dari setiap jenis informasi yang diamankan dengan persandian 97,80 persen.

KESIMPULAN

Penggunaan sandi dalam pengamanan informasi antar perangkat daerah masih terkendala karena keterbatasan perangkat, sumber daya manusia, regulasi dan pembiayaan. Dalam pemenuhan/moratorium sarana/peralatan sandi ketentuannya

harus dari BSSN sehingga sulit bagi daerah untuk memenuhinya, selanjutnya kurangnya SDM sandiman dan kurangnya peralatan sandi sehingga operasional sandi tidak bisa berjalan dengan maksimal.

2.1.7.2.16 Urusan Kebudayaan

Berdasarkan Tabel 2.48 dapat diketahui bahwa sejak tahun 2016 diselenggarakan dua festival seni dan budaya, kemudian di tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 diselenggarakan empat festival seni dan budaya, capaian kinerja tesebut mencapai target setiap tahunnya. Lebih lanjut, setiap tahun target benda dan cagar budaya yang dilestarikan selalu tercapai. Untuk jumlah sanggar seni budya yang aktif sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 setiap tahunnya sebanyak 8 sanggar seni budaya.

Tabel 2.48
Capaian Kinerja Kebudayaan Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sanggar seni budaya yang aktif	8	8	8	8	8
2	Penyelenggaraan festival seni budaya (kali) sesuai kalender budaya	2	4	4	4	4
3	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (buah)	1	1	1	1	1
4	Persentase Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	19,58	20,94	27,54	28,22	29

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Musi Banyuasin

KESIMPULAN

Urusan kebudayaan yang ditempatkan dalam kerangka pariwisata seyogyanya dalam perspektif kedepan perlu diarahkan agar produk dari berbagai unsur kebudayaan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin dapat memiliki nilai tambah ekonomi khususunya bagi para penggiat dan pelestari budaya, umumnya bagi perkembangan pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin. Jika telah terbentuk *linkages* antara kebudayaan dengan produk budaya sehingga menciptakan permintaan pasar untuk menikmati produk budaya, maka kelestarian eksistensi nilai-nilai budaya dengan sendirinya akan menjadi keniscayaan.

2.1.7.2.16 Urusan Perpustakaan

Perpustakaan yang dibina di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 sebanyak 24 binaan, terbilang turun dibandingkan tahun 2018 dan tahun 2019 masing-masing sebanyak 48 binaan. Kinerja pelayanan urusan perpustakaan diukur melalui indikator rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun yang selama periode 2016-2020 memiliki capaian yang fluktuasi dan terendah pada tahun 2020 yakni sebesar 2,65. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang membatasi kunjungan ke perpustakaan. Disamping itu untuk indikator persentase peningkatan bahan pustaka menunjukkan penurunan setiap tahunnya.

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2016- 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase peningkatan bahan pustaka (%)	-	20	23.53	7.67	7,37
2	Rasio jumlah pengunjung perpustakaan (%)	7,95	6,53	10,58	11,60	2,65

Sumber: Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan Kab. Musi Banyuasin

KESIMPULAN

Pelayanan perpustakaan pada era digital saat ini seyogyanya ditunjang oleh teknologi, sehingga dalam perspektif kedepan perlu berfokus pada pengembangan perpustakaan digital, kemudian melakukan updating dan penambahan jumlah koleksi buku.

2.1.7.12.17 Urusan Kearsipan

Berdasarkan UU No. 43 tahun 2009 pasal 4 Kearsipan pemerintah daerah melalui Lembaga Kearsipan Daerah (Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan) dalam melaksanakan penyelenggaran kearsipan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus memperhatikan 14 Asas dalam pengelolaan arsip secara Akuntabilitas. Untuk penyimpanan arsip, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin belum melakukan penyusutan arsip, saat ini perangkat daerah melakukan penyimpanan arsip di tempat masing-masing. Lebih lanjut, indikator persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 masih berada pada angka 100 persen.

Tabel 2.50
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2016- 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan kearsipan secara baku	62,74	100	100	100	100
2	Persentase arsip statis dan in aktif yang terdata dan tertata dengan baik	-	25	40,19	53,84	53,84
3	Persentase layanan arsip yang berbasis teknologi dan informasi	-	-	-	3	3

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Musi Banyuasin

KESIMPULAN

Dalam perspektif kedepan perlu dirumuskan indikator dengan definisi operasional dan rumus yang benar-benar dapat merepresentasikan kinerja pembinaan dan pelayanan urusan kearsipan pada seluruh instansi di Kabupaten Musi Banyuasin.

2.1.7.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

2.1.7.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Potensi sumberdaya perikanan dalam Kabupaten Musi Banyuasin cukup besar baik dari perikanan tangkap maupun dari perikanan

budidaya. Pada periode 2020 jumlah produksi ikan tangkap mencapai 25.101,89 ribu ton dan 23.996,02 ribu ton produksi perikanan budidaya. Pembangunan sektor perikanan di masa yang akan datang diarahkan pada produksi budidaya, sesuai dengan paradigma pembangunan perikanan yang mengarah kepada usaha budidaya ikan dan membatasi eksploitasi penangkapan ikan di alam.

Potensi tambak dalam Kabupaten Musi Banyuasin mencapai 86.740 hektar, yang telah dimanfaatkan sekitar 84 hektar, lahan dataran rendah 337.166 hektar yang sangat cocok untuk kegiatan budidaya perikanan, daerah aliran sungai sekitar 650 km yang dialiri 7 (tujuh) sungai besar (sungai Musi, Batanghari leko, lalan, Bayat, Merang, Dawas, Tungkal) dengan anak sungai mencapai 1.057 buah, 6 (enam) buah danau dengan luas mencapai 329.5 ha yang belum termanfaatkan untuk kegiatan produktif perikanan.

Tabel 2.51
Produksi Ikan (Tangkap dan Budidaya) Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2017 - 2020

Urusan dan Indikator Kinerja	2017		2018		2019		2020	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Produksi Ikan Tangkap (Ribu Ton)	22.413	22.229,60	22.637	23.607,17	22.863	22.863	23.092	25.101,89
Produksi Ikan Budidaya (Ribu Ton)	18.964	19.003,27	20.861	19.276,07	22.947	21.886,25	25.242	23.996,02
Produk Olahan Perikanan (Ribu Ton)	203,89	200,00	207,96	206	212,12	207,72	216,36	207,24

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel

Namun, peningkatan capaian produksi ikan di Kabupaten Musi Banyuasin tersebut tidak diikuti dengan kenaikan pada konsumsi ikan

masyarakat. Konsumsi ikan masyarakat pada tahun 2020 sebesar 40,52 kg/kapita/ tahun terbilang lebih rendah dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 44 kg/kapita/tahun.

Gambar 2.23
Ikan Patin



Tabel 2.52
Konsumsi Ikan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 - 2020

Konsumsi Ikan	2016	2017	2018	2019	2020
(kg/kapita/th)	44	42,63	35,24	40,99	40,52

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa kinerja urusan kelautan dan perikanan menunjukkan hasil tren meningkat. Ketiga indikator menunjukkan pencapaian yang melebihi target serta tren kinerja yang meningkat. Meski demikian, berdasarkan data konsumsi ikan di Kabupaten Musi Banyusin masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas nelayan dan meningkatkan nilai tambah produk-produk perikanan.

2.1.7.3.2 Urusan Pariwisata

Secara umum, sektor pariwisata di Kabupaten Musi Banyuasin terdapat tiga jenis wisata, yaitu wisata alam, wisata budaya dan wisata sejarah. Wisata alam yang tercatat sebagai potensi lokasi wisata yang menarik adalah danau Ulak Lia, danau Konger, danau Cala, pulau

Pandak, sungai Sembilang, sungai Kubu dan agrowisata perkebunan gambir. Untuk wisata budaya terdapat tambang minyak tradisional, tambang minyak modern dan kebudayaan Suku Anak Dalam. Wisata Sejarah meliputi Makam keramat di beberapa lokasi, Goa Jepang, Peninggalan Sriwijaya dan Candi Sereka.

Tabel 2.53

Objek Wisata di Kabupaten Musi Banyuasin

No	Nama ODTW	Alamat	Jarak Dari Pusat Kota	Jenis ODTW
1	Danau Ufak Lia	Sekayu, Kab. Musi Banyuasin	± 7,33KM	Alam
2	Sungai Musi	Sekayu, Kab. Musi Banyuasin	0	Alam
3	Rumah Linmas	Sekayu, Kab. Musi Banyuasin	0	Buatan
4	Danau Sidoati	Ds. Bailangu, Sekayu, Kab. Musi Banyuasin	± 28 KM	Alam
5	Taman Permata Muba	Sekayu, Kab. Musi Banyuasin	± 2,75 KM	Buatan
6	Waterfront Sekayu	Sekayu, Kab. Musi Banyuasin	± 3,94 KM	Buatan
7	Gelanggang Remaja Sekayu	Sekayu, Kab. Musi Banyuasin	0	Buatan
8	Stabel Berkuda Sekayu	Sekayu, Kab. Musi Banyuasin	± 2 KM	Buatan
9	Kolam Renang Tina Randik Sekayu	Sekayu, Kab. Musi Banyuasin	± 2 KM	Buatan
10	Water Fun Sekayu	Sekayu, Kab. Musi Banyuasin	± 3 KM	Buatan
11	Taman Selarai Indah	Sekayu, Kab. Musi Banyuasin	±7,43 KM	Buatan
12	Tugu Bintang Sekayu	Sekayu, Kab. Musi Banyuasin	0	Buatan
13	Taman Terbuka Hjau	Sekayu, Kab. Musi Banyuasin	± 2,75 KM	Buatan
14	Taman Pertanian Terpadu	Jln. Praja Mukti Kel. Soak Baru Kab. Musi Banyuasin	± 3,61 KM	Buatan
15	Sircuit Sky Land	Jln. Sekayu — Pendopo, Kel. Soak Baru Kab. Musi Banyuasin	± 15.03 KM	Buatan
16	Taman Agro Inovasi	Jln. Sekayu — Pendopo, Kel. Soak Baru Kab. Musi Banyuasin	± 17,96 KM	Buatan
17	Masjid Raya Baitul Makmur	Jln. Lingkar Randik, Kel Kayuara Kab. Musi Banyuasin	± 2,74 KM	Buatan
18	Pantai Bongen Tahunan	Jln. Merdeka, Kel. Balai Agung Kab. Musi Banyuasin	± 3,94 KM	Alam
19	Taman Adipura	Jln. Sekayu — Betung Kel. Kayuara Kab. Musi Banyuasin	± 2,52 KM	Buatan
20	Makam Dindi Muro Bayo	Sekayu, Kab. Musi Banyuasin	± 28 KM	Budaya
21	Puyang Keramat Burung Jauh Sedekah Bumi	Kec. Sungai Keuh Kab. Musi Banyuasin	± 37 KM	Budaya
22	Danau Konger	Desa Sungai Dua Kec. Sungai Keruh, Kab. Musi Banyuasin	± 42 KM	Alam
23	Goa Bukit Benape	Dusun 4 Sungai Dua Kec. Sungai Keruh Kab. Musi Banyuasin	± 45 KM	Alam
24	Bukit Pendape	Desa Keramat Jaya Kec. Sungai Keruh	± 70 KM	Alam
25	Tebat Indah Kertajaya	Desa KertaJaya Kec. Sungai Keruh	± 42 KM	Buatan
26	Makam Puyang Pekik Nyaring	Desa Sumber Rejeki Kec. Plakat Tinggi Kab. Musi Banyuasin	± 49 KM	Budaya
27	Danau Cala	Desa Danau Salak Kec. Lais, Kab. Musi Banyuasin	± 50 KM	Alam

No	Nama ODTW	Alamat	Jarak Dari Pusat Kota	Jenis ODTW
28	Tanampo	Desa Teluk Kijing Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin	± 32,9 KM	Alam
29	Danau Kajang	Desa Teluk Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin	± 32,9 KM	Alam
30	Masjid Raya Abdul Kadim	Desa Epil Kec. Lais	± 28 KM	Buatan
31	Makam Bujang Ranggonang	Sekayu, Kab. Musi Banyuasin	± 19 KM	Budaya
32	Industri Pembuatan Getah Gambir	Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin	± 37 KM	Minat Khusus
33	Taman Toga Mangun Jaya	Kel. Mangun Jaya Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin	± 50 KM	Buatan
34	Perkebunan Gambir	Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin	± 38 KM	Agro
35	Embung Senja	Desa Gaja Mati Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin	± 15 KM	Buatan
36	Danau Ujan Mas	Ds. Kemang Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin	± 47 KM	Buatan
37	Danau Ulak Libok	Ds. Kemang Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin	± 47 KM	Alam
38	Kolam Renang Az-Zahra	Desa Biji Mulyo Kec. Tungkal Jaya	± 90 KM	Buatan
39	Danau Putih Ex Batu Bara	Kec. Tungkal Jaya	± 95 KM	Alama
40	Pemancingan Rawa Kuning	Dusun 2 Rukun Rahayu Kec. Jirak Jaya Kab. Musi Banyuasin	± 51,4 KM	Buatan
41	Manau Kuning	Kec. Jirak Jaya	± 53,4 KM	Buatan
42	Keramat Puyang Dukun	Dusun II Ds.Tanah Abang Kec. Batang Hari Leko Kab. Muba	± 29 KM	Budaya
43	Danau Siarak	Dusun I Ds. Tanah Abang Kec. Batang Hari Leko Kab. Muba	± 29 KM	Alam
44	Puyang Janggut	Dusun I Desa Saud Kec. Batang Hari LekoKab. Musi Banyuasin	± 39 KM	Budaya
45	Danau Panjang	Dusun I Desa Pinggap Kec. Batang Hari Leko Kab. Musi Banyuasin	± 39 KM	Alam
46	Keramat Puyang Apul	Dusun I Desa Pengaturan Kec. Batang Hari Leko Kab. Muba	± 39 KM	Budaya
47	Situs Ran Putri	Dusun I Desa Lubuk Buah Kec. Batang Hari Leko Kab. Muba	± 49 KM	Budaya
48	Keramat Selerang	Dusun I Desa Sungai Napal Kec. Batang Hari Leko Kab. Muba	± 60 KM	Budaya
49	Assalam Water Fun & Family Park	Sri Gunug Kec. Sungai Lilin	± 75 KM	Buatan
50	Water Boom Gunung Sari Jos	Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin	± 80 KM	Buatan
51	Sungai BB	Desa Cinta Damai Kec. Sungai Lilin	± 83 KM	Alam
52	Objek Wisata Alam Rawa Hijau	Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin	± 78 KM	Buatan
53	Guci Purbakala Bayung Lencir	Kes. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin	± 160 KM	Budaya
54	Perkampungan Suku Anak Dalam	Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin	± 200 KM	Budaya
55	Rumah Rakit Bayung Lencir	Kes. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin	± 312 KM	Budaya
56	Embung Desa Cinta Bumi	Desa Mendis Kec. Bayung Lencir	± 312 KM	Buatan
57	Danau Kodok	Desa Sari Agung Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin	± 143,8 KM	Alam
58	Water Boom Lalan	Desa Sari Agung Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin	± 143,8 KM	Buatan
59	Rain Bow Garden	Karang Tirta Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin	± 143,4 KM	Buatan
60	Embung Tegal Mulyo	Kec. Keluang	± 43 KM	Buatan

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata Kab. Musi Banyuasin

KESIMPULAN

Kinerja pariwisata di Kabupaten Musi Banyuasin perlu ditingkatkan melalui dengan penambahan kuatitas dan kualitas wisata, penguatan aksesibilitas, amenitas serta atraksi wisata

2.1.7.3.3 Urusan Pertanian

Secara keseluruhan kinerja pertanian dapat dilihat dari kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB ADHB. Dalam kurun waktu 2017-2021 kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB ADHB 11,69 persen pada tahun 2021 dan terbesar kedua di Kabupaten Musi Banyuasin. Penurunan kontribusi sektor pertanian dipengaruhi oleh kepemilikan lahan pertanian yang semakin menyempit, sumber air irigasi menyusut, cuaca dan iklim tidak menentu, akses terhadap sumber permodalan terbatas, labilitas harga jual hasil pertanian, dan belum berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian. Berdasarkan tabel 2.65, luas total lahan pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021 sebesar 1.153.307 ha yang dididominasi oleh lahan perkebunan dan lahan hutan negara.

Tabel 2.54
Luas Lahan Pertanian (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 - 2021

Tahun	Lahan Pertanian Sawah	Lahan Pertanian Bukan Sawah								Jumlah Lahan Pertanian
	Sawah	Tegal/ Kebun	Ladang/ Huma	Perke-bunan	Hutan Rakyat	Padang Rumput	Hutan Negara	Sementara tidak diusahakan	Lainnya (Tambah, Kolam, Empang, Hutan Negara, dll)	
2015	66.810	29.739	29.524	439.874	60.084	486	-	95.264	276.276	998.057
2016	63.011	31.029	27.176	442.884	60.020	438	257.040	95.216	18.272	995.086
2017	51.228	26.234	21.213	431.375	154.854	453	236.950	86.411	18.233	1.036.373
2018	40.823	24.675	17.324	506.793	100.475	498	410.815	67.270	19.718	1.188.391
2019	40.823	43.468	19.897	498.173	100.376	554	410.815	59.495	17.977	1.192.382
2020	47.704	43.368	19.908	449.157	100.797	543	410.815	58.416	17.983	1.192.691
2021*	41.339	55.161	23.709	444.925	100.797	564	409.836	57.902	19.074	1.153.307

Sumber : Dinas TPHP Kab. Musi Banyuasin
** Data tahun 2021 masih data sementara*

Tabel 2.55
Luas Panen (Ha) Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 - 2020

NO	KECAMATAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Babat Toman	1.470	643	537	537	314
2	Plakat Tinggi	915	226	-	-	-
3	Batanghari Leko	2.025	287	-	-	-
4	Sanga Desa	991	4.003	3.781	3.781	2.355
5	Sungai Keruh	416	1.481	616	616	-
6	Sekayu	760	4.009	3.758	3.758	2.971
7	Lais	91	3.754	3.936	3.936	4.681
8	Sungai Lilin	1.716	2.146	1.258	1.258	1.368
9	Keluang	409	144	-	-	-
10	Bayung Lencir	4.745	3.343	2.119	2.119	1.188
11	Lalan	33.683	53.729	71.812	71.812	58.442
12	Lawang Wetan	1.442	2.094	1.942	1.942	958
13	Babat Supat	725	1.480	2.126	2.126	1.820
14	Tungkal Jaya	2.059	820	104	104	99
15	Jirak Jaya	-	-	-	-	644
Jumlah		**31.256**	**78.164**	**91.989**	**91.989**	**74.840**

Sumber: Muba Dalam Angka 2017-2021

Tabel 2.56
Luas Panen (Ha) Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 - 2020

NO	KECAMATAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Babat Toman	209	10	16	16	6
2	Plakat Tinggi	130	92	49	49	-
3	Batanghari Leko	288	24	90	90	15
4	Sanga Desa	141	126	13	13	76
5	Sungai Keruh	60	95	180	180	155
6	Sekayu	108	320	527	527	3
7	Lais	13	135	9	9	3
8	Sungai Lilin	244	19	2.339	2.339	91
9	Keluang	58	33	57	57	10
10	Bayung Lencir	675	208	385	385	293
11	Lalan	4.792	7.178	3.049	3.049	5.436
12	Lawang Wetan	205	59	8	8	-
13	Babat Supat	103	86	49	49	35
14	Tungkal Jaya	393	217	494	494	72
15	Jirak Jaya	-	-	-	-	7
Jumlah		**4.676**	**8.602**	**7.265**	**7.265**	**6.202**

Sumber : Muba Dalam Angka 2017-2021

Luas panen padi sawah di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020 adalah 74.840 hektar dengan produksi 365.395 ton, sedangkan luas panen jagung tahun 2020 sebesar 6.202 hektar. Produksi padi dan jagung Kabupaten Musi Banyuasin tidak mencapai target yang ditetapkan, oleh karena itu Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Muba akan terus berupaya meningkatkan produksi padi dan jagung, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tetap berupaya meningkatkan capaian produksi pertanian melalui peningkatan produktivitas pertanian dengan cara :

1. Intensifikasi lahan sawah melalui kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas padi dan palawija dan dari kegiatan pengaaan sarana dan prasarana teknologi pertanian / perkebunan tepat guna.
2. Pengembangan bibit padi unggul inhibrida melalui kegiatan pengembangan bibit unggul pertanian dan perkebunan.
3. Bantuan Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN) pasca panen dari kegiatan penanganan pasca panen dan pengelolaan hasi pertanian.

KESIMPULAN

Meskipun secara nilai, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dari sisi kuantitas produksi pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami beberapa hambatan dalam upaya untuk menciptakan kedaulatan pangan. Perlu upaya intensifikasi pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin sehingga dapat meningkatkan kedaulatan pangan untuk mendukung kemandirian daerah.

2.1.7.3.4 Urusan Perdagangan

Capaian kinerja perangkat daerah dalam urusan perdagangan di Kota Batam melebihi target yang telah ditetapkan. Kontribusi sektor perdagangan selalu menunjukkan pertumbuhan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Selama 5 tahun terakhir, sektor perdagangan menyumbang lebih dari 3 persen terhadap perekonomian Musi Banyuasin. Pada tahun 2020, kontribusi kategori ini mencapai 3,32 triliun rupiah atau sekitar 4,99 persen. Secara umum, laju pertumbuhan sektor perdagangan berfluktuasi selama periode 2016-2020. Laju pertumbuhannya sebesar 6,54 persen di tahun 2016 lalu melambat hingga menjadi sebesar 4,51 persen di tahun 2019. Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 menyebabkan melemahnya kegiatan jual beli, terutama akibat pembatasan eskpor dan impor demi mencegahnya penyebaran Virus Covid19, menjadikan sektor ini terkontraksi sebesar 0,37 persen.

Tabel 2.57
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	% Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	4,18	4,57	4,68	4,80	4,99
2	Ekspor Bersih Perdagangan (Rp)	-	-	3,14 T	33,68 T	33,75T

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin

KESIMPULAN

Secara umum, kinerja urusan perdagangan menunjukkan kinerja dengan tren meningkat dan mencapai target pada pelaksanaan program-program pemerintah daerah dalam urusan perdagangan. Selain itu, kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin juga terus meningkat.

2.1.7.3.5 Urusan Perindustrian

Terdapat dua indikator dalam urusan perindustrian di Kabupaten Musi Banyuasin, yang pertama yaitu persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB dari tahun 2016 hingga 2020 meningkat setiap tahunnya. Meski demikian, pada realisasinya, selama 5 tahun kenaikan kontribusi pada sektor industri belum cukup signifikan yaitu hanya meningkat sebesar 2,69 persen. Pada pelaksanaannya, pada sektor perindustrian lebih fokus pada penyiapan pelaku usaha/IKM pada sentra industri. Untuk membentuk sebuah sentra industri perlu lahan yang luas serta jumlah IKM yang mumpuni dan memenuhi standar.

Indikator yang kedua yaitu persentase pertumbuhan industri secara keseluruhan. Realisasi persentase pertumbuhan industri secara keseluruhan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami penurunan. Dalam realisasi tahun 2016 pertumbuhan industri secara keseluruhan sebesar 5,71%, pada realisasi tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 2,93%. Pertumbuhan industri dalam realisasi tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 2,5% dan di tahun 2020 realisasi mengalami penurunan kembali menjadi 0,71%.

Tabel 2.58
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	% Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	8,14	9,19	9,93	10,13	10,83
2	Pertumbuhan Industri secara keseluruhan (%)	5,71	2,93	2,5	2,5	0,71

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin

KESIMPULAN

Kinerja urusan perindustrian masih kurang baik apabila dilihat dari pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan. Pada indikator persentase kontribusi sektor industri dan indikator pertumbuhan industri secara keseluruhan justru mengalami penurunan. Perlu ada upaya untuk meningkatkan kinerja perindustrian terutama pada IKM yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin.

2.1.7.3.6 Urusan Transmigrasi

Transmigrasi merupakan salah satu upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari Pusat, melainkan berdasarkan Kerja sama Antar Daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Program transmigrasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Pola Transmigrasi Umum dengan capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 100%. Artinya pelaksanaan telah mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun unit permukiman transmigrasi (UPT) yang terbina di Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 1 UPT dengan jumlah transmigran yang terbina

sebanyak 185 KK. Unit permukiman transmigrasi (UPT) tersebut berupa UPT Air Balui yang terletak di Kecamatan Sanga Desa.

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Transmigrasi Umum (%)	100	100	100	100	100
2	Presentase pembinaan warga transmigran (%)	100	100	100	100	100

Tabel 2.59a
Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang terbina
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah UPT Yang Ada	Jumlah UPT Yang Dibina	%
2017	1 UPT	1 UPT	100
2018	1 UPT	1 UPT	100
2019	1 UPT	1 UPT	100
2020	1 UPT	1 UPT	100
2021	1 UPT	1 UPT	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin

Tabel 2.59b
Jumlah Transmigran yang Terbina
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah UPT Yang Ada	Jumlah UPT Yang Dibina
2017	185 KK	1 UPT
2018	185 KK	1 UPT
2019	185 KK	1 UPT
2020	185 KK	1 UPT
2021	185 KK	1 UPT

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin

KESIMPULAN

Secara umum, kinerja urusan transmigrasi menunjukkan kinerja baik dan mencapai target pada pelaksanaan program-program pemerintah daerah dalam urusan transmigrasi. Capaian kinerja urusan transmigrasi tahun 2017-2021 mencapai 100%.

2.1.7.4 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Penunjang

2.1.7.4.1 Urusan Perencanaan

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perencanan pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus sinergis dengan rencana pembangunan dari Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional.

Kinerja perencanaan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah pengampu urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara rinci capaian indikator fungsi penunjang perencanaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2020 bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.60
Urusan Perencanaan Kab. Muba Tahun 2017-2020

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase kelarasan program RKPD dalam RPJMD	76%	84,97%	95,71%	92,78%	100%
2	Persentase keselarasan program kabupaten dengan program nasional	80%	80%	86%	91,56%	95%
3	Program usulan Renja PD yang terakomodir di RKPD	91%	95,45%	96,3%	97%	100%
4	Persentase keselarasan program prioritas tahunan dengan program prioritas 5 tahunan	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
5	Persentase keselarasan program Renstra PD ke dalam Program Renja PD	75%	75%	70%	100%	100%
6	Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang yang mendukung program prioritas dan terakomodir di RKPD	70%	75%	80%	83,42%	100%

Sumber: Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin

2.1.7.4.2 Urusan Penelitian dan Pengembangan

Fungsi penelitian dan pengembangan ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Sampai tahun 2020, kinerja kelitbangan di Kabupaten Musi Banyuasin terkait dengan kegunaannya dalam memberikan kontribusi terhadap kebijakan yang diambil masih belum optimal. Dari tahun 2017-2020 tiap tahunnya dokumen hasil penelitian yang rekomendasinya menjadi input dalam pengambilan kebijakan daerah. Adapun capaian kinerja bidang penelitian dan pengembangan tersaji secara lengkap dalam tabel berikut.

Tabel 2.61
Urusan Penelitian dan Pengembangan Kab. Muba Tahun 2017-2020

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Pendayagunaan hasil Kelitbangan	44%	59%	90,38%	-	-
2	Persentase hasil inovasi yang diimplementasikan	-	-	-	90%	90%
3	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti	-	-	-	75%	75%

Sumber: Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin

2.1.7.4.3 Urusan Keuangan

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dengan realisasi pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mencapai opini WTP. Pengelolaan aset daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan masih perlu perbaikan kinerja, terutama dalam hal registrasi aset. pengamanan aset baik dari sisi administrasi maupun fisik, serta terkait penghapusan aset. Secara rinci capaian Indikator Kinerja Fungsi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.62
Urusan Keuangan Kab. Muba Tahun 2017-2020

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Persentase laporan OPD benar dan tepat waktu	78%	72%	75%	78%
2	Persentase Laporan keuangan OPD sesuai Standar Akutansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%	100%
3	Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Pencairan dana *on scedule*	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Data Aset yang akurat	100%	100%	100%	100%
6	Persentase tingkat pertumbuhan PAD	7,94%	6,96%	7,10%	7,23%
7	Jumlah regulasi terkait peningkatan PAD	1 peratu-ran	20 peratu-ran	21 peratu-ran	22 peratu-ran

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
8	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	7,88%	7,14%	8,39%	10,79%

Sumber: BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin

2.1.7.4.4 Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam pelaksanaanya perlu difikirkan untuk memanfaatkan peluang-peluang peningkatan kompetensi pegawai (diklat/tugas belajar, dst) menggunakan anggaran APBN. Dalam kerangka mempersiapkan perampingan organisasi sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo bahwa struktur organisasi instansi pemerintah perlu disederhanakan (tepat struktur kaya fungsi).

Tabel 2.63
Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Muba
Tahun 2017-2020

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Persentase pejabat yang telah mengikuti Diklat struktural	72,50%	71,46%	72,05%	72,05%
2	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	0,55%	1,19%	0,3%	0,2%
3	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan standar Jabatan	95%	97%	99,99%	98,02%
4	Persentase JPT yang mempunyai Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan	75%	76,25%	78,26%	78,79
5	Persentase Capaian Kinerja ASN yang memiliki Capaian Kinerja Baik	99,17%	99,23%	99,25%	99,81%

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
7	Persentase Kasus-Kasus pelanggaran disiplin ASN	0,63%	0,74%	0,75%	1,07%
8	Survey Kepuasan ASN	83,45%	85,21%	85,56%	85,82%

Sumber: BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin

2.1.7.4.5 Urusan Pengawasan

Kualitas pengawasan internal akan memberikan gambaran tentang jaminan kualitas atas proses pengelolaan keuangan daerah. Fungsi pengawasan merupakan salah satu unsur yang mendukung terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Unsur pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diwujudkan dalam sebuah sistem dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik. Hasil penilaian terhadap Maturitas SPIP di Kabupaten Musi Banyuasin sampai pada tahun 2020 masih ada pada level 3 atau tahap terdefinisi, di mana kondisi tersebut kebijakan dan prosedur sistem pengendalian internal sudah diimplementasikan namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Ke depan masih perlu pengembangan strategi untuk meningkatkan kualitas maturitas SPIP pada level yang lebih baik lagi. Jika dilihat dari tingkat kapabilitas APIP unsur pengawasan di Kabupaten Musi Banyuasin pada level 3 pada tahun 2019.

Tabel 2.64
Urusan Pengawasan Kab. Muba Tahun 2017-2020

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal B	60%	54%	81,25%	100%
2	Opini terhadap Laporan Keuangan Pemda	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Skor Penilaian Mandiri (Self Assesment) atas pelaksanaan reformasi dan birokrasi di Perangkat Daerah	C	C	CC	CC
4	Leveling Kapabilitas APIP	1	2	3	2,5
5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	39,64%	81,86%	54,82%	81,23%
6	Persentase PD yang telah menerapkan SPIP	18,65%	20,83%	85,13%	87,24%
7	Skor Maturitas SPIP	1	3	3	3,5
8	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	-	-	-	4

Sumber: Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin

2.1.7.4.5 Urusan Administrasi Pemerintahan

Capaian kinerja urusan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2020 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.65
Urusan Administrasi Pemerintahan Kab. Muba Tahun 2017-2020

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Nilai LPPD (Laporan Pertanggungjawaban Pemda)	3,07	2,93	3,07	3,40

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
2	Nilai LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)	B	B	B	B
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,05	83,66	85,21	85,35
4	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	CC	B

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

2.1.8 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.8.1 Fokus Kemampuan Ekonomi daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Pada tabel pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017-2020 dapat dilihat bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, jumlah konsumsi rumah tangga per kapita per bulan sebesar Rp 804.338 yang terdiri dari Rp 435.228 konsumsi makanan dan Rp 369.110 konsumsi non makanan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut meningkat menjadi Rp1.130.115 di tahun 2021 yang terdiri dari Rp 590.466 pengeluaran konsumsi makanan dan Rp 539.649 pengeluaran non makanan.

Tabel 2.66
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kab. Muba
Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Konsumsi Makanan	435.228	505.232	471.468	544.878	590.466
2	Konsumsi Non Makanan	369.110	454.663	383.909	533.715	539.649
Total		**804.338**	**959.895**	**855.377**	**1.078.593**	**1.130.115**

Sumber: BPS Kabupaten Musi Banyuasin

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa baik pengeluaran makanan maupun non makan di Kabupaten Musi Banyuasin cukup fluktuatif. Selain itu, konsumsi non makanan menunjukkan proporsi yang lebih rendah atau kurang dari 50 persen. Rasio konsumsi makanan per kapita sebulan di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2017 sebesar 54,11 persen dan menurun menjadi 52,25 persen di tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan proporsi konsumsi non pangan di Kabupaten Musi Banyuasin meskipun sempat turun menjadi 44,88 persen di tahun 2019 dan meningkat menjadi 47,75 persen di tahun 2021.

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam pengeluaran. Data berikut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2016-2020 rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (ADHB) maupun riil (ADHK), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga yang pada

gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 2.67
Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga per Kapita Kab. Muba
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	ADHB (Milyar Rp)	38.169,09	40.522,20	43.823,11	46.572,06	46.797,23
2	ADHK (Milyar Rp)	25.645,41	26.319,80	27.484,04	28.392,65	27.961,97
3	Proposi terhadap PDRB (% ADHB)	72,33	72,34	72,00	70,47	70,36

Sumber: BPS Kabupaten Musi Banyuasin

2.1.8.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan untuk pemerataan, meningkatkan kualitas hidup dan konektivitas antar daerah yang pada akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan, memfasilitasi pertumbuhan disektor industri dan usaha kecil menengah, pertanian dan pertambangan yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

2.1.8.2.1 Perhubungan

Pergerakan orang melalui angkutan umum mengalami penurunan di Kabupaten Musi Banyuasin. Pada tahun 2017 jumlah orang terangkut melalui angkutan umum sebesar 1.145 orang/bulan dan menurun pada tahun 2019 mencapai 1.124 orang/bulan. Sedangkan pergerakan orang melalui terminal, pada tahun 2017 mencapai 7.020 orang/bulan dan

mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 190.061 orang/bulan.

Tabel 2.68
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum dan Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	1.145	1.135	1.124	1.045
2	Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun	7.020	55.726	429.720	376.234

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin

2.1.8.2.2 Penataan Ruang

Pada tahun 2020, sebagian besar luasan wilayah budidaya di Kabupaten Musi Banyuasin adalah berupa wilayah produktif yaitu sebesar 68 persen. Untuk itu rasio luas wilayah perkotaan adalah sebesar 1,3 persen dari keseluruhan kawasan budidaya di Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun Kabupaten Musi Banyuasin. Setiap wilayah Kabupaten/Kota wajib menyusun Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Kabupaten Musi Banyuasin telah menyusun Perda RTRW dan dokumen Rencana Tata Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel 2.69
Penataan Ruang Kab. Muba Tahun 2017-2020

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Keberadaan Perda RTRW	1	1	1	1

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
2	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang	1	1	1	1
3	Luas Wilayah Produktif	68 %	68 %	68 %	68 %
4	Luas Wilayah Perkotaan	1,3 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin

2.1.8.2.3 Perekonomian

Gambaran kegiatan perekonomian penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat dari perkembangan sarana perdagangan dan jasa sebagai aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin sehari-hari. Dukungan terhadap keberadaan sarana perdagangan dan jasa ini sangat penting dan perlu terus ditingkatkan terutama untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin sehingga aktivitas perdagangan semakin dinamis.

Tabel 2.70
Perekonomian Kab. Muba Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	157	157	229	235	235
2	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	29	33	35	31	32

Sumber: Dispopar Kabupaten Musi Banyuasin

2.1.8.2.4 Fokus Iklim Berinvestasi

Salah satu kondisi yang mendukung terhadap pencapaian kinerja peningkatan investasi di daerah adalah kemudahan dalam mengurus

perizinan usaha dan peraturan daerah yang mendukung iklim usaha. Untuk memaksimalkan pelayanan perizinan tersebut, upaya yang dilakukan salah satunya adalah mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses pelayanan. Proses pengeluaran izin di Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 4 hari.

Tabel 2.71
Lama Proses Perizinan dan Jumlah Perda yang mendukung Iklim Usaha di Kab. Muba Tahun 2017 – 2020

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Lama Proses Perizinan	4 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari
2	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	3 Perda	3 Perda	3 Perda	3 Perda

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin

2.1.8.2.5 Fokus Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka kualitas SDM dapat semakin baik. Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di Kabupaten Musi Banyuasin. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk. Dilihat dari

proporsinya, penduduk dengan pendidikan Sekolah Dasar dan dibawahnya lebih besar dibandingkan dengan penduduk berpendidikan SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Rasio lulusan S-1, S-2 dan S-3 terhadap total penduduk menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 2.72
Jumlah Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertiggi Kab. Muba
Tahun 2017 – 2020

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	≥ Sekolah Dasar (SD)	150.050	150.164	159.074	149.906
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	56.126	51.876	50.022	64.152
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	100.449	74.015	74.231	94.997
4	Perguruan Tinggi	15.373	16.448	19.990	24.799

Sumber: BPS Kabupaten Musi Banyuasin

Tabel 2.73
Rasio lulusan S-1, S-2 dan S-3 terhadap total penduduk Kab. Muba
Tahun 2017 – 2020

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Rasio lulusan S-1, S-2 dan S-3 terhadap total penduduk	2,12	2,24	2,26	3,99

Sumber: BPS Kabupaten Musi Banyuasin

Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) penduduk Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami peningkatan. Dari 51,78% pada tahun 2016 menjadi 50,39% di tahun 2020. Dengan demikian Angka Ketergantungan di Kabupaten Musi Banyuasin termasuk dalam kategori angka ketergantungan tinggi (tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka

ketergantungan rendah bila kurang dari 30, angka ketergantungan sedang bila 30 - 40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41).

Tabel 2.74
Komposisi Penduduk dan Rasio Ketergantungan (%)
Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2016 - 2020

Tahun	Kelompok Umur (%)			Rasio Ketergantungan (%)
	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65+ Tahun	
2016	30,28	65,88	3,84	51,78
2017	30,03	66,01	3,95	51,49
2018	29,80	66,11	4,09	51,25
2019	29,55	66,21	4,24	51,04
2020	28,97	66,49	4,53	50,39

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin 2021

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Per Urusan, Tujuan, Sasaran pada RPJMD Periode Sebelumnya

Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kabupaten Musi Banyuasin Periode Tahun 2017 - 2021 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang mana berupa suatu pengukuran kinerja untuk menunjukan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, dan kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, Renstra maupun Renja yang telah ditetapkan.

Adapun dalam hal ini mengevaluasi 18 (delapan belas) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan perjanjian kinerja yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam “Menuju Muba Maju Berjaya 2022”. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi serta membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun lalu serta capaian sampai dengan tahun ini dengan target pada akhir periode dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022. Berikut ini merupakan capaian kinerja pemerintah Kabupaten

Musi Banyuasin berdasarkan kedelapan sasaran strategis daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

2.2.1 Mewujudkan Musi Banyuasin yang Bersih dan Melayani

Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu pendukung Misi ke satu yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2017 – 2022 yaitu "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kualitas Birokrasi yang Bersih dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat" dan tujuan "Mewujudkan Musi Banyuasin yang Bersih dan Melayani". Untuk mengukur sasaran ke satu tersebut ada 3 (tiga) indikator sasaran yakni Indeks Persepsi Anti Korupsi, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik).

2.2.1.1. Indeks Presepsi Anti Korupsi (IPAK)

Indeks Presepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan gambaran integritas pemberi layanan, apakah anti korupsi atau tidak. Penilaian IPAK cenderung subjektif sehingga disebut "presepsi". Nilai Indeks Presepsi Anti Korupsi diperoleh dari hasil survey presepsi korupsi yang dilaksanakan oleh entitas Kabupaten terhadap perangkat daerah, yang perhitungan dan penilaiannya dilakukan oleh Kementrian PAN dan RB. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menggunakan skala 0-4, nilai indeks semakin mendekati 4 menunjukan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukan bahwa masyarakat berprilaku semakin permisif terhadap korupsi.

Pada Tahun 2017 dan 2018 belum dilakukan penilaian Indeks Presepsi Anti Korupsi dari Kementerian PAN dan RB, sehingga belum ada perbandingan target pencapaian IPAK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Pada Tahun 2019 Indeks Presepsi Anti Korupsi Kabupaten Musi Banyuasin ditargetkan nilai 3, berdasarkan hasil penilaian dari Kementrian PAN dan RB nilai Indeks Presepsi Anti Korupsi Kabupaten Musi Banyuasin 3,41.

Pada tahun 2020 nilai Indeks Presepsi Anti Korupsi Kabupaten Musi Banyuasin ditargetkan nilai 3 tetapi untuk capaian tidak dilakukan survey terhadap Indeks Persepsi Anti Korupsi dari Kementrian PAN dan RB, sehingga pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin melakukan Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi dengan dengan realisasi sebesar 4 dari target tahun 2021 sebesar 3, apabila dibandingkan dengan target akhir tahun Perubahan RPJMD sebesar 4, persentase Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Musi Banyuasin sudah mencapai target.

2.2.1.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dilihat dari sisi realisasinya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Musi Banyuasin terus mengalami peningkatan, yaitu dari kondisi awal 80,05 ditahun 2017 dan di tahun 2021 nilai realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 87,05 dengan capaian yang sangat tinggi yaitu 98,92%. Namun perlu kerja kerjas untuk mengejar target kondisi akhir di tahun 2022 yatu sebesar 90.

Dari 60 unit penyelenggara pelayanan yang terdata, di tahun 2021 ini semuanya melakukan survey kepuasan masyarakat untuk mengukur sejauh mana kualitas layanan yang diberikan kepada penerima layanan baik secara manual maupun digital. Kedepan akan difokuskan agar perangkat daerah melakukan survei secara online. Begitu juga dalam pelayanan, perangkat daerah terus didorong agar berinovasi untuk tetap memberikan pelayanan tanpa harus datang langsung ke unit penyelenggara pelayanan.

2.2.1.3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Pemerintah pusat menjadikan SPBE sebagai platform, hal inilah menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan penyelarasan RPJMD dengan RPJMN dengan melakukan perubahan RPJMD yang tertuang dalam Pertauran Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022, dengan salah satu *entry point*nya adalah menjadikan SPBE sebagai salah satu Indeks Kinerja Utama (IKU) Kabupaten.

Realisasi kinerja indeks SPBE Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019 hasil dari evaluator eksternal Kemenpan RB sebesar 2,11 sedangkan untuk tahun 2020 hasil evaluasi dari evaluator internal sebesar 2,7 dan capaian tahun 2021 berdasarkan Kemenpan RB Nomor 1503 tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah tahun 2021 sebesar 2,82 artinya untuk indeks SPBE perlu kerja keras untuk mengejar target kondisi akhir di tahun 2022 yaitu sebesar 4.

2.2.2 Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas

Sasaran strategis 2 ini merupakan salah satu pendukung Misi ke dua yang ditetapkan dalam Perubahan dalam RPJMD 2017–2022 yaitu "Memacu Pembangunan Infrastruktur Secara Masif" dan tujuan "Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas". Untuk mengukur sasaran ke satu tersebut ada 3 (tiga) indikator sasaran yakni Persentase Jalan Kabupaten dan Jalan Strategis Lainnya yang Terkoneksi Dalam Kondisi Mantap, Persentase jumlah KK yang terlayani air bersih, dan Persentase dengan layanan sanitasi (air limbah) yang layak. Ketiga indikator tersebut yakni sebagai berikut.

2.2.2.1. Persentase jalan kabupaten dan jalan strategis lainnya yang terkoneksi dalam kondisi mantap

Dilihat dari realisasinya persentase jalan kabupaten dan jalan strategis lainnya yang terkoneksi dalam kondisi mantap mengalami peningkatan dari target di kondisi awal 2017 sebesar 55 persen realisasi di 2019 sebesar 56,72 persen mengalami peningkatan yang signifikan di

tahun 2021 sebesar 72,29 persen namun masih tetap perlu kerja keras untuk mengejar target akhir RPJMD di tahun 2022 yaitu sebesar 79,94 persen.

Kenaikan jalan kabupaten kondisi mantap dikarenakan anggaran untuk penanganan pada ruas jalan kabupaten lebih banyak dibanding anggaran pada jalan desa dan anggaran kegiatan lain pada Dinas PUPR dan adanya peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bantuan APBD Propinsi Sumatera Selatan dan dana Pihak Ketiga berupa pinjaman bagi pembangunan infrastruktur jalan. Dan Sampai Tahun 2021 panjang jalan kabupaten kondisi mantap sebesar 72,29 persen atau 776,21 KM dari total panjang jalan kabupaten sebesar 1.073,77 Km.

2.2.2.2. Persentase KK yang terlayani air bersih

Dilihat dari realisasinya persentase KK yang terlayani air bersih terus mengalami kenaikan secara flukuatif dengan data yang menunjukan peningkatan kinerja dan dilakukan penyesuaian target dari target di kondisi awal 2017 sebesar 70 persen dengan realisasi sebesar 70 persen dan pada tahun 2021 sebesar 92 persen dengan realisasi sebesar 87,51 persen. Angka ini meningkat sebesar 2,04 persen dibandingkan tahun 2020 dimana realisasi jumlah KK yang terlayani Air Bersih sebesar 85,54 persen. Apabila dibandingkan dengan target akhir di tahun 2022 sebesar 100, maka jumlah KK yang terlayani air bersih di Kabupaten Musi Banyuasin masih terus diupayakan secara masif agar jumlah KK yang terlayani air bersih dapat naik secara signifikan.

2.2.2.3. Persentase Rumah tangga dengan sanitasi (air limbah) yang layak

Pengukuran persentase rumah tangga dengan sanitasi (air limbah) yang layak berdasarkan pada data yang dikeluarkan oleh laporan bidang pengembangan sistem penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan. Realisasi pada indikator kinerja utama Persentase Rumah Tangga Dengan Layanan Sanitasi (air Limbah) Yang Layak mengalami peningkatan sebesar 1,26 persen, dimana realisasi pada tahun 2021 sebesar 81,26 persen dengan target 95 persen dari tahun sebelumnya sebesar 80 persen di tahun 2020 dengan target sebesar 90 persen.

Dibandingkan dengan target akhir di tahun 2022 sebesar 100, maka persentase Rumah tangga dengan sanitasi (air limbah) yang layak masih terus diupayakan secara massif agar Persentase Rumah tangga dengan sanitasi (air limbah) yang laya dapat naik secara signifikan.

2.2.3 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran strategis 3 ini merupakan salah satu pendukung Misi ke-3 yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2017–2022 yaitu “Meningkatnya Kemandirian Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan” dan tujuan “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat”. Untuk mengukur sasaran ke-3 tersebut ada 3 (tiga) indikator sasaran, yakni Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Desa Membangun, dan Indeks Gini.

2.2.3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data BPS Kabupaten Musi Banyuasin, pertumbuhan ekonomi Musi Banyuasin menunjukkan tren positif. Pada Tahun 2019 ekonomi Musi Banyuasin tumbuh sebesar 4,57 persen dan kembali turun hingga negatif pada tahun 2020 sebesar - 0,04 persen dikarenakan dampak pandemi Covid-19. Kabupaten Musi Banyuasin mengalami pertumbuhan minus di tahun 2020 karena sejumlah lapangan usaha mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19. Kontraksi terjadi pada beberapa sektor usaha, yakni penyedia akomodasi makan minum, transportasi, pertambangan penggalian, jasa perusahaan perdagangan, jasa pendidikan dan kontruksi. Sementara itu yang mengalami pertumbuhan positif, yakni sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Untuk sektor pertanian masih bertahan selama pandemi, bukan hanya produksi beras, tapi juga tanaman holtikultura. Selain itu, terkait adanya covid-19 membuat tiga sektor mengalami peningkatan, yakni informasi, komunikasi, dan kesehatan.

Pada Tahun 2021 nilai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin kembali tumbuh positif menjadi sebesar 3,42 persen. Hal ini menunjukkan membaiknya perekomian di Kabupaten Musi Banyuasin secara umum. Di tahun 2021, struktur perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin tidak banyak perubahan. Kontribusi terbesar berasal dari sektor Pertambangan dan Penggalian, sedangkan berdasarkan komponen pengeluaran, pengeluaran terbesar adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

2.2.3.2. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan. Perangkat Indikator untuk menuju Desa Maju dan Mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.

Realisasi Indeks Desa Membangun (IDM) dihitung berdasarkan rata – rata Indeks Ketahanan Sosial (IKS, Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE, dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Pada Tahun 2021 nilai Indeks Desa Membangun (IDM) mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 0,6598 persen menjadi sebesar 0,704 persen. Secara rata – rata IDM Kabupaten Musi Banyuasin masuk kategori desa berkembang (0,5989 < IDM ≤ 0,7072) yaitu sebesar 0,704 persen dari target sebesar 0,704, namun belum tercapai sesuai target kondisi akhir kinerja di tahun 2022 sebesar 0,7331.

2.2.3.3. Indeks Gini

Indeks Gini (*Gini Ratio*) merupakan salah atu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Realisasi indeks gini Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2021 sebesar 0,326 dari target sebesar 0,31 dibandingkan di Tahun 2020 realisasi sebesar 0,321 dari target 0,34. Hal ini

menunjukkan tingkat ketimpangan penghasilan penduduk Musi Banyuasin semakin rendah dan menunjukan tren positif.

Upah minimum kabupaten menjadi faktor pendorong sekaligus penghambat turunnya ketimpangan masyarakat. Tingginya upah minimum bagi masyarakat yang berstatus buruh dapat meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat berpendapatan 40 persen ke bawah yang bekerja sebagai buruh di perusahaan. Disisi lain, tingginya upah minimum ini juga dapat mendorong meningkatnya pendapatan masyarakat dengan pendapatan 20 persen ke atas yang bekerja pada sektor formal.

2.2.4 Menurunkan Angka Kemiskinan

Sasaran strategis 4 ini merupakan salah satu pendukung Misi ke-3 yang ditetapkan dalam perubahan dalam RPJMD 2017 – 2022, yaitu “Meningkatnya Kemandirian Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan” dan tujuan “Menurunkan Angka Kemiskinan”. Untuk mengukur sasaran ke empat tersebut ada 3 (tiga) indikator sasaran, yakni Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Nilai Tukar Petani.

2.2.4.1. Angka Kemiskinan

Realisasi angka kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami fluktuatif dengan tren yang menunjukkan peningkatan kinerja dan telah dilakukan penyesuaian target seiring dengan terjadinya pandemic Covid-19 yang memberikan dampak terhadap target kinerja angka kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin dalam

hal penurunan angka kemiskinan pada tahun 2021 adalah sebesar 15,84.

Angka ini turun 0,29 % dibanding tahun 2020 dimana realisasi angka kemiskinan sebesar 16,13 %. Apabila dibanding dengan target akhir tahun 2022 sebesar 13,20% angka kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin masih diperlukan secara masif agar angka kemiskinan dapat turun secara signifikan.

2.2.4.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatnya pasokan tenaga kerja. Realisasi indeks penganguran terbuka pada tahun 2021 sebesar 3,99 % dari target 4,44% realisasi ini menurun jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 4,79% dari target 4,62%, namun memang belum mencapai target kondisi akhir kinerja di tahun 2022 sebesar 4,24. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus melakukan upaya dan strategi dalam mencapai target tersebut diupayakan dengan pendataan lowongan kerja diperusahaan dan melakukan kerjasama dengan semua pihak terkait penempatan kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pengawasan ketenagakerjaan.

2.2.4.3 Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani merupakan indikator *proxy* kesejahteraan petani. NTP merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (lt) dengan indeks harga yan dibayar petani (lb). Realisasi

nilai tukar petani kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2020 sebesar 95,36 % dari target sebesar 98,9 %, namun memang belum tercapai sesuai target kondisi akhir kinerja di tahun 2022 sebesar 100,2%.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus melakukan upaya dan strategi yang dilakukan untuk mencapai target di kondisi akhir melalui berbagai program di sektor pertanian, pertenakan, dan perkebunan di Dinas Tanaman Pangan, Holikultura dan Peternakan dan Dinas Pekerbunan Kabupaten Musi Banyuasin guna meningkatnya Nilai Tukar Petani.

2.2.5 Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia

Sasaran strategis 5 ini merupakan salah satu pendukung Misi ke-4 (empat) yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2017–2022, yaitu "Menyediakan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Terjangkau" dan tujuan "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin". Untuk mengukur sasaran ke-5 (lima) tersebut ada 1 (satu) indikator sasaran, yaitu Indeks Pembangunan Manusia.

2.2.5.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia ini menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). IPM dihitung melalui pembentukan

indeks setiap komponennya dan merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

Realisasi IPM di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami fluktuatif dengan tren yang menunjukkan peningkatan kinerja dalam hal peningkatan IPM pada tahun 2021 adalah sebesar 68,10. Angka ini meningkat sebesar 0,41 poin dibandingkan tahun 2020 dimana realisasi IPM sebesar 67,69. Ini disebabkan adanya tren positif dari masing masing variabel pembentuk IPM antara lain Angka harapan hidup, Rata rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, dan perngeluaran perkapita. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun Perubahan RPJMD sebesar 70,77, IPM Kabupaten Musi Banyuasin masih diperlukan upaya yang masif agar angka IPM dapat meningkat secara signifikan.

Pembangunan manusia di Kabupaten Musi Banyuasin terus memperlihatkan perkembangan yang positif. Dalam kurun waktu tahun 2015-2021, tren IPM Kabupaten Musi Banyuasin terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan meningkat sebesar 1,14 poin yang menunjukkan semakin baiknya pembangunan manusia di Kabupaten Musi Banyuasin

2.2.6 Meningkatnya Prestasi Generasi Muda

Sasaran strategis 6 ini merupakan salah satu pendukung Misi ke-5 (lima) yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2017–2022 yaitu “Menciptakan Generasi Muda Musi Banyuasin yang Religius,

Berprestasi serta Anti Narkoba" dan tujuan "Meningkatnya Prestasi Generasi Muda". Untuk mengukur sasaran ke-6 (enam) tersebut ada 1 (satu) indikator sasaran yakni, Persentase Penghargaan yang dicapai oleh Generasi Muda Minimal di tingkat Provinsi terhadap generasi muda yang dibina.

2.2.6.1. Persentase Penghargaan yang dicapai oleh generasi muda minimal ditingkat provinsi terhadap generasi muda yang dibina

Realisasi persentase penghargaan yang dicapai oleh generasi muda minimal ditingkat provinsi terhadap generasi muda yang dibina di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021 sebesar 91,48 dengan target 93,97, angka ini meningkat dibandingkan tahun 2020 dimana realisasi persentase penghargaan yang dicapai oleh generasi muda minimal ditingkat provinsi terhadap generasi muda yang dibina sebesar 16,49 hal ini dikarenakan pada tahun 2020 adanya pamdemi covid-19 yang mengakibatkan banyak pihak penyelenggaraan kejuaraan / lomba tidak dapat menyelenggarakan kejuaraan.

Jumlah penghargaan yang dicapai oleh generasi muda minimal di tingkat Provinsi sebanyak 891 penghargaan berbanding dengan jumlah generasi muda yang dibina sebanyak 974 orang. Penghargaan didapat dari Lomba Seleksi Tilawatil Qur'an 19 penghargaan, Kejuaraan olahraga NPCI (National Paralympic Committee Indonesia) 68 penghargaan, Kejuaraan Olahraga Pelajar pada Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLP-D) 162 penghargaan, Kejuaraan Olahraga Prestasi pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) 481

penghargaan, Jambore Pemuda Daerah 71 penghargaan, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) 5 penghargaan, Gala Siswa indonesia (GSI) 10 penghargaan, Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) 2 penghargaan, Lomba Video Pekan Kebudayaan Daerah Provinsi 3 penghargaan, Lomba Kesenian Festival Sriwijaya 45 penghargaan, Lomba Sains dan Pendidikan 18 penghargaan, Kompetensi Siswa Nasional Tingkat SMP 15 penghargaan.

Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2022 yaitu sebesar 94,80% maka baru tercapai 91,48%. Untuk mencapai target tersebut maka perlu langkah untuk memperbanyak event lomba tingkat Kabupaten dalam rangka mengasah kemampuan generasi muda dalam kejuaraan/lomba tingkat Provinsi maupun yang lebih tinggi.

2.2.7 Meningkatnya Lingkungan Hidup

Sasaran strategis 7 ini merupakan salah satu pendukung Misi ke-6 (enam) yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2017–2022 yaitu "Mengelola Sumber Daya Alam Secara Optimal dan Bertanggung jawab dengan Memperhatikan Aspek Kelestarian Lingkungan (*Green Gowth Development*)" dan tujuan "Meningkatkan Lingkungan Hidup". Untuk mengukur sasaran ke-7 (tujuh) tersebut ada 1 (satu) indikator sasaran yakni, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

2.2.7.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang merupakan akumulasi komponen Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Kualitas Udara. Realisasi indeks kualitas lingkungan hidup pada

Tahun 2021 sebesar 73,11 dari target 74,78 meningkat dibandingkan di Tahun 2020 realisasi sebesar 72,78 dari target 72,78. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2022 yaitu sebesar 75,02 maka baru tercapai 73,11.

2.2.8 Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran strategis 8 ini merupakan salah satu pendukung Misi ke-7 (tujuan) yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2017–2022, yaitu "Memberdayakan Perempuan dan Melindungi Anak serta Penyandang Disabilitas" dan tujuan "Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak". Untuk mengukur sasaran ke-8 (delapan) tersebut ada 2 (dua) indikator sasaran, yakni Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Persentase Kecamatan Layak Anak.

2.2.8.1. Indeks Pembangunan Gender

Realisasi Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2021 sebesar 82,90 dari target sebesar 83 yang meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebesar 82,68 dari target sebesar 82,70. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun Perubahan RPJMD sebesar 83, Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Musi Banyuasin masih diperlukan sedikit upaya agar angka Indeks Pembangunan Gender dapat meningkat secara signifikan.

2.2.8.2. Persentase Kecamatan Layak Anak

Persentase kecamatan layak anak diukur melalui pemenuhan hak dan perlindungan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan

berpartisipasi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Realisasi indikator persentase kecamatan layak anak pada tahun 2021 sebesar 53,34 persen dari target sebesar 46,67 persen yang meningkat signifikan dibandingkan tahun 2020 sebesar 40 persen dari target sebesar 40 persen. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun Perubahan RPJMD sebesar 53,34, persentase kecamatan layak anak Kabupaten Musi Banyuasin telah mencapai target yang ditentukan pada kondisi akhir RPJMD di tahun 2022.

2.2.9 Meningkatkan Pelayanan Terhadap Disabilitas

Sasaran strategis 9 ini merupakan salah satu pendukung Misi ke-7 (tujuan) yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2017–2022 yaitu "Memberdayakan Perempuan dan Melindungi Anak serta Penyandang Disabilitas" dan tujuan "Meningkatkan Pelayanan Terhadap Disabilitas". Untuk mengukur sasaran ke-9 (sembilan) tersebut ada 1 (satu), yakni Persentase Disabilitas yang mendapat layanan.

2.2.9.1. Persentase Disabilitas yang Mendapat Layanan

Realisasi persentase penyandang disabilitas yang mendapat layanan pada Tahun 2021 sebesar 84,12 persen dari target sebesar 78 persen dibandingkan pada Tahun 2020 realisasi sebesar 65,59 persen dari target sebesar 61 persen. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun Perubahan RPJMD sebesar 90 persen, persentase disabilitas yang

mendapat layanan Kabupaten Musi Banyuasin masih diperlukan upaya yang masif agar angka persentase disabilitas yang mendapat layanan dapat meningkat secara signifikan. Angka persentase penyandang disabilitas tersebut didapat dari disabilitas yang mendapatkan pelayanan sebanyak 1.012 orang berbanding dengan jumlah disabilitas sebanyak 1.203 orang. Peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi karena adanya perhatian yang sangat besar dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam memberikan pelayanan dan bantuan sosial kepada para Penyandang Disabilas.

Berikut Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2017 – 2022 sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.75 berikut ini:

Tabel 2.75
Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Musi Banyuasin
Periode 2017 – 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	Kondisi Awal	2017		2018		2019		2020		2021		2022	Kondisi Akhir	Capaian Terhadap Target 2021	
			2016	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R		RPJMD	%	Notifikasi
1	1 Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	3	N/A	3	4	4	4	133.33	
	2 Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	80	80.05	82	83.66	84	85.21	86	85.35	88	87,05	90	90	98.92	
	3 Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.2	2.1	2.8	2.77	3	2,82	4	4	94.00	
2	4 Persentase Jalan Kabupaten dan Jalan Strategis Lainnya yang Terkoneksi dalam Kondisi Mantap	%	48.6	55	54.33	75.03	49.88	76.98	56.72	78.38	57.88	79.28	72,29	79.94	79.94	91.18	
	5 Persentase KK yang terlayani Air Bersih	%	60.37	70	70	80	78.3	100	80.54	85	85.47	92	87,51	100	100	95.12	

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	Kondisi Awal	2017		2018		2019		2020		2021		2022	Kondisi Akhir	Capaian Terhadap Target 2021	
			2016	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R		RPJMD	%	Notifikasi
	6 Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi (Air Limbah) yang layak	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80	73.14	90	80	95	81,26	100	100	85.54	
3	7 Pertumbuhan Ekonomi	%	N/A	5,05 - 5,25	3,02	5,25 - 5,4	3,21	6,4 - 5,6	4,57	2,00-2,50	-0,04	2,40-2,70	3,42	2,50-3,00	2,50-3,00	126.67	
	8 Indeks Desa Membangun	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.688	0.6293	0.6598	0.6598	0.704	0,704	0.7331	0.7331	100.00	
	9 Indeks Gini	Indeks	0.25	0.25	0.27	0.25	0.33	0.25	0.31	0.34	0,320	0.31	0,326	0.31	0.31	105.16	
4	10 Angka Kemiskinan	%	17.38	17.21	16.75	15.60	16.52	14.20	16.41	15.20	16.13	14.25	15.84	13.2	13.2	111.16	
	11 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5.29	5.20	5.20	5.01	4.91	4.82	4.15	4.62	4.79	4.44	3.99	4.24	4.24	89.86	
	12 Nilai Tukar Petani	Indeks	NA	94.55	95.03	95.8	99.72	96.68	90.52	98.9	95.36	100.1	NA	100.2	100.2	NA	
5	13 Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	65.76	66.96	66.96	7.60	67.57	69.88	67.83	68.17	67.69	69.47	68.1	70.77	70.77	98.03	

NO.		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	Kondisi Awal	2017		2018		2019		2020		2021		2022	Kondisi Akhir	Capaian Terhadap Target 2021	
				2016	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R		RPJMD	%	Notifikasi
6	14	Persentase Penghargaan yang dicapai oleh generasi muda minimal ditingkat provinsi terhadap generasi muda yang dibina	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90.52	89.97	90.56	16.49	93.97	91,48	94.8	94.8	97.35	
7	15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,17	54,56	67,20	72,93	65,17	69.37	73.03	73.52	72.78	74.78	73,11	75.02	75.02	97.77	
8	16	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	N/A	81,96	81,97	82	81,97	82.30	82.68	82.70	82.68	83	82,90	83	83	99.88	
	17	Persentase Kecamatan Layak Anak	%	N/A	N/A	N/A	14	26	30	33.33	40	40	46.67	53,34	53.34	53.34	114.29	
9	18	Persentase disabilitas yang mendapat layanan	%	55	14	60	25	55	59	50.61	61	65.59	78	84,12	90	90	107.85	

Keterangan :
- Sudah Tercapai/*on track* (≥100%)
- Perlu Kerja Keras (>50%,<100%)
- Sangat Sulit Tercapai (<50%)
- Belum Dapat diberikan Notifikasi

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa dari 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin hingga pada tahun 2021, 7 Indikator menunjukkan capaian ≥100 persen atau sudah tercapai/*ontrack*, 10 indikator yang masih perlu meningkatkan capaiannya untuk periode kedepan atau memiliki capaian diantara 50 persen hingga 100 persen yang 8 indikator diantaranya telah mencapai ≥90 persen dan 1 indikator yang masih belum dapat dinotifikasi. Tingkat capaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan berjalan dengan sangat baik. Capaian ini tidak terlepas dari komitmen dan dukungan penuh dari kepemimpinan Kepala Daerah beserta jajarannya, disamping itu dalam proses awal perencanaan sampai pada berakhirnya masa pelaksanaan tahun anggaran, program-program tersebut telah melalui serangkaian telaah, evaluasi dan koordinasi seluruh pihak sehingga dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan apa yang diharapkan.

Adapun ketujuh indikator kinerja utama yang mencapai ≥100 persen atau sudah tercapai/*ontrack* tersebut yaitu Indeks Persepsi Anti Korupsi (133,33%), Pertumbuhan Ekonomi (126,67%), Persentase Kecamatan Layak Anak (114,29%), Angka Kemiskinan (111,16%), Persentase disabilitas yang mendapat layanan (107,85%), Indeks Gini (105,16%), dan Indeks Desa Membangun (100,00%). Untuk sejumlah target IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang tingkat pencapaiannya belum mencapai ≥100 persen, masih diperlukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan kulitas kinerja instansi Pemerintah

mengingat bahwa tuntutan peningkatan pelayan publik dan pembangunan pada semua sektor kehidupan bermasyarakat sangat dinamis.

Upaya yang harus dilakukan diantaranya adalah dengan membangun komitmen secara terintegrasi antar perangkat daerah, merumuskan perencanaan program yang matang dan komprehensif serta menetapkan sasaran dan target kinerja yang lebih baik dan terukur. Upaya lain yang tidak kalah penting adalah membangun dan meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pembangunan baik pada tingkat Kabupaten, Provinsi maupun tingkat Nasional.

Bila dikaitkan dengan tahapan keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin 2005-2025, bahwa pada tahapan keempat RPJPD ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Musi Banyuasin yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pembangunan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin semakin maju dan kuat ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan adanya keterpaduan antara pertanian dan industri serta sektor jasa. Hal tersebut terlihat dari capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang telah lebih dari 100 persen yaitu sebesar 126,67 persen. Dari tahun

2012 hingga 2021, tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin menurun sebanyak 3,83 persen. Walaupun mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi covid-19, perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin kembali tumbuh beraktivitas sedia kala.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat serta lembaga ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin tertata dan berfungsi dengan baik. Kondisi ekonomi yang semakin baik didukung oleh pendidikan yang berkualitas, kemampuan iptek yang semakin maju guna berkembangnya investasi dari perusahaan- perusahaan yang ada di daerah. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat mencapai kesejahteraan yang terdepan dengan tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin yang semakin rendah. Kondisi yang maju dan sejahtera semakin terwujud dengan transportasi yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten, dan terpenuhinya kebutuhan perumahan dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung melaui sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan. Keseluruhan capaian pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 sampai dengan 2021 per Urusan pada aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing di bab ini, disajikan pada tabel 2.76 berikut ini.

Tabel 2.76
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kab. Musi Banyuasin
Tahun 2017 - 2021

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2017		2018		2019		2020		2021		2022
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
1	***Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi***												
1,1	Pertumbuhan PDRB	%	5,05 - 5,25	3,02	5,25 - 5,4	3,21	6,4 - 5,6	4,57	2,00 – 2,50	-0,04	2,40 – 2,70	3,42	2,50 – 3,00
1,2	Persentase Angka Kemiskinan	%	17,21	16,75	15,6	16,52	14,20	16,41	15,20	16,13	14,25	15,84	13,20
1,3	Indeks Gini	indeks	0,25	0,27	0,25	0,33	0,25	0,31	0,34	0,32	0,31	0,326	0,30
1,4	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	66,96	66,96	7,60	67,57	7,70	67,83	67,69	67,69	69,47	68,10	70,77
2	***Fokus Kesejahteraan Sosial***												
2,1	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	7,5	7,59	7,6	7,60	7,7	7,61	7,8	7,62	7,9	7,63	8
2,2	Angka Putus Sekolah SD	%	0,1	0,1	0,08	0,01	0,06	0,67	0,04	0,85	0,02	0,02	0,01
2,3	Angka Putus Sekolah SMP	%	0,32	0,32	0,22	0,04	0,12	1,38	0,008	1,59	0,005	0,004	0,002
2,4	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2,5	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2,6	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	99,48	100	99,58	100	99,68	100	99,78	94,65	98,88	98,76	99,9

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2017		2018		2019		2020		2021		2022
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
2,7	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	99,10	100	99,30	100	99,40	100	99,50	99,59	99,60	99,65	99,70
2,8	Angka Usia Harapan Hidup	tahun	68,1	68,14	68,11	68,33	69,00	68,54	68,75	68,75	-	68,84	-
2,9	Persentase Balita Gizi Buruk	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	***Fokus Seni Budaya dan Olahraga***												
2.13.1	Persentase Pemuda yang bebas narkoba	%	99,89	99,90	99,99	99,95	99,9	99,94	99,93	99,94	99,94	99,94	99,96
2.13.2	Persentase perolehan medali emas dalam kejuaraan resmi tingkat provinsi	%	25	22,20	45	19,05	39	19,88	48	8,84	39	13,63	52
2.13.3	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	%	22	40	27	45	32	45	48	45	54	58	60
2.14.1	Persentase Benda/ Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	5	0,94	0,7	7,54	35	28,22	45	29	55	33	60
	ASPEK PELAYANAN UMUM												
1	***Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar***												
1,1	***Pendidikan***												
1.1.1	Persentase terlayaninya pendidikan anak usia dini 0-6 tahun	%	80,74	79,58	82,14	70,33	84,98	72,95	86,56	55,38	88,73	55,38	-
1.1.2	APK SD	%	103,09	104,31	102,76	108,72	102,35	108,29	102,13	115,72	101,83	110,77	101,48
1.1.3	APK SMP	%	108,41	109,18	108,10	109,70	107,17	108,30	106,51	97,17	105,76	98,85	104,42

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2017		2018		2019		2020		2021		2022
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
1.1.4	APM SD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.5	APM SMP	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.6	Jumlah Kelompok Belajar Paket C (Kelompok)	kelompok	20	20	19	19	18	18	17	18	-	17	-
1.1.7	Jumlah Kelompok belajar non formal	kelompok	25	25	24	24	23	23	22	17	-	17	-
1.1.8	Persentase guru bersertifikasi	%	51,38	75,00	52,44	83,62	53,50	90,32	54,56	91,04	-	94,50	-
1,2	***Kesehatan***												
1.2.10	Jumlah kematian balita (per kasus)	KH	9/1000	N/A	8/1000	N/A	7/1000	0/1000	6/1000	150/1000	5/1000	3/1000	4/1000
1.1.1.1	Persentase kasus gizi buruk yang mendapatkan perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.2	Persentase stunting pada balita	%	15,80	21,4	15,80	10,12	14,80	9	13,80	7,67	12,80	2,21	11,80
1.1.2.1	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar terakreditasi baik	%	46,67	43	100	71,4	100	100	100	100	100	100	100
1.1.3.2	Angka Kematian Ibu	KH	61/ 100	9 Kasus	94/ 100000	94/ 100000	88/ 100000	86/ 100000	82/ 100000	63/ 100000	76/ 100000	60/ 100000	70/ 100000
1.1.3.3	Angka Kematian Bayi	KH	17/1000	42 Kasus	16/1000	3/1000	14/1000	5/1000	12/1000	5/1000	10/1000	2/1000	8/1000
1.1.3.4	Angka Kematian Balita	KH	9/1000	N/A	8/1000	N/A	7/1000	0/1000	6/1000	150/1000	5/1000	3/1000	4/1000

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2017		2018		2019		2020		2021		2022
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
1.1.4.1	Persentase Penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	%	38,51	42,23	60	50,81	100	99,70	100	95,08	100	94,66	100
1.1.4.2	Indeks Keluarga Sehat	IKS	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,30	0,19	0,60	0,27	0,80
1.2.14	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80	67	80	76,19	80	85,71	80	90,48	80	95,24	80
1.2.14	Rata-rata indeks kepuasan pelanggan rumah sakit	%	80%	77%	85%	82,66	85%	83,19	88%	85,23	90%	88,76	95%
1.2.15	Tipe kelas Rumah sakit rujukan regional JKN wilayah sumsel	Tipe	Tipe C	Tipe B	Tipe C	Tipe B	Tipe C	Tipe B	Tipe B	Tipe B	Tipe B Pendidikan	Tipe B	Tipe B Pendidikan
1.2.16	Predikat penilaian akreditasi	Tingkat	Paripurna	Paripurna versi 2012	Paripurna	Paripurna versi 2012	Paripurna	Paripurna versi SNARS	Paripurna dan JCI	Paripurna versi SNARS	Paripurna dan JCI	Paripurna versi SNARS	Paripurna dan JCI
1.2.17	Persentase Indikator SPM yang mencapai target	%	80	77	80	82,66	80	83,19	80	83,62	80	81,77 (s.d TW III)	85
1,3	***Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang***												
1.3.1	Rasio panjang jalan kabupaten kondisi mantap	%	55,0	54,52	75,03	49,88	76,98	52,67	78,38	57,88	79,28	72,29	79,94
	Persentase Jalan Kabupaten di Kecamatan yang terkoneksi dengan jalan mantap	%	55	54,52	75,03	49,88	76,98	52,67	78,38%	57,88	79,28%	72,29	79,94%
1.3.2	Rasio jembatan kondisi mantap	%	12 unit	11 unit	15 unit	15 unit	16,32	27,22	17,35	30,42	18,36	22,33	20,40

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2017		2018		2019		2020		2021		2022
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
1.3.3	Rasio drainase jalan kondisi mantap	%	48%	10,44%	52%	11,32%	65%	12,45%	67%	12,54%	68%	15,48%	69%
1.3.4	Rasio Panjang jalan rusak akibat bencana yang direhabilitasi	%	52,36%	9,31%	62,83%	7,20%	69,11%	6,75%	73,30%	4,23%	75,39%	8,73%	77,49%
1.3.5	Rasio jembatan rusak akibat bencana yang direhabilitasi	%	9,79%	5,70%	12,59%	11,40	17,48%	12,49	18,88%	12,43	20,98%	17,68	24,48%
1.3.6	Rasio jaringan irigasi	%	50 m/ha	40 m/ha	40,20 m/ha	12,09 m/ha	40,20 m/ha	18 m/ha	40,20 m/ha	31 m/ha	40,20 m/ha	21,50 m/ha	40,20 m/ha
1.3.7	Prosentase penduduk berakses air minum	%	70%	70%	80%	78,3%	100%	81,24%	100%	85,47%	100%	87,96%	100%
1.3.8	Persentase infrastruktur di kawasan strategis cepat tumbuh	%	40%	30%	45%	48%	50%	49%	60%	51%	70%	58%	75%
1.3.9	Persentase infrastruktur perdesaan dalam kondisi baik	%	50	73,24%	55	74,60	60	76,21%	65	76,14%	70	77,98%	75
1.3.10	Persentase Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan (DLH)	m2	320.931,2 M2	-	322.547,7 M2	-	324.218,25 M2	-	325.218,2 M2	-	327.505,3 M2	-	327.505,3 M2
02.05.10	Luas RTH per luas kawasan perkotaan	%	17	1,5	18	3	75,44	78,82	77,56	78,92	79,2	78,95	80
1.3.11	Ketaatan terhadap RTRW	%	67%	66,69%	71%	70%	73%	100%	75%	75%	77%	77%	80%
1,4	***Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman***												
1.4.1	Rasio Rumah Layak huni	%	5	84,00	40	84,19	45	84,00	47	84,45	52	84,37	52

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2017		2018		2019		2020		2021		2022
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
1.4.2	Persentase kawasan kumuh yang tertangani	%	10	20,02	45	53,06	60	63,78	80	67,11	100	6,7	100
1.4.3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	%	80%	52%	80%	57%	80%	53%	80%	100%	80%	100%	80%
1.4.4	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	75%	95%	75%	98%	80%	100%	85%	100%	85%	100%	85%
1,5	***Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat***												
1.5.1	Penegakkan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.5.2	Tingkat Penyelesaian konflik sosial masyarakat (%)	%	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.5.3	Persentase/angka keikutsertaan penduduk dalam pemilu dan pemilukada di Kabupaten Musi Banyuasin (%)	%	60	60,12	71	63,67	75	82	75	75	75	-	75
1.5.4	Jumlah kegiatan Pembinaan Politik Daerah sesuai Kalender Kerja	%	14	12	28	4	28	1	20	1	20	1	20
1.5.5	Tingkat Penyelesaian Konflik Sosial Masyarakat	%	65	100	70	100	75	100	100	100	100	100	100
1.5.6	Angka Penurunan Kasus Konflik Sosial	%	60	52,85	65	100	70	100	100	100	-	-	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2017		2018		2019		2020		2021		2022
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
1.5.7	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	%	14	12	28	4	28	1	28	1	28	10	-
1.5.4	Persentase penurunan titik kebakaran (hotspot) hutan dan lahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.5.5	Jumlah Desa Tangguh Bencana	desa	3	3	6	3	9	3	12	3	15	3	18
1.5.6	Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1,6	***Sosial***												
1.6.1	Angka PMKS yang mendapat layanan	%	12	5,49	14	32	90	26,27	95	71,41	95	72,34	100
1.6.2	Persentase penyandang disabilitas yang mendapat layanan	Orang	55	14	60	25	59	292	61	65,59	78	84,12	90
1.6.3	Persentase panti sosial yang dibina	%	80%	100%	85%	100%	90%	75%	95%	100%	100%	100%	-
1.6.4	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang dibina	%	4	3	5	4	7	4	10	5	10	6	-
1.6.5	Persentase lembaga sosial yang berdaya	%	85%	100%	85%	100%	90%	100%	95%	100%	100%	100%	100%
1.6.6	Persentase Taman Makam Pahlawan da Tugu yang dikelola	%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2017		2018		2019		2020		2021		2022
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
1.6.7	Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan hidup PMKS	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.6.8	Korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	***Fokus Pelayanan Wajib Tidak Dasar***												
2,1	***Tenaga Kerja***												
2.1.1	Rasio penduduk yang bekerja	%	80	94,80	81	94,99	82	83,19	83	67,32	85	66,42	85
2.1.2	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	48	29,14	50	32,32	53	16,50	55	38,66	57	40,66	58
2.1.3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,2	5,2	5,01	4,91	4,82	4,15	4,62	4,79	4,44	3,99	4,24
2.1.4	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	67	67,64	68	65,36	68	66,35	68	70,61	69	69,18	69
2.1.5	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	6,5	7,3	6,2	7,1	6,0	6,0	5,7	12,59	5,4	8,8	5,1
2.1.6	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	%	-	-	-	-	-	-	-	-	50	51,04	55

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2017		2018		2019		2020		2021		2022
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
2,2	***Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***												
2.2.1	Jumlah PD yang mengimplementasikan PPRG	PD	15	16	17	20	19	30	20	21	22	22	24
2.2.2	Rasio KDRT perempuan	%	0,9	0,01	0,8	0,076	0,78	0,007	0,75	0,0041	0,72	0,006	0,7
2.4.3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	81,96	81,97	82	81,97	82,3	82,68	82,7	82,85	83	82,90	83
2.4.4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	65,47	58,11	65,77	58,11	66	73,01	66,2	60,06	66,5	59,84	66,5
2.4.5	Penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindakan kekerasan	%	23	19	28	20	33	27	38	28	43	43	48
2.4.6	persentase kecamatan layak anak	%	-	-	14	26	30	33,33	40	40	46,67	53,34	53,34
2.4.7	Regulasi tentang peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	peraturan	1	1	5	5	7	3	9	4	11	5	13
2,3	***Ketahanan Pangan***												
2.3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Pangan	PPH	88,9	89,1	89,7	96,8	89,72	96,9	89,75	98,1	89,85	88,57	90
2.3.2	Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi Pangan (Angka Skor)	Angka skor	84	83,5	86	85,4	85,5	86,9	86	88,00	86,5	88,5	87
2.3.3	Ketersediaan bahan pangan (beras) per 1000 penduduk	per 1000 penduduk	178,81	234,21	179,2	371,28	185,2	209,5	195,2	312,2	196,2	281,9	198,35

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2017		2018		2019		2020		2021		2022
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
2.3.4	Angka konsumsi rumah tangga per kapita (Rp/orang)	Rp/orang	1981,4	200,4	2023,6	2004,9	2020	2011,6	2050	2059,8	2100	2086,2	2150
2.3.5	Persentase desa mandiri pangan	%	31,36	31,36	33,47	33,47	35,59	15,86	37,71	23,45	39,83	24,35	41,95
2.3.6	Persentase Pangan Aman di Konsumsi	%	-	-	80	85	82	76,8	-	84,23	89,00	85,28	89,00
2.3.7	Jumlah pangan segar asal tumbuhan PSAT yang aman dikonsumsi		-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	5
2.3.8	Jumlah lumbung dan sarana prasarana yang dibangun (unit)	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	5
2,4	***Pertanahan***												
2.4.1	Prosentase Luas lahan bersertifikat/Prosentase lahan tanah aset daerah yang disertifikatkan	%	55	20,22	65	20,66	70	21,32	75	22,18	80	22,71	80
2.4.2	Prosentase lahan untuk perumahan dan permukiman yang dibebaskan	%	4	7,4	12	23,71	22	26,10	46	27,57	51	29,45	59
2,5	***Lingkungan Hidup***												
2.5.1	Persentase penanganan sampah	%	89,36	87,98	90,36	80,36	91,36	91,14	92	92,50	92,36	92,54	93,36
2.5.2	Persentase bank sampah aktif	%	30	26	40	26	50	15	60	60	70	65	80
2.5.3	Indeks kualitas air	indeks	86,90	61,11	87,20	87,2	87,39	87	87,50	55,56	87,65	57,45	87,70
2.5.4	Indeks kualitas udara	indeks	85,70	71,2	86,00	87,29	87,00	83,02	88,02	85,52	89,75	87,98	90,00

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2017		2018		2019		2020		2021		2022
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
2.5.5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	65,17	54,56	67,20	72,93	69,37	73,03	71,55	72,78	74,78	73,11	75,02
2.5.6	Penegakkan Hukum Lingkungan	%	100	85,71	100	96,15	100	100	100	100	100	100	100
2.5.7	Jumlah Kader Lingkungan	org	128	520	278	520	428	620	578	625	728	634	878
2.5.8	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	%	100	92	100	64	100	88,46	100	90	100	91	100
2.5.9	Persentase meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	%	70	29,7	73	20,6	75,44	78,82	77,56	78	79,2	79	80
2.5.10	Luas RTH per luas kawasan perkotaan	%	17	1,5	18	3	19	5,5	19	17	20	18	20
2,6	***Kependudukan dan Catatan Sipil***												
2.6.1	Rasio Kepemilikan KTP elektronik	%	78	76,71	80	97,12	82	99,91	84	99,99	86	99,45	88
2.6.2	Lama Pengurusan KTP	hari	7	5	7	5	6	1	6	1	5	1	5
2.6.3	Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi Kependudukan	%	70	70,05	70	82,45	75	83,71	80	83,75	85	94,11* (s.d. TW II)	85
2,7	***Pemberdayaan Masyarakat dan Desa***												
2.7.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat /LPM (Kelompok)	%	5	3	10	11	13	13	15	15	18	18	20

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2017		2018		2019		2020		2021		2022
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
2.7.2	Jumlah BUMDes yang mempunyai 1 unit usaha yang telah berjalan dengan baik (desa)	desa	150	102	180	152	200	180	227	227	227	227	227
2.7.3	Jumlah PKK yang aktif (kelompok)	kelompok	5	5	10	15	13	10	15	15	18	18	20
2.7.4	Persentase desa inovasi	%	23	7	30	19	40	30	50	45	65	50	85
2.7.5	Persentase aparat pemerintah desa yang berkinerja baik (%)	%	45	36	50	48	55	45	65	55	75	75	80
2.7.6	Persentase Posyantekdes yang terbentuk dan aktif	desa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.7.7	Indeks Desa Membangun	-	-	-	-	-	-	-	0,6598	0,6598	0,704	0,704	0,7331
2.7.8	Persentase APBDes yang sesuai RPJMDes dan RKPDes	%	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
2.7.9	Persentase Penyampaian Laporan APBDes yang tepat waktu	%	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
2,8	***Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana***												
2.8.1	Prevalensi peserta KB aktif	%	83,16	97,94	84,75	84,25	86,3	82,08	87,11	84,72	88,9	84,96	90,12
2.8.2	Rasio petugas KB /desa	org/desa	1,06	0,17	1,05	0,15	1,04	0,14	1,03	0,13	-	0,13	-
2.5.3	Tingkat Prevalensi peserta KB pria	%	4,5	4,50	4,6	4,87	4,7	4,54	4,8	4,22	4,9	3,88	5
2,9	***Perhubungan***												
2.9.1	Jumlah Prasarana Transportasi Darat, Laut,Udara dan Kereta Api	lokasi	31	51	33	52	35	52	37	52	39	52	41

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2017		2018		2019		2020		2021		2022
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
2.9.2	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas per tahun	%	3	3,3	3	4,2	3	4,3	3	3	3	3 1,7	3
2.9.3	Persentase Kepemilikan KIR (Pengujian Kendaraan Bermotor)	%	60	62	70	74	75	78	80	79	85	82	90
2,1	***Komunikasi dan Informatika***												
2.10.1	jumlah media komunikasi publik milik Pemda (website, media cetak, radio, televisi, media sosial)	media	31	43	51	51	75	104	90	104	100	105	110
2.10.2	Persentase Informasi yang di Publiksai melalui berbagai media (Website, Media Sosial, Radio)	%	-	-	-	-	-	-	-	-	50	100	100
2.10.3	Cakupan layanan telekomunikasi	%	60	60	65	66,15	68	99,5	70	99,5	72	97,17	-
2.10.4	Jumlah kerjasama dengan media massa (elektronik, online, luar ruangan)	kerjasama	4	4	5	5	7	9	10	72	15	193	100
2.10.5	Persentase Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi (Wifi, CCTV, Website)	%	-	-	-	-	-	-	-	-	50	53	100
2.10.6	Persentase Luas Wilayah Bebas Area Blank Sopt	%	-	-	-	-	-	-	-	-	100	96,7	100
2.10.7	Persentase Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah dalam rangka Pengamanan Informasi Milik Pemerintah	%	-	-	-	-	-	-	-	-	40	58,33	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2017		2018		2019		2020		2021		2022
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
2.10.8	Persentase Citra Positif berita tentang kemajuan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	%	-	-	-	-	-	-	-	-	100	93,79	100
2.10.9	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	%	-	-	-	-	-	-	-	-	80	100	100
2.10.10	Persentase Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	%	-	-	-	-	-	-	-	-	50	87	80
2,11	***Koperasi Usaha Kecil dan Menengah***												
2.11.1	Persentase Usaha Mikro dan kecil yang sehat	%	60	60	65	65	70	70	-	-	-	-	-
2.11.2	Persentase UMKM yang sehat	%	40	40	50	50	60	60	70	62	80	79	80
2.11.3	Angka pertumbuhan wirausaha baru (org)	org	1200	1200	1400	1200	1400	1500	1650	2000	1900	2045	2100
2.11.4	Rasio jumlah koperasi aktif	%	93	95	94	96	95	96	96	98,80	97	98,98	98
2.11.5	Jumlah regulasi Koperasi	bh	93	98	94	98	95	98	-	-	-	-	-
2.11.6	Persentase UMKM yang mengakses sistem pendukung usaha	%	60	60	65	65	70	70	75	75	80	78	100
2.11.7	Persentase Koperasi Sehat	%	-	-	-	-	-	-	20	16,01	22,5	18,45	25
2.11.8	Jumlah Koperasi yang mampu berdaya saing dengan lembaga keuangan lainnya	%	-	-	-	-	-	-	10	20	15	25	20
2.11.9	Jumlah Koperasi Baru	%	-	-	-	-	-	-	10	15	15	18	20

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2017		2018		2019		2020		2021		2022
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
2,12	***Penanaman Modal***												
2.12.1	Nilai realisasi investasi PMDN	Triliun	1,171 T	2,291 T	1,433 T	5,463 T	1,754 T	2,018 T	2,147 T	1,286 T	2,628 T	3,981 T	3,216 T
2.12.2	Nilai realisasi investasi PMA	Triliun	0,500 T	0,651 T	0,6 T	0,422 T	0,7 T	0,774 T	0,8 T	0,698 T	0,9 T	0,890 T	1 T
2.12.3	Nilai survey kepuasan masyarakat bidang pelayanan perizinan	%	82,15	82,22	82,20	88,37	83,60	88,62	84,20	88,61	85	98,23	85
2.12.4	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	izin	1800	1292	2000	1402	2200	2921	2300	6815	2400	4351	2400
2.12.5	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik	%	50	48	50	48	55	49	-	-	-	-	-
2.12.6	Persentase pertumbuhan nilai investasi PMA	%	7,26	9,46	8,12	47,12	8,76	55,37	9,21	55,12	9,49	56,87	9,63
2.12.7	Persentase pertumbuhan nilai investasi PMDN	%	22,32	43,93	22,33	4,61	22,34	28,24	22,35	28,45	22,36	29,47	22,37
2.12.8	Persentase Izin yang Penerbitan sesuai standar SOP	%	80	69,66	82	46,46	85	93	87	95,84	90	95	90
2,13	***Kepemudaan dan Olahraga***												
2.13.1	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	%	22	40	27	45	32	45	48	46	50	48	50
2.13.2	Persentase Pemuda yang bebas narkoba	%	99,89	99,90	99,99	99,95	99,9	99,93	99,93	99,94	99,94	99,94	99,96
2.13.3	Persentase perolehan medali emas dalam kejuaraan resmi tingkat provinsi	%	20	22,20	20	46,43	20,79	29,10	21,08	8,84	21,08	13,63	22,09

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2017		2018		2019		2020		2021		2022
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
2.13.4	Peringkat dalam kejuaran resmi olahraga tingkat provinsi	%	2	2	2	2	2	2	1	3	1	2	1
2.13.5	Persentase pemuda yang berusaha	%	17	18,76	21	19,43	24,92	22,14	28,67	32,81	32,42	29,38	36,17
2.13.6	Ratio generasi muda yang berpresetasi tingkat provinsi	%	-	-	-	-	0,20	0,03	0,25	0,06	0,35	0,18	0,40
2,14	***Kebudayaan***												
2.14.1	Persentase Benda/Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	0,5	0,94	0,7	7,54	0,7	28,22	0,7	29	0,7	33	0,7
2,15	***Perpustakaan***												
2.15.1	Persentase peningkatan bahan pustaka	%	6,1	20	6,5	23,53	7	7,67	7,5	7,377	8,0	18,19	8,5
2.15.2	Rasio jumlah pengunjung perpustakaan	%	3,41	9,13	3,47	10,85	3,5	11,60	3,53	2,65	3,55	0,21	3,58
2,16	***Kearsipan***												
2.16.1	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan kearsipan secara baku	%	72	100	74	100	76	100	78	100	80	97,91	81
2.16.2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5
2.16.3	Persentase arsip statis dan in aktif yang terdata dan tertata dengan baik	%	20	25	24	40,19	26	53,84	28	53,84	-	-	-
2.16.4	Persentase layanan arsip yang berbasis teknologi dan informasi	%	1	1	2	2	2	3	3	3	-	-	-

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2017		2018		2019		2020		2021		2022
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
2,17	***Statistik***												
2.17.1	Jumlah buku statistik daerah	Buku	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
2.17.2	Jumlah Buku PDRB Kabupaten	Buku	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
2.17.3	Jumlah Buku Kecamatan dalam Angka	Buku	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
2.17.4	Tersedianya Satu Data Kabupaten Musi Banyuasin	Aplikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
2.17.5	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	%	-	-	-	-	-	-	-	-	80	97	100
2.17.6	Tersedianya Data Statistik Umum dan Dasar Skala Kabupaten	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
2,18	***Persandian***												
2.18.1	Rasio perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan	%	7	32	14	32	28	32	32	32,26	48	32	48
2.18.2	Rasio jenis informasi yang diamankan dengan persandian	%	2	80	2	85	2	90	2	100	2	100	2
2.18.3	Rasio konten informasi dari setiap jenis informasi yang diamankan dengan persandian	%	4	86,76	6	89,76	8	0	10	97,80	12	98,76	12

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2017		2018		2019		2020		2021		2022
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
3	***Fokus Layanan Urusan Pilihan***												
3,1	***Perikanan***												
3.1.1	Persentase penurunan Ilegal Fishing	%	5	5	5	3	5	5,4	5	5,7	5	6	-
3.1.2	Produksi perikanan budidaya	ton	18.964,74	19.003,27	20.861,21	19.276,07	22.947,33	21.886,25	25.242,07	23.996,02	27.766,27	24.586	30.542,90
3.1.3	Produksi Perikanan Tangkap	ton	22.412,80	22.229,60	22.636,93	23.607,17	22.863,30	24.315,38	23.091,93	25.101,89	23.091,85	26.895	23.556,08
3.1.4	Nilai tukar nelayan / NTN	NTN	1,25	1,23	1,3	1,35	1,35	1,37	1,38	1,37	1,38	1,37	-
3.1.5	Cakupan bina kelompok nelayan	%	28	30	35	45	50	58	65	59	70	63	-
3.1.6	Produk olahan perikanan	ton	203,89	200	207,96	206	212,12	207,72	216,36	207,24	220,69	209,64	225,11
3.1.7	Produksi Benih Ekor	ton	1.650.000	403.575	1.815.000	1.399.102	1.996.500	995.000	2.415.765	1.051.050	2.415.765	1.123.498	2.657.341
3.1.8	Nilai Investasi sektor perikanan	Milyar	2.237	2.705	2.282	2.705	2.328	2.705	2.374	2.705	-	2.705	-
3.1.9	Persentase Pokmaswas yang Aktif	%	30	32	34	36	39	43	46	46	48	47	50
3.1.10	Angka Konsumsi Ikan	%	34,32	42,63	34,91	35,24	35,61	40,99	36,32	40,52	37,05	41,23	37,79
3,2	***Pariwisata***												
3.2.1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	21	42,806	22,5	43,406	44,006	44,162	44,706	34.187	45,506	35.056	46,406
3.2.	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	%	110,56	N/A	1,40	N/A	1,50	1,74	1,59	1,87	1,79	2,54	1,87
3.2.2	Peningkatan jumlah objek wisata	unit	25	25	28	30	32	57	36	62	-	62	-

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2017		2018		2019		2020		2021		2022
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
3,3	***Pertanian***												
3.3.1	Produksi tanaman pangan												
	- Padi	ton	474.069	388.081	502.939	493.467	533.551	293.045	566.085	366.109	574.980	380.236	-
	- Jagung	ton	121.522	59.424	126.428	51.941	134.116	44.312	142.283	41.075	156.930	42.912	-
3.3.2	Persentase Produksi Tanaman Pangan												
	- Padi	%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06	1,02	1,07
	- Jagung	%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,92	1,87	1,90
3.3.3	Produktivitas Tanaman pangan												
	- Produktifitas Padi (Ku/Ha)	Ku/Ha	58	49,65	59,74	53,26	61,53	48,81	63,38	48,8	65	49,23	-
	- Produktifitas Jagung (Ku/Ha)	Ku/Ha	72	69,08	74,16	71,5	76,38	56,81	78,67	66,2	80	68,23	-
3.3.4	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan												
	- Padi	%	-	-	-	-	-	-	-	22,30	1,00	7,63	1,00
	- Jagung	%	-	-	-	-	-	-	-	-19,40	0,67	37,05	0,67
3.3.3	Produksi tanaman												
	- Karet	Ton/ha	1,03	1,01	1,03	1,01	1,03	1,01	1,03	1,02	1,05	1,05	1,05
	- Sawit	Ton/ha	2.672.306	2.659.692	2.712.391	1.865.426	2.753.077	2.195.331	2.794.373	2.295.423	2.890.921	2.435.907	-
3.3.4	Produktivitas Tanaman perkebunan												
	- Produktifitas Karet (Ton/Ha)	Ton/Ha	1,03	1,01	1,03	1,01	1,03	1,01	1,03	1,02	1,05	1,03	1,05

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2017		2018		2019		2020		2021		2022
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
	- Produktifitas Sawit (Ton/Ha)	Ton/Ha	12,15	12,06	12,15	14,77	12,15	15,32	12,15	15,54	15,15	16,74	15,15
3.3.5	Luas Areal Perkebunan												
	- Karet	Ha	220,686	211,418	220,686	210,61	220,686	213,696	220,686	215.430	225.203	216.894	225.203
	- Sawit	Ha	269,612	270,243	269,612	166,875	269,6122	173,175	269,612	175.690	280.129	179.653	280.129
3.3.6	Luas areal Tanaman Perkebunan (Ha)	Ha	498,955	491,332	499,161	496,543	499,211	517,532	499,646	517.980	499,851	520.208	499,955
3.3.7	Persentase peningkatan produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan	%	0,97	1,06	0,98	1,09	1,05	3,18	1,10	39,88	1,15	40,98	1,20
3.3.8	Persentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas Strategis Perkebunan	%	1,15	1,26	1,19	1,22	1,25	3,34	1,30	2,70	1,35	2,59	1,40
3.3.9	Persentase meningkatnya sarana dan prasarana pengendalian bencana	%	-	-		-	-	-	75	60	80	65	100
3.3.10	Persentase lahan perkebunan yang bersertifikat	%	2,2	2,3	350	450	2,975	3,056	2,4	3,13	3,37	3,15	3,277
3.3.11	Persentase Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R)	%	0,55	0,55	1,91	1,64	2,14	2,15	2,36	2,63	2,56	N/A	2,75
3.3.6	Jumlah produksi tanaman buah-buahan												
	- Produksi Duku (ton)	ton	293	204	950,00	1993	296,00	528	961,00	527	-	-	-
	- Produksi Durian (ton)	ton	235	693	1,502	4128	300	1366	1,45	1398	-	-	-

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2017		2018		2019		2020		2021		2022
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
	- Produksi Mangga (ton)	ton	66	402	69	1365	73	940	76	956	-	-	-
3.3.7	Jumlah produksi tanaman sayuran												
	- Produksi Cabe Besar (ton)	ton	1,84	1367	1,856	1647	1,876	2339	1,894	2387	-	-	-
	- Produksi Cabe Rawit (ton)	ton	516	279	521	358	526	414	531	420	-	-	-
	- Cabe	%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00
3.3.8	Produktivitas tanaman sayuran												
	- Cabe Besar (kw/ha)	Kw/ha	54,0	20,65	54,5	30,73	55,0	37,07	55,5	39,21	-	-	-
	- Cabe Rawit (kw/ha)	Kw/ha	26,5	17,12	26,7	20,34	26,29	30,44	27,1	30,90	-	-	-
	- Cabe	%	-	-	-	-	-	-	-	-	2,91	12,54	2,83
3.3.9	Persentase penyuluh yang bersertifikat	%	9	9	11	9	13	9	15	9	17	10	19
3.3.10	Persentase kelompok tani yang telah menerapkan teknologi pertanian/perkebunan	%	22	27	30	34	40	42	50	43	60	49	70
3.3.11	Persentase kasus penyakit ternak yang tertangani	%	pop	75	80	80	85	85	90	87	95	90	100
3.3.12	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	-	-	-	-	-	-	3	-21,23			

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2017		2018		2019		2020		2021		2022
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
3.3.13	Jumlah Populasi Ternak Besar	ekor	33,064	32,265	34,809	33,561	37,179	37,179	39,57	37,180	40,32	38,12	40,32
3.3.14	Jumlah Populasi Ternak Kecil	ekor	32,5	30,512	34,675	33,453	36,999	34,807	39,482	34,810	40,23	36,210	40,23
3.3.15	Jumlah Produksi Telur	ton	623	582	685	851	753	787	828	800	900	821	900
	Jumlah Produksi Daging	ton	5,846	5,257	6,43	6,607	7,073	6,332	7,78	6,5	8	6,8	8
	a. Produksi Telur	%	-	-	-	-	-	-	-	-22,13	3,02	5,13	2,93
	b. Produksi Daging	%	-	-	-	-	-	-	-	-44,58	3,00	13,88	3,00
3.3.16	Persentase luas tanaman puso kerana serangan OPT dan DPI Tanaman Pangan	%	3,25	0,35	3	0,46	2,75	0,76	2,50	0,76	2.252	0,8	2,00
3.3.17	Nilai Tukar Petani	%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,10	-	101,20
3.3.18	Persentase Peningkatan kelas kelompok tani	%	6	6	9	6	12	6	15	6	18	8	21
3,4	***Perdagangan***												
3.4.1	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah	%	20	8,87	30	12,16	30	15	35	15	40	18	40
3.4.2	Jumlah komoditi yang diekspor	Komoditi	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2
3.4.3	Jumlah revitalisasi sarana distribusi dan logistik (Pasar dan Gudang)	pasar dan gudang	1	1	2	4	2	1	3	2	4	2	4
3.4.4	Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal	%	3	5,37	7	9,29	8	9,34	9	9,38	10	9,40	10
3.4.5	Jumlah revitalisasi sarana distribusi dan	buah	1	1	2	4	2	2	3	2	4	2	4

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2017		2018		2019		2020		2021		2022
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
	logistic (pasar dan gudang)												
3.4.7	Jumlah IKM yang difasilitasi teknologi dan kemampuan wirausaha	unit	6	10	10	10	12	10	15	10	15	10	15
3,5	***Perindustrian***												
3.5.1	Persentase Pertumbuhan industri secara keseluruhan (%)	%	2,80	2,93	2,85	2,50	2,90	2,50	2,95	0,71	3	0,89	3,50
3.5.2	Jumlah pertumbuhan sentra IKM (sentra)	sentra	175	169	180	184	185	184	190	185	195	187	195
3.5.3	Jumlah produk unggulan daerah yang dikembangkan	Produk	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	2
3.5.4	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	-	-	7,75	8,92	8	9,90	8,25	10,83	8,50	-	8,50
3.5.5	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	-	-	4,50	4,92	4,65	4,75	4,80	4,99	4,95	-	4,95
3.5.6	Persentase sentra IKM yang nilai tambahnya meningkat	%	-	-	5,50	-	6,50	5,10	7,50	0,65	8,50	-	8,50
3.5.7	Nilai ekspor	Triliun	-	-	30	31,41	31	33,68	31	N/A	32	-	32
3.5.8	Persentase temuan sidak yang dilanjuti	%	-	-	-	-	20	17,65	25	100	30	-	35
3.5.9	Persentase penurunan kasus temu sidak	%	-	-	-	-	10	5,88	15	13,33	20	-	20
3.5.10	Persentase menurunnya keluhan konsumen	%	-	-	-	-	50	40	75	97,33	75	-	75
3,6	***Transmigrasi***												
3.6.1	Persentase transmigrasi umum yang ditempatkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2017		2018		2019		2020		2021		2022
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
3.6.2	Persentase Pembinaan Warga Transmigrasi	%	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
4	***Fokus Layanan Penunjang***												
4,1	***Administrasi Pemerintahan dan Kesra***												
4.1.1	Nilai LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)	%	B	B	B	B	B	B	BB	B	BB	N/A	3,05
4.1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80	80,05	82	83.66	84	85,21	86	85,35	88	87,05	95
4.1.3	Indeks Reformasi Birokrasi	%	-	-	-	-	B	CC	B	B	B	N/A	BB
4,2	***Pengawasan***												
4.2.1	Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai LKJIP minimal B	%	50	60	60	54	70	81,25	80	100	90	100	90
4.2.2	Skor Penilaian Mandiri (Self Assesment) atas pelaksanaan reformasi dan birokrasi di Perangkat Daerah	Predikat	D	-	C	C	C	CC	CC	B	B	B	BB
4.2.3	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	%	55	39,64	60	81,86	65	54,82	70	81,23	75	N/A	80
4.2.4	Persentase PD yang telah menerapkan SPIP	%	40	N/A	50	20,83	60	85,13	70	87,24	80	88,67	90
4.2.5	Skor survey Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Skor	2	-	2	-	3	-	3	3	3	-	4

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2017		2018		2019		2020		2021		2022
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
4,3	***Perencanaan Pembangunan***												
4.3.1	Persentase keselarasan program RKPD dalam RPJMD	%	75	76	75	84,97	80	95,71	90	92,78%	100	100%	100
4.3.2	Persentase keselarasan program kabupaten dengan program nasional	%	80	80	80	80	85	86	80	91,56%	85	95%	85
4.3.3	Program usulan Renja PD yang terakomodir di RKPD	%	90	91	90	95,45	90	96,3	-	97%	-	100%	-
4.3.4	Persentase keselarasan program prioritas tahunan dengan program prioritas 5 tahunan	%	100	100	100	100	100	100	-	100%	-	100%	-
4.3.5	Persentase keselarasan program Renstra PD ke dalam Program Renja PD	%	75	75	75	75	80	70	-	100%	-	100%	-
4.3.6	Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang yang mendukung program prioritas dan terakomodir di RKPD	%	-	-	-	-	-	-	-	83,42%	85	100%	85
4,4	***Penelitian dan Pengembangan***												
4.4.1	Persentase Pendayagunaan hasil Kelitbangan	%	25	44	25	59	40	90,38	-	-	-	-	-
4.4.2	Persentase hasil inovasi yang diimplementasikan	%	-	-	-	-	-	-	-	90	90	90	90

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2017		2018		2019		2020		2021		2022
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
4.4.3	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti	%	-	-	-	-	-	-	-	75	90	75	90
4,5	**Keuangan**												
4.5.1	Predikat laporan keuangan daerah	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.5.2	Persentase laporan OPD benar dan tepat waktu	%	68	78	72	72	76	75	80	79	85	80	90
4.5.3	Persentase Laporan keuangan OPD sesuai Standar Akutansi Pemerintahan (SAP)	%	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
4.5.4	Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	%	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
4.5.5	Persentase Pencairan dana on scedule	%	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
4.5.6	Persentase Data Aset yang akurat	%	-	-	-	-	-	-	-	100	100	99,96	100
4.5.3	Persentase tingkat pertumbuhan PAD	%	7,46	7,94	7,74	6,96	7,5	7,10	7,8	7,23	7,9	7,35	8
4.5.4	Jumlah regulasi terkait peningkatan PAD	peraturan	25	1	26	20	30	21	35	22	38	23	40
4.5.5	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	%	-	-	-	-	7,58	7,27	7,80	10,79	7,79	10,21	7,87

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2017		2018		2019		2020		2021		2022
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
4,6	**Kepegawaian**												
4.6.1	Persentase pejabat yang telah mengikuti Diklat struktural	%	81	72,50	84	71,46	86	72,05%	88	72,05%	-	-	-
4.6.2	Persentase penempatan jabatan struktural sesuai dengan kompetensi	%	80	90	81	95	82	99,99	83	98,02	96	98,12	-
4.6.3	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	%	1,1	0,55	1,02	1,19	-	0,3%	-	0,2%	-	-	-
4.6.4	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan standar Jabatan	%	-	-	-	-	94	99,99	95	98,02	96	98,12	97
4.6.5	Persentase JPT yang mempunyai Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan	%	-	-	-	-	64,40	78,26	64,60	78,79	64,80	84,85	65
4.6.6	Persentase Capaian Kinerja ASN yang memiliki Capaian Kinerja Baik	%	-	-	-	-	99,23	99,25	99,26	99,81	99,28	99,80	99,32
4.6.7	Persentase Kasus-Kasus pelanggaran disiplin ASN	%	-	-	-	-	0,77	0,75	0,74	1,07	0,72	1,52	0,68
4.6.8	Survey Kepuasan ASN	%	-	-	-	-	85,35	85,56	85,70	85,82	86,25	87,00	86,75
	ASPEK DAYA SAING DAERAH												
1	**Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastuktur**												
1,1	***Perhubungan***												
1.1.1	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	orang/ bulan	29,842	1145	32,826	1135	32,826	1124	35,81	1045	35,81	-	35,81

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2017		2018		2019		2020		2021		2022
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
1.1.2	Jumlah orang/barang melalu dermaga/bandara / terminal per tahun	orang/ bulan	356,104	7.020	393,912	55.726	393,912	190.061	429,72	376.234	429,72	N/A	429,72
1,2	***Penataan Ruang***												
1.3.10	Keberadaan Perda RTRW	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.3.11	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang	dokumen	1	1	1	1	2	1	3	1	4	1	5
1.3.12	Luas Wilayah Produktif	%	68	68	71	68	75	68	78	68	81	68	85
1.3.13	Luas Wilayah Perkotaan	%	1,3	1,3	1,4	1,3	1,5	1,3	1,6	1,3	1,7	1,3	1,8
1,3	***Perekonomian***												
1.3.1	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	rumah makan	165	157	178	157	188	229	196	235	206	235	215
1.3.2	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	hotel	28	29	34	33	40	35	44	31	48	32	52
2	**Fokus Iklim Berinvestasi**												
2.1.1	Lama proses perijinan	hari	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	2
2.1.2	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Perda	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	12
3	**Fokus Sumberdaya Manusia**												
3.1.1	Rasio Ketergantungan	%	55	51,49	60	51,25	65	51,04	70	50,39	75	50,45	80
3.1.2	Rasio lulusan S-1, S-2 dan S-3 terhadap total penduduk	%	3	2,12	4	2,24	5	2,26	6	3,99	7	4,03	8

Keterangan :
T : Target R : Realisasi

BAB 3

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang– undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur perubahan pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, maka manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel telah mengalami pecrubahan fundamental yang signifikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;

b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
c. Penerimaan Daerah;
d. Pengeluaran Daerah;
e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara: tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah akan dikatakan baik jika berhasil dalam merealisasi program-program yang dicanangkan.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan

daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Untuk itu dibutuhkan data dan analisis realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya tiga tahun sebelumnya.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa 4 tahun mendatang. Pengelolaan keuangan menyangkut pengelolaan sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja dan sumber-sumber pembiayaan. Suatu daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan meminimalkan sumber pendapatan dana transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri. Dan upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilakukan dengan mencermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Gambaran kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan pada waktu yang telah lalu. Dari analisis kinerja masa lalu atau beberapa tahun ke belakang, maka akan

diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai analisis proyeksi keuangan ke depan. Analisis pengelolaan keuangan daerah Analisis Keuangan masa lalu sangat penting untuk merancang keuangan masa depan. Kinerja keuangan masa lalu terdiri atas kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan neraca keuangan daerah. APBD meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sedangkan neraca keuangan daerah berupa perkembangan dan analisis neraca keuangan daerah.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam pengelolaan keuangan daerah selalu diterapkan prinsip dan pendekatan serta norma yang berlaku secara universal, yaitu dilaksanakan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Gambaran kinerja pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pada dasarnya, konsep penganggaran adalah membandingkan antara anggaran dan realisasinya antara penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Begitu juga, pada APBN/APBD, pada intinya adalah membandingkan antara anggaran dan realisasi penerimaan dengan anggaran dan realisasi pengeluaran. Dalam konteks APBD, penerimaan

daerah terdiri dari pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan, sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan. Oleh karena itu, untuk analisis keuangan daerah dalam sub bab ini akan dibagi dalam kerangka penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pada sub bab penerimaan daerah akan dianalisis kinerja realisasi dan rata- rata pertumbuhan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan, yang kemudian perhitungan proyeksi selama 5 tahun ke depan (dari tahun 2023 s.d tahun 2026) akan dijelaskan pada sub bab tersendiri.

a. Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, hal utama yang harus diperhatikan adalah tingkat penerimaan pendapatan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. Pendapatan Transfer;

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah,

Untuk melihat laju pertumbuhan pendapatan daerah dilihat dari perkembangannya dengan menggunakan data realisasi pendapatan lima tahun ke belakang. Pertumbuhan realisasi pendapatan daerah periode tahun 2017 - 2021 disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Rata - Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021
(dalam Rupiah)

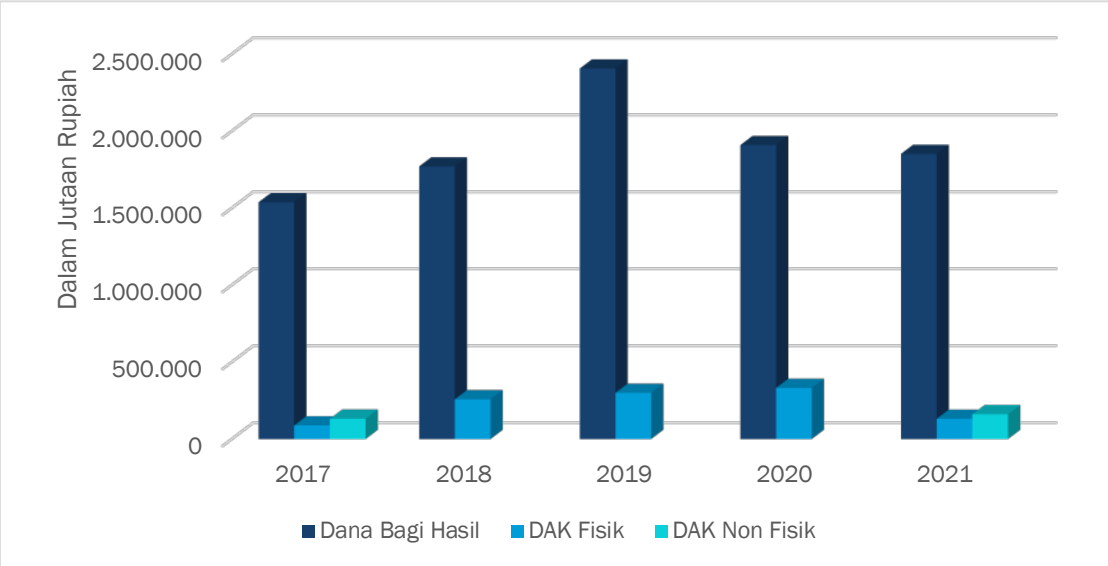
No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	**PENDAPATAN**	**2.642.776.006.642**	**3.019.699.825.936**	**3.941.909.794.941**	**3.540.659.694.226**	**3.510.691.709.633**	**0,08**
1,1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**209.410.035.753**	**210.238.037.284**	**286.594.847.516**	**353.989.261.396**	**377.346.398.575**	**0,17**
1.1.1	Pajak Daerah	58.677.094.555	81.342.647.355	69.943.956.305	79.220.521.197	79.315.580.440	**0,09**
1.1.2	Retribusi Daerah	6.414.029.555	5.581.288.250	6.812.210.396	12.201.663.299	8.022.396.031	**0,13**
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.366.700.277	12.232.599.241	14.600.521.899	15.206.508.322	17.341.957.795	**0,09**
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	131.952.211.366	111.081.502.439	195.238.158.916	247.360.568.578	272.666.464.309	**0,24**
1,2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.343.603.836.889**	**2.720.285.187.652**	**3.565.954.757.069**	**3.053.945.103.250**	**3.025.394.578.711**	**0,08**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**2.284.442.011.973**	**2.620.707.519.610**	**3.366.601.427.302**	**2.909.333.422.093**	**2.804.111.596.486**	**0,06**
1.2.1.1	**Dana Perimbangan**	**2.102.639.221.973**	**2.399.445.440.610**	**3.103.333.197.302**	**2.616.717.099.093**	**2.516.963.356.389**	**0,06**
1.2.1.1.1	**Dana Transfer Umum**	**1.882.041.539.011**	**2.141.105.721.124**	**2.803.224.178.815**	**2.284.988.894.440**	**2.224.392.142.750**	**0,06**
A.	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.537.746.040.011	1.770.278.742.124	2.405.793.795.815	1.908.963.956.440	1.851.636.079.750	**0,07**
B.	Dana Alokasi Umum (DAU)	344.295.499.000	370.826.979.000	397.430.383.000	376.024.938.000	372.756.063.000	**0,02**
1.2.1.1.2	**Dana Transfer Khusus**	**220.597.682.962**	**258.339.719.486**	**300.109.018.487**	**331.728.204.653**	**292.571.213.639**	**0,08**
A.	DAK Fisik	88.912.784.374	108.573.918.258	129.779.102.659	172.122.747.761	131.606.440.464	**0,39**
B.	DAK Non Fisik	131.684.898.588	149.765.801.228	170.329.915.828	159.605.456.892	160.964.773.175	**0,055**
1.2.1.02	**Dana Insentif Daerah**	**-**	**26.750.000.000**	**35.294.840.000**	**59.727.981.000**	**53.704.586.000**	**0,30**
1.2.1.03	**Alokasi Dana Desa (APBN)**	**181.802.790.000**	**194.512.079.000**	227.973.390.000	232.888.342.000	**233.443.654.097**	**0,07**
1.2.2	**Transfer Antar Daerah**	**59.161.824.916**	**99.577.668.042**	**199.353.329.767**	**144.611.681.157**	**221.282.982.225**	**0,49**
1.2.2.1	Dana Bagi Hasil	59.161.824.916	99.577.668.042	172.871.938.767	99.704.327.227	111.916.782.665	**0,28**
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	-	26.481.391.000	44.907.353.930	109.366.199.560	**1,07**
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**89.762.134.000**	**89.176.601.000**	**89.360.190.356**	**132.725.329.580**	**107.950.732.347**	**0,07**
1.3.1	Pendapatan Hibah	89.762.134.000	89.176.601.000	89.360.190.356	132.725.329.580	107.950.732.347	**0,07**

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Musi Banyuasin, 2022

Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah pada Tabel 3.1 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan Kabupaten Musi Banyuasin mengalami kenaikan signifikan pada Tahun 2018 yakni sebesar 14,26% dari Rp2.642.776.006.641,88 pada Tahun 2017 menjadi Rp3.019.699.825.935,55 pada Tahun 2018. Pada Tahun 2019, realisasi pendapatan senilai Rp3.941.909.794.940,88 atau naik sebesar 30,54% dari Tahun 2018. Namun demikian, dalam perkembangannya pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 realisasi pendapatan mengalami penurunan masing-masing sebesar 10,18% dan 1% menjadi Rp3.540.659.694.225,82 dan Rp3.510.691.709.633 Hal ini diakibatkan adanya penurunan signifikan pada Dana Perimbangan di tahun 2020 sebesar 15,68% atau senilai Rp486.616.098.209 dan di tahun 2021 sebesar 26,06% atau senilai Rp586.369.840.913. Berdasarkan Realisasi pendapatan Kabupaten Musi Banyuasin yang fluktuatif selama 5 (lima) tahun tersebut, secara keseluruhan menghasilkan rata – rata pertumbuhan pendapatan sebesar 8,4%.

Kontribusi terbesar untuk pendapatan Kabupaten Musi Banyuasin pada setiap tahunnya adalah dari Dana Perimbangan dengan rata – rata proporsi kontribusinya terhadap pendapatan adalah 77,25% yang terdiri dari Dana Bagi Hasil dengan proporsi 56,9% dari total pendapatan, dengan kondisi pendapatan Kabupaten Musi Banyuasin masih sangat bergantung kepada Dana Bagi Hasil.

Grafik 3.1.
Komponen Besaran Dana Perimbangan
Periode 2017-2021



b. Belanja Daerah

Berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Dengan klasifikasi tersebut, maka penganggaran ke depan akan sama klasifikasinya dengan pelaporannya sehingga akan dapat diperbandingkan dan ditingkatkan kualitas informasi yang disajikan.

Dalam realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Perkembangan rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah periode tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2	**BELANJA**	**2.619.480.025.846**	**2.958.060.291.946**	**3.647.212.439.377**	**3.377.578.658.991**	**3.836.457.605.910**	**10,60**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**1.639.803.413.474**	**1.697.465.133.203**	**2.056.860.843.111**	**2.130.974.496.838**	**2.271.258.011.014**	**8,72**
2.1.1	Belanja Pegawai	808.219.600.974	819.394.045.786	858.976.786.766	849.507.001.011	953.392.507.260	**4,33**
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	786.019.849.335	833.541.084.938	1.114.150.758.470	1.194.092.445.915	1.269.485.693.192	**13,30**
2.1.3	Belanja Bunga		4.702.586.739	16.711.549.766	19.894.751.077	15.843.408.598	**84,68**
2.1.4	Belanja Subsidi	14.608.477.500	15.062.846.740	29.222.046.831	46.193.540.000	-	**51,73**
2.1.5	Belanja Hibah	30.715.485.665	23.612.269.000	37.401.701.278	20.975.758.835	32.224.901.964	**11,25**
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	240.000.000	1.152.300.000	398.000.000	311.000.000	311.500.000	**73,24**
2.2	**BELANJA MODAL**	**699.529.017.374**	**871.952.810.973**	**1.102.419.234.361**	**790.704.925.339**	**1.097.177.454.587**	**15,39**
2.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.312.563.398**	**50.056.420**	**913.265.205**	**1.355.789.200**	**1.018.853.800**	**-**
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**278.835.031.600**	**388.592.291.350**	**487.019.096.700**	**454.543.447.614**	**467.003.286.509**	**15,19**
2.4.1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	277.283.476.600	387.040.736.350	485.431.637.950	452.848.277.614	467.003.286.509	**15,35**
2.4.2	Transfer Bantuan Keuangan lainnya	1.551.555.000	1.551.555.000	1.587.458.750	1.695.170.000	-	**3,03**

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Musi Banyuasin 2022

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat diketahui bahwa realisasi belanja daerah Kabupaten Musi Banyuasin periode tahun 2017 – 2021 berfluktuasi setiap tahunnya. Fluktuasi realisasi belanja ini dipengaruhi oleh fluktuasi realisasi belanja yang disajikan pada tabel 3.2. Realisasi belanja tertinggi terjadi pada Tahun 2021 senilai Rp3.836.457.605.910. Sedangkan realisasi belanja terendah terjadi pada tahun 2017 senilai Rp2,619,480,025,846.46.

Secara keseluruhan, rata – rata pertumbuhan per tahun belanja daerah Kabupaten Musi Banyuasin periode tahun 2017 – 2021 sebesar 10,6% dengan rata – rata pertumbuhan Belanja Operasi sebesar 8,72%, rata – rata pertumbuhan Belanja Modal sebesar 15,39%, rata – rata pertumbuhan Belanja Tidak Terduga sebesar 412,97%, dan rata – rata pertumbuhan Belanja Transfer sebesar 15,19%. Bila ditinjau dari proporsi belanja daerah dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021, persentase komponen Belanja Operasi Kabupaten Musi Banyuasin memiliki proporsi belanja daerah tertinggi yaitu sebesar 59,67%, dimana penggunaan paling besar adalah pada komponen Belanja Barang dan Jasa.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah selama periode 2017-2021 sangat fluktuatif, hal ini disebabkan karena faktor pembayaran hutang *(carry over)* dana bagi hasil migas dari pusat yang

berfluktuatif setiap tahunnya, hal ini mengakibatkan perencanaan pembiayaan untuk tahun selanjutnya menjadi fluktuatif . Perkembangan rata-rata pertumbuhan realisasi pembiayaan daerah periode tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Rata - Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
3	**PEMBIAYAAN**	**823.279.857**	**185.849.923.853**	**297.089.173.378**	**512.524.287.460**	**597.501.700.737**	**56,56**
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**29.823.279.857**	**221.311.626.753**	**493.229.904.303**	**691.747.536.094**	**819.314.146.595**	**2,06**
3.1.1	Sisa Lebih Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	29.823.279.857	24.126.960.653	247.489.457.842	591.786.528.942	675.605.322.695	2,65
3.1.2	Pinjaman Daerah	-	197.184.666.100	245.740.446.461	99.961.007.152	128.453.619.250	(0,02)
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**29.000.000.000**	**35.461.702.900**	**196.140.730.925**	**179.223.248.634**	**221.812.445.858**	**1,23**
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	10.561.702.900	146.140.730.925	166.723.248.634	123.594.091.208	4,24
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	29.000.000.000	24.900.000.000	50.000.000.000	12.500.000.000	82.963.150.000	1,44
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**24.119.260.653**	**247.489.457.842**	**591.786.528.942**	**675.605.322.695**	**271.735.804.460**	**2,55**

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Musi Banyuasin 2022

3.1.2. Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Perkembangan.

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban(utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan dan informasi mengenai fleksibilitas keuangan. Pemberian informasi tersebut merupakan upaya dan tindakan Pemerintah Daerah untuk menjalankan *good government governance* dan bentuk pertanggungjawaban atas posisi kekayaan daerah.

Sesuai dengan ketentuan Permendagri No 86 Tahun 2017 Analisis neraca daerah yang diperlukan dalam merumuskan perencanaan keuangan daerah adalah analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas dilakukan untuk menganalisis kemampuan kas Pemerintah Daerah dalam memenuhi operasional pemerintahan dan hutang jangka pendeknya. Analisis solvabilitas

dilakukan untuk mengetahui kemampuan aset dan ekuitas daerah dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah di masa mendatang. Terakhir, analisis rasio aktivitas dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat piutang daerah dapat dikonversi menjadi kas. Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin periode 2017-2021 dan rata-rata pertumbuhan disajikan pada tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4.

Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin

No.	Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Rata-rata pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
1	**ASET**						
1.1	**ASET LANCAR**						
1.1.1	Kas di Kas Daerah	8.798.095.954,79	233.769.961.338,02	584.141.441.178,43	656.803.968.675,04	209.697.789.448,75	6,63
1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	810.000,00	77.353,00	0,00	0,00	0,00	-0,95
1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	3.325.000,00	7.711.500,00	0,00	0,16
1.1.4	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	4.374.305.100,09	4.940.892.326,38	2.882.998.686,86	12.368.763.132,83	53.865.384.190,91	1,59
1.1.5	Kas di Bendahara FKTP	0,00	6.798.026.333,61	4.622.528.680,61	4.412.800.866,61	6.120	-0,46
1.1.6	Kas di Bendahara BOS	0,00	110.318.136,41	0,00	139.277,00	172.624.700	618,72
1.1.6	Kas Lainnya	8.946.859.598,01	72.743.167,06	0,00	11.940.244,00	-	-1,00
1.1.7	Kas dan Setara Kas	2.000.0000.0000,00	0,00	136.235.396,50	2.000.000.000,00	8.000.000.000	5,23
1.1.8	Investasi Jangka Pendek	0,00	1.800.000.000,00	0,00	0,00	-	-1,00
1.1.9	Piutang Pajak Daerah	41.644.925.607,00	72.587.525.687,00	71.214.992.390,00	82.888.606.700,50	91.486.674.493	0,25
1.1.10	Piutang Retribusi	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-0,88

No.	Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Rata-rata pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
1.1.11	Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	11.752.935.557,29	51.782.452.831,81	17.077.526.631,81	5.802.857.623,81	12.865.201.648,81	0,82
1.1.12	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	335.361.920.721,00	502.688.983.469,00	170.933.256.442,00	309.839.460.683,00	0,00	-0,09
1.1.13	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	78.534.135.885,46	78.346.970.052,20	6.933.408.821,00	0,00	1.202.248.584,99	-0,64
1.1.14	Penyisihan Piutang	(14.681.005.303,44)	(33.035.893.212,40)	(26.624.008.757,74)	(31.725.777.942,84)	(42.424.017.349,64)	0,40
1.1.15	Belanja Dibayar Dimuka	1.641.820.073,34	1.933.936.530,00	2.360.457.429,58	2.319.058.175,76	1.191.584.437,16	-0,03
1.1.16	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	1.733.179.267,38	1.687.179.267,38	1.875.644.642,48	1.869.144.642,48	0,00	-0,23
1.1.17	Piutang Lainnya	2.059.782.964,63	17.890.692.784,93	186.959.485,00	186.959.486,00	2.055.104.128,48	4,17
1.1.18	Persediaan	19.878.658.260,10	19.431.007.590,45	33.943.249.664,11	37.231.584.826,85	55.574.423.935	0,33
	JUMLAH ASET LANCAR	**502.046.423.685,65**	**960.804.913.654,85**	**869.688.025.691,64**	**1.084.016.216.891,04**	**393.687.024.338,81**	**0,11**
1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**						
1.2.1	Investasi Non Permanen	2.092.056.977,00	2.092.056.977,00	2.092.056.977,00	2.092.056.977,00	2.092.056.977,00	0,00
1.2.2	Investasi Permanen	711.749.518.100,62	636.210.934.023,01	640.682.572.574,57	602.283.624.509,63	645.540.413.065,35	-0,02
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**713.841.575.077,62**	**638.302.991.000,01**	**642.774.629.551,57**	**604.375.681.486,63**	**647.632.470.042,35**	**-0,02**

No.	Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Rata-rata pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
1.3	**ASET TETAP**						
1.3.1	Tanah	491.533.596.597,47	555.738.597.476,47	580.119.283.024,47	597.645.176.618,18	617.992.831.280,18	0,06
1.3.2	Peralatan dan Mesin	991.611.044.588,13	930.306.865.396,22	1.069.493.881.886,13	1.243.474.850.543,37	1.124.280.844.781,19	0,04
1.3.3	Gedung dan Bangunan	2.231.168.696.636,81	2.324.000.063.057,07	2.537.212.211.956,14	2.674.484.770.948,95	3.093.157.186.749,48	0,09
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.506.480.396.256,69	5.930.057.660.018,18	6.777.768.283.014,65	8.299.814.577.410,00	8.860.929.629.955,93	0,13
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	85.903.242.687,44	86.173.810.682,44	78.315.103.542,25	87.459.809.642,25	85.769.924.728,25	0,00
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	26.132.483.575,80	194.360.965.275,80	58.766.584.274,64	23.598.828.075,80	61.426.048.232,80	1,69
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(4.285.560.626.087,21)	(4.561.311.617.89,71)	(5.016.053.765.365,39)	(6.698.014.149.307,37)	(7.219.147.993.128,56)	2,38
	JUMLAH ASET TETAP	**5.047.268.834.255,13**	**5.459.326.344.015,47**	**6.085.621.582.332,89**	**6.228.463.863.931,18**	**6.724.408.472.599,27**	**0,07**
1.4	**DANA CADANGAN**						
1.4.1	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
1.5	**ASET LAINNYA**						
1.5.1	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	48.652.699,00	47.773.079,00	0,00	370.017.129,00	370.017.129,00	-0,34
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
1.5.4	Aset Tidak Berwujud	2.339.887.020,00	6.301.595.450,00	12.298.822.773,26	52.065.907.056,16	61.447.275.236,46	1,51
1.5.5	Aset Lain – Lain	1.246.878.242.234,22	1.289.090.611.029,43	1.302.805.415.185,61	167.335.456.686,88	154.231.003.543,72	-0,23
	JUMLAH ASET LAINNYA	**1.249.266.781.953,22**	**1.295.439.979.558,43**	**1.315.104.237.958,87**	**219.771.380.872,04**	**83.667.453.369,69**	**-0,35**
	JUMLAH ASET DAERAH	**7.512.423.614.971,62**	**8.353.874.228.28,76**	**8.913.188.475.534,97**	**8.136.627.143.180,89**	**7.849.395.420.350,12**	**2,16**

No.	Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Rata-rata pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
2	**KEWAJIBAN**						
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**						
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Utang Bunga	810.000,00	2.560.812,00	0,00	0,00		0,58
2.1.3	Utang Pajak						
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	0,00	123.594.091.208,00	224.319.965.296	0,81
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	31.022.813,65	30.052.006,99	49.673.287,67	46.531.930	0,19
2.1.6	Utang Belanja						
2.1.7	Utang Beban	44.162.030.436,30	40.341.298.646,32	10.347.556.696,00	12.354.232.947,65	49.467.291.868	0,59
2.1.8	Utang Jangka Pendek Lainnya	50.064.151.781,00	22.492.091.945,00	33.187.777.876,00	8.913.530.686,00	58.637.914.383	1,19
2.2	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**						
2.2.1	Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Utang Luar Negeri	0,00	184.013.606.400,00	280.245.478.736,00	95.866.346.046,00	0,00	-0,38
	JUMLAH KEWAJIBAN	**94.226.992.217,30**	**246.880.580.616,97**	**323.810.865.314,99**	**240.777.874.175,32**	**332.471.703.47716**	34,69

No.	Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Rata-rata pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
3	**EKUITAS DANA**						
3.1	EKUITAS DANA LANCAR	7.418.196.622.754,32	8.106.993.647.611,79	8.589.377.610.219,98	7.895.849.269.005,57	7.516.923.716.872,96	0,01
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Cadangan untuk Piutang	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Cadangan untuk Persediaan	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Pendapatan yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
3.2	**EKUITAS DANA INVESTASI**						
3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	-	-	-	-	-	-
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	-	-	-	-	-	-

No.	Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Rata-rata pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
3.2.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH EKUITAS DANA	**7.418.196.622.754,32**	**8.106.993.647.611,79**	**8.589.377.610.219,98**	**7.895.849.269.005,57**	**7.516.923.716.872,96**	**0,01**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**7.512.423.614.971,62**	**8.913.188.475.534,97**	**8.913.188.475.534,97**	**8.136.627.143.180,89**	**7.849.395.420.350,12**	**0,02**

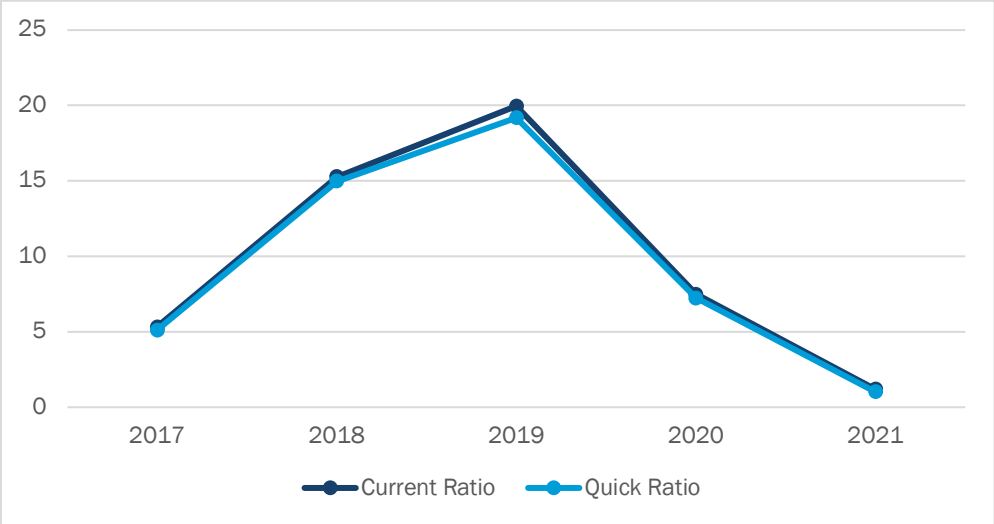
Sumber : Diolah dari Neraca Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

Analisis terhadap data neraca daerah sekurang-kurangnya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar merupakan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Sedangkan rasio cepat merupakan perbandingan antara aset lancar dikurang persediaan dengan kewajiban jangka pendek. Semakin besar rasio tersebut, maka semakin baik pula kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Grafik 3.2.
Hasil Analisis Current Ratio dan Quick Ratio



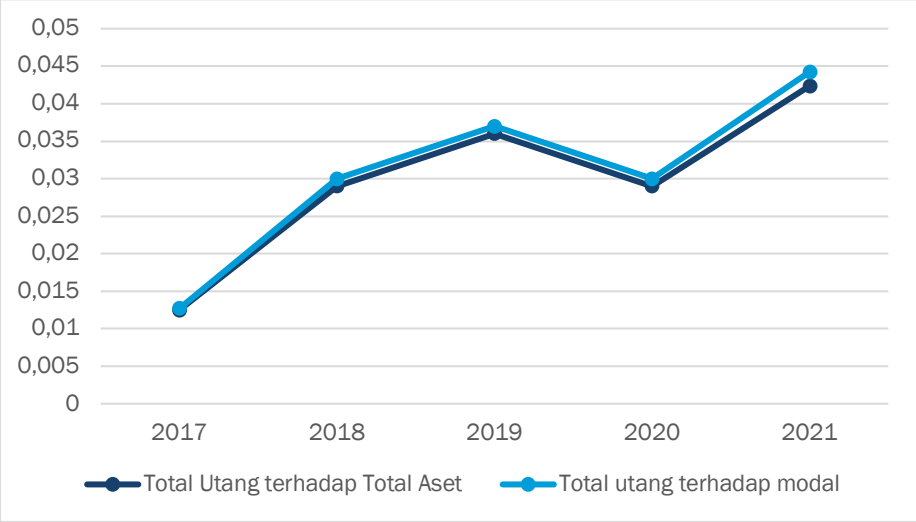
Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa Pemkab Musi Banyuasin dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya cenderung membaik dari tahun 2017 – 2019 , namun pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kondisi Pandemi Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin. Secara keseluruhan tidak ada gejala tekanan keuangan yang serius yang dihadapi dan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sangat berhati-hati dalam mengelola kewajiban jangka pendek dan kondisi arus kasnya.

2. Rasio solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan organisasi dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio total utang terhadap total aset dan rasio utang terhadap modal. Rasio total utang terhadap total aset merupakan perbandingan antara total kewajiban dengan total aset. Sedangkan rasio utang terhadap modal merupakan perbandingan total utang dengan total ekuitas. Semakin kecil rasio Solvabilitas, maka semakin baik pula kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

Grafik 3.3.

Hasil Analisis *Debt to Asset* dan *Debt to Equity*



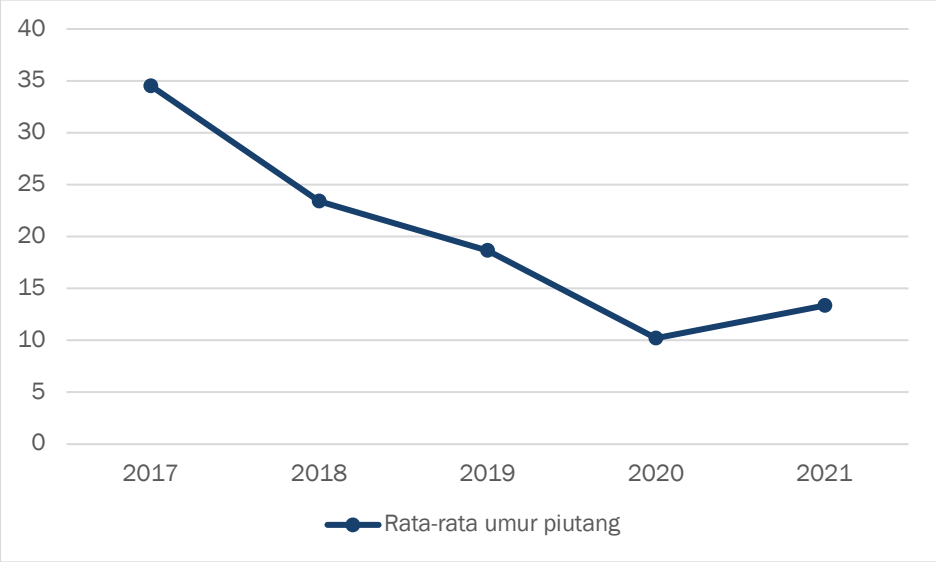
Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa Pemkab Musi Banyuasin dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya mengalami fluktuatif selama 5 tahun antara tahun 2017 – 2021. Namun secara keseluruhan, kondisi keuangan sangat baik dan mampu dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka panjangnya. Hal ini dapat dilihat bahwa persentase hutang terhadap aset atau ekuitas hanya sebesar 1,2% - 4,4% selama tahun 2017-2021.

3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio untuk mengetahui seberapa efisien organisasi dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan kas dan pendapatan. Rasio aktivitas yang dihitung ialah rata-rata umur piutang (*account receivable turnover*) dan rata-rata umur persediaan (*inventory turnover*).

Rata-rata umur piutang adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan saat terjadinya hak pendapatan yang diakui Pemerintah daerah hingga dibayarkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Rata-rata umur persediaan adalah

Grafik 3.4.
Hasil Analisis Rasio Aktivitas



Dari hasil perhitungan Kinerja rata-rata umur piutang mengalami kenaikan dari tahun 2017-2020, namun mengalami penurunan pada tahun 2021. Namun secara keseluruhan, kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menagih piutang semakin baik. Hal ini ditandai dengan semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk menagih piutang yakni, dari 34 hari menjadi 13 hari.

Hasil analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas periode tahun 2017-2021 tersaji pada tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A.	**Rasio Likuiditas**					
	Aset Lancar	502.046.423.685	960.804.913.654	869.688.025.691	1.084.016.216.891	393.687.024.338
	Persediaan	19.878.658.260	19.431.007.590	33.943.249.664	37.231.584.826	55.574.423.935
	Kewajiban Jangka Pendek	94.226.992.217	62.866.974.216	43.565.386.578	144.911.528.129	332.471.703.477
1	Rasio Lancar (***Current Ratio***)	**5,328**	**15,283**	**19,963**	**7,481**	**1,184**
2	Rasio Quick (***Quick Ratio***)	**5,117**	**14,974**	**19,184**	**7,224**	**1,017**
B.	**Rasio Solvabilitas**					
	Aset	7.512.423.614.971	8.353.874.228.228	8.913.188.475.534	8.136.627.143.180	7.849.395.420.350
	Utang	94.226.992.217	246.880.580.616	323.810.865.314	240.777.874.175	332.471.703.477
	Ekuitas	7.418.196.622.754	8.106.993.647.612	8.589.377.610.220	7.895.849.269.005	7.516.923.716.873
3	Rasio total utang terhadap total aset	**0,0125**	**0,029**	**0,036**	**0,029**	**0,04236**
4	Rasio utang terhadap modal	**0,0127**	**0,030**	**0,037**	**0,030**	**0,04423**
C	**Rasio Aktivitas**					
	Pendapatan Daerah	2.642.776.006.641	3.019.699.825.935,55	3.941.909.794.940,88	3.540.659.694.225,82	3.510.691.709.632,75
	Saldo Awal Piutang	762.583.752.418	472.728.700.074	726.917.780.620	270.582.255.841	402.906.087.309
	Saldo Akhir Piutang	472.728.700.074	726.917.780.620	270.582.255.841	402.906.087.309	107.598.564.704
5	Rata-rata Umur Piutang	**34,53**	**23,41**	**18,66**	**10,21**	**13,36**

Sumber : Diolah dari Neraca dan CaLK Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Hak dan Kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga berpedoman Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan perpaduan dari beberapa peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat yang dilaksanakan

dalam suatu sistem yang terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang tiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam implementasinya kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa kebijakan masa lalu terkait dengan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan analisis lebih lanjut atas hasil kinerja pelaksanaan APBD selama 5 tahun terakhir dan perkembangan Neraca Daerah. Kebijakan anggaran dan keuangan yang telah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir kemudian dapat menggambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan. Berikut analisis kedua kebijakan tersebut akan dijelaskan.

a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan umum pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin diarahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pembangunan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, agar dapat semaksimal mungkin menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Musi Banyuasin merupakan perkiraan terukur secara nasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dalam konteks keuangan daerah, yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah hak-hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang didapat dari sumber penerimaan internal maupun eksternal pemerintah daerah. Sumber penerimaan pendapatan daerah secara garis besar mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan dari dana perimbangan pusat - daerah dan lain-lain sumber pendapatan yang sah. Pendapatan daerah dari sumber PAD didapat dari penerimaan pajak-pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Kemudian pendapatan daerah dari sumber dana perimbangan didapat dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang mana kebijakan penetapannya merupakan kewenangan Pemerintah (Pusat). Selanjutnya, untuk pendapatan dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah didapat dari penerimaan dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dana penyesuaian/otonomi khusus, bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan

yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN. Kebijakan otonomi daerah telah memberikan kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangannya sendiri agar mampu mendanai aktivitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 merupakan landasan bagi daerah untuk membangun daerahnya secara mandiri dan lebih mengandalkan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah.

Kebijakan pendapatan harus terus diupayakan dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pendapatan melalui upaya meningkatkan pelayanan dan efektivitas serta efisiensi biaya operasional kinerja pendapatan unit-unit produksi. Untuk itu pendapatan dari PAD perlu ditingkatkan dari tahun sebelumnya. Demikian juga pendapatan yang bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat (DAU, DAK, dan dana Perimbangan lainnya) maupun bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus dapat diefektifkan melalui koordinasi akurasi data maupun kegiatan prioritas yang bernilai regional, terkait dengan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.

Upaya-upaya penting yang selama ini sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tersebut adalah :

1. Menghitung kembali PAD secara riil, khususnya pada sumber-sumber pendapatan tertentu dalam kerangka ekstensifikasi dan intensifikasi pungutan PAD, baik sumber-sumber retribusi daerah maupun pajak.

2. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang bersifat ekonomis dan rasional dengan merangsang pertumbuhan potensi perekonomian daerah.
3. Optimalisasi peran BUMD guna memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, serta dapat memberikan kontribusinya secara signifikan terhadap peningkatan PAD.
4. Mempelajari kemungkinan meningkatkan pendapatan melalui penjualan jasa-jasa publik.
5. Menyempurnakan administrasi penerimaan pendapatan daerah dan meningkatkan pengendalian pendapatan daerah untuk menjamin efektivitas pengumpulan pendapatan.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan periode tahun 2017-2022 diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah terutama sumber penerimaan dari PAD termasuk pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak.

Dalam kurun waktu tahun 2017-2022, dari sisi pengelolaan pendapatan daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah, terdapat perubahan peraturan terkait pajak dan retribusi daerah, yaitu ditetapkannya UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah. Perubahan perundang-undangan tersebut mengakibatkan adanya perubahan dan penyesuaian kebijakan terkait pengelolaan pendapatan daerah. Undang-undang tersebut ditetapkan dalam upaya memperbaiki sistem pemungutan serta optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, melalui perluasan objek dan penambahan jenis pajak daerah. Penetapan undang-undang tersebut memberikan dukungan terhadap langkah yang sangat strategis guna lebih memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya dalam rangka membangun hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang lebih ideal.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah didasarkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017-2022 dan memedomani dokumen perencanaan RKPD, serta dibahas secara bersama sesuai mekanisme ketentuan perundang-undangan, kebijakan umum belanja daerah pada periode Tahun 2017-2022 adalah:

1. Peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik serta tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas, sesuai dengan prioritas daerah yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam pelaksanaan program-program strategis daerah;

2. Menitikberatkan alokasi belanja daerah pada bidang-bidang urusan wajib dan urusan pilihan yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Adapun belanja wajib daerah telah memenuhi persyaratan belanja minimal belanja fungsi Kesehatan 10% dan belanja fungsi Pendidikan sebanyak 20% sesuai amanat undang-undang;
3. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, meningkatkan akses penduduk untuk mendapatkan perumahan yang layak, lapangan kerja, meningkatkan ketahanan pangan serta pelayanan sosial;
4. Mengarahkan pada peningkatan perekonomian daerah, khususnya untuk meningkatkan nilai tukar petani, melalui fasilitasi usaha/industri olahan, baik skala rumah tangga, kecil, dan menengah;
5. Melakukan efisiensi belanja, yaitu dengan meminimalkan belanja yang tidak langsung terarah kepada masyarakat (khususnya belanja barang) menjadi belanja yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
6. Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja perangkat daerah yang harus dicapai setiap tahunnya (*performance-based budgetting*);

7. Belanja daerah dalam rangka pemulihan ekonomi dan penanganan dampak pandemic covid-19. Pada tahun 2021, Total alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp. 95.850.256.583,00 dari total APBD Kab. Muba sebesar Rp. 4.440.417.564.812,00 pada tahun 2021.

Disamping kebijakan belanja yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2017-2022, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia juga mempedomani kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, diantaranya:

1. Kebijakan yang tertuang dalam dokumen perencanaan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
2. Standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Kementerian, sebagai pedoman dalam pelaksanaan perencanaan kinerja kegiatan pembangunan,
3. Tujuan pembangunan *millenium* atau SDGs, yang meliputi penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan membangun kemitraan global untuk pembangunan.

4. Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI).

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada dan kebutuhan pembangunan daerah, maka arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut.

1. Menciptakan pembiayaan anggaran yang memiliki risiko terkecil dan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah.
2. Menjadikan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam BUMD sebagai langkah perbaikan kinerja BUMD dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya untuk air minum.
3. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mewajibkan perusahaan – perusahaan melaksanakan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL/CSR) dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat di wilayah tempat mereka melakukan usaha Program Kemitraan Bina

Lingkungan (PKBL/CSR) perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin setiap tahunnya fluktuatif. Berdasarkan data laporan dari perusahaan yang masuk ke Sekretariat Forum MSH-CSR Kabupaten Musi Banyuasin, Pendanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)/CSR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 – 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Rekapitulasi Pendanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)/CSR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013-2020

No	Tahun	Program			Jumlah
		Pengembangan Infrastruktur	Pemberdayaan Masyarakat	Hubungan Komunitas	
1	2013	Rp15.612.301.730	Rp3.238.611.865	Rp9.855.352.567	Rp28.706.266.162
2	2014	Rp18.287.144.768	Rp2.334.426.207	Rp6.392.628.449	Rp27.014.199.424
3	2015	Rp25.514.392.762	Rp5.369.919.593	Rp5.580.614.101	Rp36.500.452.864
4	2016	Rp24.211.716.268	Rp1.275.356.000	Rp3.016.029.733	Rp28.503.102.001
5	2017	Rp10.224.493.495	Rp1.005.129.816	Rp2.741.093.409	Rp13.970.716.720
6	2018	Rp. 1.860.012.643	Rp. 1.004.140.104	Rp.3.766.569.197	Rp.6.630.721.944
7	2019	Rp.6.226.859.931	Rp.13.799.392.443	Rp.14.873.985.235	Rp.34.900.237.609
8	2020	Rp.2.223.775.631	Rp.735.327.475	Rp.12.314.095.553	Rp.15.273.198.659

Sumber : Bappeda Kab. Muba 2013-2020

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Gambaran proporsi penggunaan anggaran periode tahun anggaran sebelumnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, diuraikan sebagai berikut:

a. Proporsi Realisasi Belanja Daerah Dibanding Anggaran

Proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran periode tahun 2019-2021 pada Tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.7
Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Musi Banyuasin

No.	Uraian	Tahun 2019		Proporsi	Tahun 2020		Proporsi	Tahun 2021		Proporsi
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
2.1	**BELANJA OPERASI**	**2.331.011.570.585,72**	**2.056.860.843.111,05**	**88,2%**	**2.320.582.914.948,40**	**2.130.974.496.837,73**	**91,8%**	**2.556.011.657.399,00**	**2.271.258.011.014,17**	**88,86%**
2.1.1	Belanja Pegawai	1.011.976.393.309,31	858.976.786.766,00	**84,9%**	932.376.618.114,43	849.507.001.011,00	**91,1%**	1.045.912.595.891,00	953.392.507.260,00	**91,15%**
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.216.773.668.536,41	1.114.150.758.470,05	**91,6%**	1.297.077.753.833,97	1.194.092.445.914,7	**92,1%**	1.452.515.316.479,00	1.269.485.693.192,17	**87,40%**
2.1.3	Belanja Bunga	29.430.000.000,00	16.711.549.766,00	**56,8%**	22.432.200.000,00	19.894.751.077,00	**88,7%**	21.659.377.865,00	15.843.408.598,0	**73,15%**
2.1.4	Belanja Subsidi	34.459.938.740,00	29.222.046.831,0	**84,8%**	46.193.540.000,00	46.193.540.000,00	**100%**	0,00	0,00	
2.1.5	Belanja Hibah	37.971.570.000,00	37.401.701.278,00	**98,5%**	22.102.803.000,00	20.975.758.835,00	**94,9%**	35.524.367.164,00	32.224.901.964,00	**90,71%**
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	400.000.000,00	398.000.000,00	**99,5%**	400.000.000,00	311.000.000,00	**77,8%**	400.000.000,00	311.500.000,00	**77,88%**
2.2	**BELANJA MODAL**	**1.192.857.208.214,00**	**1.102.419.234.360,91**	**92,4%**	**965.626.543.142,00**	**790.704.925.338,91**	**81,9%**	**1.172.223.769.410,00**	**1.097.177.454.587,31**	**93,60%**
2.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.209.016.000,00**	**913.265.205,00**	**75,5%**	**2.532.457.832,00**	**1.355.789.200,00**	**53,5%**	**1.753.000.000,00**	**1.018.853.800,00**	**58,12%**
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**488.002.405.250,00**	**487.019.096.700,00**	**99,8%**	**455.342.491.620,00**	**454.543.447.614,10**	**99,8%**	**469.074.917.412,00**	**467.003.286.509,00**	**99,56%**
2.4.1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	486.414.946.500,00	485.431.637.950,00	**99,8%**	453.647.321.620,00	452.848.277.614,10	**99,8%**	469.074.917.412,00	467.003.286.509,00	**99,56%**
2.4.2	Transfer Bantuan Keuangan lainnya	1.587.458.750,00	1.587.458.750,00	**100%**	1.695.170.000,00	1.695.170.000,00	**100%**	-	-	-

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Musi Banyuasin 2022

b. Analisis Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Gambaran belanja daerah yang menginformasikan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Musi Banyuasin disajikan pada tabel 3.8 berikut ini.

Tabel 3.8
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2020

No.	Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
A.	**Belanja Tidak Langsung**	**731.960.850.151**	**747.101.665.726**	**788.191.890.874**	**805.848.433.633**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	467.330.761.910	581.741.206.972	601.108.905.251	589.038.146.494
2	Belanja Tambahan Penghasilan	258.141.722.764	156.636.538.242	178.450.805.623	208.282.657.139
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	5.891.902.854	8.533.943.132	8.632.180.000	8.527.630.000
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	596.462.623	189.977.380	-	-
B.	**Belanja Langsung**	**1.002.350.621.405**	**1.184.016.429.031**	**1.453.008.858.780**	**1.105.629.015.483**
1	Belanja Honorarium PNS	41.590.635.550	40.189.465.000	38.946.430.800	16.642.942.683
2	Belanja Uang Lembur	10.585.584.602	10.696.636.800	11.923.654.850	11.148.086.000
3	Belanja Premi Asuransi	4.115.278.570	4.297.193.187	4.521.570.253	4.668.410.653
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.214.720.195	19.165.496.921	24.248.364.785	22.437.052.706
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang /Parkir	1.001.535.000	1.889.325.497	1.663.595.000	495.690.000
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.657.675.514	3.426.410.916	3.072.608.880	396.624.000

No.	Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.282.029.800	1.787.774.000	2.823.632.000	713.506.000
8	Belanja Makanan dan Minuman	30.806.917.838	29.644.645.860	32.948.021.297	24.909.335.452
9	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.293.627.000	1.462.790.500	3.171.660.300	1.708.761.300
10	Belanja Pakaian Khusus dan Hari - Hari tertentu	1.015.570.000	1.055.516.732	2.820.311.050	1.998.096.160
11	Belanja Perjalanan Dinas	169.631.082.529	174.682.646.864	200.628.483.084	169.070.899.132
12	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.695.565.000	1.686.724.000	1.656.164.000	1.536.645.000
13	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.027.807.000	946.946.000	3.832.650.000	183.955.000
14	Belanja Pemeliharaan	15.903.575.433	21.132.045.781	18.332.478.120	59.014.086.058
15	Belanja Modal	699.529.017.374	871.952.810.973	1.102.419.234.361	790.704.925.339
	TOTAL	**1.734.311.471.556**	**1.931.118.094.757**	**2.241.200.749.654**	**1.911.477.449.116**

Berdasarkan tabel 3.8 di atas diperoleh proporsi penggunaan anggaran yang digunakan untuk belanja pemenuhan kebutuhan aparatur periode tahun 2017-2020 disajikan pada Tabel 3.9 berikut ini.

Tabel 3.9
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Musi Banyuasin 2017 – 2020

No.	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase 3/4 x 100%
		(Rp)	(Rp)	
1	2017	**1.734.311.471.556**	2.648.480.025.846	65,48%
2	2018	**1.931.118.094.757**	2.993.521.994.846	64,51%
3	2019	**2.241.200.749.654**	3.843.353.170.302	58,31%
4	2020	**1.911.477.449.116**	3.556.801.907.625	53,74%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Musi Banyuasin 2022, diolah

Tabel 3.8 di atas menunjukkan bahwa selama periode Tahun 2017-2020 pemenuhan kebutuhan aparatur alokasi belanja untuk belanja pemenuhan kebutuhan aparatur persentasenya relatif lebih besar apabila dibandingkan dengan belanja untuk pelayanan publik dan diharapkan belanja untuk pelayanan publik lebih meningkat lagi pada tahun-tahun berikutnya, Efektivitas dan efisiensi belanja daerah perlu dioptimalkan untuk belanja yang kemanfaatannya lebih besar di masyarakat. Sementara untuk tahun 2021, Total Alokasi Anggaran Belanja Pegawai pada APBD Kab. Muba sebesar Rp. 1.045.912.595.891,00 dengan realisasi sebesar Rp. 953.392.507.260,00 atau sebesar 91,15%.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Perkembangan kondisi defisit riil anggaran dan penutup defisit riil anggaran Kabupaten Musi Banyuasin periode tahun 2017-2021 tersaji pada tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10

Penutup Defisit Riil Anggaran

Kabupaten Musi Banyuasin 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.642.776.006.641	3.019.699.825.935	3.941.909.794.940	3.540.659.694.225	3.510.691.709.632
2	Belanja Daerah	2.619.480.025.846	2.958.060.291.945	3.647.212.439.376	3.377.578.658.990	3.836.457.605.910
A	**Surplus/(Defisit)**	**23.295.980.795,2**	**61.639.533.989,5**	**294.697.355.563,92**	**163.081.035.235,08**	**(325.765.896.277,33)**
	Ditutup oleh Pembiayaan Daerah:					
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	29.823.279.857	24.126.960.652	247.489.457.842	591.786.528.942	675.605.322.695
4	Penerimaan Pinjaman Daerah		197.184.666.100	245.740.446.461	99.961.007.152	143.708.823.900
5	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	29.000.000.000	35.461.702.900	196.140.730.925	179.223.248.634	221.812.445.858
B	**Total Realisasi Pembiayaan Daerah**	**823.279.857,47**	**185.849.923.852,89**	**297.089.173.378,48**	**512.524.287.460,40**	**597.501.700.737,48**
A+B	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)**	**24.119.260.652**	**247.489.457.843**	**591.786.528.942**	**675.605.322.695**	**271.735.804.459**

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Musi Banyuasin 2022

Pada tabel 3.9 di atas terlihat bahwa pada tahun 2017 realisasi pendapatan masih lebih besar diatas realisasi belanja, yang berarti tidak terjadi defisit anggaran atau surplus sebesar Rp23.295.980.795,2. Sehingga tidak diperlukan anggaran penutup defisit riil pada tahun 2017, oleh karena itu SILPA tahun sebelumnya (tahun 2016) sepenuhnya menjadi penerimaan pembiayaan (SiLPA) pada tahun berkenaan (tahun 2017). Demikian pula hal ini terjadi pada tahun 2018, 2019, 2020 yang dimana terjadi Surplus Anggaran. Keadaan berbeda terjadi pada tahun 2021, dimana Realisasi Pendapatan tidak mampu menutupi Realisasi Belanja yang lebih besar sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp325.765.896.277,33. SILPA tahun sebelumnya digunakan untuk menutup defisit riil yang menjadi penerimaan pembiayaan ditambah dengan Penerimaan Pinjaman Daerah. Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2021 sebesar Rp271.735.804.459,75. Gambaran komposisi penutup defisit riil dapat dilihat sebagaimana pada tabel 3.11 dibawah ini.

Tabel 3.11
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Musi Banyuasin

No.	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil					
		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	247.489.457.842,48	251,11	591.786.528.942,40	(3666)	675.605.322.695,48	(123,4)
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	245.740.446.461	249,34	99.961.007.152	(619,25)	143.708.823.900	(26,24)
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	**591.786.528.942**	600,45	**675.605.322.695**	(4185,33)	**271.735.804.459**	(49,6)

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Musi Banyuasin 2022

Kemudian analisis terakhir yang dapat dilakukan untuk mendapatkan gambaran kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin adalah realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) periode tahun 2017-2021 tersaji pada tabel 3.11 berikut ini.

Tabel 3.12
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Musi Banyuasin

No.	Uraian	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Rata - rata Pertumbuhan
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
1	Jumlah SiLPA	247.489.457.842,48	-	591.786.528.942,40	-	675.605.322.695,48	-	76,64%
2	Pelampauan penerimaan PAD	(22.702.125.03,70)	-9,17%	23.072.351.395,82	3,9%	8.264.278.574,74	1,22%	-132,91%
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	224.456.496.302	90,69%	404.236.300.093	68,31%	(126.864.940.893,00)	-18,78%	-25,64%
4	Pelampauan penerimaan lain - lain pendapatan daerah yang sah	(7.960.809.644,00)	-3,22%	14.988.749.580,00	2,53%	10.171.079.347,00	1,51%	-160,21%
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	(365.867.760.672,76)	147,83%	(366.505.748.551,7)	-61,31%	(362.605.738.310,52)	-53,67%	-0,44%
6	Kewajiban kepada pihak ketiga s.d. Akhir tahun belum terselesaikan	323.810.865.314,99	130,84%	240.777.874.175,32	40,69%	332.471.703.477,16	49,21%	6,22%
7	Kegiatan lanjutan							

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Musi Banyuasin 2022

BAB 4
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Kajian isu-isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam perencanaan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Berdasarkan permasalahan utama dalam pembangunan daerah selanjutnya dirumuskan isu strategis yang merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki dampak yang signifikan dalam pemenuhan kondisi yang diharapkan di masa mendatang.

Analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan yang bersifat antisipatif dan solutif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Dalam melakukan analisis isu strategis, dapat terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap kebijakan di berbagai level. Telaah kebijakan tersebut meliputi kebijakan di level internasional, nasional, provinsi dan kabupaten.

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Kabupaten Musi Banyuasin selama lima tahun terakhir terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun disamping itu terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis dan berkelanjutan antara lain dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing serta kualitas pelayanan publik.

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah maka tidak semua permasalahan dan tantangan yang dihadapi akan dapat dijawab dan diselesaikan dengan tuntas akan sehingga memerlukan pemilahan dan penentuan skala prioritas permasalahan atau tantangan yang mendesak untuk diatasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Namun demikian, permasalahan atau tantangan yang tidak menjadi prioritas utama bukan berarti tidak diatasi oleh pemerintah daerah akan tetapi secara operasional tetap menjadi perhatian sepanjang memiliki pengaruh terhadap kinerja yang telah dicapai di masa lalu dan berpengaruh terhadap standar pelayanan bagi masyarakat. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan faktor terpenting dalam pencapaian keberhasilan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin untuk lima tahun kedepan. Oleh karena itu proses

perumusan permasalahan dan analisis isu strategis harus melibatkan stakeholder kabupaten, provinsi dan pusat agar terjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antar pusat dan daerah.

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan. Identifikasi permasalahan dilakukan dalam *Forum Group Discussion* (FGD) Perangkat Daerah dan mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja berdasarkan urusan serta dielaborasi dengan berbagai permasalahan riil yang dihadapi Perangkat Daerah. Rumusan Permasalahan Pembangunan secara detil disajikan sebagai berikut.

4.1.1 Kemiskinan

Permasalahan yang selama ini terjadi pada penduduk miskin dan dibawah garis kemiskinan pada umumnya adalah tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal, ataupun keterampilan. Faktor produksi yang dimiliki umumnya sedikit sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas bagi penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan dan tidak mempunyai tanah garapan, atau kalaupun ada, relatif kecil sekali. Sehingga mendorong mereka untuk menjadi buruh tani/perkebunan atau pekerja kasar di luar pertanian/perkebunan.

Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Kabupaten Musi Banyuasin didapat informasi bahwa jumlah rumah tangga miskin dan rentan miskin di Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki asset kepemilikan lahan sebanyak 44.170 rumah tangga. Dengan kepemilikan lahan penduduk miskin di Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan dapat lebih mempermudah pemerintah dalam melakukan intervensi program agar dapat keluar dari kemiskinan asalkan program tersebut sesuai dengan karakter dan akar permasalahan penduduk miskin tersebut. Berdasarkan tabel berikut ini, dapat disampaikan jumlah kepala Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Musi Banyuasin dan Lapangan Usaha Bidang Pertanian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Kepala Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Musi Banyuasin dan lapangan Usaha Tahun 2018-2020 (Jiwa)

Tahun	Lapangan Usaha					
	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertanian Lainnya	Total Pertanian
2018	2.422	-	10.263	-	2.578	15.263
2019	1.237	-	11.968	-	1.273	14.478
2020	1.298	258	11.292	-	481	13.329

Sumber: BPS, Susenas.2021

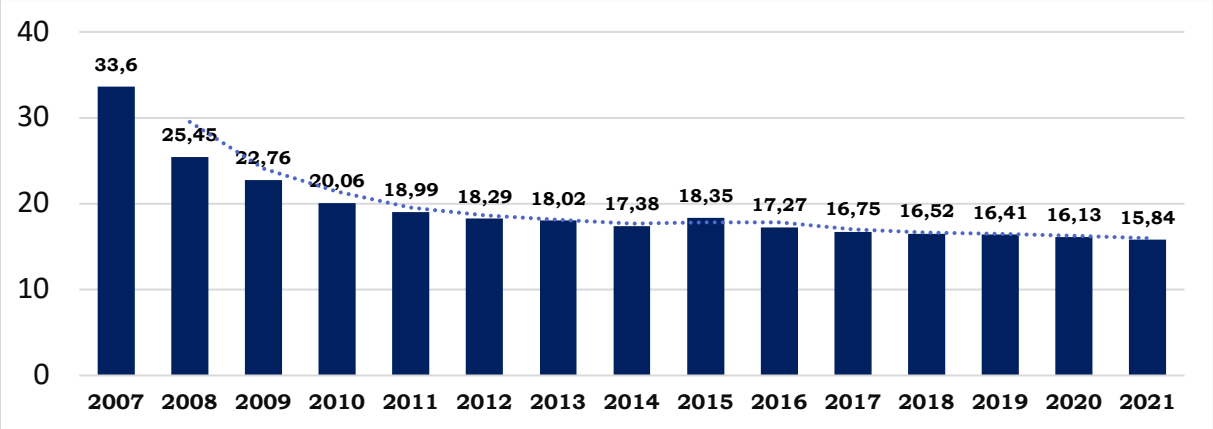
Penduduk miskin di Kabupaten Musi Banyuasin yang bekerja sebanyak 63% dan yang tidak bekerja sebanyak 37%. Sebagian besar mata pencaharian penduduk miskin di Kabupaten Musi Banyuasin lebih didominasi oleh sektor pertanian, tepatnya di perkebunan dan pertanian tanaman padi dan palawija yang dilakukan secara konvensional. Namun, karena bekerja di pertanian/perkebunan berdasarkan musiman, kesinambungan pekerjaan mereka menjadi kurang terjamin, banyak di antara mereka lalu menjadi pekerja bebas (*selfemployed*) yang berusaha apa saja. Akibatnya, di dalam situasi penawaran tenaga kerja yang besar saat ini membuat tingkat upah mereka menjadi rendah sehingga hasil yang didapatkan tentunya belum mampu mendorong penduduk miskin keluar dari kemiskinan. Hal ini mengakibatkan pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha.

Sementara itu, mereka juga tidak memiliki syarat untuk terpenuhinya kredit perbankan, seperti jaminan kredit dan lain-lain. Hal-hal seperti itulah yang mengakibatkan mereka berpaling ke lintah darat. Permasalahan selanjutnya adalah tingkat pendidikan golongan miskin umumnya rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar. Waktu mereka umumnya habis tersita untuk mencari nafkah sehingga tidak ada lagi waktu untuk belajar. Demikian juga dengan anak-anak mereka, tidak dapat menyelesaikan sekolah mereka karena harus membantu orangtua mereka mencari nafkah tambahan sehingga mengakibatkan

banyak penduduk miskin tidak mempunyai ketrampilan atau *skills* dan pendidikan.

Dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, 3 kecamatan yang masuk kategori kantong kemiskinan yaitu Kecamatan Lais, Sekayu dan Bayung Lencir. Rumah tangga miskin yang ada di 3 kecamatan ini pada umumnya memiliki lahan. Kecamatan yang memiliki penduduk miskin yang banyak adalah Kecamatan Lais.

Grafik 4.1
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Muba Tahun 2007 – 2021



Sumber : BPS, Muba dalam Angka, 2021

Selama kurun waktu 15 tahun terakhir (tahun 2007-2021) tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin terus menunjukkan tren yang menurun, kecuali pada tahun 2015 meningkat menjadi 18,35% dibandingkan tahun 2014 sebesar 17,38%. Tahun 2007 tingkat kemiskinan masih sebesar 33,60% lalu mampu diturunkan menjadi 16,13% pada tahun 2020 atau turun sebesar 17,47%. Dan pada tahun 2021, Kembali mengalami penurunan sebesar 0,29 menjadi 15,84%.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan 17 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebanyak 20,55% tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan dengan rata-rata perubahan setiap tahunnya sebesar 1,209%. Pada tahun 2004, persentase penduduk miskin di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 36,39%. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 15,84%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kabupaten Musi Banyuasin selama ini sudah cukup berhasil menurunkan angka kemiskinan. Namun, tetap diperlukan upaya dan kerja keras optimal untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan 1 digit.

Tabel 4.2
Perkembangan Angka Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota																		▲T	Rank	Total Perubahan	Rata-rata Perubahan
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004				
Ogan Komering Ulu	12,62	12,75	12,77	12,61	12,95	13,29	13,22	11,96	12,31	11,19	11,58	12,28	13,17	14,64	15,69	17,59	17,80	15,69	-0,13	8	3,07	0,181
Ogan Komering Ilir	14,68	14,73	15,01	15,28	15,75	16,03	17,08	15,30	15,82	14,53	15,06	15,98	16,17	17,67	22,50	24,47	25,93	22,50	-0,05	14	7,82	0,460
Muara Enim	12,32	12,32	12,41	12,56	13,19	13,56	14,54	13,76	14,26	13,21	13,71	14,51	15,96	17,98	19,87	22,03	21,88	19,87	0,00	7	7,55	0,444
Lahat	16,46	15,95	15,92	16,15	16,81	17,11	18,02	18,02	18,61	17,45	17,92	19,03	20,98	23,21	28,09	29,57	29,67	28,09	0,51	16	11,63	0,684
Musi Rawas	13,89	13,50	13,37	13,76	14,24	14,30	15,13	17,28	17,85	17,67	18,25	19,38	21,40	24,27	32,93	34,82	34,49	32,93	0,39	13	19,04	1,120
Musi Banyuasin	15,84	16,13	16,41	16,52	16,75	17,27	18,35	17,38	18,02	18,29	18,99	20,06	22,76	25,45	33,60	35,52	36,28	36,39	-0,29	15	20,55	1,209
Banyuasin	10,75	11,17	11,33	11,32	11,47	11,72	12,45	11,88	12,28	11,27	11,66	12,39	13,72	15,38	17,72	20,22	19,81	17,72	-0,42	3	6,97	0,410
Ogan Komering Ulu Selatan	11,12	10,85	10,53	10,64	10,98	10,95	11,58	11,21	11,57	10,49	10,84	11,53	12,73	14,56	18,96	18,42	21,06	18,96	0,27	4	7,84	0,461
Ogan Komering Ulu Timur	10,6	10,43	10,43	10,57	11,00	11,29	11,24	10,13	10,28	8,98	9,23	9,81	9,95	12,12	16,03	18,38	18,26	16,03	0,17	2	5,43	0,319
Ogan Ilir	13,82	13,36	13,31	13,19	13,58	13,80	14,43	13,38	13,86	12,79	13,18	13,98	15,65	17,78	21,57	23,75	22,67	21,57	0,46	12	7,75	0,456
Empat Lawang	13,35	12,63	12,30	12,25	12,44	12,54	13,33	12,89	13,10	13,36	13,82	14,74	15,80	18,37	23,50	-	-	23,50	0,72	11	10,15	0,677
Pali	12,91	12,62	13,47	13,81	14,53	14,23	14,88	-	-	-	-	-	-	-	8,98	-	-	-	0,29	9	-3,93	-0,561
Musi Rawas Utara	20,11	19,47	19,12	19,12	19,49	20,00	19,73	-	-	-	-	-	-	-	7,57	-	-	-	0,64	17	-12,54	-1,791
Palembang	11,34	10,89	10,90	10,95	11,40	12,04	12,85	12,93	13,36	13,59	14,13	15,00	14,75	16,66	8,98	9,35	9,23	8,98	0,45	5	-2,36	-0,139
Prabumulih	12,2	11,59	11,61	11,39	11,42	11,44	12,12	10,86	11,23	11,71	12,19	12,94	13,93	15,39	7,57	11,83	9,33	7,57	0,61	6	-4,63	-0,272
Pagar Alam	9,4	9,07	8,90	8,77	8,89	9,19	9,64	8,90	9,00	9,00	9,24	9,81	9,66	10,23	9,75	13,20	11,88	9,75	0,33	1	0,35	0,021
Lubuk Linggau	13,23	12,71	12,95	13,02	13,12	13,99	15,16	13,90	14,37	13,88	14,43	15,30	15,12	17,36	14,25	16,11	16,01	14,25	0,52	10	1,02	0,060
Sumatera Selatan	12,84	12,7	12,71	12,80	13,19	13,54	14,25	13,62	14,06	13,48	13,95	14,80	15,68	17,67	19,15	21,01	20,99	19,15	0,18		6,31	0,371

Sumber : BPS, Muba dalam Angka, 2021

Tahun 2021 adalah tahun kedua pelaksanaan pembangunan daerah dengan kondisi pandemi covid-19. Namun, Kabupaten Musi Banyuasin tetap konsisten dalam menurunkan angka kemiskinan. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan, tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin masih cukup tinggi. Tahun 2021 tingkat kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin (15,84%) menempati urutan ke-3 tertinggi setelah Kabupaten Muratara (20,11%) dan Kabupaten Lahat (16,46%).

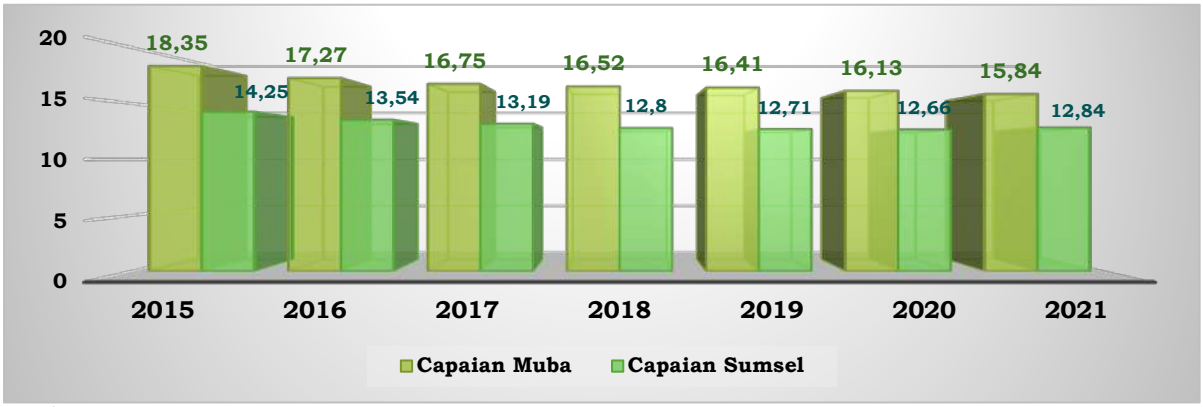
Tabel 4.3
Garis Kemiskinan berdasarkan Kabupaten/Kota
Tahun 2019-2021

No	Kabupaten/Kota	GK (Rupiah/Kapita/Bulan)		
		2019	2020	2021
1	Prabumulih	541.648	569.769	592.209
2	Palembang	521.489	548.563	567.517
3	**Musi Banyuasin**	**486.476**	**519.797**	**537.774**
4	Musi Rawas Utara	470.485	504.598	532.273
5	Lubuk Linggau	477.756	495.213	516.762
6	Musi Rawas	437.854	467.766	493.675
7	Ogan Ilir	433.616	469.746	492.536
8	Lahat	428.309	457.569	485.141
9	Ogan Komering Ulu	428.200	457.452	481.139
10	Banyuasin	397.496	429.816	445.088
11	Pali	388.208	412.236	435.379
12	Muara Enim	367.761	390.342	405.782
13	Ogan Komering Ilir	347.121	375.837	393.239
14	Oku Timur	321.629	343.601	362.446
15	Empat Lawang	315.699	341.007	360.377
16	Oku Selatan	319.333	341.148	359.858
17	Pagar Alam	328.745	342.738	356.287

Sumber : BPS, Prov. Sumsel dalam Angka , 2021.

Beberapa Hal yang menjadi faktor keberhasilan penurunan kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin antara lain Program penurunan angka kemiskinan terutama di desil 1 dalam bentuk perlindungan sosial yang meningkat setiap tahunnya, harga komoditi perkebunan yang menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir serta keseriusan pemerintah dalam menyusun basis data kemiskinan (DTKS).

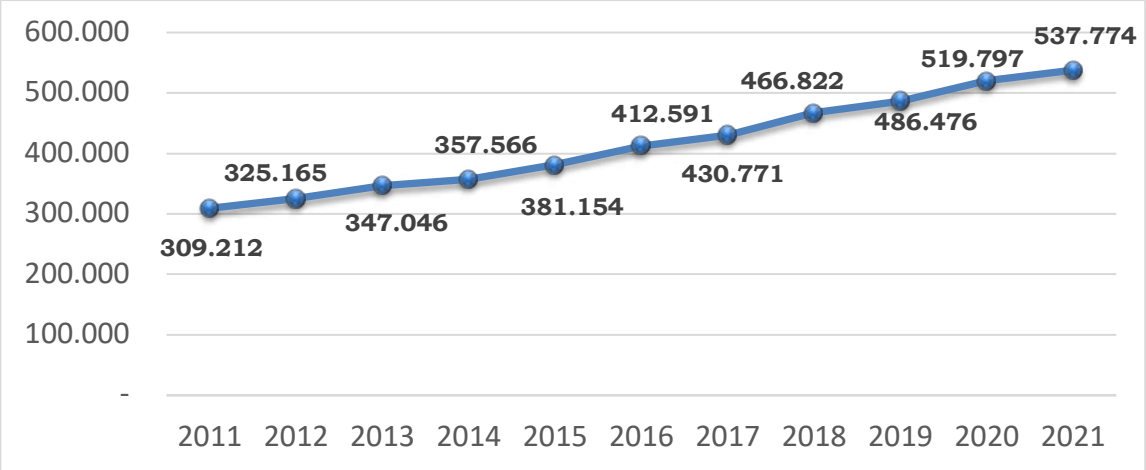
Grafik 4.2
Persentase Penduduk Miskin Muba dan Sumsel Tahun 2015-2021



Sumber : BPS, 2021

Upaya penurunan tingkat kemiskinan memang menghadapi kendala yang tidak ringan. Kondisi pandemi covid-19 yang masih berlangsung pada tahun 2021, kenaikan harga bahan pokok sedangkan disisi lain masih fluktuatifnya harga komoditas utama Kabupaten Musi Banyuasin seperti karet dan sawit, yang sebagian besar masyarakat menggantungkan pendapatannya dari komoditas tersebut. Disamping itu juga disebabkan masih tingginya garis kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Sumatera Selatan seperti yang tertera pada grafik di bawah ini:

Grafik 4.3
Garis Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin
Periode 2011-2021



Sumber : BPS, 2021.

Penyebab dan tantangan kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin setelah dilakukan identifikasi dan perumusan masalah antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pendekatan integratif untuk penanggulangan kemiskinan daerah sehingga program – program dan penanganan kemiskinan yang diupayakan belum dapat dapat mendorong akselerasi dan efektitas penurunan jumlah penduduk miskin, antara lain melalui pendekatan pembangunan kewilayahan dan fokus pada pemberdayaan masyarakat;
2. Belum adanya keterpaduan antar Perangkat Daerah dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan dengan indikator capaian yang terukur;

3. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan belum fokus, masih ego sektoral dan belum terpadu;

4. Daya beli masyarakat yang rendah dikarenakan menurunnya harga komoditi pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber utama penghasilan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin;

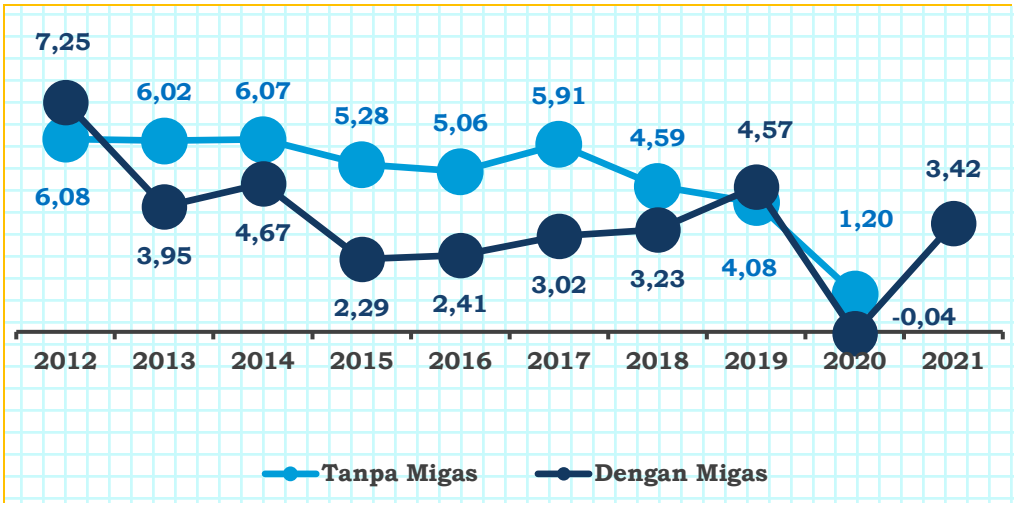
5. Tingkat pengangguran terbuka yang relatif masih tinggi. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk terus mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja;

6. Belum optimalnya peran Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menciptakan tenaga kerja terampil, sesuai tuntutan kebutuhan pasar, (termasuk update skill dan wawasan pengajar BLK).

4.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi. Pada Tahun 2020, memburuknya kegiatan ekonomi secara massif terjadi pada akhir triwulan I Tahun 2020 yang memaksa pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PDBB), dan dilanjutkan dengan *new normal* dengan tetap melakukan pembatasan-pembatasan skala mikro sebagai bentuk antisipasi terhadap peluang penyebaran wabah yang lebih besar.

Grafik 4.4
Tren Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Muba
Periode 2012-2021 (%)



Sumber: BPS, Muba Dalam Angka, 2022

Hal ini berdampak besar terhadap ekonomi di seluruh lapangan usaha mengalami kebangkrutan karena tidak dapat beroperasi ataupun hanya beroperasi sebagian. Perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2020 mengalami kontraksi cukup dalam yakni -0,04% atau menduduki posisi nomor 4 (empat) terbawah diatas Kota Lubuk Linggau, Kota Prabumulih dan Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan. Capaian ini lebih rendah dari tahun 2019 sebesar 4,57%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan nilai total PDRB ADHK jika dibandingkan dengan tahun 2019. Penyumbang kontraksi diantaranya adalah lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,65%; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,37% serta Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman sebesar 0,29%.

Adapun pada tahun 2021 perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin tumbuh sebesar 3,42 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,04 persen. Hal ini menunjukkan membaiknya perekonomian secara umum Kabupaten Musi Banyuasin. Dilihat dari struktur perekonomiannya, di tahun 2021 Kabupaten Musi Banyuasin masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; serta Industri Pengolahan yang masing - masing berkontribusi sebesar 53,67 persen, 11,69 persen dan 10,69 persen.

Kondisi ini harus disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk meningkatkan perekonomian ke depannya. Pertambangan dan Penggalian merupakan lapangan usaha dominan yang memiliki kontribusi rata-rata diatas 50% setiap tahunnya dalam struktur ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini berarti bahwa naik turunnya nilai PDRB Pertambangan dan Penggalian akan sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan serta struktur perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin secara keseluruhan.

Tabel 4.4
Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (dalam Persen) Periode 2016-2020

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,74	11,70	11,19	12,00	11,69
B	Pertambangan dan Penggalian	54,18	54,87	55,36	52,43	53,67
C	Industri Pengolahan	9,19	9,93	10,17	10,95	10,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,04	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	8,32	8,02	7,79	8,09	7,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,57	4,68	4,81	5,03	4,97
H	Transportasi dan Pergudangan	0,28	0,29	0,30	0,31	0,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,15	0,16	0,18	0,19	0,18
J	Informasi dan Komunikasi	0,23	0,25	0,26	0,31	0,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,99	1,94	1,88	1,95	1,84
L	Real Estate	1,88	1,98	2,06	2,22	2,19
M,N	Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,57	3,35	3,13	3,43	3,32
P	Jasa Pendidikan	1,91	1,85	1,83	1,96	1,91
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,34	0,33	0,34	0,39	0,39
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,54	0,55	0,58	0,63	0,60
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : BPS, Muba dalam Angka, 2021

PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Besar Kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat bergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

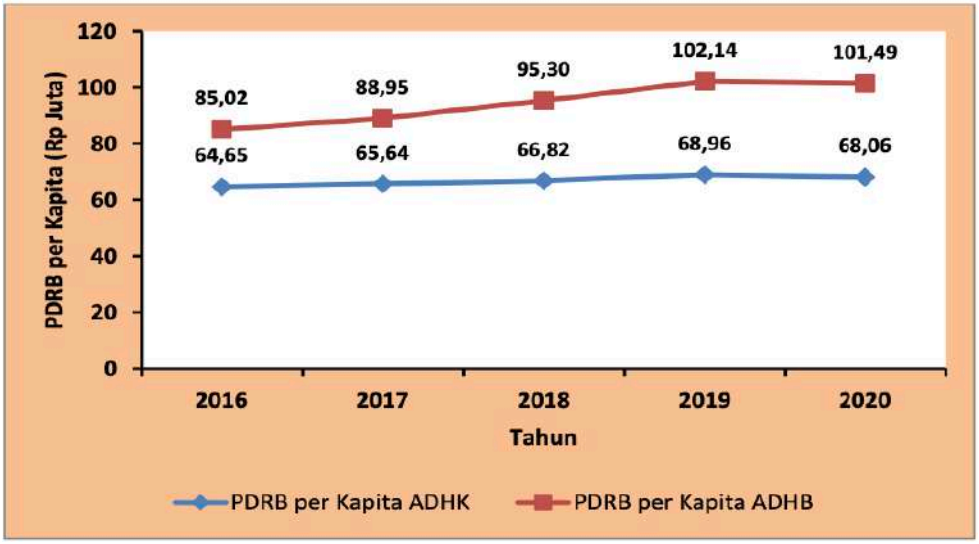
Pendapatan perkapita atau juga sering disebut PDRB perkapita adalah suatu pendapatan rata-rata dari masyarakat dalam suatu daerah. Pengertian lain, pendapatan perkapita merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk. Dengan begitu, peningkatan pendapatan perkapita diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan.

Indikator berhasil tidaknya pembangunan ekonomi wilayah, dapat dilihat melalui tingginya pendapatan masyarakat. Bahkan tinggi rendahnya pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai indikator penentu kemajuan wilayah. Analisis ini, termasuk indikator terpenting yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil dari pembangunan.

PDRB per kapita ADHK dan PDRB per kapita ADHB Kabupaten Musi Banyuasin terus meningkat pada tahun 2016-2019. Hal ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Musi Banyuasin rata-rata mampu menciptakan PDRB (nilai tambah) sebesar nilai per kapita pada masing-masing tahun. Secara riil, PDRB per kapita ADHK tumbuh masing-masing sebesar 1,54% pada tahun 2017, kemudian 1,79% pada tahun 1018 dan 3,20% pada tahun 2019. Pertumbuhan ini diikuti juga dengan penambahan jumlah penduduk yang meningkat rata-rata 1,42% per tahunnya.

Pada Tahun 2020, dengan adanya pandemi Covid-19, PDRB per kapita ADHK terkontraksi sebesar 1,31%. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, PDRB per kapita tertinggi dicapai pada tahun 2019, yaitu senilai masing-masing Rp. 102,14 juta dan Rp, 68,96 juta untuk PDRB per kapita ADHB dan PDRB per kapita ADHK.

Grafik 4.5
PDRB per Kapita ADHK dan ADHB Kabupaten Muba
Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2021 , diolah

PDRB per kapita ADHK dan PDRB per kapita ADHB Kabupaten Musi Banyuasin terus meningkat dari tahun 2016-2019. Hal ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Musi Banyuasin rata-rata mampu menciptakan PDRB (nilai tambah) sebesar nilai per kapita pada masing-masing tahun. Secara riil, PDRB per kapita ADHK tumbuh masing sebesar 1,54% pada tahun 2017, kemudian 1,79% pada tahun 2018 dan 3,20% pada tahun 2019. Pertumbuhan ini diikuti pula dengan penambahan jumlah penduduk yang meningkat rata-rata 1,42% per tahunnya.

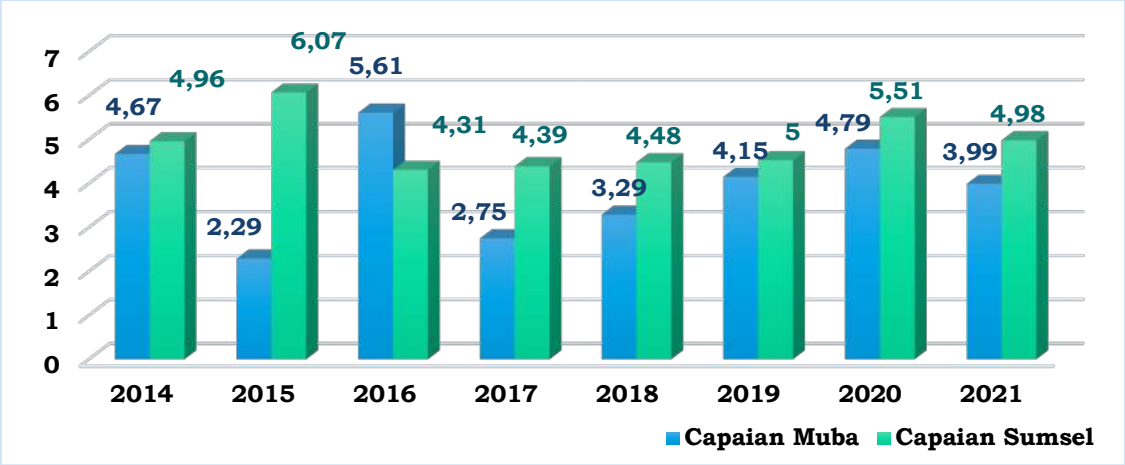
Pada Tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid-19, PDRB per kapita ADHK terkontraksi sebesar 1,31%. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, PDRB per kapita tertinggi dicapai pada tahun 2019, yaitu senilai masing-masing Rp.102,14 juta dan Rp.68,96 juta untuk PDRB per kapita ADHB dan PDRB per kapita ADHK.

4.1.3 Tingkat Pengangguran

Permasalahan ketenagakerjaan menjadi salah satu fokus utama pembangunan. Hal ini mengakibatkan pentingnya penyediaan lapangan kerja utamanya untuk generasi muda yang saat ini mendominasi jumlah penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin. Salah satu tantangan terbesar adalah menciptakan lapangan kerja atau usaha yang layak bagi angkatan kerja yang harus diantisipasi dari sejak dini sebelum terjadi peningkatan karena perubahan struktur umur penduduk. Tantangan ini

mencakup dua aspek sekaligus yaitu penciptaan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang belum bekerja dan peningkatan produktivitas kerja bagi mereka yang sudah bekerja sehingga dapat memperoleh imbalan kerja yang memadai untuk dapat hidup secara layak (*decent living*).

Grafik 4.6
Tingkat Pengangguran Terbuka Muba dan Sumsel
Periode 2014-2021 (%)



Sumber : BPS, Muba dalam Angka, 2021

Musi Banyuasin selama periode tahun 2014-2021 cenderung fluktuatif dengan persentase lebih rendah dari Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2014 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 4,67% dan menurun di tahun 2015 menjadi 2,29%. Tahun 2016 melonjak menjadi 5,61% dan kembali turun cukup tajam menjadi 2,75% pada tahun 2017. Pada tahun 2018, angka pengangguran terbuka kembali meningkat menjadi 3,29% yang berbanding lurus dengan peningkatan angka pengangguran terbuka di

Provinsi Sumatera Selatan pada tahun yang sama. Pada tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Muba mengalami peningkatan menjadi 4,15% dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020 menjadi 4,79 sebagai salah satu dampak dari kondisi pandemi covid-19. Dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 3,99% lebih rendah dibandingkan Provinsi dan Nasional. Dilihat dari jenis kelamin, jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021 sebanyak 13.230 orang yang terdiri dari 7.177 berjenis kelamin laki-laki dan 6.053 berjenis kelamin perempuan.

Dari grafik diatas, dapat kita lihat bahwa grafik tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Musi Banyuasin terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2017-2020 walaupun masih dibawah rata-rata/relatif lebih baik daripada tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Selatan. Adanya peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya di Kabupaten Musi Banyuasin yang mengakibatkan bonus demografi yang berakibat meningkatnya tingkat pengangguran di Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini menjadi permasalahan yang dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Perbandingan Jumlah Penduduk dan Angkatan Kerja di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019-2020

No.	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Jumlah Penduduk	602.496	622.206	627.070
2	Angkatan Kerja (Bekerja)	290.744	317.868	318.096
3	Angkatan Kerja (Pengangguran Terbuka)	12.573	15.986	13.230

Sumber : BPS. diolah

Selanjutnya Tabel 4.6, menjelaskan kondisi penduduk yang bekerja menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Musi Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan. Pada skala Kabupaten Musi Banyuasin maupun skala Provinsi Sumatera Selatan masih menunjukkan dominasi persentase tenaga kerja di sektor primer disusul sektor tersier dan kemudian sektor sekunder.

Pada kurun waktu empat tahun, yaitu tahun 2017-2020 terdapat tiga lapangan usaha utama bagi penduduk bekerja baik di Kabupaten Musi Banyuasin maupun pada skala Provinsi Sumatera Selatan. Ketiga lapangan usaha tersebut adalah yang tertinggi Pertanian, diikuti oleh Jasa dan kemudian Industri Pengolahan. Lapangan usaha Pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin sangat mendominasi dengan rata-rata 60,55%. Sedangkan pada skala Provinsi Sumatera Selatan, lapangan usaha pertanian masih di bawah 50%.

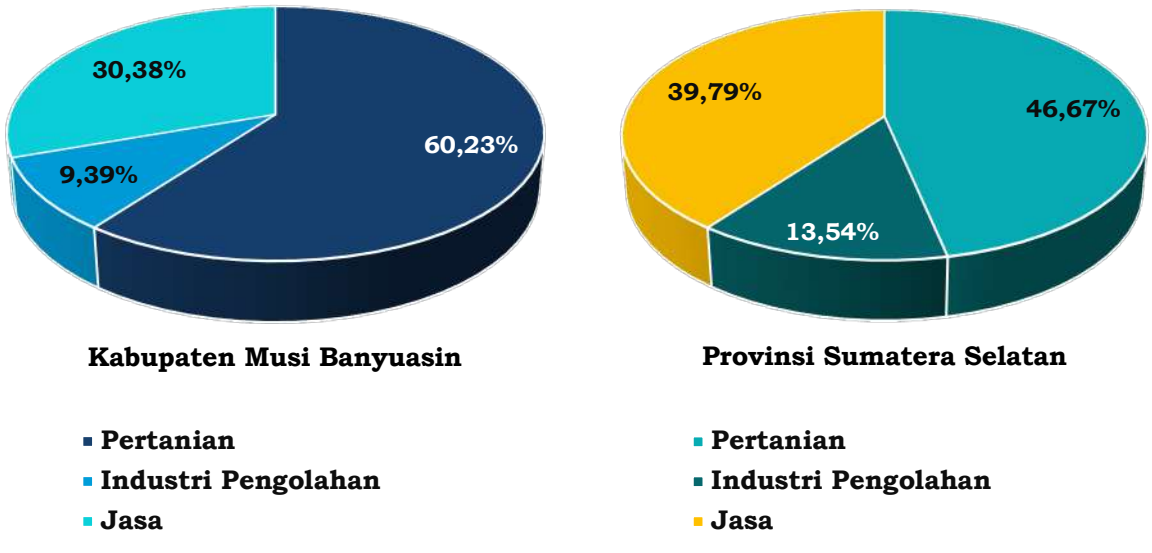
Sebagai rujukan, tahapan kemajuan perekonomian suatu negara dari tradisional menuju negara industri, salah satunya ditandai dengan transformasi sektoral tenaga kerja dari sektor primer dengan produktivitas rendah ke sektor-sektor dengan produktivitas lebih tinggi yaitu sektor sekunder dan tersier.

Tabel 4.6
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Musi Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2020

Tahun	Kabupaten Musi Banyuasin			Provinsi Sumatera Selatan		
	Pertanian	Industri Pengolahan	Jasa	Pertanian	Industri Pengolahan	Jasa
2017	62,74	11,14	26,12	48,25	13,46	38,29
2018	60,46	11,89	27,65	46,53	14,31	39,16
2019	58,78	12,45	28,77	45,91	13,57	40,52
2020	60,23	9,39	30,38	45,99	12,82	41,19
Rata-rata	**60,55**	**11,22**	**28,23**	**46,67**	**13,54**	**39,79**

Sumber: BPS Kab. Muba, 2021

Gambar 4.7
Rata-Rata Persentase Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020



Sumber: BPS Kab. Muba, 2021

4.1.4 Pendidikan

Permasalahan utama pelayanan pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin terletak pada ketersediaan sarana prasarana beserta kualitasnya. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2021 jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin secara umum jumlahnya untuk saat ini cukup memadai dengan TK/RA sebanyak 248 unit, SD/MI sebanyak 481 unit, SLTP/MTs sebanyak 162 unit, SMU/SMK/MA sebanyak 101 unit, Poltek Sekayu sebanyak 1 unit dengan 3 program, AKPER sebanyak 1 unit dan Sekolah Tinggi Swasta sebanyak tiga unit dengan lima Program. Sementara jumlah murid tahun 2021 untuk tingkat TK/RA sebanyak 10.004 orang, SD/MI sebanyak 83.443 orang, SLTP/MTs sebanyak 31.228 orang, dan SMU/SMK/MA sebanyak 27.757 orang.

Tabel 4.7
Jumlah Sekolah dan Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kab. Muba Tahun 2016-2021

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah (unit)						Jumlah Murid (jiwa)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TK/RA	N/A	N/A	196	224	224	248	N/A	N/A	8.632	10.084	10.533	10.004
SD/MI	483	492	500	502	488	481	86.627	91.082	89.764	88.589	89.518	83.443
SLTP/MTs	172	190	191	195	188	162	32.283	33.062	34.220	34.725	34.609	31.228
SMU/SMK/MA	86	99	99	101	100	101	20.808	20.808	25.308	26.848	28.084	27.757

Sumber : BPS Kab. Muba dan Dinas Pendidikan Kab. Muba, 2022

Pelayanan Pendidikan merupakan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah. Namun, berdasarkan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2020 hanya mencapai sebesar 85,53 persen. Artinya dari target yang ditetapkan sebesar 70,30 persen, terealisasi sebesar 60,13 persen saja. Sedangkan capaian standar pelayanan minimal Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 untuk urusan pendidikan, pelayanan pendidikan anak usia dini mencapai 36,17%, capaian pendidikan dasar mencapai 88,18% dan pendidikan kesetaraan mencapai 55,51%. Pelayanan tersebut di Kabupaten Musi Banyuasin terbilang sudah baik namun belum optimal, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan dinamika perubahan lingkungan regional, nasional maupun global maka pelayanan pendidikan secara iteratif perlu terus dioptimalkan. Dalam pelayanan pendidikan masih diperlukan pemerataan kualitas antara wilayah, perluasan kapasitas pelayanan pendidikan sesuai standar masih harus terus dilakukan.

Tabel 4.8
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas Menurut Karakteristik Dan Status Pendidikan Pada Tahun 2020

Karakteristik	Tidak/Belum pernah Bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak Bersekolah Lagi	Jumlah
		SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat		
Jenis Kelamin:						
Laki-laki	5,91	14,08	4,74	6,12	69,16	100,00
Perempuan	4,05	17,08	5,73	4,93	68,21	100,00

Kelompok Pengeluaran:						
40 persen terbawah	6,27	20,04	6,32	4,44	62,93	100,00
40 persen tengah	4,74	13,32	5,20	5,92	70,82	100,00
20 persen teratas	3,07	11,33	3,16	6,90	75,55	100,00
Musi Banyuasin	5	15,54	5,22	5,54	68,70	100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Kab. Muba Tahun 2020

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase penduduk Kab. Muba menurut status Pendidikan sampai dengan SMA pada tahun 2020 masih rendah. Hal ini sejalan dengan percepatan program-program peningkatan kualitas Pendidikan yang selama ini telah dijalankan dan masih perlu ditingkatkan lebih optimal. Dengan luas wilayah Kabupaten Musin Banyuasin yang sangat luas, maka perlu dilakukan kerja keras dalam pemerataan mutu dan kualitas Pendidikan serta tenaga pengajar di Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel 4.9
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah (SMP) Di Kabupaten Musi Banyuasin

No.	Uraian	Negeri		Swasta		Total	
		2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
1	**Jumlah Sekolah:**						
	SD	423	441	35	38	458	481
	SMP	100	106	50	55	150	162
2	**Jumlah Guru:**						
	SD	4.850	4.387	351	300	5.201	4.687
	SMP	1.626	1.596	428	389	2.054	1.985
3	**Jumlah Murid:**						
	SD	77.018	77.213	5.913	6.245	82.931	83.458
	SMP	23.776	24.639	5.605	6.595	29.381	31.234

Sumber: Muba dalam Angka, BPS, 2022

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin yaitu:

1. Ketersediaan sarana prasarana masih belum memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimal (SPM);
2. Sarana Prasarana sekolah masih banyak yang mengalami kerusakan;
3. Belum terpenuhinya pemerataan dan kualifikasi serta kompetensi tenaga pendidikan.

4.1.5 Kesehatan

Perkembangan kondisi kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin cenderung membaik yang ditunjukkan dengan beberapa indikator kesehatan. Angka harapan hidup merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya dari sisi kesehatan. Usia harapan hidup di Musi Banyuasin pada tahun 2021 sebesar 68,84 tahun artinya rata-rata penduduk Musi Banyuasin akan hidup mencapai umur 68 tahun. Usia harapan hidup penduduk di Musi Banyuasin mencerminkan semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan kesehatannya melalui perilaku hidup bersih dan sehat.

Pada tahun 2021 angka kematian ibu berjumlah 60 orang per 1000 penduduk. Penyebab tertinggi kematian ibu antara lain hipertensi,

pendarahan, masih rendahnya deteksi dini kehamilan risiko tinggi oleh masyarakat dan masih kurangnya kesiapsiagaan keluarga dalam rujukan persalinan pada kehamilan risiko tinggi. Sendangkan untuk angka kematian balita berjumlah 3 orang per 1000 penduduk di tahun 2021. Kondisi ini menggambarkan derajat kesehatan masyarakat khususnya status kesehatan ibu dan balita masih belum optimal.

Jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2021 untuk Dokter Umum berjumlah 38 orang, Dokter gigi berjumlah 7 orang, Tenaga Bidan pada berjumlah 270 orang, Tenaga Perawat berjumlah 266 orang, Tenaga Kefarmasian berjumlah 26 orang, Tenaga Kesehatan Masyarakat berjumlah 76 orang, Tenaga Kesehatan Lingkungan berjumlah 12 orang, Tenaga Gizi berjumlah 12 orang dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik berjumlah 6 orang dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tenaga kesehatan masih mengalami kekurangan.

Statistik kesejahteraan Kesehatan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2020, terdapat 12,15% penduduk Kab. Muba yang menderita sakit sebulan terakhir, 34,89% yang menggunakan jaminan Kesehatan untuk berobat, 25,19% Balita yang mendapatkan imunisasi lengkap serta 14,84% perempuan di Kabupaten Musi Banyuasin yang melahirkan bayi dengan berat <2,5 kg. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menyediakan fasilitas

kesehatan yang memadai bagi masyarakat sebagaimana tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Klinik Pratama dan Posyandu Di Kabupaten Musi Banyuasin

No.	Uraian	Tahun	
		2020	2021
1	**Jumlah Rumah Sakit:**		
	Rumah Sakit Umum	3	3
	Rumah Sakit Khusus	-	-
2	**Jumlah Puskesmas:**		
	Puskesmas Rawat Inap	29	6
	Puskesmas Non Rawat Inap	128	23
3	**Jumlah Klinik Pratama**	**36**	**47**
4	**Jumlah Posyandu**	**542**	**542**

Sumber: Muba dalam Angka, BPS, 2022

Secara umum, permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kesehatan yaitu sebagai berikut:

1. Kinerja pelayanan kesehatan yang rendah terutama desa yang relatif jauh dan tertinggal dari pusat pelayanan kesehatan, yang menyebabkan masih terdapatnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan.
2. Belum optimalnya pencapaian perbaikan gizi masyarakat, utamanya bagi balita.
3. Belum optimalnya pencegahan dan pengawasan terhadap penyakit-penyakit menular.
4. Perilaku hidup bersih dan sehat belum menjadi budaya masyarakat.

5. Masih terbatasnya tenaga spesialis dan teknis dalam mendukung pelayanan Rumah Sakit maupun Puskesmas.
6. Belum optimalnya peran dan fungsi, serta masih rendahnya kualitas Posyandu dengan persebaran strata yang tidak merata.
7. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dengan dukungan kelengkapan sarana dan prasarana yang semakin memadai serta kapasitas SDM tenaga kesehatan yang berkualitas.
8. Belum optimalnya partisipasi semua lapisan masyarakat dalam menjaga kehigenisan dan sanitasi lingkungan sekitar dan tempat-tempat umum.
9. Peredaran dan penggunaan Narkoba yang cukup memperhatinkan terjadi di masyarakat terutama pada usia produktif 15-35 tahun.

4.1.6 Infrastruktur Daerah

Secara umum kinerja infrastruktur daerah menunjukkan realisasi yang positif. Penanganan jalan di Kabupaten Musi Banyuasin termasuk pada jalur horizontal dan vertikal serta menangani jalan-jalan non status pada jalur tersebut. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sedang meningkatkan beberapa ruas jalan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin terus berorientasi pada visi yang ingin dicapai dimana diharapkan kondisi jalan dan jembatan yang mantap, aman dan nyaman di Kabupaten Musi Banyuasin secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Panjang jalan Kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 753/KPTS/PU-BM/2011 sepanjang 1.073,77 km dengan 94 ruas jalan kabupaten. Sedangkan panjang jalan strategis lainnya sepanjang 84,80 km sehingga total Panjang Jalan Kabupaten Musi Banyuasin sepanjang 1158,57 km. Pada tahun 2019 panjang jalan dalam kondisi mantap sepanjang 609,09 km, kondisi rusak ringan sepanjang 122,88 km, dan dalam kondisi rusak berat sepanjang 341,80 km.

Dari hasil evaluasi RPJMD Tahun 2017-2022, terdapat beberapa ketidaktercapaian target kinerja yang disebabkan beberapa hal antara lain:

1. Anggaran Perangkat Daerah pengampu Bidang Infrastruktur dialokasikan pada beberapa bidang program dan kegiatan yang luas;
2. Pada program pembangunan jalan yang mendukung IKU, alokasi anggaran tidak hanya diperuntukkan pada pembangunan jalan kabupaten/strategis saja tetapi juga dalam desa yang realisasinya tidak diperhitungkan dalam capaian kinerja;
3. Pada tahun 2018-2019, Kabupaten Muba telah mendapatkan dana pinjaman PT. SMI untuk merealisasikan beberapa ruas jalan strategis yang diperuntukkan untuk membuka daerah terisolir dan belum masuk kategori jalan mantap;

4. Menurunnya kondisi jalan mantap karena pembangunan/peningkatan jalan pada tahun-tahun sebelumnya dinilai pada tahun berikutnya yang mengalami penurunan karena faktor alam dan tidak disiplinnya pengguna jalan terutama muatan angkutan yang melebihi tonase/beban jalan.

Tabel 4.11
Kondisi Jalan (dalam km) Di Kabupaten Muba Tahun 2019-2021

Kondisi Jalan	2019	2020	2021
Baik	387,83	495,39	438,02
Sedang	177,73	126,12	338,19
Rusak	264,20	115,80	221,64
Rusak Berat	244,01	339,37	75,92

Sumber: Musi Banyuasin Dalam Angka, 2022

Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur daerah antara lain :

1. Kuantitas dan Kualitas infrastruktur transportasi darat terutama jalan dan jembatan yang relatif rendah mengakibatkan terjadinya hambatan-hambatan dalam transportasi orang, barang dan jasa baik di dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Kondisi jalan menuju sentra produksi yang kurang baik menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Kondisi jalan baik pada tahun 2020 sebesar 57,88 %.
2. Kondisi jalan menuju sentra produksi yang kurang baik menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

3. Kapasitas jalan yang ada tidak mampu menampung beban yang melebihi tonase (*overloading*) dalam mobilisasi barang sehingga dalam siklus tahunan jalan telah mengalamai kerusakan.
4. Belum berfungsinya terminal di Kota Sekayu dalam mendorong kegiatan perekonomian.
5. Masih perlunya pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur irigasi, dan saluran drainase yang sudah ada.
6. Sarana air bersih yang masih kurang, terutama pada daerah perairan (Kecamatan Lalan).
7. Masih adanya rumah tinggal belum bersanitasi, tuntutan untuk mencapai target "*Key Permormance Indicators*" akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, akses sanitasi layak 100%.
8. Masih rendahnya kesadaran masyarakat mengolah sampah dan membuang sampah di sembarang tempat.
9. Belum optimalnya partisispasi masyarakat dalam penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian) dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang tata ruang masih kurang.

4.1.7 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,

termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (Undang-Undang Republik Indonesia nomer 4 Tahun 1982, Pasal 1 butir 1). Perkembangan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dewasa ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai pengembangan diberbagai macam sektor antara lain sektor pertambangan, pertanian, ekonomi, sosial, dan jasa. Tentunya perkembangan suatu wilayah akan berbeda dengan wilayah lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Perkembangan suatu wilayah diharapkan turut berlandaskan aspek lingkungan sehingga aspek kerusakan lingkungan hidup dapat diminimalisir.

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi baik di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin maupun secara regional tentunya akan menimbulkan dampak buruk bagi keseimbangan lingkungan. Perubahan fungsi hutan menjadi lahan pertanian/perkebunan, permukiman, industri dan eksploitasi pertambangan dan hasil hutan dalam waktu tidak terlalu lama akan mengganggu keseimbangan alam jika tidak ada penanganan secara proporsional. Pemanfaatan sumberdaya alam di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini tentunya menimbulkan berbagai macam permasalahan yang ditimbulkan oleh pemanfaatan sumberdaya alam. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan hidup secara

terpadu baik dalam lingkup lokal, regional, maupun lingkup Daerah Aliran Sungai (DAS) yang multisektoral serta komplek wilayah yang bervariasi.

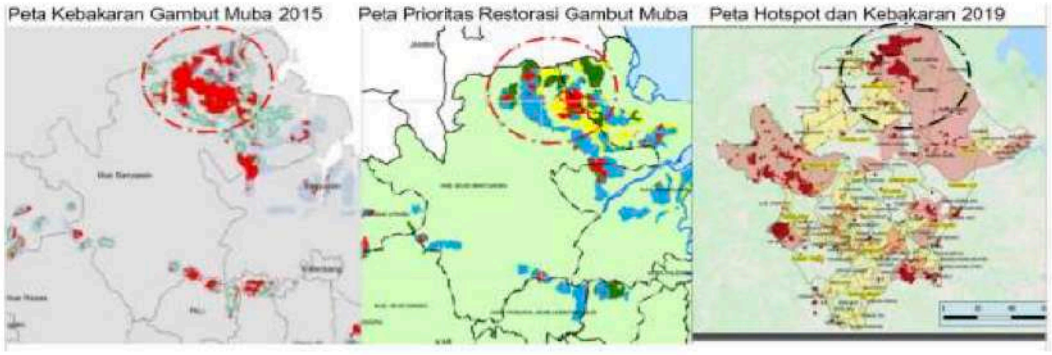
Potensi migas dan batubara yang cukup melimpah di Kabupaten Musi Banyuasin selain sebagai suatu potensi sekaligus akan memberikan suatu permasalahan berkaitan dengan proses eksplorasi penambangan. Untuk itu diharapkan sebelum proses eksplorasi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan penambangan harus terlebih dahulu dilakukan kajian lingkungan sehingga dampak lingkungan yang lebih luas yang pada akhirnya akan memberikan dampak buru terhadap masyarakat dapat dihindari. kemarau yang sudah memiliki kerentanan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan ini merupakan ancaman yang sangat serius terhadap lingkungan dengan meningkatkan emisi karbon yang berpengaruh terhdap perubhan iklim global dan menurunkan biodiversitas.

Musi Banyuasin sebagai salah satu kabupaten yang memiliki ekosistem gambut dan berada di wilayah tropis dengan sebaran musim waktu hujan dan kemarau yang sudah memiliki kerentanan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan ini merupakan ancaman yang sangat serius terhdap lingkungan dengan meningkatkan emisi karbon yang berpengaruh terhdap perubhan iklim global dan menurunkan biodiversitas. Kejadian kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 nomor 2 (dua) tertinggi di Sumatera Selatan dibandingkan

kabupaten / kota lainnya mencapai 5.300 titik hot spot. sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan luasan kebakaran hutan seluas 24.129 Ha dengan 3.613 titik hotspot.

Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Musi Banyuasin banyak terjadi pada lahan gambut, luas lahan gambut di Kabupaten Musi Banyuasin seluas 262.000 Ha. Secara visual kebakaran selalu terjadi di lokasi yang diperkirakan sama, lokasi tersebut yaitu kebakaran 2015, dan kebakaran 2019. lahan tersebut adalah lahan prioritas restorasi dan sudah dilakukan kegiatan restorasi. Dari sini dapat diperkirakan bahwa pengaruh restorasi belum terlalu besar dalam mencegah kebakaran, seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.8
Perbandingan Lahan Terbakar 2015, Prioritas Restorasi, dan Lahan Terbakar 2019



Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup antara lain :

1. Penurunan fungsi hutan akibat illegal logging dan pembukaan lahan dengan cara membakar, baik dari masyarakat maupun dari

perusahaan perkebunan sudah memasuki kondisi yang menghawatirkan

2. Terjadinya konversi lahan tanpa mempertimbangkan aspek kesesuaian lahan
3. Pemanfaatan sumur tua (*mature*) oleh masyarakat perlu diawasi dan dikelola sehingga tidak berdampak pada kerusakan lingkungan
4. Masih terjadi pencemaran sungai
5. Masih terjadinya *illegal fishing*.

4.1.8 Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas aparatur, pengawasan dan pelayanan publik. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengupayakan beberapa hal seperti reformasi birokrasi mutlak harus dilakukan oleh setiap institusi pemerintah. Perubahan *mind-set* dan *culture set* serta pengembangan budaya kerja merupakan hal penting dalam reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah pemberantasan korupsi, menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan bebas KKN.

1. Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN.

Reformasi birokrasi yang berjalan tidak seiring dengan tuntutan efisiensi pelaksanaan manajemen menjadi salah satu kendala penerapan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Peningkatan kinerja pengawasan baik secara internal maupun eksternal dalam bentuk kelembagaan maupun non kelembagaan masih belum optimal. Sampai dengan saat ini upaya pencegahan telah dilaksanakan secara integratif oleh aparat publik sebagai penyedia pelayanan umum, bersama-sama dengan sektor swasta dan masyarakat sebagai sarana untuk mencapai optimalisasi upaya pemberantasan korupsi. Penyebab lambannya upaya pencegahan KKN juga masih terkendala oleh belum optimalnya kapasitas pengelolaan manajemen keuangan negara dan pengawasannya. Penyebabnya antara lain oleh keterbatasan jumlah dan kualitas pengelola keuangan pada masing-masing PD dan auditor daerah. Permasalahan lain di bidang pengawasan adalah bahwa masih terdapat ketidakselarasan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, belum sempurnanya mekanisme/hubungan kerja yang mengatur pengawasan yang dilakukan legislatif dan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam penanganan pengaduan masyarakat, dan perlunya diperkuat kode etik/standar audit.

2. Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Kinerja birokrasi berdasarkan kelembagaan belum optimal sesuai harapan dan ini tercermin dari kinerja Perangkat Daerah yang masih rendah. Hal ini disebabkan dukungan kualitas tenaga teknis masih rendah, terdapat tumpang tindih kewenangan pada beberapa PD, sistem perencanaan dan pelaporan yang belum optimal, proses kerja di dalam birokrasi juga belum ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.

3. Pelayanan Publik

Pelaksanaan pelayanan publik telah menunjukkan kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk lebih meningkatkan sistem pelayanan investasi dan birokrasi pelayanan perizinan diperlukan adanya berbagai kemudahan pelayanan investasi.

Beberapa unit pelayanan publik belum menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang secara jelas dan transparan memberitahukan hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan publik. Di samping itu, sistem manajemen pelayanan publik belum banyak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Faktor lain yang menyebabkan belum optimalnya pelayanan publik adalah Sumber Daya Manusia dan kapasitas aparatur yang masih kurang dan perlu

ditingkatkan. Sistem evaluasi kinerja pelayanan publik juga masih lemah dalam mendorong kinerja pelayanan. Sehubungan dengan hal tersebut Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Musi Banyuasin harus ditingkatkan.

4.2. Isu Strategis Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang dimasa datang. Untuk menentukan isu-isu strategis daerah dilakukan penelaahan terhadap permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan. Permasalahan dan peluang tersebut bisa berasal dari dalam daerah maupun dari luar daerah seperti dari dunia internasional, nasional, regional dan daerah perbatasan. Isu- isu strategis yang dapat menjadi permasalahan dan peluang dalam pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin lima tahun kedepan dari hasil analisis diuraikan sebagai berikut :

1. Isu Global/ Internasional

1) Pandemi Covid-19

Corona Virus Disiase atau Covid-19 ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020. Virus dengan cepat telah menyebar di berbagai negara di dunia. Ratusan negara telah terdampak virus ini dengan total korban mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa. Kasus terkonfirmasi positif pertama Covid-19 di Indonesia dilaporkan pada awal Maret 2020 dan terus bertambah yang tersebar di 34 provinsi. Provinsi

dengan kasus penyebaran virus tertinggi tercatat di DKI Jakarta, disusul oleh Jawa Barat dan Jawa Timur. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan kasus positif terbesar ketiga di kawasan Asia Tenggara setelah Malaysia dan Filipina.

Pada April 2020, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pandemi ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Sebelum itu, Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 melalui Keppres No. 9/2020 tentang Perubahan atas Keppres No. 7/2020 untuk melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu upaya mencegah penyebaran adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Kebijakan ini fokus pada pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19.

Pelaksanaan PSBB berdampak pada pelarangan berbagai kegiatan seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, moda transportasi, dan pertahanan dan keamanan. Pandemi Covid-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi

sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian.

Berdasarkan pola penyebaran Covid-19 saat ini, identifikasi ke kanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal nonpertanian relatif besar dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (health security), dan sumber daya manusia SDM kesehatan, terutama untuk mendeteksi dan surveilans uji laboratorium, penyediaan alat pelindung dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan kuratif Covid-19 menyebabkan pencapaian target target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat.

Dari sisi ekonomi, Covid-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan titik berbeda dengan pengalaman saat SARS dan MERS yang berdampak singkat dan hanya berpengaruh pada beberapa negara, dampak Covid-19 diperkirakan akan lebih besar dan lama jika kasusnya meningkat kembali. Ekonomi dunia diperkirakan mengalami resesi pada tahun 2020 lebih buruk dari saat krisis keuangan dan pangan global tahun 2008 ketika itu, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami kontraksi sebesar -0,1

persen pandemi Covid-19 memaksa dunia usaha dan pemerintah menerapkan teknologi informasi dengan lebih intensif. Proses transisi ke ekonomi digital berlangsung lebih cepat. Beberapa perusahaan yang sukses bertransisi ke sistem online memiliki peluang untuk bertahan karena permintaan rumah tangga khususnya untuk konsumsi pangan dan kebutuhan pokok lainnya masih dapat berjalan. Dengan kata lain, terdapat resiko penurunan elastisitas penciptaan lapangan kerja baru terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pengangguran relatif lebih tinggi dari basaline, khususnya di wilayah wilayah dengan konektivitas digital relatif baik. Jumlah orang miskin dan rentan meningkat terutama dari kelompok pekerja informal, dengan tingkat kemiskinan diperkirakan berada pada kisaran 9,7 - 10,2 persen pada akhir 2020 jika tidak ada jaring pengaman sosial yang memadai.

Sistem produksi yang tidak berjalan optimal dan membebani biaya menyebabkan sebagian perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Tambahan pengangguran diperkirakan sebesar 4,22 juta jiwa dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,8 - 8,5 persen. Interupsi kegiatan belajar mengajar dalam waktu lama juga berpotensi mengurangi efektivitas pembelajaran. Risiko yang lebih besar dialami siswa atau mahasiswa yang memiliki hambatan literasi digital atau kesulitan mendapatkan akses informasi (World Bank, 2020).

Selain itu, pandemi Covid-19 juga berdampak pada kebijakan penetapan bahkan pelarangan mobilitas warga negara Indonesia (WNI) dari dan ke luar negeri. Berbagai protokol keamanan dilakukan untuk mencegah impor penyakit Covid-19. Upaya ini diambil untuk membendung lonjakan kasus Covid-19 yang pada akhirnya melemahkan sistem pemerintahan dan keamanan sebagai dampak dari krisis ekonomi dan sosial, TNI-Polri turut mengawal pelaksanaan berbagai protokol keamanan serta menyiapkan fasilitas kesehatan di kawasan isolasi bagi WNI yang datang dari luar negeri.

Covid-19 telah menyebabkan perubahan tatanan pola perdagangan dan rantai pasokan. Disrupsi sisi produksi telah menyebabkan masing-masing negara lebih mendahulukan pemenuhan kebutuhan rakyatnya dibanding untuk ekspor, karena keterbatasan pasokan. Pengalaman dalam menghadapi pandemi Covid-19 akan memberikan pelajaran berharga bagi setiap negara maupun pelaku pasar untuk segera melakukan transformasi dan penyesuaian, sebagai upaya pemulihan pasca pandemi Covid-19 agar dapat pulih dan tumbuh lebih cepat ataupun sebagai upaya antisipatif agar dapat lebih berdaya tahan (resilience) dalam menghadapi kondisi tak terduga di masa datang. Pascapandemi Covid-19, ekonomi global diperkirakan akan menuju keseimbangan baru (new normal), dimana proses transformasi diperkirakan akan terjadi di empat area.

Pertama, melalui transformasi struktural ekonomi dan digital, struktur perekonomian negara-negara akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berbagai negara mulai melakukan transformasi perekonomiannya sekaligus melakukan pembenahan sistem kesehatannya. Tele-medicine dan *e-commerce* merupakan salah satu sektor yang bertahan dan berkembang di saat pandemi Covid-19, dan akan terus berlanjut secara pesat pasca pandemi Covid-19.

Kedua, transformasi perilaku dan pola hidup masyarakat untuk lebih menerapkan perilaku hidup sehat yang akan berdampak pada perubahan permintaan berbagai produksi yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Kebiasaan Baru saat pandemi terjadi, seperti menjaga jarak dengan orang lain, menggunakan masker dan pelindung diri lainnya, mencuci tangan dengan sabun, serta lebih memanfaatkan layanan antar, akan terus menjadi tren gaya hidup masyarakat ke depan. Pemanfaatan teknologi akan semakin masif dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari, layanan pembayaran digital *mall-online* konsultasi dokter online dan pertemuan/pembelajaran *online*.

Ketiga, transformasi pola rantai pasokan berupa kondisi sistem rantai pasokan tradisional yang bersifat linear akan dianggap tidak relevan lagi dan bergeser menjadi jaringan pasokan digital (*digital supply network*), sehingga konsumen, pabrik, dan jaringan pasokan produksi akan terhubung melalui platform digital. Jaringan pasokan

digital ini akan pada teknologi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi 4.0 *Artificial Intelligence*, *Internet of Things*, *Cloud Computing*, *3D printing*, dan *Robotics*.

Keempat, transformasi tatanan internasional berupa kondisi krisis Covid-19 berpotensi menjadi salah satu landasan bagi negara-negara untuk lebih mementingkan kebijakan dalam negerinya (inward-looking policies) yang berorientasi pada nasionalisme dan deglobalisasi, seperti lebih menutup diri terhadap imigran dan memberikan produksi lebih banyak kepada industri dalam negerinya. Sementara itu, paradigma pembangunan negara-negara Utara-Selatan akan mengalami pergeseran sebagai implikasi kebijakan Amerika yang menghentikan bantuannya untuk WHO, sementara Cina berperan aktif membantu WHO dan negara-negara lain yang membutuhkan penanganan Covid-19.

Dalam kondisi dan situasi status tanggap darurat, pemerintah pusat telah mempertajam realokasi anggaran dan belanja pemerintah pusat serta belanja transfer di tahun 2020 dalam rangka mendukung percepatan penanganan. Covid- 19 salah satu penyesuaian dan penajaman anggaran dalam skema Dana Alokasi Khusus (DAK) terutama pada sektor kesehatan dan DAK fisik untuk infrastruktur. Demikian pula, sejumlah daerah melakukan penyesuaian alokasi pembiayaan dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD termasuk melakukan penajaman terhadap perencanaan

pembangunan daerah di tahun 2021. Dengan berbagai keterbatasan anggaran tersebut, kepala daerah dituntut melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk penanganan Covid-19 sekaligus meningkatkan ketahanan ekonominya.

Dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, pemerintah perlu mengambil respon kebijakan secara cepat dan benar. Belajar dari langkah-langkah yang diambil oleh berbagai negara, respon kebijakan untuk memitigasi dampak Covid-19 dapat dibagi menjadi empat tahap : pertama adalah menguatkan sektor kesehatan, kedua melindungi masyarakat dan dunia usaha, ketiga mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan dan keempat adalah program pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pasca pandemi Covid-19. Tahap pertama hingga ketiga yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona. Dalam Perpu ini pemerintah merelaksasi batas defisit anggaran yang sebelumnya di bawah 3,0 persen PDB untuk dapat meningkatkan alokasi kesehatan, memberikan stimulus untuk melindungi kelompok masyarakat rentan dan mencegah dunia usaha mengalami kebangkrutan yang masif. Selain stimulus fiskal, langkah-langkah stimulus moneter dan keuangan juga diambil untuk mengurangi

tekanan di sektor keuangan dan meringankan beban dunia usaha diantaranya melalui restrukturisasi pinjaman dan penundaan pembayaran bunga.

Dampak Covid-19 dapat berpengaruh terhadap pencapaian visi Indonesia untuk masuk menjadi negara maju dalam jangka menengah. Pandemi Covid-19 akan mempengaruhi pencapaian berbagai sasaran pembangunan baik jangka pendek maupun jangka menengah. Oleh karena itu, tahap keempat merupakan tahap penting setelah penurunan kasus pandemi Covid-19 yang diarahkan untuk mengurangi gap target dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini dibutuhkan program pemulihan kehidupan ekonomi dan berdampak kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai aspek pembangunan terutama untuk menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata dan ekspor. Mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha terkait lainnya. Untuk mewujudkan tahap keempat berjalan efektif maka arah kebijakan pembangunan dalam RKP 2021 difokuskan untuk (1) pemulihan industri pariwisata dan investasi, (2) reformasi sistem kesehatan nasional, (3) reformasi sistem jaring pengaman sosial, dan (4) reformasi sistem ketahanan bencana.

Permendagri Nomor 20 /2020 dan SE Mendagri Nomor 440/2436/SJ/ merupakan Landasan awal Realokasi

Anggaran/Refocussing Kegiatan Percepatan Penanganan Virus Covid-19 di Kabupaten Musi Banyuasin. Kebijakan awal rencana penganggaran Percepatan Penanganan Virus Covid-19 Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp. 500 Milyar, kemudian dari SILPA Audited Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin TA. 2019 anggaran Percepatan Penanganan Virus Covid-19 Kabupaten Musi Banyuasin bertambah menjadi Rp. 591,786 Milyar, yang terdiri dari 2 tahap, yaitu :

1. Untuk tahap I dengan total anggaran realokasi/refocussing sebesar Rp.137,559 Milyar yang terdiri dari 2 bidang, yaitu : bidang Penanganan Kesehatan sebesar Rp. 77,88 Milyar, bidang Jaring Pengaman Sosial sebesar Rp. 59,670 Milyar, sedangkan Penanganan dampak ekonomi, direncanakan secara bertahap pada Perubahan APBD TA 2020.
2. Sedangkan pada tahap 2 Total Alokasi Anggaran COVID 19 melalui Penyesuaian APBD Rp. 303, 878 Milyar. Arah Kebijakan Program Pengendalian Covid 19 Kabupaten Musi Banyuasin setelah keluar SKB Mendagri 119/2813/SJ dan SKB Kemenkeu : 177/KMK.07/2020 melalui penyesuaian APBD TA. 2020 meliputi: Penanganan Kesehatan sebesar Rp. 89,88 Milyar, Penanganan Dampak Ekonomi sebesar Rp. 103,436 Milyar, dan Jaring Pengaman Sosial sebesar Rp. 110,552 Milyar. Untuk Tahun 2021, dari Total APBD Kabupaten Musi Banyuasin sebesar

Rp. 4.440.417.564.812,- dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.95.850.256.583,- telah terealisasi sebesar 74% (Rp.70.896.841.783,-).

Adapun strategi dalam penganggaran, meliputi :

1. Realokasi anggaran/Refocusing kegiatan, dilakukan dengan merevisi program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD TA. 2020 untuk diarahkan pada program-program yang relevan dengan Percepatan Penanganan Virus Covid-19.
2. Sumber dana yang dapat digunakan untuk penanganan Covid-19 di daerah yaitu Dana Insentif Daerah (DID), Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan, Dana Desa (DD), DAU Tambahan.
3. Rasionalisasi belanja pegawai terutama dilakukan dengan mengendalikan/mengurangi honorarium.
4. Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja.
5. Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50%dengan mengurangi anggaran belanja.

Sedangkan arah kebijakan penganggaran penanganan Covid-19, meliputi :

a. Penanganan Kesehatan

Pengadaan sarana prasarana dalam rangka pencegahan, penanggulangan Covid-19, antara lain berupa Alat Pelindung Diri (APD) tenaga Medis, Sarana dan Peralatan Layanan Kesehatan,Penyediaan Rumah Sehat dan Pemberian Insentif bagi Dokter, tenaga Medis dan unsur pendukung lainnya, Pembuatan Pos Terpadu.

b. Penanganan Dampak Ekonomi, terdiri dari :

1. Penggratisan Tarif PDAM melalui subsidi Pekanggan Sosial Umum (I.A, I.B, I.C, II.A,II.B dan II.C sebanyak 32.636 pelanggan) selama 3 bulan.
2. Menggratiskan Tarif Listrik melaui subsidi untuk Gol R1/900 dan Gol S2/900 sebanyak 45.986 Pelanggan ke PT. Muba Elektric Power selama 3 bulan.
3. Program Padat Karya di desa melalui Alokasi Dana Desa APBD Kab. Musi Banyuasin.
4. Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat, melalui pemberian bantuan bibit ternak dan pendampingan pada kelompok masyarakat terdampak sehingga meningkatkan daya beli.

5. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (MCK Individual yang dilaksanakan secara padat karya, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pendapatan.

6. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan secara swakelola padat karya (melalui Dana Kelurahan).

c. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial, meliputi:

No.	Kegiatan	Jumlah Penerima Manfaat
1	KPM BPNT Top UP (APBD) @400.000	14.570 KPM
2	Perluasan KPM BPNT (APBD) @ 400.000	8.977 KPM
3	KPM Misbar diluar DTKS @600.000	15.000 KPM
4	BST Pusat Tahap I	9.476 KPM
5	PKH Tahap III	1.862 KPM
6	BLT Dana Desa	35.977 KPM
7	BLT APBD Pengasuh Pondok Pesantren @600.000	1.000 Orang
8	Program Asuransi Kematian untuk masyarakat melalui premi	129.348 Jiwa
9	Ketersediaan cadangan pangan melalui penyediaan cadangan beras BULOG sebanyak 265 ton	-

Strategi dan arah kebijakan Penganggaran Penanganan COVID-19 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di formulasikan ke dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 35 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020.

Sedangkan penyesuaian target pendapatan dan rasionalisasi Belanja daerah dilakukan dengan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda APBD (Diktum Keenam SKB Nomor: 119/2813/SJdan Nomor 177/KMK.07/2020).

2) Sustainable Development Goals (SDGs)

Memberikan arah tentang pentingnya tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang harus bersinergi dalam pembangunan global ke depan. SDGs dicanangkan untuk melanjutkan tujuan utama MDGs yang belum tercapai, yang antara lain permasalahan kesehatan ibu dan anak, akses terhadap air bersih dan sanitasi, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan status nutrisi. Selain itu, SDGs juga terbuka bagi beberapa isu pembangunan yang muncul sejak MDGs lahir di tahun 2000, seperti ketersediaan anggaran, perubahan iklim, ketersediaan energi, dan lainnya. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan SDGs meliputi:

a. Penghapusan Kemiskinan
b. Penghapusan Kelaparan
c. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan
d. Pendidikan Berkualitas
e. Kesetaraan Gender

f. Air Bersih dan Sanitasi
g. Energi Bersih dan Terjangkau
h. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak
i. Infrastruktur tangguh, Industri inklusif, dan Inovatif
j. Penurunan Kesenjangan
k. Kota Inklusif Dan Berkelanjutan
l. Konsumsi Dan Produksi Berkelanjutan
m. Perubahan Iklim Dan Pengurangan Resiko Bencana
n. Pelestarian Dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Bawah Laut
o. Pelestarian Dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat
p. Perdamaian, Keadilan, Dan Kelembagaan Yang Kokoh
q. Kemitraan Untuk Semua Tujuan Pembangunan.

Terkait dengan SDGs, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkomitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkan strategi yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, penurunan kesenjangan, serta peningkatan kemitraan. Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengadopsi strategi melalui empat jalur pembangunan, yaitu: pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment".

3) Pergeseran Pusat Ekonomi Dunia dari Kawasan Eropa-Amerika ke Kawasan Asia Pasifik

Pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang cukup tinggi akan menyebabkan negara berkembang menjadi motor penggerak ekonomi dunia. Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) negara berkembang diperkirakan akan mencapai 43,8% pada tahun 2019. Hal ini mengakibatkan aliran modal asing akan bergeser ke negara-negara Asia dan Amerika Latin. Dampak lain yang akan dihadapi adalah harga komoditas secara umum akan menurun sementara harga produk manufaktur dalam tren meningkat. Bank Dunia memperkirakan indeks harga komoditas energi akan turun dari 123,2 pada tahun 2015 menjadi 121,9 pada tahun 2019. Di sisi lain indeks harga produk manufaktur akan meningkat dari 109 pada tahun 2015 menjadi 115,4 pada tahun 2019.

2. Isu Nasional

- Pemberantasan Korupsi dan Penegakkan Hukum

  Pemberantasan korupsi merupakan tantangan serius bagi pembangunan di Indonesia. Korupsi sangat menghambat efektivitas mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Hal ini akan sangat menghambat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan akan memunculkan beragam dampak buruk bagi masyarakat luas. Oleh karena itu

korupsi dapat dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*).

Tantangan utama untuk melaksanakan pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengefektifkan penegakan hukum. Hal ini memerlukan perbaikan kualitas dan integritas aparat penegak hukum dan menyempurnaan regulasi dan peraturan perundangan. Tantangan lain dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengoptimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan meningkatkan efektifitas reformasi birokrasi serta lebih meningkatkan kepedulian dan keikutsertaan masyarakat luas melalui pendidikan antikorupsi bagi masyarakat luas.

- Melawan Terorisme dan Narkoba

  Terorisme adalah ancaman langsung pada nilai-nilai demokrasi karena menggunakan kekerasan dalam mengekspresikan kepentingan politik dan ketidakpuasan para pengikutnya. Terorisme menimbulkan kekacauan dan ketakutan yang meluas dalam kerangka besar untuk melawan negara Pancasila dan UUD 1945.

  Selain terorisme, persoalan yang dapat menghancurkan generasi muda bangsa yaitu penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Derasnya arus transportasi antar negara dan antar wilayah menyebabkan mudahnya jaringan pengedar narkoba memasuki

wilayah yang dianggapnya lemah dari pengawasan aparat. Dalam keterbatasan ekonomi masyarakat sering memilih jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu kelompok pengguna juga sudah merambah ke berbagai kalangan baik pelajar dan mahasiswa, kalangan artis, aparat yang bersentuhan langsung, pegawai dan pejabat pemerintahan dan sebagainya. Terorisme dan narkoba merupakan musuh besar bangsa saat ini yang harus diantisipasi jika negara ini ingin kuat dan sejahtera. Terorisme mengganggu stabilitas bangsa dan ekonomi negara, sementara narkoba merusak masa depan generasi bangsa dan pemicu kejahatan lainnya.

- Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Desa

  Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan penunjang pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam sasaran pembangunan nasional khususnya pembangunan ketahanan air, infrastruktur dan konektivitas terdapat sasaran pembangunan strategis nasional seperti: waduk dari 21 ke 49 waduk, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi 9,136 juta hektar menjadi 10 juta hektar, rasio elektrifikasi 81,5 – 96,6, kawasan permukiman kumuh perkotaan dari 38.431 ha – 0 ha, kekurangan tempat tinggal dari 7,6 juta – 5 juta, akses air minum layak dari 70% - 100%, akses sanitasi layak dari 60,9% - 100%, kondisi mantap jalan nasional 94% - 98%, pengembangan jalan nasional 38.570 km – 45.592 km, pengembangan jalan baru 1.202 km – 2.650 km, pengembangan

jalan tol 807 km – 1.000 km, panjang jalur kereta api 5.434 km – 8.692 km, pengembangan pelabuhan 278 – 450, jumlah bandara 237 – 252, kabupaten/kota yang dijangkau broadband 82% - 100%, jumlah dermaga penyeberangan 210 – 275, pangsa pasar angkutan umum perkotaan 23% - 32%.

Kebijakan Pemerintah yang perlu disikapi antara lain percepatan pembangunan desa dan wilayah tertinggal, terpencil dan terluar. Paradigma baru membangun Indonesia dari pinggiran atau desa sangat rasional bila dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan pengurangan jumlah penduduk miskin perdesaan. Kebijakan yang populis ini sudah mulai ditindaklanjuti sejak tahun 2015 dengan ditandai adanya alokasi dana desa hingga 10%. Dana tersebut akan terus bertambah sesuai dengan jumlah alokasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang keduanya masuk dalam struktur APBD. Dapat dipastikan setiap desa akan menerima sekitar Rp. 500 – Rp. 1 milyar per tahun tergantung karakteristik desa masing-masing. Dana yang cukup besar tersebut harus tepat sasaran dan pengelolaannya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan bukan menjadi persoalan baru.

3. Isu Regional

- Penelaahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan

Isu strategis dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

a. Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan

Perlunya Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan yang dimana Provinsi Sumatera Selatan tergolong cukup tinggi, begerak fluktuatif serta capaianya tidak pernah lebih baik dari capaian nasional;

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia

1) Pendidikan

Belum meratanya akses dan mutu layanan pendidikan yang antara lain dipengaruhi oleh kurangnya prasarana dan sarana, terbatasnya jumlah dan mutu tenaga pengajar, serta belum meratanya persebaran tenaga pengajar;

2) Kesehatan

Belum meratanya akses dan mutu layanan kesehatan sebagai akibat terbatasnya prasarana dan sarana layanan kesehatan, belum meratanya jumlah dan persebaran tenaga kesehatan di daerah perdesaan, serta rendahnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat;

3) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Belum Optimalnya kondisi pencapaian kesetaraan dan keadilan gender, dilihat dengan pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Untuk pencapaian IPG Sumsel Tahun 2018 tergolong baik sebesar 92,62 diatas nilai capaian nasional sebesar 90,99 dan berada pada peringkat sepuluh namun

kondisi capaian beberapa komponen masih terdapat kesenjangan yang besar antara capaian laki-laki dan perempuan, khususnya pada kompon Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita.

c. Pengurangan Pengangguran dan Antisipasi Bonus Demografi

1) Pengangguran

Terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang baik yang dicerminkan oleh pengangguran lulusan SMA ke atas yang relatif tinggi, tingginya persentase pekerja di sektor informal, adanya kesenjangan upah diantara kelompok pekerja, rendahnya kualitas tenaga kerja, berkembangnya teknologi yang menggantikan tenaga kerja manusia.

2) Bonus Demografi

Jumlah penduduk yang terus meningkat menyebabkan Provinsi Sumatera Selatan menghadapi masalah kependudukan terutama dalam penyediaan pelayanan dasar, perumahan, pemukiman, penyedian prasarana dan penyediaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu pemerintah harus bekerja lebih fokus untuk menyambut bonus demografi tersebut dengan menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan dan pelayanan umum lainnya.

d. Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan

1) Peningkatan Investasi

Belum optimalnya investasi dalam mendorong percepatan pembangunan daerah sebagai akibat belum terciptanya iklim usaha yang kondusif, lemahnya promosi daerah, dan terbatasnya kerjasama antar daerah.

2) Ekonomi Kerakyatan

Meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan mendorong tumbuhnya usah kecil dan menengah (UKM).

e. Perbaikan Konektivitas dan Infrastruktur Dasar

Ketimpangan antar wilayah di Provinsi Sumatera Selatan masih relatif tinggi. Hal ini disebabkan oleh konektivitas yang masih belum baik karena sarana dan prasarana perhubungan yang masih rendah.

Selain itu permasalahan yang masih cukup serius dan perlu penanganan yang baik adalah infrastruktur dasar, berupa pengadaan air bersih dan sanitasi rumahtangga. Sumatera Selatan masih jauh tertinggal dari rata-rata nasional dalam pemenuhan sanitasi dan air bersih.

f. Optimalisasi Reformasi Birokrasi

Dengan Optimalisasi Reformasi Birokrasi ini diharapkan bisa membuat pemerintahan di Sumatera Selatan menjadi pemerintahan yang berkarakter, bersih dari KKN, meningkat kualitas pelayanan publik, dan meningkat kapasitas dan

akuntabilitas kinerja.

g. Pelestarian Ekosistem dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Lingkungan yang rusak dapat mengakibatkan terganggunya hidrologi dan ketersediaan air. Selain untuk kebutuhan rumahtangga, air digunakan juga untuk kebutuhan lahan pertanian.

h. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Nilai Tukar Petani

Belum optimalnya Produktivitas pertanian dan perkebunan yang disebabkan oleh alih fungsi lahan mengakibatkan berkurangnya luas tanam tanaman pangan, rendahnya intensitas pertanaman, adanya kenaikan indeks harga yang diterima petani lebih rendah dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar petani secara umum;

i. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Belum optimlanya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana ketenagalistrikan;

j. Pengembangan Sosial Budaya dan Olahraga

Memberdayakan pusat-pusat kegiatan seni dan budaya di Provinsi Sumatera Selatan agar tetap lestari dan terjaga terutama kesenian tradisional yang menjadi ciri khas Sumatera Selatan. Kemudian menggalakkan festival seni dan budaya yang berskala nasional dan internasional serta mengembangkan manajemen olahraga dalam menggabungkan kegiatan promosi, ekonomi dan prestasi olah raga yang bermutu.

4. Isu Daerah Perbatasan

➢ Penelaahan RPJMD Kabupaten Perbatasan

Agar perencanaan pembangunan daerah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah lainnya maka, perlu dilakukan telaahan terhadap RPJMD Kabupaten Perbatasan lainnya.

Tabel 4.12
Isu Strategis RPJMD Daerah Perbatasan

No.	Kabupaten Musi Rawas (2021-2024)	Kabupaten Pali (2021-2024)	Kabupaten Banyuasin (2018-2023)	Kabupaten Muratara (2021-2024)
1.	Isu Strategis Daerah : : Kurang memadainya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana dasar permukiman serta belum terkelolanya sumber daya alam secara optimal; Masih kurangnya sarana dan prasarana konservasi sumber daya air untuk mengatasi permasalahan kelebihan dan kekurangan baik air baku maupun air irigasi; Masih kurangnya aksesibilitas mutu pendidikan sarana dan prasarana dan peran serta masyarakat; Masih kurang representatifnya sarana dan prasarana kesehatan yang berpengaruh pada kurangnya aksesibilitas dan	Isu Strategis Daerah : Belum meratanya pembangunan sarana dan prasana dasar seperti banyaknya jalan dan jembatan yang rusak, jaringan air bersih, listrik, komunikasi dan sanitasi masih sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Belum berkembangnya ekonomi daerah, belum adanya pengembangan sektor pariwisata, belum optimalnya pengelolaah hasil pertambangan, produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan dan hasil hutan. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Belum optimalnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan .	Isu Strategis Daerah : Kemiskinan dan Layanan Dasar Peningkatan Produksi Berkelanjutan Infrastruktur Lingkungan dan Tanggap Darurat Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi Pengembangan Sosial, Budaya dan Olahraga	Isu Strategis Daerah : Geografi dan lingkungan : Adanya gangguan banjir Adanya pertambangan tanpa izin Masih terdapat lahan yang tidak produktif Masih terdapat illegal loging Sumber Daya Manusia : Tingkat pendidikan masih cukup rendah Kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, tenaga kesehatan dan tenaga kerja masih belum memadai Tingkat kesehatan

No.	Kabupaten Musi Rawas (2021-2024)	Kabupaten Pali (2021-2024)	Kabupaten Banyuasin (2018-2023)	Kabupaten Muratara (2021-2024)
	kualitas pelayanan bidang kesehatan; Belum optimalnya peran BKPRD dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib penataan ruang; Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan serta semakin menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan karena kurangnya konsistensi antara perencanaan pembangunan yang dihasilkan melalui proses musrenbang dengan alokasi penganggaran di APBD; Belum optimalnya peran serta fungsi kelembagaan masyarakat desa dan tata kelola pemerintahan desa; Masih kurangnya pendapatan petani/peternak dan daya saing produk pertanian dalam arti luas; Masih kurang optimalnya pembinaan terhadap sektor usaha kecil, menengah dan koperasi;			masyarakat masih relatif rendah Tingginya kasus peredaran dan penggunaan narkoba Ekonomi : Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I masih cukup tinggi Penerimaan pendapatan asli daerah masih belum optimal Pertumbuhan ekonomi Kab. Muratara masih terbatas Infrastruktur : Masih terbatasnya akses menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan Kualitas jalan yang masih tendah khususnya konektivitas antar desa Prasarana pengairan yang ada belum dimanfaatkan secara optimal Angkutan umum yang tesedia masih terbatas Intalasi jaringan layanan air bersih belum

No.	Kabupaten Musi Rawas (2021-2024)	Kabupaten Pali (2021-2024)	Kabupaten Banyuasin (2018-2023)	Kabupaten Muratara (2021-2024)
	Belum optimalnya pengembangan produk unggulan daerah; Pengembangan pariwisata dan budaya lokal; Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik; Masih kurang efektifnya penanggulangan kemiskinan dan kurang perhatiannya terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial; Masih kurangnya kemampuan dan kesiapan aparatur dan masyarakat dalam penanganan bencana, pengurangan risiko bencana; Belum optimalnya pengelolaan Investasi dan pelayanan perizinan secara online; Masih luasnya lahan kritis; Terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olahraga; Belum optimalnya pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil; Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat			terjangkau keseluruh desa Jaringan sanitasi rumah tangga masih terbatas Jaringan komunikasi dan informasi belum menjangkau ke seluruh wilayah desa Tata Kelola Pemerintahan : Pelayanan perizinan masih belum optimal Sistem kelembagaan pemerintah masih belum tertata dengan baik Kualitas dan kuantitas aparatur masih belum tertata dengan baik Tranparansi pemerintah masih kurang optimal Sistem penyusunan dan penegakan Perda masih lemah Data Dasar wilayah masih belum lengkap Sarana perkantoran pemerintah masih belum memadai

Sumber : RPJMD Kabupaten Musi Rawas, Pali, Banyuasin dan Muratara

Dari beberapa isu strategis Kabupaten perbatasan dapat disimpulkan isu-isu utama pada masing-masing daerah perbatasan yang menjadi perhatian dan bahan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin kedepan sebagai berikut:

1. Isu Kemiskinan dan penurunan pengangguran;
2. Isu Penyediaan Infrastruktur Dasar masyarakat;
3. Isu Pendidikan dan Kesehatan;
4. Isu Peningkatan Tatakelola Pemerintahan;
5. Isu Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan

5. Isu Pengembangan Kota

City branding diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pencapaian visi Kabupaten Musi Banyuasin. *City branding* merupakan salah satu strategi untuk mempromosikan image sebuah kota atau daerah beserta isinya (budaya, obyek wisata, produk barang, layanan jasa, dan sebagainya) di dalam benak target pasar (investor, tourist, talent, event) kota dengan menggunakan kalimat positioning, slogan, icon, eksibisi dan berbagai media lainnya, agar kota tersebut dikenal secara luas baik regional, nasional bahkan internasional.

"Sekayu kota wisata olahraga yang ramah lingkungan" sebagai city branding Kota Sekayu merupakan *trigger* untuk peningkatan perekonomian kabupaten Musi Banyuasin Khususnya Kota Sekayu. Kota wisata olahraga ini dilatarbelakangi oleh Kabupaten Musi Banyuasin pernah menjadi salah satu penyelenggara Pekan Olahraga Nasional tahun 2004.

4.2.1. Isu Tata Ruang dan Lingkungan

1. Rencana struktur ruang

Rencana struktur ruang yang dikembangkan adalah rencana yang dapat mengoptimalkan masing-masing wilayah sehingga tercipta pemenuhan kebutuhan antara wilayah satu terhadap wilayah yang lainnya. Apabila sistem pemenuhan kebutuhan terjadi dalam jangka panjang berarti sistem perekonomian wilayah dapat berjalan sesuai dengan harapan dan perkembangan ekonomi dapat terwujud. Berdasarkan rumusan strategi pengembangan wilayah, struktur ruang Kabupaten Musi Banyuasin diarahkan pada penguatan fungsi-fungsi pelayanan untuk masing-masing pusat pelayanan dapat dilhat pada Tabel 4.7. sebagai berikut:

Tabel 4.13

Struktur Ruang dan Fungsi yang diemban Kecamatan

No.	Kecamatan	Hirarki	Fungsi Yang Diemban Pusat Kegiatan/Pelayanan															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Sekayu	PKW	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Sungai Lilin	PKL		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
3	Bayung Lencir	PKL		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X		X	X
4	Babat Toman	PPLp		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	
5	Tungkal Jaya	PPK		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X		X	X
6	Lalan	PPK		X			X		X			X	X	X	X	X	X	
7	Batanghari Leko	PPK		X			X		X			X	X	X	X	X	X	
8	Babat Supat	PPK		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X		X	X
9	Plakat Tinggi	PPK		X			X		X			X	X	X	X		X	
10	Sungai Keruh	PPK		X			X		X			X	X	X	X		X	
11	Lais	PPK		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
12	Lawang Wetan	PPK		X			X		X			X	X	X	X		X	
13	Sanga Desa	PPK		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
14	Keluang	PPK		X			X		X			X	X	X	X		X	

Keterangan :

1. Pemerintah Kabupaten
2. Pemerintah Lokal
3. Distribusi dan Koleksi
4. Industri
5. Perdagangan, Kios dan Los Pasar
6. Jasa Persewaan dan Perbankan
7. Jasa Koperasi Unit Desa
8. Jasa Hukum dan Konsultasi
9. Pariwisata dan Jasa Penginapan
10. Pendidikan
11. Kesehatan
12. Listrik
13. Telekomunikasi
14. Irigasi
15. Air Minum Bersih
16. Air Limbah

PKW : Pusat Kegiatan Wilayah; PKL : Pusat Kegiatan Lokal; PKLp : Pusat Kegiatan Lokal Promosi; PPK : Pusat Pelayanan Kawasan.

2. Telaah Rencana Pola Ruang

Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maka pengertian rencana pola ruang adalah rencana yang menggambarkan letak, ukuran dan fungsi dari kegiatan-kegiatan lindung dan budidaya. Substansi dari rencana pola ruang meliputi batas-batas kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya (kawasan lindung dan budidaya). Adapun tujuan pengembangan rencana pola ruang adalah:

1. Pemanfaatan ruang harus memperhatikan daya dukung lingkungan;
2. Tersedianya lahan yang dapat menampung perkembangan jumlah penduduk dan tenaga kerja;
3. Terciptanya sinkronisasi antara rencana pola ruang dan rencana struktur ruang yang dikembangkan;
4. Memperhatikan kesesuaian lahan dan kondisi eksisting;
5. Mewujudkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi:

a. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;
b. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
c. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
d. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

3. Kebijakan Satu Peta

Dalam rangka mewujudkan perencanaan "THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial)" dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin perlu didukung oleh data yang akurat mulai dari data numerik hingga data yang terlokasikan (data spasial). Data spasial atau data informasi geospasial dengan output peta menjadi dasar perencanaan untuk

mendukung ketepatsasaran pembangunan. Kebijakan Satu Peta melalui Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah menjadi alat bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk memproduksi data informasi geospasial yang bersumber dari satu data spasial yang telah disepakati bersama.

Pengelolaan data informasi geospasial berasal dari produksi data geospasial dimasing-masing OPD diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 661/KPTS-BAPPEDA/2018 tentang Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Seluruh data informasi geospasial yang dihasilkan dan disahkan dalam Keputusan ini menjadi sumber data bagi perencanaan pembangunan. Data informasi geospasial yang diproduksi dan dimanfaatkan akan terintegrasi dengan Satu Data Indonesia. Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyusun persiapan integrasi KSP dengan Satu Data Indonesia yang dimulai melalui Rapat Koordinasi Integrasi Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia. Integrasi antar kebijakan ini menjadi dasar untuk melaksanakan perencanan pembangunan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

4. Reforma Agraria

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, bahwa bahwa penyelenggaraan Reforma Agraria dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui tahapan perencanaan Reforma Agraria dan pelaksanaan Reforma Agraria.

Perencanaan Reforma Agraria itu meliputi : a. perencanaan Penataan Aset terhadap penguasaan dan pemilikan TORA; b. perencanaan terhadap Penataan Akses dalam penggunaan dan pemanfaatan serta produksi atas TORA; c. perencanaan kepastian hukum dan legalisasi atas TORA; d. perencanaan penanganan sengketa dan konflik agraria; dan e. perencanaan kegiatan lain yang mendukung Reforma Agraria.

Sementara pelaksanaan Reforma Agraria, menurut Perpres ini, dilaksanakan melalui tahapan: a. Penataan Aset; dan b. Penataan Akses. Penataan Aset, terdiri atas: a. redistribusi tanah; atau b. legalisasi aset.

Sedangkan yang menjadi obyek redistribusi tanah meliputi:

1. Tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak memohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir;

2. Tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang HGU untuk menyerahkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari bidang HGU yang berubah menjadi HGB karena perubahan peruntukan rencana tata ruang;
3. Tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Tanah Negara yang diberikan kepada pemegang HGU dalam proses pemberian, perpanjangan, atau pembaruan haknya;
4. Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan/atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sumber TORA meliputi:
   1. Tanah dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan sesuai peraturan perundang-undangan menjadi TORA; 2. Tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah diselesaikan penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria;
6. Tanah hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria;
7. Tanah bekas tambang yang berada di luar kawasan hutan;
8. Tanah timbul;
9. Tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah meliputi: 1. Tanah yang dihibahkan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan; 2. Tanah hasil konsolidasi yang

subjeknya memenuhi kriteria Reforma Agraria; 3. Sisa tanah sumbangan tanah untuk pembangunan dan tanah pengganti biaya pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang telah disepakati untuk diberikan kepada pemerintah sebagai TORA; atau 4. Tanah Negara yang dikuasai masyarakat;

10. Tanah bekas hak erpacht, tanah bekas partikelir dan tanah bekas eigendom yang luasnya lebih dari 10 bouw yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai objek redistribusi; dan tanah kelebihan maksimum, tanah absente, dan tanah swapraja/bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan sebagai objek redistribusi tanah.

    Objek redistribusi meliputi: a. Redistribusi tanah untuk pertanian; dan b. redistribusi tanah untuk non-pertanian. Redistribusi tanah untuk pertanian diredistribusi kepada Subjek Reforma Agraria dengan luasan paling besar 5 (lima) hektar sesuai dengan ketersediaan TORA, dengan pemberian sertifikat hak milik atau Hak Kepemilikan Bersama.

    Subjek Reforma Agraria, terdiri atas: a. orang perseorangan; b. kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama; atau c. badan hukum.

Untuk orang perseorangan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. WNI; b. berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah; dan c. bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah atau bersedia tinggal di wilayah redistribusi tanah.

Sedangkan pekerjaan orang perseorangan tersebut di antaranya adalah: a. petani gurem yang memiliki luas tanah 0,25 ha atau lebih kecil dan/atau petani yang menyewa tanah yang luasannya tidak lebih 2 ha; b. petani penggarap yang mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah yang bukan miliknya; c. buruh tanah yang mengerjakan atau mengusahakan tanah orang lain dengan mendapat upah; d. guru honorer yang belum berstatus sebagai PNS; e. pekerja harian lepas; f. pegawai swasta dengan pendapatan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak; g. Pegawai Negeri Sipil paling tinggi golongan III/a yang tidak memiliki tanah; dan h. anggota TNI/Polri berpangkat paling tinggi Letnan Dua/Inspektur Dua atau yang setingkat.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkomitmen untuk melaksanakan Reforma Agraria dengan telah mengusulkan untuk untuk TORA, progresnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.14
Progress TORA di Kabupaten Musi Banyuasin

Kabupaten/Kriteria	Luas Indikatif (Ha)	Luas Permohonan (Ha)	Luas Invert (Ha)	Luas Usulan Rekomendasi (Ha)	Luas Rekom Gubernur ke Menko (Ha)	Penyelesaian Tata Batas (Ha)	Keterangan
Musi Banyuasin							
a. Permukiman, Fasum, Fasos	1.547,93	2.436,52	1.553,53	2.022,92	2.098,78		**Sudah rapat pembahasan penyiapan keputusan pelepasan kawasan hutan melalui perubahan tata batas kawasan hutan dalam rangka TORA tanggal 26 November 2019**
b. Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	10.132,90		10.032,99	9.834,50	8.810,76		
c. Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	-		-	143,52	128,64		
d. Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	-		-		1.059,34		
Lainnya				322,42	332,40		
Total	11.680,84	2.436,52	11.586,52	12.323,36	12.429,92	0,00	

Dengan memperhatikan hasil pembobotan dan kriteria terkait isu-isu strategis Kabupaten Musi Banyuasin, maka **isu-isu strategis** yang paling menentukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. **Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran;**
2. **Pertumbuhan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi;**
3. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;**
4. **Penguatan Dukungan Infrastruktur untuk Perekonomian;**
5. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;**
6. **Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19**

Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin.

b. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan belum fokus, masih ego sektoral dan belum menggunakan basis data terpadu (BDT) secara maksimal.
c. Masih perlunya peningkatan dan pengembangan infrastruktur Jalan dan Jembatan dalam mendukung pengembangan wilayah yang merupakan tujuan pembangunan yang harus dicapai.
d. Belum optimalnya pengembangan Infrastruktur lainnya seperti jaringan listrik, air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman.
e. Kualitas dan Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan masih terbatas.
f. Belum optimalnya kualifikasi, kompetensi dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.
g. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan belum memadai.
h. Rasio tenaga dokter dan tenaga medis belum sesuai standar pelayanan kesehatan terutama pada pada daerah dengan infrastruktur yang sulit.
i. Produksi dan produktivitas pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan belum optimal.
j. Masih belum berkembangnya sektor hilir (agroindustri) sehingga masih rendahnya nilai tambah sektor pertanian dan perkebunan sebagai komoditas unggulan.
k. Belum optimalnya kontribusi PAD terhadap APBD.

l. Belum optimalnya peran BUMD dalam kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah
m. Kinerja birokrasi masih perlu perbaikan sesuai dengan tuntutan pelayanan publik.
n. Belum optimalnya penggunaan teknologi Informasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik.
o. Tingkat kemandirian Koperasi dan UKM masih rendah.
p. Belum tersedianya upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
q. Pengelolaan sumber daya alam belum sepenuhnya memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
r. Isu global yang tidak kalah pentingnya adalah program pengurangan emisi karbon akibat deforestasi dan degradasi hutan dan lahan.
s. Isu kepastian hukum kepemilikan lahan, mencegah krisis ekologi, mengatasi konflik lahan dengan program "reforma agraria".
t. Belum optimalnya pemanfaatan sarana olahraga yang sudah dibangun.
u. Perlu peningkatan peran Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar usaha.
v. Perlu pengembangan sektor dan komoditas unggulan di Kabupaten Musi Banyuasin.

4.3. Penyelarasan Isu Strategis Kabupaten Musi Banyuasin

Pelaksanaan otonomi daerah bukanlah membagi ruang dan pemerintahan dengan memisahkan pemerintahan kabupaten/kota dengan pemerintahan provinsi maupun nasional melainkan program pembangunan kabupaten/kota wajib mendukung program pembangunan provinsi maupun nasional. Bertitik tolak dari hal tersebut maka dipandang perlu dilakukan penyelarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi dan nasional.

Penyelarasan RPJMD kabupaten dan kota meliputi : Penyelarasan Isu Strategis, Penyelarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, Penyelarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Penyelaraan Program Prioritas Pembangunan Daerah, Penyelarasan Pendanaan Program Pembangunan Daerah serta Penyelarasan lokasi Pelaksanaan kegiatan Strategis Nasional.

Penyelarasan isu strategis Kabupaten Musi Banyuasin dengan Provinsi Sumatera Selatan serta Isu Strategis Nasional disajikan dalam tabel 4.10 berikut ini.

Tabel 4.15

Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah

No	Isu Strategis			
	RPD Kab. Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026	RPJMD Prov. Sumsel Tahun 2019 – 2023	RPJMN Tahun 2020 – 2024	
1	2	3	4	
1	Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran serta Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19	Percepatan penurunan angka kemiskinan	IV.5	Pengentasan Kemiskinan
2	Penguatan Dukungan Infrastruktur untuk Perekonomian	Perbaikan konektivitas dan infrastruktur dasar	VI.1.2.1 VI.1.2.2	Belum optimalnya peningkatan akses air minum layak dan aman; Belum optimalnya peningkatan akses layanan sanitasi layak dan aman.
		Pengembangan energi baru dan terbarukan	VI.4.1 VI.4.2 VI.4.3	Keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan; Akses serta keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; Kecukupan penyediaan energi dan ketenagalistrikan.

No	Isu Strategis			
	RPD Kab. Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026	RPJMD Prov. Sumsel Tahun 2019 – 2023	RPJMN Tahun 2020 – 2024	
1	2	3	4	
		Pelestarian ekosistem dan peningkatan kualitas lingkungan	II.1 VII.1 VII.3 VIII.3	Keberlanjutan sumber daya alam Peningkatan kualitas lingkungan hidup Pembangunan rendah karbon Penegakan hukum nasional
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pengembangan sumberdaya manusia	IV.3	Pemenuhan layanan dasar
		Pengurangan Pengangguran dan Antisipasi Bonus Demografi		
		Pengembangan sosial budaya dan olahraga	IV.4	Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
4	Pertumbuhan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi	Peningkatan produktivitas pertanian dan nilai tukar petani	II.2	Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomi
			II.1	Keberlanjutan sumber daya alam
		Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan	II.3	Transformasi struktural berjalan lambat
5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Optimalisasi Reformasi Birokrasi	VIII.4	Reformasi birokrasi dan tata kelola
			II.4	Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital

Berdasarkan penyelarasan Isu Strategis Kabupaten Musi Banyuasin dengan Isu Strategis Provinsi Sumatera Selatan serta Isu Strategis Nasional pada tabel 4.11, didapatkan bahwa Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 yang terdiri dari **Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran; Pertumbuhan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi; Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; Penguatan Dukungan Infrastruktur untuk Perekonomian; Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;** serta **Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19** telah selaras dengan Isu-Isu Strategis Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023 dan RPJMN Tahun 2020 – 2024.

BAB 5
TUJUAN DAN SASARAN



BAB V
TUJUAN DAN SASARAN

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026, perlu dirumuskan tujuan pembangunan daerah *(goal)* dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun kedepan. Tujuan dan sasaran ini merupakan dampak *(impact)* keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait dalam memberikan arah terhadap pembangunan kabupaten secara umum.

Sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh

berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yang diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua dan diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah. Nawacita tersebut yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat,dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Kemudian Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrstruktur

   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Birokrasi

   Memprioritaskan Investasi untuk penciotaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

4. Penyederhanaan Birokrasi

   Memprioritaskan Investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhakan eselonisasi

5. Transformasi Ekonomi

   Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktru dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kelima arahan tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024, yaitu :

1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kabupaten Musi Banyuasin dengan segala kelebihan dan kekurangannya berupaya menyelaraskan tujuan dan sasaran pembangunan dengan visi dan misi provinsi maupun nasional. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam pasal 1 angka 12 disebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Perumusan tujuan dan sasaran kabupaten mengacu kepada dokumen perencanaan di tingkat nasional, provinsi dan dokumen perencanaan jangka panjang daerah agar terjaga keselarasan antar dokumen perencanaan tersebut.

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 adalah Mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Untuk mewujudkan Visi jangka panjang tersebut, pada periode lima tahun ketiga ditetapkan ; Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah : Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Sementara itu Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah: “Sumsel Maju Untuk Semua”.

Visi Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 adalah: “MUBA Maju, Mandiri dan Sejahtera 2025”.

5.1. Tujuan

Tujuan merupakan perumusan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap pembangunan kabupaten secara umum. Di samping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap isu strategis yang telah ditetapkan.

Dari penyelarasan dokumen perencanaan jangka menengah baik nasional maupun provinsi dan permasalahan serta isu strategis Kabupaten Musi Banyuasin adalah:

1. Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran;
2. Pertumbuhan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Penguatan Dukungan Infrastruktur untuk Perekonomian;
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;
6. Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19

Untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis tersebut maka perlu dirumuskan Tujuan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026 sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dengan indikator tujuan Angka Kemiskinan, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pelayanan Infrastruktur untuk menyelesaikan isu strategis terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan dan peningkatan ketahanan ekonomi serta penguatan dukungan infrastruktur untuk perekonomian dalam rangka pemulihan pasca pandemi covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Diharapkan dengan tercapainya indikator tujuan tersebut dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin yang inklusif;

2. Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk menyelesaikan isu strategis peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan Kesehatan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan sumber daya manusia di Kabupaten Musi Banyuasin yang mampu berdaya saing menghadapi tantangan global;
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi untuk menyelesaikan isu strategis peningkatan tata Kelola pemerintahan. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk mengukur keberhasilan dalam empat tahun, maka setiap tujuan diukur dengan indikator tujuan. Adapun indikator masing – masing tujuan yang di sajikan pada tabel 5.1 dibawah ini.

Tabel 5.1
Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target (Tahun)				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	1) Angka Kemiskinan	15,55	15,05	14,35	13,85	13,35
		2) Indeks Gini	0,316	0,306	0,296	0,286	0,276
		3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,9	3,8	3,65	3,5	3,35

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target (Tahun)				
			2022	2023	2024	2025	2026
		4) Pertumbuhan Ekonomi	3,50-4,00	3,75-4,25	4,00-4,50	4,25-4,75	4,35-5,00
		5) Indeks Pelayanan Infrastruktur	80,15	85,44	91,15	92,17	93,37
2	Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	6) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,64	69,17	69,71	70,25	70,78
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*)	7) Indeks Reformasi Birokrasi	C	C	CC	CC	B

Sumber: Rancangan Akhir Penyempurnaan RPD Kab. Muba, diolah

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 ini memiliki 3 tujuan utama seperti yang telah tertera di tabel 5.1 sebagai berikut:

1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
2. Terciptanya kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing;
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan alat/indikator pencapaian tujuan yaitu: Angka Kemiskinan, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pelayanan Infrastruktur dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang

inklusif. Sementara itu, untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dan Indeks Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governace*).

Pada Tahun 2026, diharapkan Angka Kemiskinan Kab. Muba sudah menurun menuju 13,35%. Sementara itu, ketimpangan pendapatan/indeks gini dapat menurun hingga menjadi 0,276 pada akhir tahun 2026. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun pada angka 3,35% pada tahun 2026, dan pertumbuhan ekonomi berkisar pada angka 3,45-5,00. Indeks pelayanan infrastruktur pada membaik menjadi 93,37 pada tahun 2026. Indeks Pembangunan Manusia diharapkan meningkat pada tahun 2026 menjadi 70,78 dan Indeks Reformasi Birokrasi menjadi B.

5.2. Sasaran

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Kabupaten Musi Banyuasin. Sasaran – sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan terkait juga telah dicapai dan diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Langkah-langkah penetapan sasaran pelayanan pemerintah daerah :

1) Mereview hasil evaluasi capaian pembangunan tahun-tahun sebelumnya.
2) Merumuskan pernyataan sasaran untuk masing-masing tujuan.
3) Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi Indikator Kunci Keberhasilan (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengacu pada tugas dan fungsi pemerintah daerah yaitu meningkatkan layanan publik, kesejahteraan masyarakat daya saing daerah.
4) Memeriksa kembali konsistensi pernyataan sasaran terhadap tujuan serta melakukan penyempurnaan bila diperlukan.

Sasaran yang ingin dicapai guna mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 adalah :

1. Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Penurunan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat;
2. Penyediaan Lapangan Kerja yang didukung oleh tenaga kerja terampil;
3. Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi;
4. Peningkatan produktivitas sektor Usaha Mikro, IKM dan Industri Pengolahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi;
5. Peningkatan kesejahteraan para petani;

6. Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang aktivitas masyarakat;
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
8. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat;
9. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;
10. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan;
11. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk mengukur kinerja sasaran digunakan indikator sasaran, Indikator sasaran ditampilkan dalam tabel 5.2 berikut ini:

Tabel 5.2
Indikator Sasaran

No.	Uraian Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Indikator Sasaran			
				2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan Daya Beli dan Menurunkan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	10.371	10.602	10.883	11.064	11.295
2	Penyediaan Lapangan Kerja yang didukung oleh tenaga kerja terampil	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,18	69,71	70,03	70,38	70,76
3	Peningkatan produktivitas Sektor Pertanian dan perikanan sebagai menjadi penopang pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHK)	4,21	3,38	3,69	4,01	4,34
4	Peningkatan produktivitas Sektor Usaha Mikro, IKM dan Industri Pengolahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi	1) Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	2,65	1,76	1,94	2,12	2,31
		2) Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (ADHK)	7,75	0,70	1,05	1,40	1,75
		3) Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHK)	6,67	0,79	1,12	1,47	1,82
5	Peningkatan Kesejahteraan Para Petani	Nilai Tukar Petani	91,00	93,00	95,00	97,00	100,00
6	Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk menunjang aktivitas masyarakat	1) Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	65,04%	68,62%	73,14%	76,52%	80,10%

No.	Uraian Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Indikator Sasaran			
				2023	2024	2025	2026
		2) Persentase Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Air Bersih	90,60%	95,20%	100%	100%	100%
		3) Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi (Air Limbah) yang Layak	84,80%	92,50%	100%	100%	100%
		4) Persentase Kawasan Kumuh Tertangani	100%	78,97%	58,17%	37,50%	0%
7	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,01%	65,51%	66,01%	66,29%	66,72%
8	Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat	1) Harapan lama Sekolah (HLS)	12,45	12,60	12,76	12,91	13,07
		2) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,69	7,74	7,8	7,86	7,91
9	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	68,96	69,08	69,2	69,33	69,45
10	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	1) Nilai Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	B	BB	BB	BB	BB
		2) Opini BPK RI terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	91	92	92	92
		2) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,97	3,1025	3,235	3,3675	3,5

Keterkaitan isu strategis, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 5.3 di bawah ini:

Tabel 5.3
Keterkaitan Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran

No	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran
1	2	3	4
1	- Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran - Pertumbuhan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi - Penguatan Dukungan Infrastruktur untuk Perekonomian - Pemulihan pasca pandemi covid-19	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	1) Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Penurunan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat 2) Penyediaan Lapangan Kerja yang didukung oleh tenaga kerja terampil 3) Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan sebagai menjadi penopang pertumbuhan ekonomi 4) Peningkatan produktivitas sektor Usaha Mikro, IKM dan Industri Pengolahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi 5) Peningkatan kesejahteraan para petani 6) Peningkatan infrastruktur dasar untuk menunjang aktivitas masyarakat 7) Peningkatan kualitas lingkungan hidup
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	1) Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat 2) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
3	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance)*	3) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik

Penjabaran Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 setiap tahun dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut:

Tabel 5.4
Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kodisi Awal (2022)	Target				Kondisi Akhir 2026
					2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Peningkatan daya beli masyarakat dan penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	10.371	10.602	10.883	11.064	11.295	11.295
		Penyediaan Lapangan Kerja yang didukung oleh tenaga kerja terampil	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,18	69,71	70,03	70,38	70,76	70.76
		Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan sebagai menjadi penopang pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (ADHK)	4,21	3,38	3,69	4,01	4,34	4,34
		Peningkatan Produktivitas Sektor Usaha Mikro, IKM dan Industri Pengolahan sebagai Penopang Pertumbuhan Ekonomi	Laju Petumbuhan Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	2,65	1,76	1,94	2,12	2,31	2,31
			Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (ADHK)	7,75	0,70	1,05	1,40	1,75	1,75

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kodisi Awal (2022)	Target				Kondisi Akhir 2026
					2023	2024	2025	2026	
			Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHK)	6,67	0,79	1,12	1,47	1,82	1,82
		Peningkatan Kesejahteraan Para Petani	Nilai Tukar Petani	91	93,00	95,00	97,00	100,00	100,00
		Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk menunjang aktivitas masyarakat	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	65,04%	68,62%	73,14%	76,52%	80,10%	80,10%
			Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani air bersih	90,60%	95,20%	100%	100%	100%	100%
			Persentase rumah tangga dengan layanan sanitasi (air limbah) yang layak	84,80%	92,50%	100%	100%	100%	100%
			Persentase kawasan kumuh tetangani	100%	78,97%	58,17%	37,50%	0%	0%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kodisi Awal (2022)	Target				Kondisi Akhir 2026
					2023	2024	2025	2026	
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,01%	65,51%	66,01%	66,29%	66,72%	66,72%
2	Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,45	12,60	12,76	12,91	13,07	13,07
			Rata – rata Lama Sekolah (RLS)	7,69	7,74	7,8	7,86	7,91	7,91
		Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	68,96	69,08	69,2	69,33	69,45	69,45
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)	Peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan	Nilai Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	B	BB	BB	BB	BB	BB
			Opini BPK RI terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Peningkatan kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	91	92	92	92	90
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,97	3,1025	3,235	3,3675	3,5	2,97

5.3. Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Penyelarasan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjamin sinergitas antara sasaran pembangunan daerah dalam RPD Kabupaten Musi Banyuasin selaras dengan sasaran pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan dengan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. Hal ini bertujuan agar daerah merumuskan tujuan dan sasaran selaras dengan sasaran pokok pembangunan nasional dalam RPJMN. Tabel penyelarasan target indikator makro Kab. Muba – Prov. Sumsel – Nasional dijelaskan pada tabel 5.5 berikut ini:

Tabel 5.5
Penyelarasan Target Indikator makro Kab. Muba – Prov. Sumsel – Nasional Tahun 2020-2024

No.	Indikator Pembangunan	RPJMN Tahun 2020-2024					Indikator Pembangunan	RPJMD Provinsi					Indikator Pembangunan	RPJMD - RPD Kab. Musi Banyuasin				
		Target						Target						Target				
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,60	5,8	5,9	6,1	6,2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,5-6,0	5,5-6,1	5,5-6,1	5,5-6,1	5,5-6,1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,00-2,50	2,40-2,70	3,50 – 4,00	3,75 – 4,25	4,00 – 4,50
2	Tingkat Kemiskinan (%)	9,81	9,43	9	8,55	8,15	Tingkat Kemiskinan (%)	11,50	10,70	9,90	9,20	9,20	Tingkat Kemiskinan (%)	15,20	14,25	15,55	15,05	14,35
3	Tingkat Pengangguran Terbuka(%)	4,20	4	3,8	3,4	3,1	Tingkat Pengangguran Terbuka(%)	4,01	3,87	3,75	3,62	3,62	Tingkat Pengangguran Terbuka(%)	4,62	4,44	3,9	3,8	3,65
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,11-72,21	72,28-72,95	73,41 - 73,46	74,77	74,60 - 84,23	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,08	71,75	72,42	73,09	73,09	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,17	69,47	68,64	69,17	69,71
5	Rasio Gini/Indeks Gini	0,379-0,381	0,377-0,379	0,376 - 0,378	0,375-0,378	0,360 - 0,474	Rasio Gini	0,354	0,353	0,352	0,35	0,35	Rasio Gini	0,34	0,31	0,316	0,306	0,296

Sumber: RPJMN, RPJMD Prov Sumsel, RPD. diolah

Tabel 5.6
Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam RPD – RPJMD Provinsi – RPJM Nasional

No		RPD Kab. Muba 2023-2026		Perubahan RPJMD Prov Sumsel 2018-2023	RPJMN 2020-2024
	Tujuan	Sasaran /Indikator		Sasaran / Indikator	Sasaran / Indikator
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	1	**Peningkatan daya beli masyarakat dan menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat**	**Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan (Maju Ekonomi Kerakyatan)**	**Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian**
		a.	Pengeluaran perkapita	Pengeluaran Per Kapita	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
		2	**Penyediaan Lapangan Kerja yang didukung oleh tenaga kerja terampil**	**Menurunnya Pengangguran dan Kemiskinan (Maju Kesejahteraan Masyarakat)**	**Menurunnya Pengangguran**
		a.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka
		3	**Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan sebagai menjadi penopang pertumbuhan ekonomi**	**Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Kedaulatan Pangan (Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan)**	**Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan**

No		RPD Kab. Muba 2023-2026		Perubahan RPJMD Prov Sumsel 2018-2023	RPJMN 2020-2024
	Tujuan	**Sasaran /Indikator**		**Sasaran / Indikator**	**Sasaran / Indikator**
		a.	Laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan(ADHK)	Nilai tukar Petani	Pertumbuhan PDRB
		4	**Peningkatan Produktivitas Sektor Usaha Mikro, IKM dan Industri Pengolahan sebagai Penopang Pertumbuhan Ekonomi**	**Meningkatnya Investasi, Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi, Industri dan Perdagangan)**	**Meningkatnyan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor dan Daya Saing**
		a.	Laju Pertumbuhan sektor industri pengolahan (ADHK)	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
		b.	Laju pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran (ADHK)	Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Pertumbuhan Sektor Perdagangan
		c.	Laju pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (ADHK)		Pertumbuhan Sektor Akomodasi dan Makan Minum
		5	**Peningkatan kesejahteraan para petani**	**Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Kedaulatan Pangan (Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan)**	**Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan**
		a.	Nilai tukar petani	Nilai Tukar Petani	
		6	**Peningkatan Infrastruktur Dasar untuk menunjang aktivitas masyarakat**	**Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan**	**Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar**

No		RPD Kab. Muba 2023-2026		Perubahan RPJMD Prov Sumsel 2018-2023	RPJMN 2020-2024
	Tujuan	Sasaran /Indikator		Sasaran / Indikator	Sasaran / Indikator
				Konektivitas (Maju Infrastruktur dan Konektivitas)	**Meningkatnya Konektivitas Wilayah**
		a.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Persentase kondisi mantap jalan nasional/ provinsi/kabupaten-kota (%)
		b	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Air Bersih	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman (%)
		c	Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi (Air Limbah) yang Layak	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	Rumah tangga dengan akses sanitasi
		d	Persentase Kawasan Kumuh Tertangani		Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau
		7	**Peningkatan kualitas lingkungan hidup**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (Maju Kualitas Lingkungan Hidup)**	**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**
		a.	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hiduo	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
2	Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	8	**Peningkatan kualitas pendidikan**	**Meningkatnya Akses Pendidikan Berkualitas (Maju Akses Pendidikan Berkualitas)**	**Terpenuhinya Layanan Dasar**

No		RPD Kab. Muba 2023-2026		Perubahan RPJMD Prov Sumsel 2018-2023	RPJMN 2020-2024
	Tujuan	**Sasaran /Indikator**		**Sasaran / Indikator**	**Sasaran / Indikator**
		a.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Harapan Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah
		b.	Rata – rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata lama sekolah	Rata-rata lama sekolah
		9	**Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat**	**Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Maju Kesehatan Masyarakat)**	**Terpenuhinya Layanan Dasar**
		a.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Usia Harapan hidup	Usia Harapan hidup
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik *(Good Governance*)	10	**Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan**	**Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas**	**Menguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik**
		a.	Nilai Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai Sakip	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks RB
		b.	Opini BPK RI terhadap LKPD	Opini BPK	Persentase Instansi Pemerintah yang mendapatkan Opini WTP
		11	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	**Meningkatnya Pelayanan Publik berkualitas**	**Menguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik**
		a.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Konten Informasi Publik
		b.	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Inovasi Daerah	

BAB 6
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Strategi dan arah kebijakan merupakan unsur dalam perencanaan yang berisikan upaya strategis dan langkah – langkah konkrit Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar strategi dan arah kebijakan dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi dalam menjalankan program perangkat daerah. Sehingga dalam implementasi RPD ini tidak hanya melaksanakan program – program yang telah ditetapkan, tetapi juga mendorong sebuah pemikiran dan cara baru dalam menjalankan pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki tantangan dan peluang kompleks kedepan.

6.1. Strategi

Strategi merupakan serangkaian upaya mengenai gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk itu, strategi menjadi salah satu

rujukan yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Rumusan strategi menunjuk keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah berupaya dalam menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari pembangunan daerah. Selanjutnya strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan.

Dari hasil analisis permasalahan, isu – isu strategis dan analisis faktor internal dan eksternal secara umum keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 dijelaskan pada tabel 6.1 seperti dibawah ini.

Tabel 6.1
Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023- 2026 untuk Mewujudkan Tujuan: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Tujuan 1 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif	
Sasaran	**Strategi**
1. Peningkatan Daya Beli dan Penurunan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	(1) Menciptakan peluang untuk penambahan pendapatan masyarakat berbasis komoditas pertanian dan Perikanan
	(2) Memperkuat program jaminan sosial dalam upaya mengurangi beban masyarakat miskin terhadap akses pelayanan dasar dan memberikan jaminan penghasilan dasar

Tujuan 1 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif	
Sasaran	**Strategi**
	(3) Mempercepat pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Keterkaitan antara Sasaran dan Strategi pada Tujuan 1 dengan sasaran kedua yaitu Penyediaan Lapangan Kerja yang didukung oleh tenaga kerja terampil dijelaskan pada tabel 6.2 seperti dibawah ini.

Tabel 6.2
Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023- 2026 untuk Mewujudkan Tujuan: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Tujuan 1 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif	
Sasaran	**Strategi**
2. Penyediaan Lapangan Kerja yang didukung oleh tenaga kerja terampil	(4) Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja serta jiwa kewirausahaan
	(5) Menciptakan tenaga kerja yang bersertifikasi sesuai kebutuhan pasar kerja melalui program-program pelatihan dan penempatan kerja
	(6) Mengembangkan dan memanfaatkan *Muba Vocational Centre* (MVC) guna meningkatkan Kapasitas Calon Tenaga Kerja lokal untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik
	(7) Mengembangkan dan mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK)

Keterkaitan antara Sasaran dan Strategi pada Tujuan 1 dengan sasaran ketiga dan keempat yaitu peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan serta Sektor Usaha Mikro, IKM dan Industri Pengolahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi dan sasaran kelima peningkatan kesejahteraan para petani dijelaskan pada tabel 6.3 seperti dibawah ini.

Tabel 6.3
Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2023- 2026 untuk Mewujudkan Tujuan: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Tujuan 1 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif	
Sasaran	**Strategi**
3. Peningkatan produktivitas Sektor Pertanian dan perikanan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi	(8) Memenuhi kebutuhan infrastruktur pendukung kawasan Komoditas Unggulan pertanian dan Perikanan (Karet, Sawit, Padi, Perikanan)
	(9) Membentuk tata kelola kelembagaan yang baik ditingkat petani (Karet, Sawit, Padi, perikanan) dan Mendorong Transformasi On Farm ke Off Farm
	(10) Menumbuhkan Hilirisasi komoditas unggulan daerah untuk meningkatkan Nilai tambah produk/komoditas unggulan.
	(11) Memfasilitasi sarana dan prasarana peningkatan produktivitas Pertanian dan Perikanan
	(12) Meningkatkan Kapasitas SDM Pertanian dan Perikanan

Tujuan 1 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif	
Sasaran	**Strategi**
4. Peningkatan produktivitas Sektor Usaha Mikro, IKM dan Industri Pengolahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi	(13) Memperkuat iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan pengembangan usaha ekonomi kreatif
	(14) Mendorong diversifikasi ekonomi serta mengoptimalkan hilirisasi komoditi unggulan terutamanya pada sektor yang memberi dampak luas kepada masyarakat.
	(15) Mendorong pengembangan UMKM, IKM serta BUMDes dengan peningkatan kapasitas pelaku usaha, teknologi tepat guna, akses permodalan, legalitas dan standarisasi produk untuk pemenuhan kebutuhan domestik maupun luar daerah.
	(16) Mempersiapkan pasar serta mendorong digitalisasi ekonomi.
5. Peningkatan Kesejahteraan Para Petani	(17) Memfasilitasi percepatan pelaksanaan TORA untuk legalitas kepemilikan lahan petani
	(18) Menyediakan Fasilitas pasca panen pertanian dan perikanan
	(19) Menyediakan Pasar Komoditas Unggulan Pertanian dan Perikanan

Keterkaitan antara Sasaran dan Strategi pada Tujuan 1 dengan sasaran keenam yaitu peningkatan infrastruktur dasar untuk menunjang aktivitas masyarakat serta sasaran ketujuh peningkatan kualitas lingkungan hidup dijelaskan pada tabel 6.4 seperti dibawah ini.

Tabel 6.4
Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2023- 2026 untuk Mewujudkan Tujuan: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Tujuan 1 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif	
Sasaran	**Strategi**
6. Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk menunjang aktivitas masyarakat	(20) Meningkatnya kualitas perencanaan di bidang jalan dan jembatan dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi berbasis satu data Muba
	(21) Mengoptimalkan kualitas pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan
	(22) Mengoptimalkan evaluasi kualitas hasil pekerjaan konstruksi
	(23) Memperluas cakupan dan meningkatkan kapasitas serta kualitas layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis Satu Data Muba
	(24) Melakukan konservasi Sumber Air Baku
	(25) Mengoptimalkan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP)
	(26) Memperluas cakupan dan meningkatkan kapasitas Sistem penyediaan air limbah skala komunal
	(27) Meningkatkan kapasitas SDM, Kelembagaan, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah
	(28) Menangani kawasan pemukiman kumuh yang komprehensif sesuai SK Kawasan Kumuh
	(29) Melakukan pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru
	(30) Melakukan Penataan terhadap Kawasan Perumahan di Daerah Bantaran Sungai dan Kawasan Lindung

Tujuan 1 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif	
Sasaran	**Strategi**
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	(31) Meningkatkan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kualitas lingkungan hidup
	(32) Mengelola kawasan RTH
	(33) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan kualitas lingkungan hidup

Keterkaitan antara Sasaran dan Strategi pada Tujuan 2 dengan sasaran kedelapan dan kesembilan yaitu peningkatan kualitas pendidikan dan Kesehatan masyarakat dijelaskan pada tabel 6.5 seperti dibawah ini.

Tabel 6.5
Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2023-2026 untuk Mewujudkan Tujuan 2:
Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Tujuan 2 : Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	
Sasaran	**Strategi**
8. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat	(34) Meningkatkan Pelayanan Pendidikan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat (sekolah gratis yang berkualitas)
	(35) Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan non Formal/Kesetaraan
	(36) Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
	(37) Meningkatkan Pengelolaan manajemen pendidikan
	(38) Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan berbasis Satu Data Muba
9. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	(39) Melaksanakan strategi nasional penanganan Covid-19
	(40) Meningkatkan kompetensi dan manajemen SDM kesehatan
	(41) Meningkatkan kualitas sarana prasarana kesehatan
	(42) Meningkatkan aktivitas dan minat masyarakat dalam berolahraga melalui peningkatan olahraga rekreasi
	(43) Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga

Keterkaitan antara Sasaran dan Strategi pada Tujuan 3 dengan sasaran kesepuluh dan kesebelas yaitu peningkatan kualitas tata Kelola

pemerintahan dan pelayanan publik dijelaskan pada tabel 6.6 seperti dibawah ini.

Tabel 6.6
Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 untuk Mewujudkan Tujuan 3: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance)	
Sasaran	**Strategi**
10. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	(44) Menyusun perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel berbasis Satu Data Muba
	(45) Mempercepat Implementasi Satu Data Muba
	(46) Meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah
	(47) Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dan daerah serta Membentuk Aparatur SDM yang profesional
	(48) Mengoptimalkan sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP)
	(49) Meningkatkan harmonisasi dan kemitraan penyelenggaraan pemerintahan
11. Peningkatan kualitas pelayanan Publik	(50) Menerapkan Pelayanan Publik yang transparan, akuntabel dan efisien sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM)
	(51) Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan sistem informasi terpadu (SPBE)
	(52) Memfasilitasi peningkatan cakupan jaringan internet di seluruh Kabupaten Musi Banyuasin (3G/4G)
	(53) Mempermudah akses pelayanan publik dengan mendekatkan langsung ke masyarakat

6.2. Arah Kebijakan

Di samping strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaanya.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan pembangunan dapat dijalankan dalam satu tahun periode, namun dapat juga membutuhkan lebih dari satu tahun. Hal terpenting adalah arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala yang ada.

Agar penetapan arah kebijakan terarah dan fokus maka dilakukan pemetaan waktu arah kebijakan pembangunan sehingga dapat dilihat kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Dari hasil analisis strategi dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin maka ditetapkan fokus dan tema pembangunan tahunan yang akan

dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Setiap tahunnya adalah sebagai berikut :

Tabel 6.7
Tema Pembangunan Kabupaten Muba Tahun 2023 – 2026

No	Tahun	TEMA PEMBANGUNAN
1	2023	Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan
2	2024	Memperkuat Struktur Ekonomi Daerah untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan
3	2025	Meningkatkan Daya Saing Daerah didukung SDM yang Berkualitas dan Pelayanan Publik yang Bersih
4	2026	Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif untuk Mendorong Transformasi Ekonomi

Perumusan arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang ditetapkan agar fokus untuk mencapai apa yang diinginkan. Berdasarkan hubungan antara tujuan, sasaran dan strategi yang telah diuraikan diatas, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 yang disajikan pada tabel 6.8 berikut ini:

Tabel 6.8
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2023 - 2026

ARAH KEBIJAKAN			
Tahun 2023	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
1. Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan beban Masyarakat 2. Pengembangan dan Optimalisasi BLK dan MVC 3. Peningkatan Kapasitas SDM dan tata kelola kelembagaan pertanian dan perikanan 4. Penumbuhan Hilirisasi Komoditas Unggulan 5. Percepatan pelaksanaan program TORA	1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim 2. Peningkatan Daya Saing Calon Tenaga Kerja lokal 3. Pemenuhan Fasilitasi sarana prasarana peningkatan produktivitas Pertanian dan Perikanan 4. Optimalisasi hilirisasi komoditas Unggulan dan Diversifikasi ekonomi 5. Percepatan Legalitas kepemilikan lahan petani	1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 2. Peningkatan Kesempatan Kerja bagi Tenaga Kerja Lokal 3. Pemenuhan Insfrastruktur pendukung kawasan komoditas unggulan 4. Perkuatan iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan Pengembangan usaha ekonomi kreatif 5. Penyediaan Fasilitas Pasca Panen Pertanian dan Perikanan Disertai Penyediaan Pasar Komoditas Unggulan	1. Penurunan ketimpangan pendapatan Masyarakat 2. Peningkatan Kesempatan Kerja bagi Tenaga Kerja Lokal 3. Transformasi Pertanian dan Perikanan dari On Farm ke Off Farm 4. Perkuatan pasar dan digitlisasi Usaha Ekonomi 5. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat Petani

ARAH KEBIJAKAN			
Tahun 2023	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
6. Optimalisasi Perencaanaan yang berbasis Satu Data Muba untuk Pembangunan Infrastruktur Dasar antara lain : Jalan Kabupaten, Air Minum, Sanitasi, pemukiman Kumuh dan Kawasan 7. Peningkatan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kualitas lingkungan hidup 8. Pemerataan dan Peningkatan kualitas SDM Pendidik dan Kependidikan 9. Pemerataan dan Peningkatan kualitas SDM Tenaga Kesehatan	6. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar prioritas 7. Pemenuhan kebutuhan RTH perkotaan di tiap kecamatan 8. Peningkatkan Kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan berbasis Satu Data Muba 9. Peningkatkan Kuantitas dan kualitas sarana prasarana Kesehatan berbasis Satu Data Muba	6. Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar 7. Optimalisasi RTH sebagai sarana Rekreasi Masyarakat 8. Peningkatan Akses dan Layanan Pendidikan bagi Masyarakat 9. Peningkatan Akses dan Layanan Kesehatan bagi Masyarakat 10. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang baik disertai Percepatan implementasi satu data Muba	6. Optimalisasi Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Infrastruktur Dasar 7. Pemenuhan sarana dan Prasarana Pengelolaan lingkungan hidup berbasis Peran serta masyarakat 8. Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Pendidikan 9. Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

ARAH KEBIJAKAN			
Tahun 2023	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
10. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang baik disertai Percepatan implementasi satu data Muba 11. Peningkatan Akses terhadap Layanan publik	10. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang baik disertai Percepatan implementasi satu data Muba 11. Penyederhanaan Birokrasi Layanan Publik	11. Digitalisasi Akses layanan Publik	10. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang baik disertai Percepatan implementasi satu data Muba 11. Optimalisasi Tata Kelola Pelayanan Publik

Untuk tema pembangunan tahunan dan perumusan arah kebijakan pembangunan tersebut bersifat dinamis, dimana dalam perjalanannya dapat menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika yang berkembang sehingga dapat disusun sub tema tahunannya dan arah kebijakan pembangunan dapat menyesuaikan.

Penyelarasan permasalahan dengan strategi dan arah kebijakan Kabupaten Musi Banyuasin ini bertujuan agar dapat merumuskan permasalahan pembangunan daerah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Tabel penyelarasan sasaran dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dapat disajikan pada tabel 6.9 dibawah ini:

Tabel 6.9
Keselarasan Sasaran – Srategi – Arah Kebijakan
Kabupaten Musi Banyuasin

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN			
			2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Daya Beli dan Penurunan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	1) Menciptakan peluang untuk penambahan pendapatan masyarakat berbasis komoditas pertanian dan Perikanan	Peningkatan pendapatan dan Pengurangan beban masyarakat	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Penurunan ketimpangan pendapatan Masyarakat
		2) Memperkuat program jaminan sosial dalam upaya mengurangi beban masyarakat miskin terhadap akses pelayanan dasar dan Memberikan Jaminan Penghasilan Dasar				
		3) Mempercepat pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)				
2	Penyediaan Lapangan Kerja yang didukung oleh tenaga kerja terampil	4) Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja serta jiwa kewirausahaan	Pengembangan dan optimalisasi BLK dan MVC	Peningkatan Daya Saing Calon Tenaga Kerja lokal	Peningkatan Kesempatan Kerja bagi Tenaga Kerja Lokal	Peningkatan Kesempatan Kerja bagi Tenaga Kerja Lokal
		5) Menciptakan tenaga kerja yang bersertifikasi sesuai kebutuhan pasar kerja melalui program-program pelatihan dan penempatan kerja				

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN			
			2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
		6) Mengembangkan dan memanfaatkan Muba Vocational Centre (MVC) guna meningkatkan Kapasitas Calon Tenaga Kerja lokal untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik				
		7) Mengembangkan dan mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK)				
3	Peningkatan produktivitas Sektor Pertanian dan perikanan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi	8) Memenuhi kebutuhan infrastruktur pendukung kawasan Komoditas Unggulan pertanian dan Perikanan (Karet, Sawit, Padi, Perikanan)	Peningkatan Kapasitas SDM dan tata kelola kelembagaan Pertanian dan Perikanan	Pemenuhan Fasilitsi sarana prasarana peningkatan produktivitas Pertanian dan Perikanan	Pemenuhan Insfrastruktur pendukung kawasan komoditas unggulan	Transformasi Pertanian dan Perikanan dari On Farm ke Off Farm
		9) Membentuk tata kelola kelembagaan yang baik ditingkat petani (Karet, Sawit, Padi, perikanan) dan Mendorong Transformasi On Farm ke Off Farm				
		10) Menumbuhkan Hilirisasi komoditas unggulan daerah untuk meningkatkan Nilai tambah produk/komoditas unggulan				
		11) Memfasilitasi sarana dan prasarana peningkatan produktivitas Pertanian dan Perikanan				
		12) Meningkatkan Kapasitas SDM Pertanian dan Perikanan				

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN			
			2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
4	Peningkatan produktivitas Sektor Usaha Mikro, IKM dan Industri Pengolahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi	13) Memperkuat iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan pengembangan usaha ekonomi kreatif	Penumbuhan Hilirisasi Komoditas Unggulan	Optimalisasi hilirisasi komoditas Unggulan dan Diversifikasi ekonomi	Perkuatan iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan Pengembangan usaha ekonomi kreatif	Perkuatan pasar dan digitlisasi Usaha Ekonomi
		14) Mendorong diversifikasi ekonomi serta mengoptimalkan hilirisasi komoditi unggulan terutamanya pada sektor yang memberi dampak luas kepada masyarakat				
		15) Mendorong pengembangan UMKM, IKM serta BUMDes dengan peningkatan kapasitas pelaku usaha, teknologi tepat guna, akses permodalan, legalitas dan standarisasi produk untuk pemenuhan kebutuhan domestik maupun luar daerah				
		16) Mempersiapkan pasar serta mendorong digitalisasi ekonomi.				
5	Peningkatan Kesejahteraan Para Petani	17) Memfasilitasi percepatan pelaksanaan TORA untuk legalitas kepemilikan lahan petani	Percepatan pelaksanaan program TORA	Percepatan Legalitas kepemilikan lahan petani	Penyediaan Fasilitas Pasca Panen Pertanian dan Perikanan Disertai Penyediaan Pasar Komoditas Unggulan	Peningkatan Kesejahteraan masyarakat Petani

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN			
			2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
		18) Menyediakan Fasilitas pasca panen pertanian dan perikanan				
		19) Menyediakan Pasar Komoditas Unggulan Pertanian dan Perikanan				
6	Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk menunjang aktivitas masyarakat	20) Meningkatnya kualitas perencanaan di bidang jalan dan jembatan dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi berbasis satu data Muba	Optimalisasi Perencaanaan yang berbasis Satu Data Muba untuk Pembangunan Infrastruktur Dasar antara lain : Jalan Kabupaten, Air Minum, Sanitasi, pemukiman Kumuh dan Kawasan Pemukiman	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar prioritas	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Optimalisasi Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Infrastruktur Dasar
		21) Mengoptimalkan kualitas pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan				
		22) Mengoptimalkan evaluasi kualitas hasil pekerjaan konstruksi				
		23) Memperluas cakupan dan meningkatkan kapasitas serta kualitas layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis Satu Data Muba				
		24) Melakukan konservasi Sumber Air Baku				
		25) Mengoptimalkan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP)				
		26) Memperluas cakupan dan meningkatkan kapasitas Sistem penyediaan air limbah skala komunal				

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN			
			2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
		27) Meningkatkan kapasitas SDM, Kelembagaan, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah				
		28) Menangani kawasan pemukiman kumuh yang komprehensif sesuai SK Kawasan Kumuh				
		29) Melakukan pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru				
		30) Melakukan Penataan terhadap Kawasan Perumahan di Daerah Bantaran Sungai dan Kawasan Lindung				
7	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	31) Meningkatkan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kualitas lingkungan hidup	Peningkatkan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kualitas lingkungan hidup	Pemenuhan kebutuhan RTH perkotaan di tiap kecamatan	Optimalisasi RTH sebagai sarana Rekreasi Masyarakat	Pemenuhan sarana dan Prasarana Pengelolaan lingkungan hidup berbasis Peran serta masyarakat
		32) Mengelola kawasan RTH				
		33) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan kualitas lingkungan hidup				
8	Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat	34) Meningkatkan Pelayanan Pendidikan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat (sekolah gratis yang berkualitas)	Pemerataan dan Peningkatan kualitas SDM Pendidik dan Kependidikan	Peningkatkan Kuantitas dan kualitas sarana prasarana	Peningkatan Akses dan Layanan Pendidikan bagi Masyarakat	Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Pendidikan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN			
			2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
		35) Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan non Formal/Kesetaraan		pendidikan berbasis Satu Data Muba		
		36) Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan				
		37) Meningkatkan Pengelolaan manajemen pendidikan				
		38) Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan berbasis Satu Data Muba				
9	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	39) Melaksanakan strategi nasional penanganan Covid-19	Pemerataan dan Peningkatan kualitas SDM Tenaga Kesehatan	Peningkatkan Kuantitas dan kualitas sarana prasarana Kesehatan berbasis Satu Data Muba	Peningkatan Akses dan Layanan Kesehatan bagi Masyarakat	Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
		40) Meningkatkan kompetensi dan manajemen SDM kesehatan				
		41) Meningkatkan kualitas sarana prasarana kesehatan				
		42) Meningkatkan aktivitas dan minat masyarakat dalam berolahraga melalui peningkatan olahraga rekreasi				
		43) Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga				

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN			
			2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
10	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	44) Menyusun perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel berbasis Satu Data Muba	Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang baik disertai Percepatan implementasi satu data Muba	Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang baik disertai Percepatan implementasi satu data Muba	Penyelenggara-an Tata kelola Pemerintahan yang baik disertai Percepatan implementasi satu data Muba	Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang baik disertai Percepatan implementasi satu data Muba
		45) Mempercepat Implementasi Satu Data Muba				
		46) Meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah				
		47) Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dan daerah serta Membentuk Aparatur SDM yang profesional				
		48) Mengoptimalkan sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP)				
		49) Meningkatkan harmonisasi dan kemitraan penyelenggaraan pemerintahan				
11	Peningkatan kualitas pelayanan Publik	50) Menerapkan Pelayanan Publik yang transparan, akuntabel dan efisien sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM)	Peningkatan Akses terhadap Layanan publik	Penyederhanaan Birokrasi Layanan Publik	Digitalisasi Akses layanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pelayanan Publik
		51) Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan sistem informasi terpadu (SPBE)				

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN			
			2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
		52) Memfasilitasi peningkatan cakupan jaringan internet di seluruh Kabupaten Musi Banyuasin (3G/4G)				
		53) Mempermudah akses pelayanan publik dengan mendekatkan langsung ke masyarakat				

Penyelarasan sasaran dan strategi pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin dimaksudkan untuk menjamin sinergitas antara strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPD Kabupaten Musi Banyuasin selaras dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dan dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang telah tertuang dalam RPJMN. Hal ini bertujuan agar daerah dapat merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan provinsi dan pembangunan nasional. Tabel penyelarasan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dapat disajikan pada tabel 6.10.

Tabel 6.10
Keselarasan Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJMN

No	RPJMD MUSI BANYUASIN 2017 – 2022		RPJMD PROVINSI SUMSEL 2019 – 2023	RPJMN 2020 - 2024
	SASARAN	STRATEGI	STRATEGI	STRATEGI
1	2	3	4	5
Tujuan 1 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif **Indikator Tujuan 1 & 2 : Angka Kemiskinan, Indeks Gini**				
1	Peningkatan Daya Beli dan Penurunan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	1) Menciptakan peluang untuk penambahan pendapatan masyarakat berbasis komoditas pertanian dan Perikanan	Peningkatan kesejahteraan petani	Peningkatan kesejahteraan
		2) Memperkuat program jaminan sosial dalam upaya mengurangi beban masyarakat miskin terhadap akses pelayanan dasar dan memberikan jaminan penghasilan dasar	Menurunkan daerah rawan pangan	Reforma agraria
		3) Mempercepat pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).	Menekan tingkat kemiskinan guna memperkecil kesenjangan sosial melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar dan kegiatan ekonomi produktif	Akselerasi penguatan ekonomi keluarga

No	RPJMD MUSI BANYUASIN 2017 – 2022		RPJMD PROVINSI SUMSEL 2019 – 2023	RPJMN 2020 - 2024
	SASARAN	STRATEGI	STRATEGI	STRATEGI
1	2	3	4	5
Tujuan 1 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif **Indikator 3 : Tingkat Pengangguran Terbuka**				
2	Penyediaan Lapangan Kerja yang didukung oleh tenaga kerja terampil	4) Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja serta jiwa kewirausahaan	Penyediaan Lapangan Pekerjaan	Menciptakan lapangan pekerjaan
		5) Menciptakan tenaga kerja yang bersertifikasi sesuai kebutuhan pasar kerja melalui program-program pelatihan dan penempatan kerja		
		6) Mengembangkan dan memanfaatkan Muba Vocational Centre (MVC) guna meningkatkan Kapasitas Calon Tenaga Kerja lokal untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik		
		7) Mengembangkan dan mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK)		

No	RPJMD MUSI BANYUASIN 2017 – 2022		RPJMD PROVINSI SUMSEL 2019 – 2023	RPJMN 2020 - 2024
	SASARAN	STRATEGI	STRATEGI	STRATEGI
1	2	3	4	5
Tujuan 1 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif **Indikator 4 : Pertumbuhan Ekonomi**				
3	Peningkatan produktivitas Sektor Pertanian dan perikanan sebagai menjadi penopang pertumbuhan ekonomi	8) Memenuhi kebutuhan infrastruktur pendukung kawasan Komoditas Unggulan pertanian dan Perikanan (Karet, Sawit, Padi, Perikanan)	Meningkatkanproduktivitas dan komoditas unggulan serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir	Meningkatkan aksebilitas transfortasi dan distribusi komoditas unggulan
		9) Membentuk tata kelola kelembagaan yang baik ditingkat petani (Karet, Sawit, Padi, perikanan) dan Mendorong Transformasi On Farm ke Off Farm		
		10) Menumbuhkan Hilirisasi komoditas unggulan daerah untuk meningkatkan Nilai tambah produk/komoditas unggulan		
		11) Memfasilitasi sarana dan prasarana peningkatan produktivitas Pertanian dan Perikanan		
		12) Meningkatkan Kapasitas SDM Pertanian dan Perikanan		

No	RPJMD MUSI BANYUASIN 2017 – 2022		RPJMD PROVINSI SUMSEL 2019 – 2023	RPJMN 2020 - 2024
	SASARAN	STRATEGI	STRATEGI	STRATEGI
1	2	3	4	5
4	Peningkatan produktivitas Sektor Usaha Mikro, IKM dan Industri Pengolahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi	13) Memperkuat iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan pengembangan usaha ekonomi kreatif	Mendoron tersedianya infrastruktur mendukung iklim investasi	Meningkatnya Nilai Tambah, lapangankerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian
		14) Mendorong diversifikasi ekonomi serta mengoptimalkan hilirisasi komoditi unggulan terutamanya pada sektor yang memberi dampak luas kepada masyarakat	Memfasilitasi Pembangunan Industri Sektor Hilir dari Potensi ekonomi masyarakat agar dapat membeikan kesempatan kerja seluas-luasnya seerta tingkat pendapatan pekerja lebih besar dan lebih merata	
		15) Mendorong pengembangan UMKM, IKM serta BUMDes dengan peningkatan kapasitas pelaku usaha, teknologi tepat guna, akses permodalan, legalitas dan standarisasi produk untuk pemenuhan kebutuhan domestik maupun luar daerah		Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi
		16) Mempersiapkan pasar serta mendorong digitalisasi ekonomi.		

No	RPJMD MUSI BANYUASIN 2017 – 2022		RPJMD PROVINSI SUMSEL 2019 – 2023	RPJMN 2020 - 2024
	SASARAN	STRATEGI	STRATEGI	STRATEGI
1	2	3	4	5
5	Peningkatan Kesejahteraan Para Petani	17) Memfasilitasi percepatan pelaksanaan TORA untuk legalitas kepemilikan lahan petani	Peningkatan kesejahteraan petani	Peningkatan kesejahteraan petani
		18) Menyediakan Fasilitas pasca panen pertanian dan perikanan	Memperkuat daya saing ekspor dann mengendalikan impor untuk meningkatkan neraca perdagangan	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
		19) Menyediakan Pasar Komoditas Unggulan Pertanian dan Perikanan		Peningkatan pegelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
Tujuan 1 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif **Indikator 5 : Indeks Pelayanan Infrastruktur**				
6	Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk menunjang aktivitas masyarakat	20) Meningkatnya kualitas perencanaan di bidang jalan dan jembatan dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi berbasis satu data Muba	Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang	Peningkatan kualitas kjalan dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, termasuk pemeliharaan rutin jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan
		21) Mengoptimalkan kualitas pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan	Meningkatkan pelayanan jasa konstrusi dan inerja pengeloaan bangunan gedung/ rumah negara	
		22) Mengoptimalkan evaluasi kualitas hasil pekerjaan konstruksi		

No	RPJMD MUSI BANYUASIN 2017 – 2022		RPJMD PROVINSI SUMSEL 2019 – 2023	RPJMN 2020 - 2024
	SASARAN	STRATEGI	STRATEGI	STRATEGI
1	2	3	4	5
		23) Memperluas cakupan dan meningkatkan kapasitas serta kualitas layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis Satu Data Muba	Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar pemukiman	Peningkatan tata kelola kelembagaan untuk menyediakan air minum layak maupun aman
		24) Melakukan konservasi Sumber Air Baku	Menininggkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup	Peningkatan kapasitas air minum
		25) Mengoptimalkan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP)		Pengembangan dan pengelolaan SPAM
		26) Memperluas cakupan dan meningkatkan kapasitas Sistem penyediaan air limbah skala komunal	Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar
		27) Meningkatkan kapasitas SDM, Kelembagaan, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah		Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar
		28) Menangani kawasan pemukiman kumuh yang komprehensif sePsuai SK Kawasan Kumuh	Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar pemukiman	Penyediaan Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau

No	RPJMD MUSI BANYUASIN 2017 – 2022		RPJMD PROVINSI SUMSEL 2019 – 2023	RPJMN 2020 - 2024
	SASARAN	STRATEGI	STRATEGI	STRATEGI
1	2	3	4	5
		29) Melakukan pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru	Menekan tingkat kemiskinan guna memperkecil kesenjangan sosial melalui peningkatan akses masyarakata miskin terhadap pelayanan dasar dan kegiatan ekonomi produktif	Penyediaan Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau
		30) Melakukan Penataan terhadap Kawasan Perumahan di Daerah Bantaran Sungai dan Kawasan Lindung		Penyediaan Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau
7	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	31) Meningkatkan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfatan ruang	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
		32) Mengelola kawasan RTH	Menjaga kualitas lingkungan hidup meliputi kualitas air, kualitas udara dsan tutupan tutupan hutan	
		33) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan kualitas lingkungan hidup		
Tujuan 2 : Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing **Indikator 1 : Indeks Pembangunan Manusia**				
1	Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat	34) Meningkatkan Pelayanan Pendidikan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat (sekolah gratis yang berkualitas)	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas dan terjangkau	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran

No	RPJMD MUSI BANYUASIN 2017 – 2022		RPJMD PROVINSI SUMSEL 2019 – 2023	RPJMN 2020 - 2024
	SASARAN	STRATEGI	STRATEGI	STRATEGI
1	2	3	4	5
		35) Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan non Formal/Kesetaraan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas dan terjangkau	Peningkatan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun
		36) Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan		Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata
		37) Meningkatkan Pengelolaan manajemen pendidikan		Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran pendidikan
		38) Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan berbasis Satu Data Muba		
2	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	39) Melaksanakan strategi nasional penanganan Covid-19		

No	RPJMD MUSI BANYUASIN 2017 – 2022		RPJMD PROVINSI SUMSEL 2019 – 2023	RPJMN 2020 - 2024
	SASARAN	STRATEGI	STRATEGI	STRATEGI
1	2	3	4	5
		40) Meningkatkan kompetensi dan manajemen SDM kesehatan	Menekan tingkat kemiskian guna memperkecil kesenjangan sosial melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar dan kegiatan ekonomi produktif	Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
		41) Meningkatkan kualitas sarana prasarana kesehatan		Penguatan pelayanan kesehtan dasar dan rujukan
		42) Meningkatkan aktivitas dan minat masyarakat dalam berolahraga melalui peningkatan olahraga rekreasi		Pengembangan budaya dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional
		43) Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga		Peningkatan Kualitas Hidup
Tujuan 3 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik *good dovernance)* **Indikator 1 : Indeks Reformasi Birokrasi**				
1	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	44) Menyusun perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel berbasis Satu Data Muba	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan daerah	Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi

No	RPJMD MUSI BANYUASIN 2017 – 2022		RPJMD PROVINSI SUMSEL 2019 – 2023	RPJMN 2020 - 2024
	SASARAN	STRATEGI	STRATEGI	STRATEGI
1	2	3	4	5
				birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran
		45) Mempercepat Implementasi Satu Data Muba	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif	Peningkatan kualitas komunikasi publik
		46) Meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan daerah	Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggara

No	RPJMD MUSI BANYUASIN 2017 – 2022		RPJMD PROVINSI SUMSEL 2019 – 2023	RPJMN 2020 - 2024
	SASARAN	STRATEGI	STRATEGI	STRATEGI
1	2	3	4	5
		47) Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dan daerah serta Membentuk Aparatur SDM yang profesional	Meningkatkan integritas ASN	Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajamen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional
		48) Mengoptimalkan sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP)	Melibatkan seluruh stakeholder dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggara
		49) Meningkatkan harmonisasi dan kemitraan penyelenggaraan pemerintahan	Melibatkan seluruh stakeholder dalam perencanaan dan pelasanaan pembangunan	
2	Peningkatan kualitas pelayanan Publik	50) Menerapkan Pelayanan Publik yang transparan, akuntabel dan efisien sesuai dengan standar pelayanan	Menciptakan pelayanan publik yang terpadu, cepat, mudah dan inklusif (mengakomodir	Transformasi pelayanan public, melalui: pelayanan public berbasis elektronik (e-

No	RPJMD MUSI BANYUASIN 2017 – 2022		RPJMD PROVINSI SUMSEL 2019 – 2023	RPJMN 2020 - 2024
	SASARAN	STRATEGI	STRATEGI	STRATEGI
1	2	3	4	5
		minimal (SPM)	kelompok masyarakat berkebutuhan khusus)	service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan public, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu
		51) Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan sistem informasi terpadu (SPBE)	Menciptakan pelayanan publik yang terpadu, cepat, mudah dan inklusif	Penataan kelembagaan dan proses bisnis
		52) Memfasilitasi peningkatan cakupan jaringan internet di seluruh Kabupaten Musi Banyuasin (3G/4G)	Meningkatkan daya saing pariwisata untuk meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan	Peningkatan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi
		53) Mempermudah akses pelayanan publik dengan mendekatkan langsung ke masyarakat		

6.3. Program Prioritas

Perencanaan strategis yang dituangkan dalam RPJP dan RPD harus dapat diterjemahkan kedalam perencanaan operasional, dalam RPD yang disusun saat ini keselarasan sasaran pokok dan arah kebijakan dielaborasi dalam strategi dan arah kebijakannya. Program pembangunan daerah merupakan program atau agenda strategis pada periode RPD yang akan menjadi prioritas atau target yang secara langsung didedikasikan untuk mencapai sasaran daerah. Dalam implementasinya program pembangunan daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun 67 (enam puluh tujuh) program prioritas yang akan dilaksanakan pada pembangunan tahun 2023-2026 adalah:

A. Program prioritas untuk pencapaian sasaran: Peningkatan Daya Beli dan Penurunan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat:

1. Program Pemberdayaan Sosial;
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
3. Program Rehabilitasi Sosial;

B. Program prioritas untuk pencapaian sasaran: Penyediaan Lapangan Kerja yang Didukung oleh Tenaga Kerja Terampil:

4. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
5. Program Penempatan Tenaga Kerja;
6. Program Hubungan Industrial;

C. Program prioritas untuk pencapaian sasaran: Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan sebagai Penopang Pertumbuhan Ekonomi:

7. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
8. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
9. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
10. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
11. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;

D. Program prioritas untuk pencapaian sasaran: Peningkatan Produktivitas Sektor Usaha Mikro, IKM dan Industri Pengolahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi:

12. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
13. Program Pemberdayaan dan Perlindungn Koperasi;
14. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil & Usaha Mikro;
15. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
16. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
17. Program Pengembangan Umkm;
18. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
19. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
20. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri;
21. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan;
22. Program Promosi Penanaman Modal;
23. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;

E. Program prioritas untuk pencapaian sasaran: Peningkatan Kesejahteraan Para Petani:

24. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
25. Program Penyuluhan Pertanian;

F. Program prioritas untuk pencapaian sasaran: Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk Menunjang Aktivitas Masyarakat:

26. Program Penyelenggaraan Jalan;
27. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
28. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
29. Program Kawasan Permukiman;
30. Program Pengembangan Perumahan;
31. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU);
32. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
33. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;

G. Program prioritas untuk pencapaian sasaran: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup:

34. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
35. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
36. Program Penanggulangan Bencana;
37. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
38. Program Pengelolaan Persampahan;
39. Program Pengendalian Pencemarandan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

H. Program prioritas untuk pencapaian sasaran: Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat:

40. Program Pengelolaan Pendidikan;

I. Program prioritas untuk pencapaian sasaran: Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat:

41. Program Pemasaran Pariwisata;
42. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
43. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
44. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
45. Program Penanganan Kerawanan Pangan;

46. Program Pengelolalaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan;
47. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
48. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
49. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
50. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
51. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;

J. Program prioritas untuk pencapaian sasaran: Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan:

52. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
53. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
54. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
55. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
56. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
57. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
58. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
59. Program Administrasi Pemerintahan Desa
60. Program Kepegawaian Daerah

K. Program prioritas untuk pencapaian sasaran: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:

61. Program Pelayanan Penanaman Modal;
62. Program Aplikasi Informatika;
63. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
64. Program Pendaftaran Penduduk;
65. Program Pencatatan Sipil;
66. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
67. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.

Selanjutnya gambaran program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 dalam pencapaian tujuan, sasaran dan strategi masing – masing diuraikan pada tabel 6.11 berikut ini.

Tabel 6.11
Program Prioritas Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR RPD 2023-2026			TARGET						PAGU INDIKATIF (DALAM JUTA RUPIAH)				PD
			Satuan	Awal	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
[TUJUAN] Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif													
Indikator : Angka Kemiskinan			%	15,55	15,05	14,35	13,85	13,35					
Indikator : Indeks Gini			Indeks	0,316	0,306	0,296	0,286	0,276					
Indikator : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			%	3,9	3,8	3,65	3,5	3,35					
Indikator : Pertumbuhan Ekonomi			%	3,50-4,00	3,65-4,15	4,00-4,50	4,25-4,75	4,35-5,00					
Indikator : Indeks Pelayanan Infrastruktur			Indeks	80,15	85,44	91,15	92,17	93,37					
	[SASARAN] Peningkatan Daya Beli dan Penurunan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat												
	Indikator : Pengeluaran Per Kapita		Juta Rp./Tahun	10,371	10,602	10,883	11,064	11,295					
1	[Program] Program Pemberdayaan Sosial												
		Persentase PMKS yang mendapat Layanan	%	76,15	77,00	78,00	79,00	90,00	7.784	8.563	8.563	8.563	DINSOS
2	[Program] Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial												

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR RPD 2023-2026			TARGET						PAGU INDIKATIF (DALAM JUTA RUPIAH)				PD
			Satuan	Awal	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
		Persentase Masyarakat Kurang Mampu (DTKS) yang mendapatkan bantuan sosial Kesejateraan Keluarga	%	0	8	9	9,8	10,2	100	100	100	100	DINSOS
		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam bidang Meningkatnya Kesejahteraan Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	100	100	100	100	100	4.454	4.899	4.899	4.899	DINSOS
3	[Program] Program Rehabilitasi Sosial												
		Persentase Disabilitas yang mendapat layanan	%	84,12	93,26	95,76	98,25	100	4.642	5.106	5.106	5.106	DINSOS
[SASARAN] Penyediaan Lapangan Kerja yang didukung oleh tenaga kerja terampil													
Indikator : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)			%	69,18	69,71	70,03	70,38	70,76					
4	[Program] Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja												
		Persentase Tenaga Kerja Terlatih	%	6,9	24,1	25,2	26,2	27	5.000	5.000	5.000	5.000	DISNAKER TRANS
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja	%	40	50	80	90	100	5.000	5.000	5.000	5.000	DISNAKER TRANS
5	[Program] Program Penempatan Tenaga Kerja												
		Persentase Pekerja yang ditempatkan	%	40,66	42,60	43,50	45,80	47,80	1.000	1.000	1.000	1.000	DISNAKER TRANS
6	[Program] Program Hubungan Industrial												

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR RPD 2023-2026			TARGET						PAGU INDIKATIF (DALAM JUTA RUPIAH)				PD
			Satuan	Awal	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
		Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun	%	8,8	7,8	6,5	5,4	4,8	200	250	275	300	DISNAKER TRANS
		Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan	%	30	41	49	56	71	150	200	250	275	DISNAKER TRANS
[SASARAN] Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan perikanan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi													
Indikator : Laju Pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHK)			%	4,21	3,38	3,69	4,01	4,34					
7	[Program] Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)												
		Persentase Jaringan Irigasi, Sungai dan Penampung Air lainnya dalam Kondisi Baik	%	50	55	60	65	70	17.000	21.000	22.000	23.000	DPUPR
8	[Program] Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian												
		Persentase Ketersediaan Sarana Perkebunan	%	1,4	1,55	1,7	1,85	2	3.300	3.400	3.470	4.000	DISBUN
		Persentase ketersediaan sarana pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan)	%	20	25	30	35	40	22.023	23.000	24.000	24.000	DTPHP
9	[Program] Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian												

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR RPD 2023-2026			TARGET						PAGU INDIKATIF (DALAM JUTA RUPIAH)				PD
			Satuan	Awal	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
		Persentase Ketersediaan Prasarana Perkebunan	%	1,4	1,55	1,7	1,85	2,1	1.535	2.250	2.500	2.500	DISBUN
		Persentase ketersediaan prasarana pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan)	%	10	15	20	25	30	12.700	13.700	14.700	15.700	DTPHP
10	[Program] Program Pengelolaan Perikanan Tangkap												
		Produksi Perikanan Tangkap	Ton	23.024	23.484	23.954	24.434	24.675	5.700	6.000	6.250	6.400	DISPERIK
11	[Program] Program Pengelolaan Perikanan Budidaya												
		Produksi Perikanan Budidaya	Ton	25.466	25.772	26.813	27.349	27.896	4.472	4.712	6.043	6.896	DISPERIK
[SASARAN] Peningkatan Produktivitas Sektor Usaha Mikro, IKM dan Industri Pengolahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi													
Indikator : Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (ADHK)			%	2,65	1,76	1,94	2,12	2,31					
Indikator : Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (ADHK)			%	7,75	0,7	1,05	1,4	1,75					
Indikator : Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHK)			%	6,67	0,79	1,12	1,47	1,82					

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR RPD 2023-2026			TARGET						PAGU INDIKATIF (DALAM JUTA RUPIAH)				PD
			Satuan	Awal	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
12	[Program] Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan												
		Persentase Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan	%	5	5	7	8	10	2.000	2.700	3.400	4.100	DISPERIK
		Konsumsi Ikan	Kg/Kap/ Th	50,45	52,44	53,76	54,97	60,23	450	550	700	700	DISPERIK
13	[Program] Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi												
		Jumlah koperasi yang mampu berdaya saing	Koperasi	2	5	8	10	12	450	460	470	480	DINKOP
14	[Program] Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro												
		Jumlah UMK yang berdaya saing	UMK	100	200	300	400	500	900	1.000	1.100	1.200	DINKOP
15	[Program] Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian												
		Jumlah koperasi yang menjalin kerjasama dengan badan usaha lainnya	Koperasi	2	5	6	7	8	400	420	440	460	DINKOP
16	[Program] Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal												
		Nilai Kinerja PTSP dan Percepatan Pelayanan Berusaha Pemerintah Daerah	Nilai	87,76	88,03	88,10	88,60	88,90	380	335	890	945	DPMPTSP
17	[Program] Program Pengembangan Umkm												

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR RPD 2023-2026			TARGET						PAGU INDIKATIF (DALAM JUTA RUPIAH)				PD
			Satuan	Awal	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
		Jumlah Usaha Mikro menjadi usaha kecil	UMK	10	13	18	25	35	3.500	4.000	4.500	5.000	DINKOP
18	[Program] Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri												
		Jumlah Kemitraan Usaha	Mitra Usaha	2	4	6	8	11	500	500	500	400	DISDAGPERIN
19	[Program] Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan												
		Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi Baik	%	20,59	30,88	41,18	50,00	58,82	30.100	20.800	19.650	19.650	DISDAGPERIN
20	[Program] Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri												
		persentase peningkatan kapasitas produksi industri kecil menengah.	%	0,89	1	1,2	1,5	2	4.100	4.300	2.300	2.200	DISDAGPERIN
		persentase peningkatan tenaga kerja industri kecil menengah.	%	0,89	1	1,2	1,5	2	600	700	300	250	DISDAGPERIN
21	[Program] Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan												
		Persentase Rekomendasi Perizinan Pelaku usaha yang terbit	%	4,49	9,4	14,96	22,44	32,05	460	535	690	870	DISDAGPERIN
22	[Program] Program Promosi Penanaman Modal												
		Minat Investasi	%	50	60	75	80	80	859	1.009	1.009	1.209	DPMPTSP
23	[Program] Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting												

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR RPD 2023-2026			TARGET						PAGU INDIKATIF (DALAM JUTA RUPIAH)				PD
			Satuan	Awal	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
		Persentase ketersediaan kebutuhan barang pokok dan penting terhadap kebutuhan	%	100	100	100	100	100	3.450	3.350	3.350	3.350	DISDAGPERIN
[SASARAN] Peningkatan Kesejahteraan Para Petani													
Indikator : Nilai Tukar Petani (NTP)			Rasio	91	93	95	97	100					
24	[Program] Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral												
		Persentase Ketersediaan Data Statistik Perkebunan	Dokumen	100	100	100	100	100	800	800	800	800	DISBUN
		Persentase Ketersediaan Data Statistik Perkebunan	Dokumen	100	100	100	100	100	321	321	321	321	DTPHP
25	[Program] Program Penyuluhan Pertanian												
		Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	%	7	11	14	20	22	4.587	4.350	4.600	4.700	DTPHP
		Persentase Penggunaan Teknologi yang diterapkan oleh Petani	%	2,15	2,35	2,55	2,75	2,95	425	600	625	725	DISBUN
[SASARAN] Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk menunjang aktivitas masyarakat													
Indikator : Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap			%	65,04	68,62	73,14	76,52	80,1					
Indikator : Persentase Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Air Bersih			%	90,6	95,2	100	100	100					
Indikator : Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi (Air Limbah) yang Layak			%	84,8	92,5	100	100	100					

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR RPD 2023-2026			TARGET						PAGU INDIKATIF (DALAM JUTA RUPIAH)				PD
			Satuan	Awal	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
Indikator : Persentase Kawasan Kumuh Tertangani			%	100	78,97	58,17	37,5	0					
26	[Program] Program Penyelenggaraan Jalan												
		Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap	%	65,61	70	75	80	85	200.00	250.000	357.000	510.000	DPUPR
27	[Program] Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum												
		Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Air Bersih (Peripaan dan Non Perpipaan)	%	75	80	85	90	100	5.000	15.000	15.000	15.000	DINAS PERKIM
28	[Program] Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah												
		Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi yang layak (WC Individual, Komunal)	%	75	80	85	90	100	15.000	25.000	25.358	26.625	DINAS PERKIM
29	[Program] Program Kawasan Permukiman												
		Persentase Rumah di Kawasan Kumuh yang dibangun / diperbaiki	%	10	30	60	80	100	10.000	30.000	70.000	48.076	DINAS PERKIM
30	[Program] Program Pengembangan Perumahan												

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR RPD 2023-2026			TARGET						PAGU INDIKATIF (DALAM JUTA RUPIAH)				PD
			Satuan	Awal	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
		Persentase Rumah Korban bencana / Relokasi Yang di Bangun / Di rehab	%	4	25	50	75	100	20.000	40.000	50.000	100.000	DINAS PERKIM
31	[Program] Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)												
		Persentase PSU Yang dibangun / direhab	%	14	20	26	32	38	5.000	7.500	19.266	22.923	DINAS PERKIM
		[Program] Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan											
		Persentase Tanah yang dibebaskan/ diganti rugi oleh PEMDA	%	60,4	83,8	88,9	94,4	100	2.500	2.500	5.000	5.000	DINAS PERKIM
32	[Program] Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan												
		Persentase Kasus Sengketa Tanah yang terselesaikan	%	27,3	45,5	63,6	81,8	100	500	536	600	650	DINAS PERKIM
33	[Program] Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh												
		Persentase Rumah di Luar Kawasan Kumuh yang dibangun / diperbaiki	%	5	25	50	75	100	30.000	85.000	120.000	200.000	DINAS PERKIM
[SASARAN] Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup													
Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Indeks	65,01	65,51	66,01	66,29	66,72					
34	[Program] Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)												

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR RPD 2023-2026			TARGET						PAGU INDIKATIF (DALAM JUTA RUPIAH)				PD
			Satuan	Awal	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin Lingkungan dan izin PPLH	%	100	100	100	100	100	1.451	852	1.503	911	DLH
35	[Program] Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup												
		Persentase Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Diluar Pengadilan atau melalui Pengadilan	%	100	100	100	100	100	300	300	300	300	DLH
36	[Program] Program Penanggulangan Bencana												
		Persentase Capaian Penanggulangan Bencana (100%)	%	100	100	100	100	100	7.900	7.300	7.330	7.330	BPBD
37	[Program] Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)												
		Persentase Luasan RTH yang dikelola	%	20	20	20	20	20	9.175	10.000	11.537	12.455	DLH
38	[Program] Program Pengelolaan Persampahan												
		Persentase Penanganan sampah	%	100	100	100	100	100	24.000	24.000	24.000	24.000	DLH
39	[Program] Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup												
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dicapai	%	66,58	67,05	67,51	68,01	68,5	900	900	900	900	DLH
[TUJUAN] Terciptanya kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing													

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR RPD 2023-2026			TARGET						PAGU INDIKATIF (DALAM JUTA RUPIAH)				PD
			Satuan	Awal	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
Indikator : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks	68,64	69,17	69,71	70,25	70,78					
[SASARAN] Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat													
Indikator : Harapan lama Sekolah (HLS)			Tahun	12,45	12,6	12,76	12,91	13,07					
Indikator : Rata-rata Lama Sekolah (RLS)			Tahun	7,69	7,74	7,8	7,86	7,91					
40		[Program] Program Pengelolaan Pendidikan											
		Jumlah anak usia 4-6 tahun yang terlayani di PAUD	%	55,48	57,35	59,87	61,2	62,5	24.000	26.000	28.000	30.000	DIKBUD
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	100	100	100	100	100	17.200	17.500	17.800	18.100	DIKBUD
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100	100	100	100	100	12.700	12.900	13.000	13.100	DIKBUD
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	101,48	103,62	105,39	107,56	109,73	21.500	22.700	23.900	24.000	DIKBUD
		Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI	%	0,8	0,75	0,7	0,65	0,6	6.500	7.000	7.500	8.000	DIKBUD
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	99,6	99,7	99,8	99,9	100	88.800	88.900	89.000	89.500	DIKBUD
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	2.100	2.200	2.300	2.400	DIKBUD
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	100	100	100	100	100	45.200	51.400	57.500	26.000	DIKBUD
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	100	100	100	100	100	4.800	5.000	5.300	54.000	DIKBUD

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR RPD 2023-2026			TARGET						PAGU INDIKATIF (DALAM JUTA RUPIAH)				PD
			Satuan	Awal	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	88,75	91,36	94,12	97,42	100	7.800	8.100	8.500	8.800	DIKBUD
		Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs	%	1,3	1,2	1,1	1	0,8	4.000	4.500	5.000	5.500	DIKBUD
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	99,6	99,7	99,8	99,9	100	31.500	32.000	32.500	33.000	DIKBUD
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	2.100	2.200	2.300	2.400	DIKBUD
		Persentase sekolah yang sudah mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	55,4	60,38	65,72	70,81	75,2	750	850	950	1.000	DIKBUD
[SASARAN] Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat													
Indikator : Usia Harapan Hidup (UHH)			Tahun	68,96	69,08	69,2	69,33	69,45					
41	[Program] Program Pemasaran Pariwisata												
		Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	34.056	36.102	39.407	42.184	43.798	3.039	3.175	3.312	3.546	DISPOPAR
42	[Program] Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan												
		Persentase desa yang melaksanakan PHBS	%	20	25	30	35	40	400	500	600	650	DINKES
		Persentase PHBS tempat kerja	%	40	45	50	55	60	450	550	600	650	DINKES
		Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	161489	177.638	195.402	214.942	236.437	300	350	400	450	DINKES

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR RPD 2023-2026			TARGET						PAGU INDIKATIF (DALAM JUTA RUPIAH)				PD
			Satuan	Awal	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
		Persentase Rumah Sehat	%	77,2	83	85	90	95	700	800	900	1.000	DINKES
43	[Program] Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)												
		Persentase Kecamatan Layak Anak	%	53,34	66,6	80	86,66	93,33	500	500	500	500	DPPPA
		Jumlah Penghargaan Nasional Kabupaten Layak Anak (KLA)	Jumlah	4	4	4	4	4	500	500	500	500	DPPPA
44	[Program] Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat												
		Prevalensi stunting pada balita	%	18,4	16	14	13	12	2.000	3.000	4.000	5.000	DINKES
		Angka kematian ibu	KH	70/100 000	64/1 0000 0	58/100 000	52/10 0000	46/1 0000 0	7.500	8.000	10.00 0	11.00 0	DINKES
		Angka kematian bayi	KH	8/1000	7/10 00	6/1000	5/100 0	4/10 00	3.000	4.000	5.000	6.000	DINKES
		Jumlah FKTP Akreditasi Minimal Utama	PKM	1	2	3	4	5	1.450	1.500	1.700	2.000	DINKES
		Jumlah FKRTL Akreditasi Paripurna	RS	1	1	3	3	3	1.000	1.500	1.700	2.000	DINKES
		Persentase Jaminan Kesehatan Masyarakat	%	95	95	95	95	95	60.00 0	70.00 0	70.00 0	70.00 0	DINKES
		Jumlah Opersaional Pelayanan Puskesmas	PKM	29	29	29	29	29	685	750	850	1.000	DINKES
		Jumlah Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RS	3	3	3	3	3	102.0 00	102.0 00	102.0 00	102.0 00	DINKES

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR RPD 2023-2026			TARGET						PAGU INDIKATIF (DALAM JUTA RUPIAH)				PD
			Satuan	Awal	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
		Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jaringan	Aplikasi	40	40	40	40	40	2.000	2.000	2.000	2.000	DINKES
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	100	100	100	100	10.000	10.000	10.000	10.000	DINKES
		Jumlah Pelayanan Standard Minimal Kesehatan	Dokumen	12	12	12	12	12	12.000	12.000	12.000	12.000	DINKES
		Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Dokumen	10	10	10	10	10	500	750	1.000	1.250	DINKES
		Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Dokumen	2	2	2	2	2	500	750	1.000	1.250	DINKES
		Persentase Alat Kesehatan yang di lakukan pemeliharaan atau kalibrasi	%	100	100	100	100	100	1.000	1.000	1.000	1.000	DINKES
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana (FKTP dan FKTR)	%	100	100	100	100	100	15.000	15.000	15.000	15.000	DINKES
		Persentase ketersediaan obat essensial	%	86	90	96	98	100	10.000	10.000	10.000	10.000	DINKES
		Persentase ketersediaan BMHP	%	86	90	96	98	100	5.000	7.000	8.000	10.000	DINKES
		Persentase Alat Kesehatan Memenuhi Syarat	%	80	85	90	95	100	20.000	20.000	20.000	20.000	DINKES
45	[Program] Program Penanganan Kerawanan Pangan												
		Persentase Desa Rawan Pangan (Prioritas 1,2,3)	Desa	9,58	23	22	21	20	200	200	200	200	DKP

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR RPD 2023-2026			TARGET						PAGU INDIKATIF (DALAM JUTA RUPIAH)				PD
			Satuan	Awal	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
46	[Program] Program Pengelololalaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan												
		Persentase penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan	%	n/a	50	50	50	50	1.650	1.850	2.050	2.350	DKP
47	[Program] Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif												
		Jumlah pelaku usaha pariwisata	Orang	343	383	420	459	501	1.802	2.308	2.389	2.511	DISPOPAR
48	[Program] Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat												
		Tingkat Konsumsi Energi PerKapita/Hari	Kkal/Kap /Hari	2.086,20	2.090	2.095	2.100	2.105	7.685	6.958	6.053	4.248	DKP
49	[Program] Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan												
		Persentase Puskesmas dengan jenis Nakes sesuai Standar	%	70	80	85	87	90	800	850	900	950	DINKES
		Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya	%	60	65	75	80	85	2.000	3.000	4.000	5.000	DINKES
50	[Program] Program Peningkatan Kualitas Keluarga												
		Jumlah Kegiatan Yang Mendukung Kualitas Keluarga dan Hak Anak	Jumlah	1	1	1	1	1	400	400	400	400	DPPPA

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR RPD 2023-2026			TARGET						PAGU INDIKATIF (DALAM JUTA RUPIAH)				PD
			Satuan	Awal	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
		Jumlah Penghargaan Anugrah Parahita Eka Praya (APE)	Jumlah	2	2	3	3	3	400	400	400	400	DPPPA
51	[Program] Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman												
		Persentase sertifikasi tempat pengelolaan makanan dan minuman	%	30	40	45	50	55	250	250	250	250	DINKES
[TUJUAN] Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)													
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi			Predikat	C	C	CC	CC	B					
[SASARAN] Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan													
Indikator : Nilai Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah			Predikat	B	BB	BB	BB	BB					
Indikator : Opini BPK RI terhadap LKP			Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP					
52	[Program] Program Pengelolaan Keuangan Daerah.												
		Persentase SKPD Yang Penganggarannya Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	%	100	100	100	100	100	2.250	2.250	2.250	2.250	BPKAD
		Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	%	100	100	100	100	100	3.185	3.185	3.185	3.185	BPKAD
		Persentase Pencairan Dana On Skedul	%	100	100	100	100	100	431.587	452.238	474.534	498.631	BPKAD
53	[Program] Program Pengelolaan Pendapatan Daerah												

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR RPD 2023-2026			TARGET						PAGU INDIKATIF (DALAM JUTA RUPIAH)				PD
			Satuan	Awal	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
		Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	12,10	13,84	14,72	15,64	16,60	6.000	6.200	6.400	6.600	BPPRD
54	[Program] Program Penyelenggaraan Pengawasan												
		Persentase PD yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB	%	22,91	67	70	75	80	456	475	475	475	INSPEKTORAT
		Persentase PD Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik (Zona Hijau)	%	33,33	40	50	60	70	1.215	1.220	1.220	1.220	INSPEKTORAT
		Opini terhadap laporan keuangan pemda	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	2.099	2.100	2.100	2.100	INSPEKTORAT
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	%	78	80	83	85	90	400	400	400	400	INSPEKTORAT
		Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	%	84	85	87	89	90	1.334	1.350	1.350	1.350	INSPEKTORAT
55	[Program] Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah												
		Rasio ketersediaan data untuk untuk perencanaan pembangunan	%	65	70	70	70	80	465	477	539	553	BAPPEDA
		Persentase keselarasan program RKPD dalam RPJMD	%	100	100	100	100	100	1.494	1.525	1.544	1.559	BAPPEDA
		Presentase keselarasan program kabupaten dengan program nasional	%	90	90	90	90	90	816	821	826	831	BAPPEDA
56	[Program] Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah												

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR RPD 2023-2026			TARGET						PAGU INDIKATIF (DALAM JUTA RUPIAH)				PD
			Satuan	Awal	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
		Presentasi hasil inovasi yang diimplementasikan	%	90	90	90	90	90	1.250	1.250	1.400	1.400	BAPPEDA
		Persentase rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti	%	90	90	90	90	90	500	500	600	600	BAPPEDA
57	[Program] Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota												
		Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	SEMUA PD
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100	100	85.000	85.000	85.000	85.000	SEMUA PD
		Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	9.000	9.000	9.000	9.000	SEMUA PD
		Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel	%	100	100	100	100	100	2.500	2.500	2.500	2.500	SEMUA PD
		Persentase Layanan Keuangan, Administrasi dan Kesejahteraan DPRD	%	80	85	90	95	95	50.000	50.000	50.000	50.000	SEKRETARIAT DPRD
		Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil Kepada Daerah dan Sekretaris Daerah	%	70	75	80	85	90	IDR 9.000	9.000	9.000	9.000	SEKRETARIAT DAERAH
		Meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten dan Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B	B	B	B	1.200	1.200	1.200	1.200	SEKRETARIAT DAERAH

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR RPD 2023-2026			TARGET						PAGU INDIKATIF (DALAM JUTA RUPIAH)				PD
			Satuan	Awal	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
		Terbentuknya inovasi pelayanan publik perangkat daerah dan tersertifikasinya pelayanan publik perangkat daerah dengan standar ISO	Laporan	3	3	3	3	3	750	750	750	750	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Tersusunnya Analisa Jabatan Perangkat Daerah dalam Kab. Muba	%	100	100	100	100	100	750	750	750	750	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase terlayaninya Kunjungan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Laporan	275	315	358	134	136	6.000	6.000	6.000	6.000	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	100	100	100	100	1.300	1.300	1.300	1.300	SEKRETARIAT DAERAH
58	[Program] Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan												
		Persentase Organisasi Masyarakat yang dibina	%	100	100	100	100	100	325	325	325	325	KESBANGPOL
59	[Program] Program Administrasi Pemerintahan Desa												
		Persentase Desa Tertib Administrasi	%	70	75	80	80	100	7.500	7.500	7.500	7.500	DPMD
60	[Program] Program Kepegawaian Daerah												
		Persentase Penempatan ASN sesuai dengan Standar Jabatan	%	98,12	98,15	98,20	98,25	98,30	950	950	950	1.100	BKPSDM

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR RPD 2023-2026			TARGET						PAGU INDIKATIF (DALAM JUTA RUPIAH)				PD
			Satuan	Awal	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
		Persentase JPT yang mempunyai Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan	%	84,85	85,50	86,50	87,50	90,00	4.770	4.770	4.850	4.850	BKPSDM
		Persentase Capaaian Kenerja ASN yang Memiliki Capaian Kinerja Baik	%	99,80	99,82	99,84	99,86	99,88	175	185	195	210	BKPSDM
		Persentase Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN	%	1,52	1,49	1,39	1,29	1,09	540	595	650	725	BKPSDM
		Survey Kepuasan ASN	%	87,00	87,25	87,50	87,75	88,00	950	950	1.000	1.000	BKPSDM
[SASARAN] Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik													
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Indeks	90	91	92	92	92					
Indikator : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE			Indeks	2,97	3,1025	3,235	3,3675	3,5					
61	[Program] Program Pelayanan Penanaman Modal												
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dibidang Pelayanan Perizinan	Nilai	88,76	88,76	88,76	88,76	88,76	715	715	735	740	DPMPTSP
		Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di terbitkan	Jumlah	2400	2550	2550	2600	2700	1.100	1.150	1.200	1.300	DPMPTSP
		Persentase Penerbitan Izin dan non perizinan Sesuai SOP	%	85	85	87	87	90	300	330	360	380	DPMPTSP
62	[Program] Program Aplikasi Informatika												
		Persentase aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten	%	40	55	65	75	85	2.000	2.000	2.000	2.000	DINKOMINFO
63	[Program] Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)												

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / INDIKATOR RPD 2023-2026			TARGET						PAGU INDIKATIF (DALAM JUTA RUPIAH)				PD
			Satuan	Awal	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
		Persentase sarana prasarana jalan dalam kondisi baik	%	85	90	87	97	100	3.375	3.550	3.590	3.655	DISHUB
64	[Program] Program Pendaftaran Penduduk												
		Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	%	100	100	100	100	100	1.000	1.000	1.000	1.000	DISDUKCAPIL
65	[Program] Program Pencatatan Sipil												
		Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	%	100	100	100	100	100	700	700	700	700	DISDUKCAPIL
66	[Program] Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan												
		Persentase capaian terlaksananya Informasi Administrasi Kependudukan yang mudah diakses oleh masyarakat	%	100	100	100	100	100	2.800	2.800	2.800	2.800	DISDUKCAPIL
67	[Program] Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan												
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%	100	100	100	100	100	7.800	8.450	9.100	9.750	SEMUA PD KECAMATAN

BAB 7

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, dan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan, serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

7.1.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Untuk mendapatkan proyeksi pendanaan lima tahun ke depan dilakukan analisis proyeksi data masa lalu yang didasarkan pada rata-rata pertumbuhan selama lima tahun ke belakang. Dari analisis rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sudah diuraikan pada subbab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata pertumbuhan APBD Kabupaten Musi Banyuasin berfluktuatif atau dinamis. Hal ini disebabkan dari faktor eksternal terutama dari pendapatan dana perimbangan. Bila dilihat untuk pertumbuhan realisasi APBD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017-2021 hanya tumbuh sekitar 0,43% karena pergerakannya yang fluktuatif.

Sebagai bahan pertimbangan proyeksi pendapatan dan belanja lima tahun ke depan selain melihat rata-rata pertumbuhan juga mengantisipasi perubahan-perubahan kebijakan disektor keuangan. Salah satunya dengan adanya dampak krisis ekonomi akibat adanya wabah Covid-19 tentu akan berpengaruh terhadap penerimaan PAD maupun Dana Transfer dari Pemerintah. Oleh karena itu, dalam menentukan angka proyeksi perlu dilakukan penyesuaian agar diperoleh angka yang lebih realistis dan tidak terlalu optimistik. Hal ini bertujuan agar dalam melakukan perencanaan keuangan lebih mengedepankan asas konservatif dan kehati-hatian. Apalagi jika dilihat dari pertumbuhan setiap jenis pendapatan per tahunnya, masih sangat fluktuatif, bahkan beberapa pos pendapatan mengalami kecenderungan pertumbuhan negatif. Penetapan angka pertumbuhan untuk menentukan proyeksi pendapatan dilakukan dengan hanya mengakui angka pertumbuhan sebesar 50%, serta mempertimbangkan informasi-informasi kebijakan Pemerintah dan kondisi terkini terkait adanya dampak wabah Covid-19. Penyesuaian terhadap target Pajak dan Retribusi Daerah juga telah dilakukan serta penurunan dan relaksasi terhadap penerimaan dari Pendapatan Transfer juga perlu dipertimbangkan. Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 juga menjadi isu strategis di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026. Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 begitu dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menyusun setiap program-

program dan kegiatan yang mendukung dalam proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, diharapkan program-program yang telah disusun dapat meningkatkan kembali kekuatan perekonomian masyarakat.

Untuk proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2022-2026 diasumsikan pertumbuhan setiap tahunnya sekitar 1,61%. Secara lengkap proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022-2026 disajikan pada tabel 7.1

Tabel 7.1
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022-2026

No.	URAIAN	Pertum-buhan (%)	PROYEKSI				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	PENDAPATAN	7,232	3.209.005.733.000	3.376.844.797.000	3.637.166.386.000	3.924.492.478.000	4.241.940.148.000
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	15	388.258.361.000	446.497.115.000	513.471.682.000	590.492.434.000	679.066.300.000
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	6,056	2.723.426.373.000	2.828.160.634.000	3.016.398.303.000	3.221.338.823.000	3.444.579.566.000
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	6,235	2.623.921.007.000	2.727.660.215.000	2.914.892.880.000	3.118.818.345.000	3.341.033.884.000
1.2.1.01	Dana Perimbangan	7,448	-	2.491.954.485.000	2.674.586.187.000	2.873.819.801.000	3.091.250.795.000
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	7,931	-	2.071.965.664.000	2.233.597.925.000	2.410.782.126.000	2.605.061.236.000
A.	Dana Bagi Hasil (DBH)	9,185	-	1.689.911.850.000	1.843.903.035.000	2.013.293.338.000	2.199.622.672.000
B.	Dana Alokasi Umum (DAU)	2,0		382.053.814.000	389.694.890.000	397.488.788.000	405.438.564.000
1.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	5,0	-	419.988.821.000	440.988.262.000	463.037.675.000	486.189.559.000
1.2.1.02	Dana Insentif Daerah	1,0	-	11.315.135.000	11.428.286.000	11.542.569.000	11.657.994.000
1.2.1.03	Alokasi Dana Desa (APBN)	2,0	-	224.390.595.000	228.878.407.000	233.455.975.000	238.125.095.000
1.2.2	Transfer Antar Daerah	1,0	99.505.366.000	100.500.419.000	101.505.423.000	102.520.478.000	103.545.682.000
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5,0	97.320.999.000	102.187.048.000	107.296.401.000	112.661.221.000	118.294.282.000

No.	URAIAN	Pertum-buhan (%)	PROYEKSI				
			2022	2023	2024	2025	2026
2	**BELANJA**	**9,443**	**2.974.417.481.954**	**3.396.844.797.000**	**3.657.166.386.000**	**3.944.492.478.000**	**4.261.940.148.000**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**5,861**	**2.115.018.164.922**	**2.204.577.482.455**	**2.342.592.641.824**	**2.492.598.252.407**	**2.655.748.082.709**
2.1.1	Belanja Pegawai	**1,875**	965.901.185.024	965.901.185.024	990.048.714.650	1.014.799.932.516	1.040.169.930.829
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	**7,500**	1.126.762.667.431	1.126.762.667.431	1.239.438.934.174	1.363.382.827.592	1.499.721.110.351
2.1.3	Belanja Bunga	**-100,0**	10.040.682.467	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi		-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	**7,5**	11.913.630.000	11.913.630.000	13.104.993.000	14.415.492.300	15.857.041.530
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	**6225**	400.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
2.2	**BELANJA MODAL**	**16,972**	**593.505.673.332**	**758.180.153.145**	**859.835.544.676**	**974.860.037.993**	**1.105.060.846.691**
2.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**0,0**	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**19,662**	**263.393.643.700**	**431.587.161.400**	**452.238.199.500**	**474.534.187.600**	**498.631.218.600**
2.4.1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	**19,662**	263.393.643.700	431.587.161.400	452.238.199.500	474.534.187.600	498.631.218.600
2.4.2	Transfer Bantuan Keuangan lainnya	**-**	-	-	-	-	-

No.	URAIAN	Pertum-buhan (%)	PROYEKSI				
			2022	2023	2024	2025	2026
3	**PEMBIAYAAN**	**-27,131**	**(234.588.251.046)**	**20.000.000.000**	**20.000.000.000**	**20.000.000.000**	**20.000.000.000**
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**0,0**	**45.000.000.000**	**45.000.000.000**	**45.000.000.000**	**45.000.000.000**	**45.000.000.000**
3.1.1	Sisa Lebih Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	**0,0**	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000
3.1.2	Pinjaman Daerah	**-**	-	-	-	-	-
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**-22,765**	**279.588.251.046**	**25.000.000.000**	**25.000.000.000**	**25.000.000.000**	**25.000.000.000**
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	**-100,0**	246.988.251.046	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	**-5,828**	32.600.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2022
BPKAD Tahun 2022

Proyeksi pendapatan dan belanja ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan.

Hasil perhitungan proyeksi di atas didapat besaran pendapatan pada tahun 2022 sebesar Rp3.209.005.733.000, tahun 2023 sebesar Rp3.376.844.797.000, tahun 2024 sebesar Rp3.637.166.386.000, tahun 2025 sebesar Rp3.924.492.478.000, dan tahun 2026 sebesar Rp4.241.940.148.000. Pendapatan tersebut didapat dari 3 sumber yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022-2026 berasal dari pendapatan pajak daerah yang diproyeksikan berdasarkan data historis pendapatan pajak daerah dari tahun 2017-2021. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2022-2026 diproyeksikan sebesar Rp388 milyar – Rp679 milyar yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan sudah mulai efektifnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dulunya merupakan pajak kewenangan pemerintah pusat dialihkan menjadi pajak Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009. Disamping itu kebijakan perpajakan daerah lainnya juga memberikan kontribusi bagi meningkatkan penerimaan pajak daerah ini seperti Pajak Air Tanah yang dahulunya merupakan Pajak Provinsi sekarang diserahkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang dahulunya Pajak Pusat sekarang diserahkan menjadi Pajak Daerah.

Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar ialah pendapatan transfer Dana Bagi Hasil, baik migas maupun non migas dengan besaran lebih dari 70% dari total pendapatan. Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang sekitar 10%-15% dari total pendapatan. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam hal PAD belum mandiri secara fiskal. Perlunya peningkatan dan inovasi dalam hal mencari pendapatan asli daerah sehingga kedepannya tidak lagi terlalu bergantung terhadap transfer dari pusat karena target capaiannya tidak menentu serta dipengaruhi oleh banyak faktor seperti, menurunnya produksi minyak dan gas bumi, harga minyak dunia, kebijakan moneter pusat, dan kebijakan dana transfer oleh pemerintah pusat.

Pertumbuhan proyeksi pendapatan tersebut didukung oleh pengelolaan dan kebijakan yang mengacu pada potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Musi Banyuasin. Selain dari sumber-sumber pendapatan yang sudah dikelola selama ini, masih terdapat sumber-sumber pendapatan yang potensial penerimaannya dengan tetap memperhitungkan kemampuan ekonomi masyarakat. Adapun kebijakan pengelolaan pendapatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin periode tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan meningkat setiap tahunnya, yang bersumber dari: Pajak Daerah (hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, galian C); Retribusi Daerah (jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu); Hasil Perusahaan Milik

Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (PDAM, PT. Petro Muba Holding, Bank Sumsel, PDPDE); Lain-lain PAD yang sah (Penjualan aset daerah, jasa giro, bunga deposito, ganti rugi, denda keterlambatan, denda retribusi, pendapatan lain-lain dan BLUD).

Langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka optimalisasi target PAD antara lain sebagai berikut:

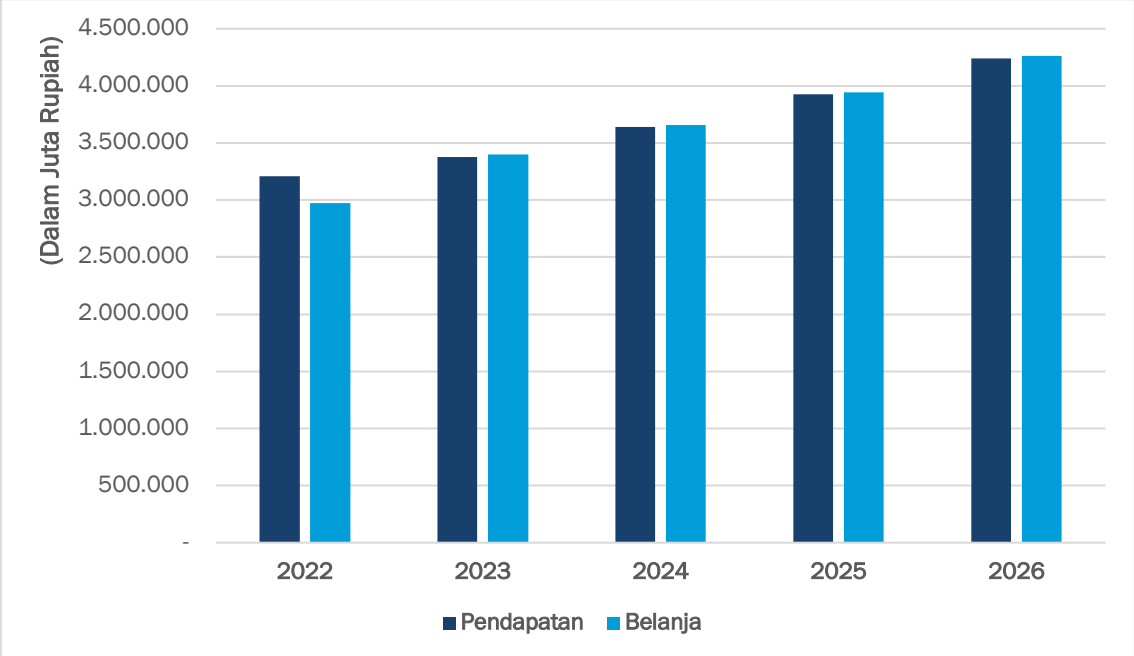
1) Perbaikan dalam administrasi perpajakan menyangkut pendataan objek pajak, penghitungan, penetapan serta penerapan sanksi baik kepada wajib pajak maupun aparatur pajak yang melanggar ketentuan perpajakan daerah;
2) Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
3) Peningkatan Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
4) Meninjau ulang Perda-perda yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, khususnya yang berhubungan dengan retribusi daerah dan pajak daerah;
5) Pemantapan kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
6) Peningkatan koordinasi antar OPD dalam upaya meningkatkan PAD;

7) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan lembaga keuangan lainnya. terutama menyangkut perolehan dana perimbangan;
8) Meningkatkan keaktifan dan keseriusan dalam pengusulan untuk dana alokasi khusus;
9) Peningkatan kinerja BUMD melalui pemberian penyertaan modal yang dikaitkan dengan penerimaan deviden yang akan diperoleh

b. Dana Perimbangan (DAU, DAK, Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak SDA) diharapkan dapat meningkat/naik setiap tahunnya, dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
   1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB, serta bagi hasil pajak dari Pusat dan Provinsi;
   2) Mencari dan menggali sumber pajak baru yang bisa meningkatkan pendapatan daerah;
   3) Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
c. Lain-lain pendapatan yang sah pada Tahun Anggaran 2023-2026 diupayakan naik setiap tahunnya, dengan mengupayakan adanya peningkatan perolehan Bagi Hasil Pajak Provinsi, dan bantuan keuangan provinsi melalui koordinasi dan konsultasi ke Provinsi dan Pusat

Pada proyeksi belanja daerah, didapatkan hasil perhitungan pada tahun 2022 sebesar Rp2.974.417.481.954, tahun 2023 sebesar Rp3.396.844.797.000, tahun 2024 sebesar Rp3.657.166.386.000, tahun 2025 sebesar Rp3.944.492.478.000, tahun 2026 sebesar Rp4.261.940.148.000. Belanja tersebut dibagi dalam beberapa komponen seperti belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Komponen belanja yang mendapat alokasi terbesar ialah belanja operasi dengan alokasi 60% dari total belanja. Dari total belanja operasi, belanja barang dan jasa mendapatkan porsi yang paling besar sebanyak lebih dari 50%.

Grafik 7.1.
Proyeksi Pendapatan Daerah 2022-2026



Sumber : BPPRD dan BPKAD, diolah

Dalam menentukan proyeksi SiLPA pada periode tahun 2022-2026 menggunakan data SiLPA pada periode sebelumnya. Namun demikian, dengan mempertimbangkan bahwa tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan lebih baik, sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal sebesar 5% dari total APBD, maka diperoleh proyeksi SiLPA sebagaimana disajikan pada tabel 3.13 berikut ini.

Tabel 7.2

Proyeksi SILPA Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022 - 2026

(dalam jutaan)

No.	URAIAN	TAHUN DASAR 2021	PROYEKSI				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	**675.605**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2022

7.1.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Setelah menganalisis kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai kerangka keuangan, selanjutnya akan digambarkan kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan periode tahun 2022-2026, Perkiraan kapasitas riil kemampuan daerah disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat

perencanaan dari penganggaran setiap tahunnya, Selengkapnya secara indikatif tersaji pada tabel 7.3 berikut ini.

Tabel 7.3
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022- 2026

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	PENDAPATAN	3.209.005.733.000,00	3.376.844.797.000	3.637.166.386.000	3.924.492.478.000	4.241.940.148.000
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	45.000.000.000	293.858.036.114,58	255.731.211.422,90	262.590.387.464,35	284.746.276.247,97
	Total Penerimaan	**3.254.005.733.000**	**4.149.809.045.770**	**3.992.064.654.158**	**3.936.622.299.406**	**3.903.611.199.050**
	Dikurangi					
1	Pengeluaran Pembiayaan	-	(25.000.000.000,00)	(25.000.000.000,00)	(25.000.000.000,00)	(25.000.000.000,00)
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUDA	**3.254.005.733.000**	**4.166.124.391.070**	**4.094.562.043.058**	**4.125.301.731.906**	**4.012.078.671.900**

Sumber : Data diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen dalam pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan pengeluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksudkan dapat dinikmati oleh masyarakat.

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang ditetapkan oleh para aparatur pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut ke dalam berbagai kelompok prioritas.

Secara keseluruhan kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022-2026 disajikan pada tabel 7.4 berikut ini.

Tabel 7.4
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022-2026

No	Uraian	APBD	Proyeksi				Akhir RPD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	**KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**	**4.289.295.659.812**	**3.254.005.733.000**	**3.421.844.797.000**	**3.682.166.386.000**	**3.969.492.478.000**	**4.286.940.148.000**
1	PENDAPATAN	3.613.690.337.116	3.209.005.733.000,00	3.376.844.797.000,00	3.637.166.386.000,00	3.924.492.478.000,00	4.241.940.148.000,00
2	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	675.605.322.696,00	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000
B	**BELANJA + PEMBIAYAAN**	**4.440.417.564.812**	**3.254.005.733.000**	**3.421.844.797.000**	**3.682.166.386.000**	**3.969.492.478.000**	**4.286.940.148.000**
	BELANJA	**4.199.063.344.221**	**2.974.417.481.954**	**3.396.844.797.000**	**3.657.166.386.000**	**3.944.492.478.000**	**4.261.940.148.000**
B.1	**PRIORITAS I**	**2.624.739.085.889**	**1.720.268.340.763**	**1.884.942.820.576**	**2.099.274.478.850**	**2.338.242.865.584**	**2.604.781.957.041**
B.1.a	**Belanja Operasi**	**1.452.515.316.479,00**	**1.126.762.667.431,00**	**1.126.762.667.431,00**	**1.239.438.934.174,10**	**1.363.382.827.591,51**	**1.499.721.110.350,66**
B.1.a.1	Belanja Barang dan Jasa	1.452.515.316.479,00	1.126.762.667.431	1.126.762.667.431	1.239.438.934.174	1.363.382.827.592	1.499.721.110.351
B.1.b	**Belanja Modal**	**1.172.223.769.410,00**	**593.505.673.332,00**	**758.180.153.145,00**	**859.835.544.676,30**	**974.860.037.992,65**	**1.105.060.846.690,60**
B.1.b.1	Belanja Modal	1.172.223.769.410,00	593.505.673.332	758.180.153.145	859.835.544.676	974.860.037.993	1.105.060.846.691
B.2	**PRIORITAS II**	**1.574.324.258.332**	**1.254.149.141.191**	**1.511.901.976.424**	**1.557.891.907.150**	**1.606.249.612.416**	**1.657.158.190.959**
B.2.a	**Belanja Operasi**	**1.103.496.340.920**	**988.255.497.491**	**1.077.814.815.024**	**1.103.153.707.650**	**1.129.215.424.816**	**1.156.026.972.359**
B.2.a.1	Belanja Pegawai	1.045.912.595.891	965.901.185.024	965.901.185.024	990.048.714.650	1.014.799.932.516	1.040.169.930.829
B.2.a.2	Belanja Bunga	21.659.377.865	10.040.682.467	-	-	-	-
B.2.a.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
B.2.a.4	Belanja Hibah	35.524.367.164	11.913.630.000	11.913.630.000	13.104.993.000	14.415.492.300	15.857.041.530
B.2.a.4	Belanja Bantuan Sosial	400.000.000	400.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
B.2.b	**Belanja Tidak Terduga**	**1.753.000.000**	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**
B.2.b..1	Belanja Tidak Terduga	1.753.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
B.2.c	**Belanja Transfer**	**469.074.917.412,00**	**263.393.643.700**	**431.587.161.400**	**452.238.199.500**	**474.534.187.600**	**498.631.218.600**

No	Uraian	APBD	Proyeksi				Akhir RPD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
B.2.c.1	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	469.074.917.412,00	263.393.643.700,00	431.587.161.400,00	452.238.199.500,00	474.534.187.600,00	498.631.218.600,00
C	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**241.354.220.591**	**279.588.251.046**	**25.000.000.000**	**25.000.000.000**	**25.000.000.000**	**25.000.000.000**
C.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	83.000.000.000	32.600.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
C.2	Pembayaran Pokok Hutang Kepada Pihak Ketiga	158.354.220.591,00	246.988.251.046	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Data diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa Belanja daerah harus diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian pembangunan 4 (empat) tahun ke depan seusai dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Disamping pengelolaan belanja sejak proses perencanaan pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek, efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian efektivitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow* program prioritas) dan kebutuhan.

Selanjutnya, ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah berdasarkan prioritas. Prioritas dikelompokkan menjadi 2 (dua) sebagaimana disajikan pada Tabel 3.16. Penetapan persentase tiap tahun sesuai urutan prioritas (I dan II) untuk keperluan pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. Secara simultan persentase tersebut dipertajam ketika program prioritas untuk masing-masing jenis prioritas (Prioritas I dan II) telah dirumuskan. Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut :

1. Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama. Pengeluaran wajib dalam hal ini adalah alokasi anggaran Pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan anggaran Kesehatan dialokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji sesuai UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan program prioritas dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin periode 2023-2026, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.

Tabel 7.5
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022-2026 (dalam jutaan)

Uraian	Alokasi									
	Proyeksi									
	2022		2023		2024		2025		2026	
	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp
Prioritas I	57,84	**1.720.268**	55,49	**1.884.943**	57,40	**2.099.274**	59,28	**2.338.243**	61,12	**2.604.782**
Belanja Operasi	37,88	**1.126.763**	33,17	**1.126.763**	33,89	**1.239.439**	34,56	**1.363.383**	35,19	**1.499.721**
Belanja Barang dan Jasa	37,88	1.126.763	33,17	1.126.763	33,89	1.239.439	34,56	1.363.383	35,19	1.499.721
Belanja Modal	19,95	**593.506**	22,32	**758.180**	23,51	**859.836**	24,71	**974.860**	25,93	**1.105.061**
Belanja Modal	19,95	593.506	22,32	758.180	23,51	859.836	24,71	974.860	25,93	1.105.061
	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIORITAS II	42,16	**1.254.149**	44,51	**1.511.902**	42,60	**1.557.892**	40,72	**1.606.250**	38,88	**1.657.158**
Belanja Operasi	33,23	**988.255**	31,73	**1.077.815**	30,16	**1.103.154**	28,63	**1.129.215**	27,12	**1.156.027**
Belanja Pegawai	32,47	965.901	28,44	965.901	27,07	990.049	25,73	1.014.800	24,41	1.040.170
Belanja Bunga	0,34	10.041	-		-		-		-	
Belanja Subsidi	0,00		-		-		-		-	
Belanja Hibah	0,40	11.914	0,35	11.914	0,36	13.105	0,37	14.415	0,37	15.857
Belanja Bantuan Sosial	0,01	400	2,94	100.000	2,73	100.000	2,54	100.000	2,35	100.000
Belanja Tidak Terduga	0,08	**2.500**	0,07	**2.500**	0,07	**2.500**	0,06	**2.500**	0,06	**2.500**
Belanja Tidak Terduga	0,08	2.500	0,07	2.500	0,07	2.500	0,06	2.500	0,06	2.500
Belanja Transfer	8,86	**263.394**	12,71	**431.587**	12,37	**452.238**	12,03	**474.534**	11,70	**498.631**
Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	8,86	263.394	12,71	431.587	12,37	452.238	12,03	474.534	11,70	498.631
Total	100,00	**2.974.417**	100,00	**3.396.845**	100,00	**3.657.166**	100,00	**3.944.492**	100,00	**4.261.940**

Sumber : Hasil Analisis

Sedangkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021-2022 berdasarkan prioritas, Prioritas dikelompokkan menjadi 2 (dua) sebagaimana disajikan dalam tabel 7.5.

Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut.

1. Prioritas I, adalah belanja langsung yang disesuaikan peruntukannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan yang terdiri dari :
   a. Belanja Operasi, berupa :
      - Belanja barang dan jasa
   b. Belanja Modal
      - Belanja modal
2. Prioritas II, adalah belanja tidak langsung yang disesuaikan peruntukannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan yang terdiri dari :
   a. Belanja operasi, berupa :
      - Belanja pegawai;
      - Belanja Bunga;
      - Belanja subsidi;
      - Belanja Hibah; dan
      - Belanja Bantuan Sosial.
   b. Belanja tidak terduga, berupa :
      - Belanja Tidak Terduga
   c. Belanja Transfer :
      - Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

7.2. Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah merupakan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Selain itu disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Rembang berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dengan APBD. Sebagaimana amanat pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan *absolute* adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan Umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip

akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasionaldengan rincian sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
   - Pendidikan;
   - Kesehatan;
   - Pekerjaan umum dan penataan ruang;
   - Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;
   - Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
   - Sosial.

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
   - Tenaga kerja;
   - Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   - Pangan;
   - Lingkungan hidup;
   - Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
   - Pemberdayaan masyarakat dan desa;
   - Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
   - Perhubungan;
   - Komunikasi dan informatika;
   - Koperasi, usaha kecil dan menengah;

- Penanaman modal;
- Kepemudaan dan olahraga;
- Statistik;
- Persandian;
- Kebudayaan;
- Perpustakaan; dan
- Kearsipan.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:

- Kelautan dan perikanan;
- Pariwisata;
- Pertanian;
- Perdagangan;
- Perindustrian;
- Transmigrasi.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, meliputi:

- Sekretariat Daerah;
- Sekretariat DPRD.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, meliputi:

- Perencanaan;
- Keuangan;
- Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- Penelitian dan Pengembangan;
- Penghubung;

- Pengelolaan Perbatasan Daerah.

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, meliputi:

- Inspektorat Daerah.

g. Unsur Kewilayahan, meliputi:

- Kecamatan.

h. Unsur Pemerintahan Umum, meliputi:

- Kesatuan Bangsa dan Politik.

Indikasi Rencana Program Prioritas Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 pada seluruh Perangkat Daerah yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 7.6

Tabel 7.6

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPD		PERANGKAT DAERAH
							2023		2024		2025		2026				
					Satuan	Awal	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
X			NON URUSAN														
X	XX		NON BIDANG URUSAN					1.511.733		1.511.733		1.511.733		1.511.733			
X	XX	01	[Program] Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					1.511.733		1.511.733		1.511.733		1.511.733			
				Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran	%	100	100	1.120.000	100	1.120.000	100	1.120.000	100	1.120.000	100,00	1.120.000	SEMUA PD
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	%	100	100	85.000	100	85.000	100	85.000	100	85.000	100,00	85.000	SEMUA PD
				Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	%	100	100	9.000	100	9.000	100	9.000	100	9.000	100,00	9.000	SEMUA PD
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel	%	100	100	2.500	100	2.500	100	2.500	100	2.500	100,00	2.500	SEMUA PD
				Persentase Layanan Keuangan, Administrasi dan Kesejahteraan DPRD	%	80	85	50.000	90	50.000	95	50.000	95	50.000	95,00	50.000	SEKRETARIAT DPRD
				Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil Kepada Daerah dan Sekretaris Daerah	%	70	75	9.000	80	9.000	85	9.000	90	9.000	90,00	9.000	SEKRETARIAT DAERAH
				Meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP) Kabupaten dan Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B	1.200	B	1.200	B	1.200	B	1.200	B	1.200	SEKRETARIAT DAERAH
				Terbentuknya inovasi pelayanan publik perangkat daerah dan tersertifikasinya pelayanan publik perangkat daerah dengan standar ISO	Laporan	3	3	750	3	750	3	750	3	750	3,00	750	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase Tersusunnya Analisa Jabatan Perangkat Daerah dalam Kab. Muba	%	100	100	750	100	750	100	750	100	750	100,00	750	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase terlayaninya Kunjungan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Laporan	275	315	6.000	358	6.000	134	6.000	136	6.000	136,00	6.000	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangandan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	100	1.300	100	1.300	100	1.300	100	1.300	100,00	1.300	SEKRETARIAT DAERAH
				Jumlah Pelayanan dan PenunjangBLUD FKTP	PKM	28	28	38.233	29	38.233	29	38.233	29	38.233	29,00	38.233	DINKES
				Jumlah Pelayanan dan PenunjangBLUD FKTL	RS	3	3	188.000	3	188.000	3	188.000	3	188.000	3,00	188.000	DINKES
															-	-	

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPD		PERANGKAT DAERAH
							2023		2024		2025		2026				
					Satuan	Awal	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**1.027.757**		**1.270.087**		**1.512.111**		**1.803.962**			
1	**01**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**					**268.950**		**281.250**		**293.550**		**315.800**			
1	**01**	**02**	**[Program] Program Pengelolaan Pendidikan**					**268.950**		**281.250**		**293.550**		**315.800**			
				Jumlah anak usia 4-6 tahun yang terlayani di PAUD	%	55,48	57,35	24.000	59,87	26.000	61,2	28.000	62,5	30.000	62,50	30.000	DIKBUD
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	100	100	17.200	100	17.500	100	17.800	100	18.100	100,00	18.100	DIKBUD
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100	100	12.700	100	12.900	100	13.000	100	13.100	100,00	13.100	DIKBUD
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	101,48	103,62	21.500	105,39	22.700	107,56	23.900	109,73	24.000	109,73	24.000	DIKBUD
				Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI	%	0,8	0,75	6.500	0,7	7.000	0,65	7.500	0,6	8.000	0,60	8.000	DIKBUD
				Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	99,6	99,7	88.800	99,8	88.900	99,9	89.000	100	89.500	100,00	89.500	DIKBUD
				Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	2.100	100	2.200	100	2.300	100	2.400	100,00	2.400	DIKBUD
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	100	100	45.200	100	51.400	100	57.500	100	26.000	100,00	26.000	DIKBUD
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	100	100	4.800	100	5.000	100	5.300	100	54.000	100,00	54.000	DIKBUD
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	88,75	91,36	7.800	94,12	8.100	97,42	8.500	100	8.800	100,00	8.800	DIKBUD
				Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs	%	1,3	1,2	4.000	1,1	4.500	1	5.000	0,8	5.500	0,80	5.500	DIKBUD
				Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	99,6	99,7	31.500	99,8	32.000	99,9	32.500	100	33.000	100,00	33.000	DIKBUD
				Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	2.100	100	2.200	100	2.300	100	2.400	100,00	2.400	DIKBUD
				Persentase sekolah yang sudah mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	55,4	60,38	750	65,72	850	70,81	950	75,2	1.000	75,20	1.000	DIKBUD
																-	
1	**02**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**258.535**		**275.550**		**282.900**		**290.450**			
1	**02**	**02**	**[Program] Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**					**253.635**		**269.250**		**275.250**		**281.500**			
				Prevalensi stunting pada balita	%	18,4	16	2.000	14	3.000	13	4.000	12	5.000	12,00	5.000	DINKES
				Angka kematian ibu	KH	70/100000	64/100000	7.500	58/100000	8.000	52/100000	10.000	46/100000	11.000	46/100000	11.000	DINKES
				Angka kematian bayi	KH	8/1000	7/1000	3.000	6/1000	4.000	5/1000	5.000	4/1000	6.000	4/1000	6.000	DINKES

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPD		PERANGKAT DAERAH
					2023		2024		2025		2026				
			Satuan	Awal	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Jumlah FKTP Akreditasi Minimal Utama	PKM	1	2	1.450	3	1.500	4	1.700	5	2.000	5,00	2.000	DINKES
		Jumlah FKRTL Akreditasi Paripurna	RS	1	1	1.000	3	1.500	3	1.700	3	2.000	3,00	2.000	DINKES
		Persentase Jaminan Kesehatan Masyarakat	%	95	95	60.000	95	70.000	95	70.000	95	70.000	95,00	70.000	DINKES
		Jumlah Opersaional Pelayanan Puskesmas	PKM	29	29	685	29	750	29	850	29	1.000	29,00	1.000	DINKES
		Jumlah Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RS	3	3	102.000	3	102.000	3	102.000	3	102.000	3,00	102.000	DINKES
		Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jaringan	Aplikasi	40	40	2.000	40	2.000	40	2.000	40	2.000	40,00	2.000	DINKES
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100,00	10.000	DINKES
		Jumlah Pelayanan Standard Minimal Kesehatan	Dokumen	12	12	12.000	12	12.000	12	12.000	12	12.000	12,00	12.000	DINKES
		Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Dokumen	10	10	500	10	750	10	1.000	10	1.250	10,00	1.250	DINKES
		Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Dokumen	2	2	500	2	750	2	1.000	2	1.250	2,00	1.250	DINKES

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPD		PERANGKAT DAERAH
									2023		2024		2025		2026				
							Satuan	Awal	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
						Persentase Alat Kesehatan yang di lakukan pemeliharaan atau kalibrasi	%	100	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100,00	1.000	DINKES
						Persentase pemenuhan sarana dan prasarana (FKTP dan FKTR)	%	100	100	15.000	100	15.000	100	15.000	100	15.000	100,00	15.000	DINKES
						Persentase ketersediaan obat essensial	%	86	90	10.000	96	10.000	98	10.000	100	10.000	100,00	10.000	DINKES
						Persentase ketersediaan BMHP	%	86	90	5.000	96	7.000	98	8.000	100	10.000	100,00	10.000	DINKES
						Persentase Alat Kesehatan Memenuhi Syarat	%	80	85	20.000	90	20.000	95	20.000	100	20.000	100,00	20.000	DINKES
																	-	-	
1	**02**	**03**		**[Program] Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**						**2.800**		**3.850**		**4.900**		**5.950**			
						Persentase Puskesmas dengan jenis Nakes sesuai Standar	%	70	80	800	85	850	87	900	90	950	90,00	950	DINKES
						Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya	%	60	65	2.000	75	3.000	80	4.000	85	5.000	85,00	5.000	DINKES
																	-	-	
1	**02**	**04**		**[Program] Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**						**250**		**250**		**250**		**250**			
						Persentase sertifikasi tempat pengelolaan makanan dan minuman	%	30	40	250	45	250	50	250	55	250	55,00	250	DINKES
																	-	-	
1	**02**	**05**		**[Program] Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**						**1.850**		**2.200**		**2.500**		**2.750**			

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPD		PERANGKAT DAERAH
									2023		2024		2025		2026				
							Satuan	Awal	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
						Persentase desa yang melaksanakan PHBS	%	20	25	400	30	500	35	600	40	650	40,00	650	DINKES
						Persentase PHBS tempat kerja	%	40	45	450	50	550	55	600	60	650	60,00	650	DINKES
						Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	161489	177.638	300	195.402	350	214.942	400	236.437	450	236.437,00	450	DINKES
						Persentase Rumah Sehat	%	77,2	83	700	85	800	90	900	95	1.000	95,00	1.000	DINKES
																	-	-	
1	**03**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**302.930**		**416.930**		**542.091**		**691.927**			
1	**03**	**02**		**[Program] Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**						**17.000**		**21.000**		**22.000**		**23.000**			
						Persentase Jaringan Irigasi, Sungai dan Penampung Air lainnya dalam Kondisi Baik	%	50	55	17.000	60	21.000	65	22.000	70	23.000	70,00	23.000	DPUPR
																	-	-	
1	**03**	**03**		**[Program] Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**						**5.000**		**15.000**		**15.000**		**15.000**			
						PersentaseRumah Tangga Yang Terlayani Air Bersih (Peripaan dan Non Perpipaan)	%	75	80	5.000	85	15.000	90	15.000	100	15.000	100,00	15.000	DINAS PERKIM
																	-	-	
1	**03**	**05**		**[Program] Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**						**15.000**		**25.000**		**25.358**		**26.625**			
						Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi yang layak (WC Individual, Komunal)	%	75	80	15.000	85	25.000	90	25.358	100	26.625	100,00	26.625	DINAS PERKIM
																	-	-	
1	**03**	**06**		**[Program] Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**						**5.000**		**10.000**		**16.220**		**13.584**			

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPD		PERANGKAT DAERAH
							2023		2024		2025		2026				
					Satuan	Awal	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Persentase Drainase dalam Kondisi Baik		%	44,9	59,26	5.000	73,55	10.000	87,83	16.220	100	13.584	100,00	13.584	DINAS PERKIM
															-	-	
1	03	07	**[Program] Program Pengembangan Permukiman**					**5.000**		**10.000**		**15.583**		**10.038**			
			Persentase sarana dan prasarana permukiman yang ditangani		%	44,9	59,26	5.000	73,5	10.000	87,8	15.583	100	10.038	100,00	10.038	DINAS PERKIM
															-	-	
1	03	08	**[Program] Program Penataan Bangunan Gedung**					**50.000**		**80.000**		**85.000**		**87.750**			
			Persentase penataan bangunan rumah dan gedung negara kabupaten yang ditangani		%	40	55	50.000	70	80.000	85	85.000	100	87.750	100,00	87.750	DINAS PERKIM
															-	-	
1	03	09	**[Program] Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya**					**2.000**		**2.000**		**2.000**		**2.000**			
			Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertangani		%	25	30	2.000	35	2.000	40	2.000	45	2.000	45,00	2.000	DINAS PERKIM
															-	-	
1	03	10	**[Program] Program Penyelenggaraan Jalan**					**200.000**		**250.000**		**357.000**		**510.000**			
			Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap		%	65,61	70	200.000	75	250.000	80	357.000	85	510.000	85,00	510.000	DPUPR
															-	-	
1	03	11	**[Program] Program Pengembangan Jasa Konstruksi**					**930**		**930**		**930**		**930**			

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPD		PERANGKAT DAERAH
									2023		2024		2025		2026				
							Satuan	Awal	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
						Persentase Tenaga Jasa Konstruksi yang terlatih dan bersertifikat	%	25	30	930	35	930	40	930	45	930	45,00	930	DPUPR
																	-	-	
1	03	12		**[Program] Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**						**3.000**		**3.000**		**3.000**		**3.000**			
						Persentase Ketaatan dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	78	79	3.000	80	3.000	82	3.000	84	3.000	84,00	3.000	DPUPR
																	-	-	
1	04			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**65.000**		**162.500**		**259.266**		**370.999**			
1	04	02		**[Program] Program Pengembangan Perumahan**						**20.000**		**40.000**		**50.000**		**100.000**			
						Persentase Rumah Korban bencana / Relokasi Yang di Bangun / Di rehab	%	4	25	20.000	50	40.000	75	50.000	100	100.000	100,00	100.000	DINAS PERKIM
																	-	-	
1	04	03		**[Program] Program Kawasan Permukiman**						**10.000**		**30.000**		**70.000**		**48.076**			
						Persentase Rumah di Kawasan Kumuh yang dibangun / diperbaiki	%	10	30	10.000	60	30.000	80	70.000	100	48.076	100,00	48.076	DINAS PERKIM
																	-	-	
1	04	04		**[Program] Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh**						**30.000**		**85.000**		**120.000**		**200.000**			
						Persentase Rumah di Luar Kawasan Kumuh yang dibangun / diperbaiki	%	5	25	30.000	50	85.000	75	120.000	100	200.000	100,00	200.000	DINAS PERKIM
																	-	-	
1	04	05		**[Program] Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**						**5.000**		**7.500**		**19.266**		**22.923**			
						Persentase PSU Yang dibangun / direhab	%	14	20	5.000	26	7.500	32	19.266	38	22.923	38,00	22.923	DINAS PERKIM
																	-	-	

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPD		PERANGKAT DAERAH
							2023		2024		2025		2026				
					Satuan	Awal	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	05			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**14.822**		**14.585**		**15.033**		**15.514**			
1	05	02		**[Program] Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum**				**4.500**		**4.500**		**4.500**		**4.500**			
				Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan Keindahan) di Kabupaten	%	100%	100%	4.500	100%	4.500	100%	4.500	100%	4.500	1,00	4.500	SATPOLPP
															-	-	
1	05	03		**[Program] Program Penanggulangan Bencana**				**8.508**		**7.999**		**8.134**		**8.255**			
				Persentase Capaian Penanggulangan Bencana (100%)	%	100	100	7.900	100	7.300	100	7.330	100	7.330	100,00	7.330	BPBD
				Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota	orang/ RT	1	1	608	1	699	1	804	1	925	1,00	925	SATPOLPP
															-	-	
1	05	04		**[Program] Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**				**1.814**		**2.086**		**2.399**		**2.759**			
				Tingkat waktu tanggap (Response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	85	85	1.814	85	2.086	85	2.399	85	2.759	85,00	2.759	SATPOLPP
															-	-	
1	06			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**117.520**		**119.272**		**119.272**		**119.272**			
1	06	02		**[Program] Program Pemberdayaan Sosial**				**7.784**		**8.563**		**8.563**		**8.563**			
				Persentase PMKS yang mendapat Layanan	%	76,15	77,00	7.784	78,00	8.563	79,00	8.563	90,00	8.563	90,00	8.563	DINSOS
															-	-	
1	06	04		**[Program] Program Rehabilitasi Sosial**				**4.642**		**5.106**		**5.106**		**5.106**			

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPD		PERANGKAT DAERAH
							2023		2024		2025		2026				
					Satuan	Awal	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Disabilitas yang mendapat layanan	%	84,12	93,26	4.642	95,76	5.106	98,25	5.106	100	5.106	100,00	5.106	DINSOS
															-	-	
1	06	05		**[Program] Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**				**104.454**		**104.899**		**104.899**		**104.899**		**104.899**	
				Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam bidang Meningkatnya Kesejahteraan Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	100	100	4.454	100	4.899	100	4.899	100	4.899	100,00	4.899	DINSOS
				Persentase Masyarakat Kurang Mampu (DTKS) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga	%	0	8	100.000	9	100.000	9,8	100.000	10,2	100.000	10,2	100.000	DINSOS
1	06	06		**[Program] Program Penanganan Bencana**				**640**		**704**		**704**		**704**			
				Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	%	100	100	640	100	704	100	704	100	704	100,00	704	DINSOS
															-	-	
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**198.568**		**196.334**		**212.710**		**206.378**			
2	07		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**					**12.100**		**12.200**		**12.275**		**12.325**			
2	07	02		**[Program] Program Perencanaan Tenaga Kerja**				**750**		**750**		**750**		**750**			
				Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah	Dokumen	n/a	1	750	1	750	1	750	1	750	1,00	750	DISNAKERTRANS
															-	-	
2	07	03		**[Program] Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**				**10.000**		**10.000**		**10.000**		**10.000**			
				Persentase Tenaga Kerja Terlatih	%	6,9	24,1	5.000	25,2	5.000	26,2	5.000	27	5.000	27,00	5.000	DISNAKERTRANS

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPD		PERANGKAT DAERAH
									2023		2024		2025		2026				
							Satuan	Awal	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja	%	n/a	50	5.000	80	5.000	90	5.000	100	5.000	100,00	5.000	DISNAKERTRANS
																	-	-	
2	07	04		[Program] Program Penempatan Tenaga Kerja						1.000		1.000		1.000		1.000			
						Persentase Pekerja yang ditempatkan	%	40,66	42,60	1.000	43,50	1.000	45,80	1.000	47,80	1.000	47,80	1.000	DISNAKERTRANS
																	-	-	
2	07	05		[Program] Program Hubungan Industrial						350		450		525		575			
						Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun	%	8,8	7,8	200	6,5	250	5,4	275	4,8	300	4,80	300	DISNAKERTRANS
						Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan	%	30	41	150	49	200	56	250	71	275	71,00	275	DISNAKERTRANS
																	-	-	
2	08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						4.800		4.700		4.700		4.700			
2	08	02		[Program] Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan						1.350		1.350		1.350		1.350			
						Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Menerapkan PUG melalui PPRG	Jumlah	24	26	700	28	700	30	700	32	700	32,00	700	DPPPA
						Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	66,5	66,7	650	66,8	650	66,9	650	67	650	67,00	650	DPPPA
																	-	-	
2	08	03		[Program] Program Perlindungan Perempuan						450		450		450		450			
						Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan	%	0,006	0,009	450	0,010	450	0,011	450	0,012	450	0,01	450	DPPPA
																	-	-	
2	08	04		[Program] Program Peningkatan Kualitas Keluarga						800		800		800		800			

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPD		PERANGKAT DAERAH
							2023		2024		2025		2026				
					Satuan	Awal	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Jumlah Kegiatan Yang Mendukung Kualitas Keluarga dan Hak Anak	Jumlah	1	1	400	1	400	1	400	1	400	1,00	400	DPPPA
				Jumlah Penghargaan Anugrah Parahita Eka Praya (APE)	Jumlah	2	2	400	3	400	3	400	3	400	3,00	400	DPPPA
															-	-	
2	**08**	**05**		**[Program] Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak**				**200**		**100**		**100**		**100**			
				Jumlah Aplikasi Yang diterapkan dalam Pengumpulan data gender dan anak	Jumlah	0	1	200	1	100	1	100	1	100	1,00	100	DPPPA
															-	-	
2	**08**	**06**		**[Program] Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)**				**1.000**		**1.000**		**1.000**		**1.000**			
				Persentase Kecamatan Layak Anak	%	53,34	66,6	500	80	500	86,66	500	93,33	500	93,33	500	DPPPA
				Jumlah Penghargaan Nasional Kabupaten Layak Anak (KLA)	Jumlah	4	4	500	4	500	4	500	4	500	4,00	500	DPPPA
															-	-	
2	**08**	**07**		**[Program] Program Perlindungan Khusus Anak**				**1.000**		**1.000**		**1.000**		**1.000**			
				Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap anak dan dampingan korban bagi anak memerlukan perlindungan khusus	%	0,012	0,013	1.000	0,014	1.000	0,015	1.000	0,016	1.000	0,02	1.000	DPPPA
															-	-	
2	**09**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**9.735**		**9.208**		**8.503**		**6.998**			
2	**09**	**02**		**[Program] Program Pengelolalaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan**				**1.650**		**1.850**		**2.050**		**2.350**			
				Persentase penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan	%	n/a	50	1.650	50	1.850	50	2.050	50	2.350	50,00	2.350	DKP

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPD		PERANGKAT DAERAH
							2023		2024		2025		2026				
					Satuan	Awal	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
															-	-	
2	**09**	**03**	**[Program] Program Peningkatan DiversifikasiDan Ketahanan Pangan Masyarakat**					**7.685**		**6.958**		**6.053**		**4.248**			
				Tingkat Konsumsi Energi PerKapita/Hari	Kkal/Kap/Hari	2.086,20	2.090	7.685	2.095	6.958	2.100	6.053	2.105	4.248	2.105,00	4.248	DKP
															-	-	
2	**09**	**04**	**[Program] Program Penanganan Kerawanan Pangan**					**200**		**200**		**200**		**200**			
				Persentase Desa Rawan Pangan (Prioritas 1,2,3)	Desa	9,58	23	200	22	200	21	200	20	200	20,00	200	DKP
															-	-	
2	**09**	**05**	**[Program] Program Pengawasan Dan Keamanan Pangan**					**200**		**200**		**200**		**200**			
				Persentase Pangan Segar Aman Dikonsumsi	%	96,7	90	200	92	200	93	200	94	200	94,00	200	DKP
															-	-	
2	**10**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**					**3.000**		**3.036**		**5.600**		**5.650**			
2	**10**	**04**	**[Program] Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**					**500**		**536**		**600**		**650**			
				Persentase Kasus Sengketa Tanah yang terselesaikan	%	27,3	45,5	500	63,6	536	81,8	600	100	650	100,00	650	DINAS PERKIM
															-	-	
2	**10**	**05**	**[Program] Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**					**2.500**		**2.500**		**5.000**		**5.000**			
				Persentase Tanah yang dibebaskan/ diganti rugi oleh PEMDA	%	60,4	83,8	2.500	88,9	2.500	94,4	5.000	100	5.000	100,00	5.000	DINAS PERKIM
															-	-	
2	**11**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**					**36.995**		**37.297**		**39.537**		**39.951**			
2	**11**	**02**	**[Program] Program Perencanaan Lingkungan Hidup**					**250**		**250**		**250**		**250**			

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPD		PERANGKAT DAERAH
									2023		2024		2025		2026				
							Satuan	Awal	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
						Persentase Penyelesaian Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	%	100	100	250	100	250	100	250	100	250	100,00	250	DLH
																	-	-	
2	**11**	**03**		**[Program] Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**						**900**		**900**		**900**		**900**			
						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dicapai	%	66,58	67,05	900	67,51	900	68,01	900	68,5	900	68,50	900	DLH
																	-	-	
2	**11**	**04**		**[Program] Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**						**9.175**		**10.000**		**11.537**		**12.455**			
						Persentase Luasan RTH yang dikelola	%	20	20	9.175	20	10.000	20	11.537	20	12.455	20,00	12.455	DLH
																	-	-	
2	**11**	**06**		**[Program] Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**						**1.451**		**852**		**1.503**		**911**			
						Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin Lingkungan dan izin PPLH	%	100	100	1.451	100	852	100	1.503	100	911	100,00	911	DLH
																	-	-	
2	**11**	**07**		**[Program] Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH**						**100**		**125**		**150**		**160**			
						Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang melaksanakan PPLH	%	100	100	100	100	125	100	150	100	160	100,00	160	DLH

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPD		PERANGKAT DAERAH
							2023		2024		2025		2026				
					Satuan	Awal	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
															-	-	
2	**11**	**08**	**[Program] Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**					**319**		**370**		**397**		**475**			
				Persentase Masyarakat yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	100	100	319	100	370	100	397	100	475	100,00	475	DLH
															-	-	
2	**11**	**09**	**[Program] Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**					**500**		**500**		**500**		**500**			
				Persentase penghargaan lingkungan hidup yang dicapai	%	100	100	500	100	500	100	500	100	500	100,00	500	DLH
															-	-	
2	**11**	**10**	**[Program] Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**					**300**		**300**		**300**		**300**			
				Persentase Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Diluar Pengadilan atau melalui Pengadilan	%	100	100	300	100	300	100	300	100	300	100,00	300	DLH
															-	-	
2	**11**	**11**	**[Program] Program Pengelolaan Persampahan**					**24.000**		**24.000**		**24.000**		**24.000**			
				PersentasePenanganan sampah	%	100	100	24.000	100	24.000	100	24.000	100	24.000	100,00	24.000	DLH
															-	-	
2	**12**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**					**4.700**		**4.700**		**4.700**		**4.700**			
2	**12**	**02**	**[Program] Program Pendaftaran Penduduk**					**1.000**		**1.000**		**1.000**		**1.000**			
				Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	%	100	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100,00	1.000	DISDUKCAPIL

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPD		PERANGKAT DAERAH
									2023		2024		2025		2026				
							Satuan	Awal	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																	-	-	
2	**12**	**03**		**[Program] Program Pencatatan Sipil**						**700**		**700**		**700**		**700**			
						Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	%	100	100	700	100	700	100	700	100	700	100,00	700	DISDUKCAPIL
																	-	-	
2	**12**	**04**		**[Program] Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**						**2.800**		**2.800**		**2.800**		**2.800**			
						Persentase capaian terlaksananya Informasi Administrasi Kependudukan yang mudah diakses oleh masyarakat	%	100	100	2.800	100	2.800	100	2.800	100	2.800	100,00	2.800	DISDUKCAPIL
																	-	-	
2	**12**	**05**		**[Program] Program Pengelolaan Profil Kependudukan**						**200**		**200**		**200**		**200**			
						Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100	200	100	200	100	200	100	200	100,00	200	DISDUKCAPIL
																	-	-	
2	**13**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**16.250**		**16.300**		**16.500**		**16.650**			
2	**13**	**02**		**[Program] Program Penataaan Desa**						**1.450**		**1.500**		**1.600**		**1.700**			
						Persentase Desa Tertata	%	30	35	1.450	38	1.500	42	1.600	45	1.700	45,00	1.700	DPMD
																	-	-	
2	**13**	**03**		**[Program] Program Peningkatan Kerjasama Desa**						**300**		**300**		**400**		**450**			
						Jumlah Desa yang melakukan kerjasama	Desa	4	6	300	6	300	8	400	10	450	10,00	450	DPMD
																	-	-	

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPD		PERANGKAT DAERAH
							2023		2024		2025		2026				
					Satuan	Awal	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	**13**	**04**	**[Program] Program Administrasi Pemerintahan Desa**					**7.500**		**7.500**		**7.500**		**7.500**			
				Persentase Desa Tertib Administrasi	%	70	75	7.500	80	7.500	80	7.500	100	7.500	100,00	7.500	DPMD
															-	-	
2	**13**	**05**	**[Program] Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**					**7.000**		**7.000**		**7.000**		**7.000**			
				Jumlah Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat yang dibina	Lembaga	15	15	2.200	15	2.200	15	2.200	15	2.200	15,00	2.200	DPMD
				Jumlah Keluarga Inklusif yang dibina	Keluarga	150	150	400	150	400	150	400	150	400	150,00	400	DPMD
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang dibina	%	100	100	4.400	100	4.400	100	4.400	100	4.400	100,00	4.400	DPMD
															-	-	
2	**14**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**					**2.335**		**2.493**		**2.679**		**2.820**			
2	**14**	**02**	**[Program] Program Pengendalian Penduduk**					**267**		**269**		**271**		**275**			
				Persentase Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)	%	2,33	2,3	267	2,27	269	2,23	271	2,19	275	2,19	275	DPPKB
															-	-	
2	**14**	**03**	**[Program] Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**					**1.768**		**1.824**		**1.908**		**1.945**			
				Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)	%	65,29	65,69	244	66,10	246	66,51	248	67,03	250	67,03	250	DPPKB
				Persentase Kebutuhan KB Yang Tidak Terpenuhi	%	7,88	7,70	261	7,51	265	7,23	270	7,16	275	7,16	275	DPPKB
				Persentase Penggerakan dan Wawasan Masyarakat Tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana	%	60	65	1.263	70	1.313	75	1.390	85	1.420	85,00	1.420	DPPKB

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPD		PERANGKAT DAERAH
							2023		2024		2025		2026				
					Satuan	Awal	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
															-	-	
2	**14**	**04**	**[Program] Program Pemberdayaaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera**					**300**		**400**		**500**		**600**			
				Persentase Jumlah Kelompok PIK-R, BKR, BKB, BKL dan UPPKS Yang Dibina	%	70	75	300	80	400	85	500	90	600	90,00	600	DPPKB
															-	-	
2	**15**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**					**16.625**		**16.800**		**16.840**		**16.905**			
2	**15**	**02**	**[Program] Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**					**13.375**		**13.550**		**13.590**		**13.655**			
				Persentase Pelayanan Penerangan Lampu Jalan	%	38	41	10.000	43	10.000	46	10.000	48	10.000	48,00	10.000	DPUPR
				Persentase sarana prasarana jalan dalam kondisi baik	%	85	90	3.375	87	3.550	97	3.590	100	3.655	100,00	3.655	DISHUB
															-	-	
2	**15**	**03**	**[Program] Program Pengelolaan Pelayaran**					**750**		**750**		**750**		**750**			
				Persentase Sarana Prasarana pelayaran dalam kondisi baik	%	80	84	750	86	750	89	750	99	750	99,00	750	DISHUB
															-	-	
2	**15**	**04**	**[Program] Program Pengelolaan Penerbangan**					**2.500**		**2.500**		**2.500**		**2.500**			
				Persentase Sarana Prasarana transportasi udara dalam kondisi baik	%	80	83	2.500	85	2.500	87	2.500	97	2.500	97,00	2.500	DISHUB
															-	-	
2	**16**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					**14.000**		**14.500**		**14.500**		**14.500**			
2	**16**	**02**	**[Program] Program Informasi Dan Komunikasi Publik**					**12.000**		**12.500**		**12.500**		**12.500**			
				Persentase informasi pemerintahan yang disampaikan kepada publik	%	100	100	12.000	100	12.500	100	12.500	100	12.500	100,00	12.500	DINKOMINFO
															-	-	

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPD		PERANGKAT DAERAH
							2023		2024		2025		2026				
					Satuan	Awal	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	16	03		**[Program] Program Aplikasi Informatika**				**2.000**		**2.000**		**2.000**		**2.000**			
				Persentase aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten	%	40	55	2.000	65	2.000	75	2.000	85	2.000	85,00	2.000	DINKOMINFO
															-	-	
2	17			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**6.800**		**7.530**		**8.260**		**8.990**			
2	17	03		**[Program] Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**				**1.300**		**1.350**		**1.400**		**1.450**			
				Jumlah koperasi aktif	Koperasi	70	80	1.300	100	1.350	120	1.400	140	1.450	140,00	1.450	DINKOP
															-	-	
2	17	04		**[Program] Program Penilaian Ksp/Usp Koperasi**				**250**		**300**		**350**		**400**			
				Jumlah Koperasi sehat	Koperasi	65	70	250	75	300	80	350	85	400	85,00	400	DINKOP
															-	-	
2	17	05		**[Program] Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**				**400**		**420**		**440**		**460**			
				Jumlah koperasi yang menjalin kerjasama dengan badan usaha lainnya	Koperasi	2	5	400	6	420	7	440	8	460	8,00	460	DINKOP
															-	-	
2	17	06		**[Program] Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi**				**450**		**460**		**470**		**480**			
				Jumlah koperasi yang mampu berdaya saing	Koperasi	2	5	450	8	460	10	470	12	480	12,00	480	DINKOP
															-	-	
2	17	07		**[Program] Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro**				**900**		**1.000**		**1.100**		**1.200**			
				Jumlah UMK yang berdaya saing	UMK	100	200	900	300	1.000	400	1.100	500	1.200	500,00	1.200	DINKOP
															-	-	

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPD		PERANGKAT DAERAH
							2023		2024		2025		2026				
					Satuan	Awal	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	**17**	**08**	**[Program] Program Pengembangan Umkm**					**3.500**		**4.000**		**4.500**		**5.000**			
				Jumlah Usaha Mikro menjadi usaha kecil	UMK	10	13	3.500	18	4.000	25	4.500	35	5.000	35,00	5.000	DINKOP
															-	-	
2	**18**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**					**4.489**		**5.554**		**6.014**		**6.414**			
2	**18**	**02**	**[Program] Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**					**380**		**335**		**890**		**945**			
				Nilai Kinerja PTSP dan Percepatan Pelayanan Berusaha Pemerintah Daerah	Nilai	87,76	88,03	380	88,10	335	88,60	890	88,90	945	88,90	945	DPMPTSP
															-	-	
2	**18**	**03**	**[Program] Program Promosi Penanaman Modal**					**859**		**1.009**		**1.009**		**1.209**			
				Minat Investasi	%	50	60	859	75	1.009	80	1.009	80	1.209	80,00	1.209	DPMPTSP
															-	-	
2	**18**	**04**	**[Program] Program Pelayanan Penanaman Modal**					**2.115**		**2.195**		**2.295**		**2.420**			
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dibidang Pelayanan Perizinan	Nilai	88,76	88,76	715	88,76	715	88,76	735	88,76	740	88,76	740	DPMPTSP
				Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di terbitkan	Jumlah	2400	2550	1.100	2550	1.150	2600	1.200	2700	1.300	2.700,00	1.300	DPMPTSP
				Persentase Penerbitan Izin dan non perizinan Sesuai SOP	%	85	85	300	87	330	87	360	90	380	90,00	380	DPMPTSP
															-	-	
2	**18**	**05**	**[Program] Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**					**990**		**1.015**		**1.070**		**1.090**			
				Nilai Realisasi investasi PMA	Rupiah	n/a	1,8 T	329	2 T	336	2,2 T	321	2,3 T	327	2,3 T	327	DPMPTSP

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPD		PERANGKAT DAERAH
							2023		2024		2025		2026				
					Satuan	Awal	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Nilai Realisasi investasi PMDN	Rupiah	n/a	1,5 T	661	1,6 T	679	1,7 T	749	1,8 T	763	1,8 T	763	DPMPTSP
															-	-	
2	18	06		**[Program] Program Pengelolaan Data Dan Sistem Penamanan Modal**				**145**		**1.000**		**750**		**750**			
				Jumlah DatadanInformasiPerizinandan NonPerizinan yang dikelola	Dokumen	1 Dok	3 Dok	145	3 Dok	1.000	3 Dok	750	3 Dok	750	3 Dok	750	DPMPTSP
															-	-	
2	19			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**52.464**		**45.541**		**55.227**		**46.400**			
2	19	02		**[Program] Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**				**2.652**		**2.698**		**2.754**		**2.818**			
				Persentase pemuda yang berwirausaha terhadap pemuda yang dibina	%	32,81	32,98	2.295	35,12	2.295	36,79	2.295	41,00	2.295	41,00	2.295	DISPOPAR
				Persentase pemuda yang bebas narkoba	%	99,93	99,94	357	99,95	403	99,96	459	99,97	523	99,97	523	DISPOPAR
															-	-	
2	19	03		**[Program] Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**				**46.440**		**39.471**		**49.101**		**40.210**			
				Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga	%	16,29	17,16	31.098	18,03	22.598	18,95	32.098	19,88	22.898	19,88	22.898	DISPOPAR
				Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk	Unit / 1000 penduduk	0,27	0,28	15.342	0,29	16.873	0,30	17.003	0,31	17.312	0,31	17.312	DISPOPAR
															-	-	
2	19	04		**[Program] Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**				**3.372**		**3.372**		**3.372**		**3.372**			
				Persentase Organisasi Kepramukaan yang terakreditasi	%	2,22	12,02	3.372	21,27	3.372	30,52	3.372	39,77	3.372	39,77	3.372	DISPOPAR
															-	-	
2	20			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**2.096**		**2.096**		**2.096**		**2.096**			

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPD		PERANGKAT DAERAH
							2023		2024		2025		2026				
					Satuan	Awal	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	20	02		**[Program] Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**				**2.096**		**2.096**		**2.096**		**2.096**			
				Persentase data Statistik Sektoral	%	100	100	975	100	975	100	975	100	975	100,00	975	DINKOMINFO
				Persentase Ketersediaan Data Statistik Perkebunan	Dokumen	100	100	800	100	800	100	800	100	800	100	800	DISBUN
				Persentase Ketersediaan Data Statistik Pertanian	Dokumen	100	100	321	100	321	100	321	100	321	100	321	DTPHP
															-	-	
2	21			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**679**		**679**		**679**		**679**			
2	21	02		**[Program] Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**				**679**		**679**		**679**		**679**			
				Persentase keamanan informasi Pemerintah Daerah	%	100	100	679	100	679	100	679	100	679	100,00	679	DINKOMINFO
															-	-	
2	22			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**7.500**		**9.700**		**10.600**		**12.600**			
2	22	02		**[Program] Program Pengembangan Kebudayaan**				**5.000**		**6.500**		**7.000**		**8.500**			
				Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	5	7	5.000	9	6.500	11	7.000	13	8.500	13,00	8.500	DIKBUD
															-	-	
2	22	04		**[Program] Program Pembinaan Sejarah**				**500**		**700**		**900**		**1.100**			
				Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	42%	48%	500	60%	700	73%	900	85%	1.100	0,85	1.100	DIKBUD
															-	-	
2	22	05		**[Program] Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya**				**1.000**		**1.000**		**1.000**		**1.000**			
				Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	unit	38	48	1.000	58	1.000	68	1.000	78	1.000	78,00	1.000	DIKBUD
															-	-	

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPD		PERANGKAT DAERAH
							2023		2024		2025		2026				
					Satuan	Awal	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	22	06	[Program] Program Pengelolaan Permuseuman					1.000		1.500		1.700		2.000			
				Jumlah kegiatan yang di laksanakan dan jumlah koleksi	unit	244	294	1.000	344	1.500	394	1.700	444	2.000	444,00	2.000	DIKBUD
															-	-	
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					3.000		3.000		3.000		3.000			
2	23	02	[Program] Program Pembinaan Perpustakaan					3.000		3.000		3.000		3.000			
				Terbinanya PerpustakaanTingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	8,5	8,7	1.500	8,9	1.500	9	1.500	9,2	1.500	9,20	1.500	DPAD
				Meningkatnya budaya gemar membaca Tingkat Daerah	%	3,58	4	1.500	6	1.500	8,5	1.500	10	1.500	10,00	1.500	DPAD
															-	-	
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					1.000		1.000		1.000		1.000			
2	24	02	[Program] Program Pengelolaan Arsip					1.000		1.000		1.000		1.000			
				Terkelolahnya Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	%	81	81	500	82	500	82	500	83	500	83,00	500	DPAD
				Terkelolahnya Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Keg.	5	5	500	5	500	6	500	6	500	6,00	500	DPAD
															-	-	
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					113.910		110.625		113.614		117.910			
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					15.172		16.662		19.643		21.396			
3	25	03	[Program] Program Pengelolaan Perikanan Tangkap					5.700		6.000		6.250		6.400			
				Produksi Perikanan Tangkap	Ton	23.024	23.484	5.700	23.954	6.000	24.434	6.250	24.675	6.400	24.675,18	6.400	DISPERIK
															-	-	
3	25	04	[Program] Program Pengelolaan Perikanan Budidaya					4.472		4.712		6.043		6.896			
				Produksi Perikanan Budidaya	Ton	25.466	25.772	4.472	26.813	4.712	27.349	6.043	27.896	6.896	27.896,46	6.896	DISPERIK
															-	-	
3	25	05	[Program] Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan					2.550		2.700		3.250		3.300			
				Tingkat Partisipasi Pokmaswas	%	52	60	2.550	69	2.700	78	3.250	86	3.300	86,00	3.300	DISPERIK
															-	-	

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPD		PERANGKAT DAERAH
							2023		2024		2025		2026				
					Satuan	Awal	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	25	06		**[Program] Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan**				**2.450**		**3.250**		**4.100**		**4.800**			
				Persentase Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan	%	5	5	2.000	7	2.700	8	3.400	10	4.100	10,00	4.100	DISPERIK
				Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Th	50,45	52,44	450	53,76	550	54,97	700	60,23	700	60,23	700	DISPERIK
															-	-	
3	26			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**6.364**		**6.958**		**7.466**		**7.979**			
3	26	02		**[Program] Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**				**1.523**		**1.475**		**1.765**		**1.922**			
				Jumlah objek wisata	Unit	62	64	1.523	67	1.475	69	1.765	72	1.922	72,00	1.922	DISPOPAR
															-	-	
3	26	03		**[Program] Program Pemasaran Pariwisata**				**3.039**		**3.175**		**3.312**		**3.546**			
				Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	34.056	36.102	3.039	39.407	3.175	42.184	3.312	43.798	3.546	43.798,00	3.546	DISPOPAR
															-	-	
3	26	05		**[Program] Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**				**1.802**		**2.308**		**2.389**		**2.511**			
				Jumlah pelaku usaha pariwisata	Orang	343	383	1.802	420	2.308	459	2.389	501	2.511	501,00	2.511	DISPOPAR
															-	-	
3	27			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**48.055**		**51.560**		**54.375**		**56.360**			
3	27	02		**[Program] Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**				**25.323**		**26.400**		**27.470**		**28.000**			
				Persentase Ketersediaan Sarana Perkebunan	%	1,4	1,55	3.300	1,7	3.400	1,85	3.470	2	4.000	2,00	4.000	DISBUN
				Persentase ketersediaan sarana pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan)	%	20	25	22.023	30	23.000	35	24.000	40	24.000	40,00	24.000	DTPHP
															-	-	
3	27	03		**[Program] Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**				**14.235**		**15.950**		**17.200**		**18.200**			

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPD		PERANGKAT DAERAH
									2023		2024		2025		2026				
							Satuan	Awal	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
						Persentase Ketersediaan Prasarana Perkebunan	%	1,4	1,55	1.535	1,7	2.250	1,85	2.500	2,1	2.500	2,10	2.500	DISBUN
						Persentase ketersediaan prasarana pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan)	%	10	15	12.700	20	13.700	25	14.700	30	15.700	30,00	15.700	DTPHP
																	-	-	
3	**27**	**04**		**[Program] Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**						**1.800**		**2.300**		**2.350**		**2.500**			
						Persentase kasus penyakit ternak yang tertangani	%	20	25	1.800	28	2.300	30	2.350	32	2.500	32,00	2.500	DTPHP
																	-	-	
3	**27**	**05**		**[Program] Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**						**1.175**		**1.410**		**1.580**		**1.655**			
						PersentaseKetersediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Bencana Perkebunan	%	1,4	1,55	835	1,7	1.070	1,85	1.240	2,1	1.315	2,10	1.315	DISBUN
						Persentase serangan Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang di tangani	%	50,00	55,00	340	60,00	340	65,00	340	70,00	340	70,00	340	DTPHP
																	-	-	
3	**27**	**06**		**[Program] Program Perizinan Usaha Pertanian**						**510**		**550**		**550**		**580**			

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPD		PERANGKAT DAERAH
							2023		2024		2025		2026				
					Satuan	Awal	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Pelaku usaha Perkebunan Mendapat Kejelasan Status Usahanya	%	2,15	2,35	510	2,55	550	2,75	550	2,95	580	2,95	580	DISBUN
															-	-	
3	27	07		**[Program] Program Penyuluhan Pertanian**				**5.012**		**4.950**		**5.225**		**5.425**			
				Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	%	7	11	4.587	14	4.350	20	4.600	22	4.700	22,00	4.700	DTPHP
				Persentase Penggunaan Teknologi yang diterapkan oleh Petani	%	2,15	2,35	425	2,55	600	2,75	625	2,95	725	2,95	725	DISBUN
															-	-	
3	30			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**38.169**		**29.070**		**28.130**		**28.275**			
3	30	02		**[Program] Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan**				**460**		**535**		**690**		**870**			
				Persentase Rekomendasi Perizinan Pelaku usahayang terbit	%	4,49	9,4	460	14,96	535	22,44	690	32,05	870	32,05	870	DISDAGPERIN
															-	-	
3	30	03		**[Program] Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**				**30.100**		**20.800**		**19.650**		**19.650**			
				Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi Baik	%	20,59	30,88	30.100	41,18	20.800	50,00	19.650	58,82	19.650	58,82	19.650	DISDAGPERIN
															-	-	
3	30	04		**[Program] Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**				**3.450**		**3.350**		**3.350**		**3.350**			
				Persentase ketersediaan kebutuhan barang pokok dan penting terhadap kebutuhan	%	NA	100	3.450	100	3.350	100	3.350	100	3.350	100,00	3.350	DISDAGPERIN
															-	-	

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPD		PERANGKAT DAERAH
							2023		2024		2025		2026				
					Satuan	Awal	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	30	05		**[Program] Program Pengembangan Ekspor**				3.050		3.225		3.225		3.225			
				Persentasi peningkatan volume penjualan produk	%	5	7,5	3.050	10	3.225	12,5	3.225	15	3.225	15,00	3.225	DISDAGPERIN
															-	-	
3	30	06		**[Program] Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen**				609		660		715		780			
				Persentase UTTP Bertanda Tera Sah	%	40,38	41,00	609	41,78	660	42,57	715	43,36	780	43,36	780	DISDAGPERIN
															-	-	
3	30	07		**[Program] Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**				500		500		500		400			
				Jumlah Kemitraan Usaha	Mitra Usaha	2	4	500	6	500	8	500	11	400	11,00	400	DISDAGPERIN
															-	-	
3	31			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				5.300		5.525		3.150		3.050			
3	31	02		**[Program] Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**				4.700		5.000		2.600		2.450			
				persentase peningkatan kapasitas produksi industri kecil menengah.	%	0,89	1	4.100	1,2	4.300	1,5	2.300	2	2.200	2,00	2.200	DISDAGPERIN
				persentase peningkatan tenaga kerja industri kecil menengah.	%	0,89	1	600	1,2	700	1,5	300	2	250	2,00	250	DISDAGPERIN
															-	-	
3	31	03		**[Program] Program Pengendalian Izin Usaha Industri**				150		175		200		250			
				Persentase izin Usaha Industri yang Terkendali	%	4,25	9,75	150	0,165	175	24,5	200	33,75	250	33,75	250	DISDAGPERIN
															-	-	
3	31	04		**[Program] Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**				450		350		350		350			

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPD		PERANGKAT DAERAH
							2023		2024		2025		2026				
					Satuan	Awal	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Jumlah Usaha Industri yang terdaftar di SIINas		Unit Usaha	17	22	450	27	350	32	350	37	350	37,00	350	DISDAGPERIN
															-	-	
3	32		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**					**850**		**850**		**850**		**850**			
3	32	03	**[Program] Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**					**750**		**750**		**750**		**750**			
				Persentase Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi	%	11	22	750	40	750	70	750	100	750	100,00	750	DISNAKERTRANS
															-	-	
3	32	04	**[Program] Program Pengembangan Transmigrasi**					**100**		**100**		**100**		**100**			
				Persentase Pembinaan Warga Transmigrasi Relokasi	%	32	49	100	61	100	79	100	100	100	100,00	100	DISNAKERTRANS
															-	-	
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**44.527**		**45.184**		**45.877**		**46.565**			
4	01		**SEKRETARIAT DAERAH**					**24.229**		**24.886**		**25.579**		**26.267**			
4	01	02	**[Program] Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**					**18.099**		**18.675**		**19.280**		**19.870**			
				Jumlah pasangan Isbat Nikah warga Kab. Musi banyuasin yang kurang mampu	pasang	300	300	1.500	300	1.500	200	1.500	200	1.500	200,00	1.500	SEKRETARIAT DAERAH
				Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Dokumen	3	3	314	3	314	3	316	3	316	3,00	316	SEKRETARIAT DAERAH
				Jumlah Batas Wilayah Daerah yang jelas dan terselesaikan	Dokumen	13	13	1.122	13	1.155	13	1.185	13	1.145	13,00	1.145	SEKRETARIAT DAERAH

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPD		PERANGKAT DAERAH
									2023		2024		2025		2026				
							Satuan	Awal	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
						Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten	Dokumen	9	9	2.575	9	2.620	9	2.657	9	2.702	9,00	2.702	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah peserta STQ dan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi	Orang	800	800	4.500	800	4.500	800	4.500	800	4.500	800,00	4.500	SEKRETARIAT DAERAH
						Terbinanya Sarjana Bina Desa	Orang	45	45	3.100	45	3.100	45	3.100	45	3.100	45,00	3.100	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan Hukum	Kasus	210	210	2.000	210	2.100	210	2.200	210	2.300	210,00	2.300	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Produk Hukum Haerah yang disusun	Dokumen	747	747	2.000	747	2.200	747	2.400	747	2.600	747,00	2.600	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri	Dokumen	14	14	988	14	1.186	14	1.422	14	1.707	14,00	1.707	SEKRETARIAT DAERAH
																	-	-	
4	**01**	**03**		**[Program] Program Perekonomian Dan Pembangunan**						**6.130**		**6.211**		**6.299**		**6.397**			
						Laporan Inflasi secara periode	Laporan	7	7	803	7	884	7	972	7	1.070	7,00	1.070	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkroniasasi, monitoring Dn evaluasi kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	2	2	949	2	949	2	949	2	949	2,00	949	SEKRETARIAT DAERAH
						Standar Satuan Harga (SSH)	Dokumen	3	3	972	3	972	3	972	3	972	3,00	972	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Laporan	18	18	965	18	965	18	965	18	965	18,00	965	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Dokumen	2.027	2.059	1.000	2.091	1.000	2.125	1.000	2.157	1.000	2.157,00	1.000	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah rekomendasi izin pertambangan	Dokumen	2	2	819	3	819	4	819	4	819	4,00	819	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah pemetaan potensi sumber daya alam	Dokumen	4	4	622	6	622	8	622	8	622	8,00	622	SEKRETARIAT DAERAH
																	-	-	
4	**02**			**SEKRETARIAT DPRD**						**20.298**		**20.298**		**20.298**		**20.298**			

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPD		PERANGKAT DAERAH
							2023		2024		2025		2026				
					Satuan	Awal	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	**02**	**02**	**[Program] Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**					**20.298**		**20.298**		**20.298**		**20.298**			
				Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	%	80	85	20.298	90	20.298	95	20.298	95	20.298	95,00	20.298	SEKRETARIAT DPRD
															-	-	
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					**467.023**		**488.254**		**511.917**		**537.263**			
5	**01**		**PERENCANAAN**					**6.175**		**6.191**		**6.303**		**6.412**			
5	**01**	**02**	**[Program] Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**					**2.775**		**2.823**		**2.909**		**2.943**			
				Rasio ketersediaan data untuk untuk perencanaan pembangunan	%	65	70	465	70	477	70	539	80	553	80,00	553	BAPPEDA
				Persentase keselarasan program RKPD dalam RPJMD	%	100	100	1.494	100	1.525	100	1.544	100	1.559	100,00	1.559	BAPPEDA
				Presentase keselarasan program kabupaten dengan program nasional	%	90	90	816	90	821	90	826	90	831	90,00	831	BAPPEDA
5	**01**	**03**	**[Program] Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**					**3.400**		**3.368**		**3.394**		**3.469**			
				Persentase program/kegiatan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan	%	90	90	3.400	90	3.368	90	3.394	90	3.469	90,00	3.469	BAPPEDA
															-	-	
5	**02**		**KEUANGAN**					**451.713**		**472.863**		**495.969**		**520.966**			
5	**02**	**02**	**[Program] Program Pengelolaan Keuangan Daerah**					**443.022**		**464.173**		**486.969**		**512.066**			
				Persentase pengelolaan bantuan keuangan sektor pendidikan	%	100	100	6.000	100	6.500	100	7.000	100	8.000	100,00	8.000	DIKBUD
				Persentase SKPD Yang Penganggarannya Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	%	100	100	2.250	100	2.250	100	2.250	100	2.250	100,00	2.250	BPKAD

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPD		PERANGKAT DAERAH
									2023		2024		2025		2026				
							Satuan	Awal	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
						Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	%	100	100	3.185	100	3.185	100	3.185	100	3.185	100,00	3.185	BPKAD
						Persentase Pencairan Dana On Skedul	%	100	100	431.587	100	452.238	100	474.534	100	498.631	100,00	498.631	BPKAD
																	-	-	
5	02	03		**[Program] Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**						**2.691**		**2.490**		**2.600**		**2.300**			
						Persentase Data Aset Yang Akurat	%	100	100	2.691	100	2.490	100	2.600	100	2.300	100,00	2.300	BPKAD
																	-	-	
5	02	04		**[Program] Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**						**6.000**		**6.200**		**6.400**		**6.600**			
						Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	12,10	13,84	6.000	14,72	6.200	15,64	6.400	16,60	6.600	16,60	6.600	BPPRD
																	-	-	
5	03			**KEPEGAWAIAN**						**7.385**		**7.450**		**7.645**		**7.885**			
5	03	02		**[Program] Program Kepegawaian Daerah**						**7.385**		**7.450**		**7.645**		**7.885**			
						Persentase Penempatan ASN sesuai dengan Standar Jabatan	%	98,12	98,15	950	98,20	950	98,25	950	98,30	1.100	98,30	1.100	BKPSDM
						Persentase JPT yang mempunyai Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan	%	84,85	85,50	4.770	86,50	4.770	87,50	4.850	90,00	4.850	90,00	4.850	BKPSDM
						Persentase Capaaian Kenerja ASN yang Memiliki Capaian Kinerja Baik	%	99,80	99,82	175	99,84	185	99,86	195	99,88	210	99,88	210	BKPSDM
						Persentase Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN	%	1,52	1,49	540	1,39	595	1,29	650	1,09	725	1,09	725	BKPSDM
						Survey Kepuasan ASN	%	87,00	87,25	950	87,50	950	87,75	1.000	88,00	1.000	88,00	1.000	BKPSDM
																	-	-	
5	04			**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**													-	-	
5	05			**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**1.750**		**1.750**		**2.000**		**2.000**			
5	05	02		**[Program] Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**						**1.750**		**1.750**		**2.000**		**2.000**			
						Presentasi hasil inovasi yang diimplementasikan	%	90	90	1.250	90	1.250	90	1.400	90	1.400	90,00	1.400	BAPPEDA

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPD		PERANGKAT DAERAH
							2023		2024		2025		2026				
					Satuan	Awal	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti	%	90	90	500	90	500	90	600	90	600	90,00	600	BAPPEDA
															-	-	
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					6.587		6.690		6.690		6.690			
6	01		INSPEKTORAT DAERAH					6.587		6.690		6.690		6.690			
6	01	02	[Program] Program Penyelenggaraan Pengawasan					5.505		5.545		5.545		5.545			
				Persentase PD yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB	%	22,91	67	456	70	475	75	475	80	475	80,00	475	INSPEKTORAT
				Persentase PD Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik (Zona Hijau)	%	33,33	40	1.215	50	1.220	60	1.220	70	1.220	70,00	1.220	INSPEKTORAT
				Opini terhadap laporan keuangan pemda	Predikat	WTP	WTP	2.099	WTP	2.100	WTP	2.100	WTP	2.100	WTP	2.100	INSPEKTORAT
				Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	%	78	80	400	83	400	85	400	90	400	90,00	400	INSPEKTORAT
				Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	%	84	85	1.334	87	1.350	89	1.350	90	1.350	90,00	1.350	INSPEKTORAT
															-	-	
6	01	03	[Program] Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi					1.082		1.145		1.145		1.145			
				Nilai Kapabilitas APIP	Level	2	3	312	3	320	3	320	3	320	3,00	320	INSPEKTORAT
				Nilai Maturitas SPIP	Skor	3,06	3,15	320	3,2	325	3,25	325	3,3	325	3,30	325	INSPEKTORAT
				Nilai Reformasi dan Birokrasi Pemda	Skor	CC	CC	450	B	500	B	500	BB	500	BB	500	INSPEKTORAT
															-	-	
7			UNSUR KEWILAYAHAN					20.334		21.775		23.270		24.775			

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPD		PERANGKAT DAERAH
							2023		2024		2025		2026				
					Satuan	Awal	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7	**01**		**KECAMATAN**					**20.334**		**21.775**		**23.270**		**24.775**			
7	**01**	**02**	**[Program] Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik**					**9.937**		**10.440**		**10.961**		**11.494**			
				Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100	100	9.937	100	10.440	100	10.961	100	11.494	100,00	11.494	SEMUA PD KECAMATAN
															-	-	
7	**01**	**03**	**[Program] Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**					**7.800**		**8.450**		**9.100**		**9.750**			
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%	100	100	7.800	100	8.450	100	9.100	100	9.750	100,00	9.750	SEMUA PD KECAMATAN
															-	-	
7	**01**	**04**	**[Program] Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**					**750**		**825**		**900**		**975**			
				Persentase Penegakan Perda	%	100	100	750	100	825	100	900	100	975	100,00	975	SEMUA PD KECAMATAN
															-	-	
7	**01**	**05**	**[Program] Program Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum**					**885**		**1.003**		**1.100**		**1.200**			
				Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan	%	100	100	885	100	1.003	100	1.100	100	1.200	100,00	1.200	SEMUA PD KECAMATAN
															-	-	
7	**01**	**06**	**[Program] Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**					**962**		**1.057**		**1.209**		**1.355**			
				Persentase jumlah Desa yang dibina	%	100	100	962	100	1.057	100	1.209	100	1.355	100,00	1.355	SEMUA PD KECAMATAN
															-	-	
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**					**6.406**		**6.484**		**6.570**		**6.664**			
8	**01**		**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**					**6.406**		**6.484**		**6.570**		**6.664**			
8	**01**	**02**	**[Program] Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Bangsa**					**850**		**850**		**850**		**850**			

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPD		PERANGKAT DAERAH
									2023		2024		2025		2026				
							Satuan	Awal	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
						Persentase kecamatan yang mendapatkan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa	%	n/a	26	850	52	850	78	850	100	850	100,00	850	KESBANGPOL
																	-	-	
8	**01**	**03**		**[Program] Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**						**4.126**		**4.126**		**4.126**		**4.126**			
						Tersedianya dokumen laporan analisa stabilitas politik	Dokumen	n/a	8	4.126	8	4.126	8	4.126	8	4.126	8,00	4.126	KESBANGPOL
																	-	-	
8	**01**	**04**		**[Program] Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**						**325**		**325**		**325**		**325**			
						Persentase Organisasi Masyarakat yang dibina	%	n/a	100	325	100	325	100	325	100	325	100,00	325	KESBANGPOL
																	-	-	
8	**01**	**05**		**[Program] Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya**						**325**		**325**		**325**		**325**			
						Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	n/a	100	325	100	325	100	325	100	325	100,00	325	KESBANGPOL
																	-	-	
8	**01**	**06**		**[Program] Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**						**780**		**858**		**944**		**1.038**			
						Persentase capaian rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial	%	n/a	100	780	100	858	100	944	100	1.038	100,00	1.038	KESBANGPOL
						GRAND TOTAL				**3.396.845**		**3.657.166**		**3.944.492**		**4.261.940**			

BAB 8

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja adalah Keluaran hasil dari kegiatan / program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang di emban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional selain itu kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknnya tujuan organisasi. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri atas unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diukur melalui penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang dijabarkan dalam dua indikator kinerja, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan dan Indikator Kinerja Kunci

(IKK) adalah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

8.1. INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN

Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Target Indikator Makro Pembangunan sebagaimana tabel 8.1. berikut.

Tabel 8.1
Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2023 - 2026

NO.	INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	Kondisi Awal	TARGET (TAHUN)			
			2023	2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,64	69,17	69,71	70,25	70,78
2	Angka Kemiskinan	15,55	15,05	14,35	13,85	13,35
3	Angka Pengangguran	3,9	3,8	3,65	3,5	3,35
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,50-4,00	3,75-4,25	4,00-4,50	4,25-4,75	4,35-5,00
5	Pengeluaran Perkapita	10,371	10,602	10,883	11,064	11,295
6	Ketimpangan Pendapatan	0,316	0,306	0,296	0,286	0,276

Hasil Proyeksi. Diolah

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang menggambarkan sejauh mana suatu negara (wilayah) telah menggunakan sumber daya penduduknya untuk meningkatkan mutu kehidupan warga negara (wilayah) tersebut. Penyusunan IPM secara khusus mengukur capaian pembangunan manusia dengan 4 (empat)

variabel pokok yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata lama sekolah (RLS) dan Pengeluaran Perkapita yang telah disesuaikan. Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 sebagaimana ditampilakan pada tabel 8.2. berikut.

Tabel 8.2
Target IPM Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2023 - 2026

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)
1.	2023	69,17
2.	2024	69,71
3.	2025	70,25
4.	2026	70,78

2. Angka Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata – rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan merupakan persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk total disuatu daerah.

Permasalahan yang selama ini terjadi pada penduduk miskin dan dibawah garis kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin pada umumnya adalah tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal ataupun ketrampilan. Target Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 sebagaimana ditampilkan pada tabel 8.3. berikut.

Tabel 8.3
Target Angka Kemiskinan
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026

No	Tahun	Angka Kemiskinan
1.	2023	15,05
2.	2024	14,35
3.	2025	13,85
4.	2026	13,35

3. Pengangguran

Penganguran terbuka adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, atau tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, atau tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan, tetapi belum

mulai berkerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Indikator ini berfungsi sebagai acuan pemerintah daerah untuk pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, trend indikator ini akan menunjukan keberhasilan / kegagalan program dan kegiatan ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 sebagaimana ditampilakan pada tabel 8.4. berikut.

Tabel 8.4
Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026

No	Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
1.	2023	3,8
2.	2024	3,65
3.	2025	3,5
4.	2026	3,35

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Suatu wilayah mengalami pertumbuhan secara ekonomi bila terjadi peningkatan kapasitas produksi dari semua kegiatan ekonomi didalam wilayahnya secara terukur. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonom yang berorientasi pada

penciptaan kesempatan kerja dan berpihak pada penurunan angka kemiskinan. Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 sebagaimana ditampilakan pada tabel 8.5. berikut.

Tabel 8.5
Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2023 - 2026

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
1.	2023	3,75 – 4,25
2.	2024	4,00 – 4,50
3.	2025	4,25 – 4,75
4.	2026	4,35 – 5,00

5. Pengeluaran Perkapita

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah stsndar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan dietentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli. Besaran nilai tingkat daya beli (purchasing power parity/PPP) menunjukkan tingkat kemampuan daya beli penduduk. Semakin besar indeks daya beli

mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk semakin membaik. Target Pengeluaran Perkapita Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 sebagaimana ditampilakan pada tabel 8.6. berikut.

Tabel 8.6
Target Pengeluaran Perkapita Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2023 - 2026

No	Tahun	Pengeluaran perkapita
1.	2023	10,602
2.	2024	10,883
3.	2025	11,064
4.	2026	11,295

6. Ketimpangan Pendapatan

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga harus diikuti dengan pemerataan pembangunan. Pembangunan yang hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menimbulkan dua masalah krusial yakni kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Kesenjangan ekonomi yang dimaksud adalah adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Berawal dari distribusi pendapatan yang tidak merata yang kemudian memicu terjadinya ketimpangan

pendapatan sebagai dampak dari perubahan tingkat kesejahteraan yang berbeda antar kelompok masyarakat.

Indeks gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu parameter untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk. Indeks Gini menunjukan pemerataan yang sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi indeks gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Target Indeks Gini Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 sebagaimana ditampilakan pada tabel 8.7. berikut.

Tabel 8.7
Target Indeks Gini Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2023 - 2026

No	Tahun	Indeks Gini
1.	2023	0,306
2.	2024	0,296
3.	2025	0,286
4.	2026	0,276

8.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal, dalam memenuhi target – target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward* dan *punishment*. Sistem pengukuran kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, membandingkan secara sistematis dan bekesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan dengan realisasi pencapaiannya.

Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri (*self-assement*) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menusun rencana, pelaksanaan dan pengukuran termasuk menentukan ukutannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara penyusun rencana, pelaksanaan dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara penyusun rencana, pelaksanaan dan pengukuran dilakukan tidak oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan penentuan ukurannya ditentukan oleh pihak lain.

Indikator Kinerja Utama *(Key Performance Indicator)* adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Berikut Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dan memperhatikan peluang serta tantangan selama kurun waktu empat tahun mendatang sampai dengan tahun 2026, sebagaimana ditampilkan pada tabel 8.8 berikut ini:

Tabel 8.8
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2023 - 2026

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET (TAHUN)			
		2023	2024	2025	2026
1	Angka Kemiskinan	15,05	14,35	13,85	13,35
2	Indeks Gini	0,306	0,296	0,286	0,276
3	Tingkat Penganguran Tebuka (TPT)	3,8	3,65	3,5	3,35
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,75-4,25	4,00-4,50	4,25-4,75	4,35-5,00
5	Indeks Pelayanan Infrastruktur	85,44	91,15	92,17	93,37
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,17	69,71	70,25	70,78
7	Indeks Reformasi Birokrasi	C	CC	CC	B
8	Pengeluaran Per Kapita	10.602	10.883	11.064	11.295

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET (TAHUN)			
		2023	2024	2025	2026
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,71	70,03	70,38	70,76
10	Laju Pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHK)	3,38	3,69	4,01	4,34
11	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	1,76	1,94	2,12	2,31
12	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (ADHK)	0,70	1,05	1,40	1,75
13	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHK)	0,79	1,12	1,47	1,82
14	Nilai Tukar Petani	93,00	95,00	97,00	100,00
15	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	68,62%	73,14%	76,52%	80,10%
16	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Air Bersih	95,20%	100%	100%	100%
17	Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi (Air Limbah) yang Layak	92,50%	100%	100%	100%
18	Persentase Kawasan Kumuh Tertangani	78,97%	58,17%	37,50%	0%
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,51%	66,01%	66,29%	66,72%
20	Harapan lama Sekolah (HLS)	12,60	12,76	12,91	13,07
21	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,74	7,8	7,86	7,91
22	Usia Harapan Hidup (UHH)	69,08	69,2	69,33	69,45
23	Nilai Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	BB	BB	BB	BB
24	Opini BPK RI terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	92	92	92
26	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,1025	3,235	3,3675	3,5

8.3. INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik yang secara kuantitatif dan atau kualitatif menjadi dampak yang dapat menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Target capaian Indikator Kinerja Daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah disajikan sebagaimana tabel 8.9. berikut.

Tabel 8.9
Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2023	2024	2025	2026	
	2022	Target	Target	Target	Target	Target
NON URUSAN						
Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100	100	100	100	100	100
Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel	100	100	100	100	100	100
Persentase Layanan Keuangan, Administrasi dan Kesejahteraan DPRD	80	85	90	95	95	95
Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil Kepada Daerah dan Sekretaris Daerah	70	75	80	85	90	90
Meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten dan Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	B	B
Terbentuknya inovasi pelayanan publik perangkat daerah dan tersertifikasinya pelayanan publik perangkat daerah dengan standar ISO	3	3	3	3	3	3
Persentase Tersusunnya Analisa Jabatan Perangkat Daerah dalam Kab. Muba	100	100	100	100	100	100
Persentase terlayaninya Kunjungan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	275	315	358	134	136	136

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2023	2024	2025	2026	
	2022	Target	Target	Target	Target	Target
Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	100	100	100	100	100
Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP	28	28	29	29	29	29
Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL	3	3	3	3	3	3
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
Jumlah anak usia 4-6 tahun yang terlayani di PAUD	55,48	57,35	59,87	61,2	62,5	62,5
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	100	100	100	100	100	100
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100	100	100	100	100	100
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	101,48	103,62	105,39	107,56	109,73	109,73
Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI	0,8	0,75	0,7	0,65	0,6	0,6
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99,6	99,7	99,8	99,9	100	100
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100	100
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	100	100	100	100	100	100
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	100	100	100	100	100	100
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	88,75	91,36	94,12	97,42	100	100
Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs	1,3	1,2	1,1	1	0,8	0,8

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2023	2024	2025	2026	
	2022	Target	Target	Target	Target	Target
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99,6	99,7	99,8	99,9	100	100
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100	100
Persentase sekolah yang sudah mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	55,4	60,38	65,72	70,81	75,2	75,2
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
Prevalensi stunting pada balita	18,4	16	14	13	12	12
Angka kematian ibu	70/100000	64/100000	58/100000	52/100000	46/100000	46/100000
Angka kematian bayi	8/1000	7/1000	6/1000	5/1000	4/1000	4/1000
Jumlah FKTP Akreditasi Minimal Utama	1	2	3	4	5	5
Jumlah FKRTL Akreditasi Paripurna	1	1	3	3	3	3
Persentase Jaminan Kesehatan Masyarakat	95	95	95	95	95	95
Jumlah Opersional Pelayanan Puskesmas	29	29	29	29	29	29
Jumlah Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3	3	3	3	3	3
Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jaringan	40	40	40	40	40	40
Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau berpotensi bencana	100	100	100	100	100	100
Jumlah Pelayanan Standard Minimal Kesehatan	12	12	12	12	12	12
Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	10	10	10	10	10	10
Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	2	2	2	2	2	2
Persentase Alat Kesehatan yang di lakukan pemeliharaan atau kalibrasi	100	100	100	100	100	100

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2023	2024	2025	2026	
	2022	Target	Target	Target	Target	Target
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana (FKTP dan FKTR)	100	100	100	100	100	100
Persentase Puskesmas dengan jenis Nakes sesuai Standar	70	80	85	87	90	90
Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya	60	65	75	80	85	85
Persentase ketersediaan obat essensial	86	90	96	98	100	100
Persentase ketersediaan BMHP	86	90	96	98	100	100
Persentase Alat Kesehatan Memenuhi Syarat	80	85	90	95	100	100
Persentase sertifikasi tempat pengelolaan makanan dan minuman	30	40	45	50	55	55
Persentase desa yang melaksanakan PHBS	20	25	30	35	40	40
Persentase PHBS tempat kerja	40	45	50	55	60	60
Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	161489	177.638	195.402	214.942	236.437	236.437
Persentase Rumah Sehat	77,2	83	85	90	95	95
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
Persentase Jaringan Irigasi, Sungai dan Penampung Air lainnya dalam Kondisi Baik	50	55	60	65	70	70
Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Air Bersih (Peripaan dan Non Perpipaan)	75	80	85	90	100	100
Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi yang layak (WC Individual, Komunal)	75	80	85	90	100	100
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	44,9	59,26	73,55	87,83	100	100
Persentase sarana dan prasarana permukiman yang ditangani	44,9	59,26	73,5	87,8	100	100

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2023	2024	2025	2026	
	2022	Target	Target	Target	Target	Target
Persentase penataan bangunan rumah dan gedung negara kabupaten yang ditangani	40	55	70	85	100	100
Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertangani	25	30	35	40	45	45
Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap	65,61	70	75	80	85	85
Persentase Tenaga Jasa Konstruksi yang terlatih dan bersertifikat	25	30	35	40	45	45
Persentase Ketaatan dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	78	79	80	82	84	84
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Persentase Rumah Korban bencana / Relokasi Yang di Bangun / Di rehab	4	25	50	75	100	100
Persentase Rumah di Kawasan Kumuh yang dibangun / diperbaiki	10	30	60	80	100	100
Persentase Rumah di Luar Kawasan Kumuh yang dibangun / diperbaiki	5	25	50	75	100	100
Persentase PSU Yang dibangun / direhab	14	20	26	32	38	38
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan Keindahan) di Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Capaian Penanggulangan Bencana (100%)	100	100	100	100	100	100
Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota	1	1	1	1	1	1

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2023	2024	2025	2026	
	2022	Target	Target	Target	Target	Target
Tingkat waktu tanggap (Response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	85	85	85	85	85	85
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
Persentase PMKS yang mendapat Layanan	76,15	77,00	78,00	79,00	90,00	90,00
Persentase Disabilitas yang mendapat layanan	84,12	93,26	95,76	98,25	100	100
Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam bidang Meningkatnya Kesejahteraan Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100	100	100	100	100	100
Persentase Masyarakat Kurang Mampu (DTKS) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga	0	8	9	9,8	10,2	100
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah	n/a	1	1	1	1	1
Persentase Tenaga Kerja Terlatih	6,9	24,1	25,2	26,2	27	27

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2023	2024	2025	2026	
	2022	Target	Target	Target	Target	Target
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja	n/a	50	80	90	100	100
Persentase Pekerja yang ditempatkan	40,66	42,60	43,50	45,80	47,80	47,80
Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun	8,8	7,8	6,5	5,4	4,8	4,8
Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan	30	41	49	56	71	71
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Menerapkan PUG melalui PPRG	24	26	28	30	32	32
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,5	66,7	66,8	66,9	67	67
Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan	0,006	0,009	0,010	0,011	0,012	0,012
Jumlah Kegiatan Yang Mendukung Kualitas Keluarga dan Hak Anak	1	1	1	1	1	1
Jumlah Penghargaan Anugrah Parahita Eka Praya (APE)	2	2	3	3	3	3
Jumlah Aplikasi Yang diterapkan dalam Pengumpulan data gender dan anak	0	1	1	1	1	1
Persentase Kecamatan Layak Anak	53,34	66,6	80	86,66	93,33	93,33
Jumlah Penghargaan Nasional Kabupaten Layak Anak (KLA)	4	4	4	4	4	4
Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap anak dan dampingan korban bagi anak memerlukan perlindungan khusus	0,012	0,013	0,014	0,015	0,016	0,016
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2023	2024	2025	2026	
	2022	Target	Target	Target	Target	Target
Persentase penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan	n/a	50	50	50	50	50
Tingkat Konsumsi Energi PerKapita/Hari	2.086,20	2.090	2.095	2.100	2.105	2.105
Persentase Desa Rawan Pangan (Prioritas 1,2,3)	9,58	23	22	21	20	20
Persentase Pangan Segar Aman Dikonsumsi	96,7	90	92	93	94	94
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						
Persentase Kasus Sengketa Tanah yang terselesaikan	27,3	45,5	63,6	81,8	100	100
Persentase Tanah yang dibebaskan/ diganti rugi oleh PEMDA	60,4	83,8	88,9	94,4	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
Persentase Penyelesaian Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	100	100	100	100	100	100
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dicapai	66,58	67,05	67,51	68,01	68,5	68,5
Persentase Luasan RTH yang dikelola	20	20	20	20	20	20
Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin Lingkungan dan izin PPLH	100	100	100	100	100	100
Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang melaksanakan PPLH	100	100	100	100	100	100
Persentase Masyarakat yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100	100	100	100	100	100

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2023	2024	2025	2026	
	2022	Target	Target	Target	Target	Target
Persentase penghargaan lingkungan hidup yang dicapai	100	100	100	100	100	100
Persentase Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Diluar Pengadilan atau melalui Pengadilan	100	100	100	100	100	100
Persentase Penanganan sampah	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100	100	100	100	100	100
Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	100	100	100	100	100	100
Persentase capaian terlaksananya Informasi Administrasi Kependudukan yang mudah diakses oleh masyarakat	100	100	100	100	100	100
Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
Persentase Desa Tertata	30	35	38	42	45	45
Jumlah Desa yang melakukan kerjasama	4	6	6	8	10	10
Persentase Desa Tertib Administrasi	70	75	80	80	100	100
Jumlah Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat yang dibina	15	15	15	15	15	15
Jumlah Keluarga Inklusif yang dibina	150	150	150	150	150	150
Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang dibina	100	100	100	100	100	100

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2023	2024	2025	2026	
	2022	Target	Target	Target	Target	Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
Persentase Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)	2,33	2,3	2,27	2,23	2,19	2,19
Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)	65,29	65,69	66,10	66,51	67,03	67,03
Persentase Kebutuhan KB Yang Tidak Terpenuhi	7,88	7,70	7,51	7,23	7,16	7,16
Persentase Penggerakan dan Wawasan Masyarakat Tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana	60	65	70	75	85	85
Persentase Jumlah Kelompok PIK-R, BKR, BKB, BKL dan UPPKS Yang Dibina	70	75	80	85	90	90
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Persentase Pelayanan Penerangan Lampu Jalan	38	41	43	46	48	48
Persentase sarana prasarana jalan dalam kondisi baik	85	90	87	97	100	100
Persentase Sarana Prasarana pelayaran dalam kondisi baik	80	84	86	89	99	99
Persentase Sarana Prasarana transportasi udara dalam kondisi baik	80	83	85	87	97	97
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
Persentase informasi pemerintahan yang disampaikan kepada publik	100	100	100	100	100	100

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2023	2024	2025	2026	
	2022	Target	Target	Target	Target	Target
Persentase aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten	40	55	65	75	85	85
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
Jumlah koperasi aktif	70	80	100	120	140	140
Jumlah Koperasi sehat	65	70	75	80	85	85
Jumlah koperasi yang menjalin kerjasama dengan badan usaha lainnya	2	5	6	7	8	8
Jumlah koperasi yang mampu berdaya saing	2	5	8	10	12	12
Jumlah UMK yang berdaya saing	100	200	300	400	500	500
Jumlah Usaha Mikro menjadi usaha kecil	10	13	18	25	35	35
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
Nilai Kinerja PTSP dan Percepatan Pelayanan Berusaha Pemerintah Daerah	87,76	88,03	88,10	88,60	88,90	88,90
Minat Investasi	50	60	75	80	80	80
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dibidang Pelayanan Perizinan	88,76	88,76	88,76	88,76	88,76	88,76
Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di terbitkan	2400	2550	2550	2600	2700	2700
Persentase Penerbitan Izin dan non perizinan Sesuai SOP	85	85	87	87	90	90
Nilai Realisasi investasi PMA	n/a	1,8 T	2 T	2,2 T	2,3 T	2,3 T
Nilai Realisasi investasi PMDN	n/a	1,5 T	1,6 T	1,7 T	1,8 T	1,8 T
Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola	1 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2023	2024	2025	2026	
	2022	Target	Target	Target	Target	Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Persentase pemuda yang berwirausaha terhadap pemuda yang dibina	32,81	32,98	35,12	36,79	41,00	41,00
Persentase pemuda yang bebas narkoba	99,93	99,94	99,95	99,96	99,97	99,97
Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga	16,29	17,16	18,03	18,95	19,88	19,88
Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,31
Persentase Organisasi Kepramukaan yang terakreditasi	2,22	12,02	21,27	30,52	39,77	39,77
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
Persentase data Statistik Sektoral	100	100	100	100	100	100
Persentase Ketersediaan Data Statistik Perkebunan	100	100	100	100	100	100
Persentase Ketersediaan Data Statistik Pertanian	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
Persentase keamanan informasi Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	5	7	9	11	13	13
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	42%	48%	60%	73%	85%	85%

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2023	2024	2025	2026	
	2022	Target	Target	Target	Target	Target
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	38	48	58	68	78	78
Jumlah kegiatan yang di laksanakan dan jumlah koleksi	244	294	344	394	444	494
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
Terbinanya Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8,5	8,7	8,9	9	9,2	9,2
Meningkatnya budaya gemar membaca Tingkat Daerah	3,58	4	6	8,5	10	10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
Terkelolahnya Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	81	81	82	82	83	83
Terkelolahnya Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	5	5	5	6	6	6
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Produksi Perikanan Tangkap	23.024	23.484	23.954	24.434	24.675	24.675
Produksi Perikanan Budidaya	25.466	25.772	26.813	27.349	27.896	27.896
Tingkat Partisipasi Pokmaswas	52	60	69	78	86	86
Persentase Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan	5	5	7	8	10	10

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2023	2024	2025	2026	
	2022	Target	Target	Target	Target	Target
Konsumsi Ikan	50,45	52,44	53,76	54,97	60,23	60,23
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Jumlah objek wisata	62	64	67	69	72	72
Jumlah kunjungan wisatawan	34.056	36.102	39.407	42.184	43.798	43.798
Jumlah pelaku usaha pariwisata	343	383	420	459	501	501
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
Persentase Ketersediaan Sarana Perkebunan	1,4	1,55	1,7	1,85	2	2
Persentase ketersediaan sarana pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan)	20	25	30	35	40	40
Persentase Ketersediaan Prasarana Perkebunan	1,4	1,55	1,7	1,85	2,1	2,1
Persentase ketersediaan prasarana pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan)	10	15	20	25	30	30
Persentase kasus penyakit ternak yang tertangani	20	25	28	30	32	32
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Bencana Perkebunan	1,4	1,55	1,7	1,85	2,1	2,1
Persentase serangan Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang di tangani	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00
Persentase Pelaku usaha Perkebunan Mendapat Kejelasan Status Usahanya	2,15	2,35	2,55	2,75	2,95	2,95

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2023	2024	2025	2026	
	2022	Target	Target	Target	Target	Target
Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	7	11	14	20	22	22
Persentase Penggunaan Teknologi yang diterapkan oleh Petani	2,15	2,35	2,55	2,75	2,95	2,95
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
Persentase Rekomendasi Perizinan Pelaku usaha yang terbit	4,49	9,4	14,96	22,44	32,05	32,05
Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi Baik	20,59	30,88	41,18	50,00	58,82	58,82
Persentase ketersediaan kebutuhan barang pokok dan penting terhadap kebutuhan	NA	100	100	100	100	100
Persentasi peningkatan volume penjualan produk	5	7,5	10	12,5	15	15
Persentase UTTP Bertanda Tera Sah	40,38	41,00	41,78	42,57	43,36	43,36
Jumlah Kemitraan Usaha	2	4	6	8	11	11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
persentase peningkatan kapasitas produksi industri kecil menengah.	0,89	1	1,2	1,5	2	2
persentase peningkatan tenaga kerja industri kecil menengah.	0,89	1	1,2	1,5	2	2
Persentase izin Usaha Industri yang Terkendali	4,25	9,75	0,165	24,5	33,75	33,75
Jumlah Usaha Industri yang terdaftar di SIINas	17	22	27	32	37	37
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2023	2024	2025	2026	
	2022	Target	Target	Target	Target	Target
Persentase Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi	11	22	40	70	100	100
Persentase Pembinaan Warga Transmigrasi Relokasi	32	49	61	79	100	100
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
SEKRETARIAT DAERAH						
Jumlah pasangan Isbat Nikah warga Kab. Musi banyuasin yang kurang mampu	300	300	300	200	200	200
Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	3	3	3	3	3	3
Jumlah Batas Wilayah Daerah yang jelas dan terselesaikan	13	13	13	13	13	13
Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten	9	9	9	9	9	9
Jumlah peserta STQ dan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi	800	800	800	800	800	800
Terbinanya Sarjana Bina Desa	45	45	45	45	45	45
Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan Hukum	210	210	210	210	210	210
Jumlah Produk Hukum Haerah yang disusun	747	747	747	747	747	747
Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri	14	14	14	14	14	14
Laporan Inflasi secara periode	7	7	7	7	7	7
Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkroniasasi, monitoring Dn evaluasi kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2	2	2	2	2	2

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2023	2024	2025	2026	
	2022	Target	Target	Target	Target	Target
Standar Satuan Harga (SSH)	3	3	3	3	3	3
Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	18	18	18	18	18	18
Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	2.027	2.059	2.091	2.125	2.157	2.157
Jumlah rekomendasi izin pertambangan	2	2	3	4	4	4
Jumlah pemetaan potensi sumber daya alam	4	4	6	8	8	8
SEKRETARIAT DPRD						
Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	80	85	90	95	95	95
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
PERENCANAAN						
Rasio ketersediaan data untuk untuk perencanaan pembangunan	65	70	70	70	80	80
Persentase keselarasan program RKPD dalam RPJMD	100	100	100	100	100	100
Presentase keselarasan program kabupaten dengan program nasional	90	90	90	90	90	90
Persentase program/kegiatan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan	90	90	90	90	90	90
KEUANGAN						

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2023	2024	2025	2026	
	2022	Target	Target	Target	Target	Target
Persentase pengelolaan bantuan keuangan sektor pendidikan	100	100	100	100	100	100
Persentase SKPD Yang Penganggarannya Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	100	100	100	100	100	100
Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100	100	100	100	100	100
Persentase Pencairan Dana On Skedul	100	100	100	100	100	100
Persentase Data Aset Yang Akurat	100	100	100	100	100	100
Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12,10	13,84	14,72	15,64	16,60	16,60
KEPEGAWAIAN						
Persentase Penempatan ASN sesuai dengan Standar Jabatan	98,12	98,15	98,20	98,25	98,30	98,30
Persentase JPT yang mempunyai Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan	84,85	85,50	86,50	87,50	90,00	90,00
Persentase Capaaian Kenerja ASN yang Memiliki Capaian Kinerja Baik	99,80	99,82	99,84	99,86	99,88	99,88
Persentase Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN	1,52	1,49	1,39	1,29	1,09	1,09
Survey Kepuasan ASN	87,00	87,25	87,50	87,75	88,00	88,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Presentasi hasil inovasi yang diimplementasikan	90	90	90	90	90	90

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2023	2024	2025	2026	
	2022	Target	Target	Target	Target	Target
Persentase rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti	90	90	90	90	90	90
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
INSPEKTORAT DAERAH						
Persentase PD yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB	22,91	67	70	75	80	80
Persentase PD Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik (Zona Hijau)	33,33	40	50	60	70	70
Opini terhadap laporan keuangan pemda	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	78	80	83	85	90	90
Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	84	85	87	89	90	90
Nilai Kapabilitas APIP	2	3	3	3	3	3
Nilai Maturitas SPIP	3,06	3,15	3,2	3,25	3,3	3,3
Nilai Reformasi dan Birokrasi Pemda	CC	CC	B	B	BB	BB
UNSUR KEWILAYAHAN						
KECAMATAN						
Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	100	100	100	100	100	100
Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100	100	100	100	100	100
Persentase Penegakan Perda	100	100	100	100	100	100
Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan	100	100	100	100	100	100

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah				Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
				2022	Target	Target	Target	Target	Target
			Persentase jumlah Desa yang dibina	100	100	100	100	100	100
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
			Persentase kecamatan yang mendapatkan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa	n/a	26	52	78	100	100
			Tersedianya dokumen laporan analisa stabilitas politik	n/a	8	8	8	8	8
			Persentase Organisasi Masyarakat yang dibina	n/a	100	100	100	100	100
			Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	n/a	100	100	100	100	100
			Persentase capaian rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial	n/a	100	100	100	100	100

BAB 9
PENUTUP



BAB IX
PENUTUP

Berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati Musi Banyuasin Periode 2017-2022 pada tahun 2022 menandai juga berakhirnya RPJMD Periode 2017-2022 pada kurun waktu yang sama, RPJMD yang baru akan dibuat setelah Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Tahun 2024. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin perlu disusun suatu dokumen sebagai pedoman Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 yang berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025, penyelesaian target kinerja RPJMD 2017-2022 yang belum tercapai dan menjaga keselarasan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin dengan Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan serta mengantisipasi perkembangan pembangunan yang akan mempengaruhi kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik yang berisi tujuan, sasaran, isu-isu/program-program strategis yang akan dilaksanakan dan dicapai dalam empat tahun mendatang, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan. Rencana Pembangunan Daerah ini menempatkan program pelaksanaan pembangunan sesuai dengan prioritas yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan skala prioritas yang dimulai dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 dan hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022.

9.1 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;
3. Penjabaran lebih lanjut Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 untuk setiap tahunnya disusun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

4. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
5. Dalam hal pelaksanaan RPD terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan sasaran dan program tetapi tidak mengubah target akhir pencapaian sasaran kabupaten, maka penetapan perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

9.2 Pedoman Transisi

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026

   Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Tahun 2024;

2. Renstra-PD Tahun 2023-2026

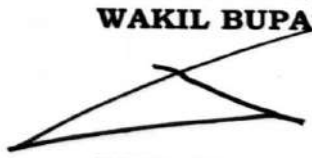
   Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023-2026

   Penyusunan RKPD Tahun 2023-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 ini.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Aamiin,

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,



BENI HERNEDI